



# NEGARA

## DI TENGAH KOTA: POLITIK REPRESENTASI DAN SIMBOLISME PERKOTAAN (SURABAYA 1930 – 1960)

Sarkawi B. Husain  
Pengantar: Prof. Dr. I Ketut Ardhana



Tidak diperjualbelikan.

# NEGARA DI TENGAH KOTA



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

# NEGARA DI TENGAH KOTA

---

Politik Representasi  
dan Symbolisme Perkotaan  
(Surabaya 1930-1960)

---

**Sarkawi B. Husain**

**Editor:**

**Prof. Dr. I Ketut Ardhana**



LIPI Press

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2010 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Negara di Tengah Kota: Politik Representasi dan Symbolisme Perkotaan (Surabaya, 1930–1960)/Sarkawi B. Husain. – Jakarta: LIPI Press, 2010.  
xxxv + 205 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-543-0 (cetak)  
978-602-496-298-2 (*e-book*)

1. Representasi Kekuasaan

2. Sejarah Perkotaan

327.109

Editor : I Ketut Ardhana  
Kopieditor : Nanik Supriyanti & Fadly Suhendra  
Penata Isi : Prapti Sasiwi  
Desainer Sampul : Junaedi Mulawardana



Diterbitkan oleh:  
LIPI Press, anggota Ikapi  
Jln. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350  
Telp. (021) 314 0228, 314 6942. Faks. (021) 314 4591  
E-mail: [press@mail.lipi.go.id](mailto:press@mail.lipi.go.id)

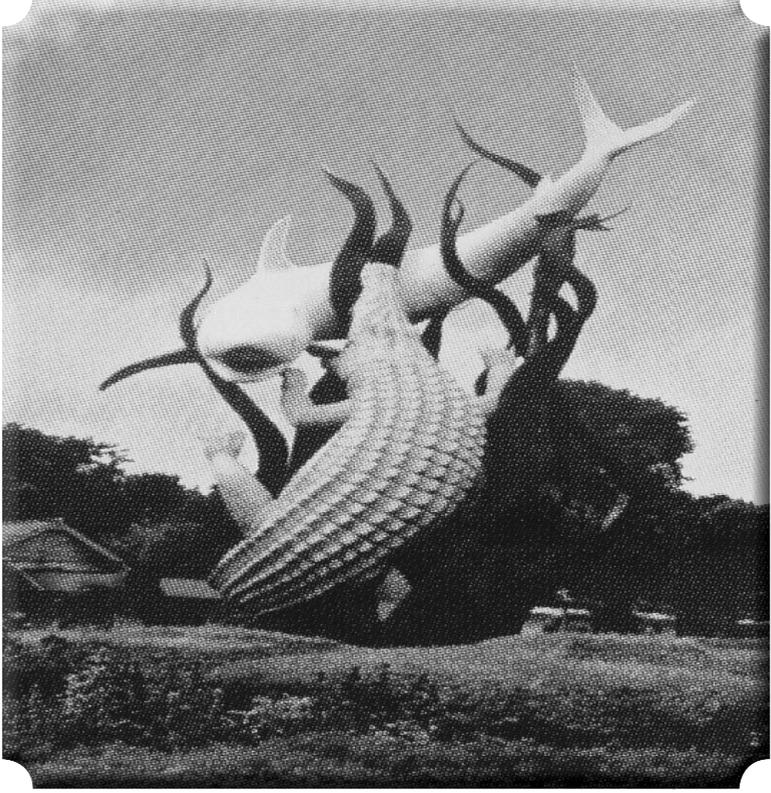
Atas kerja sama:  
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI) dengan  
Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie (NIOD)

Buku ini merupakan karya buku yang terpilih dalam Program Akuisisi Pengetahuan Lokal Tahun 2021 Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.



Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

## PENGANTAR

### Ke Arah Penulisan Sejarah Perkotaan Surabaya

Pembangunan kota-kota modern di Asia Tenggara ditentukan secara signifikan oleh peran kebijakan pemerintah kolonial dan dinamika masyarakatnya di masa lalu. Dalam kaitan ini selain implementasi kebijakan pemerintah kolonial, tidak dapat dipungkiri pula adanya konsep pandangan masyarakat lokal dan para elitnya di masa lalu terhadap tata ruang pada saat itu. Warisan masa lalu berupa aspek budaya, ekonomi, sosial dan politik misalnya sering menjadi faktor penentu terhadap eksistensi dan perkembangan sebuah kota. Ini dapat dimengerti karena timbulnya sebuah kota sebagai media atau tempat aktivitas masyarakat sekaligus memainkan peranan penting sebagai pusat perkembangan sebuah peradaban manusia. Namun, perlu dicatat bahwa kota-kota yang sudah ada itu di masa lalu ada yang tertelan perkembangan zaman, namun ada yang masih eksis dan bertahan sampai sekarang. Hilangnya sebuah kota sebagai sebuah peradaban sering disebabkan oleh adanya bencana alam sehingga wilayah perkotaan itu ditinggalkan oleh penghuninya. Cerita tentang hilangnya sebuah kota kerajaan misalnya sebagai akibat munculnya bencana alam dapat dilihat seperti yang terjadi di Sumbawa. Dalam hal ini ketika meletusnya Gunung Tambora pada tahun 1815 telah melenyapnya keberadaan dua kota kerajaan, yaitu Papekat dan Tambora (Ardhana, 2005). Didasari atas fakta sejarah

itu dapat dikatakan bahwa sebuah bencana alam yang terjadi itu tidak hanya mengubah keadaan fisik sebuah wilayah, namun sekaligus dapat mengubah peta politik kekuasaan di sebuah kawasan.

## **KONTRIBUSI STUDI PERKOTAAN**

Meskipun dari penjelasan di atas tampak ada hilangnya sebuah kota karena bencana, namun studi perkembangan kota modern sekarang ini, masih sangat dimungkinkan karena masih banyaknya informasi yang tersedia untuk dapat disusun dalam sebuah kajian sejarah perkotaan. Dari informasi yang tersedia itu, yang umumnya masih ditemukan dalam peninggalan sumber-sumber tertulis, yang kemudian dilengkapi dengan data-data sejarah lisan sangat dimungkinkan upaya ke arah penulisan sejarah perkotaan yang tampaknya masih belum banyak dilakukan. Bagaimanapun juga pemahaman dinamika masa lalu sebuah wilayah sangat penting, mengingat perlunya belajar dari masa lalu sebagai *lesson learned* untuk pengembangan sebuah wilayah. Lebih-lebih wilayah itu akan menjadi sebuah pusat perkotaan yang nantinya akan terkonsentrasi berbagai aktivitas yang dilakukan penduduk, baik di sektor jasa, pusat bisnis, politik maupun di bidang lain. Selain itu, pemahaman sebuah perkembangan wilayah juga menjadi penting. Tidak jarang misalnya dicari bukti-bukti sejarah kelahiran sebuah kota. Kelahiran sebuah kota seringkali dilihat dalam lintasan zaman, dalam arti bahwa kelahiran sebuah kota tidak mesti setelah lahirnya Republik Indonesia. Ini menjadi penting mengingat kelahiran sebuah kota digali jauh sebelum era kolonial sehingga bagaimana pun juga menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat yang mendiami kota tersebut, mengingat eksistensi sebuah kota yang sudah berlangsung cukup lama dalam episode sejarahnya.

## **KARAKTERISTIK PERTUMBUHAN SEBUAH KOTA**

Studi tentang sejarah perkotaan memberikan kontribusi yang cukup besar tidak hanya bagi mereka yang menggeluti masalah perkotaan,

tetapi juga bagi birokrat, politisi, akademisi, dan terutama bagi pengambil kebijakan dalam upaya memahami masalah-masalah perkotaan yang dilihat dari dinamika sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Seringkali sebuah kota berkembang karena daya dukung yang dimiliki oleh masyarakat sekitarnya. Demikianlah misalnya muncul dan berkembangnya sebuah kota sangat terkait dengan perkembangan urat nadi perekonomian dari masyarakat di sekitarnya. Dari data-data sejarah dapat menunjukkan bagaimana lahirnya sebuah kota seringkali pula berawal ketika berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, baik di sekitar pinggiran sungai, pantai, dan wilayah pedalaman maupun pegunungan, baik di masa prakolonial, kolonial maupun di era kemerdekaan. Adanya mobilitas penduduk dalam kaitannya dengan aspek demografi, teknologi, organisasi, dan lingkungan tampaknya banyak berpengaruh terhadap perkembangan sebuah kota (Gist dan Fava, 1964). Hal ini tidak terlepas dari proses pembangunan yang dilakukan, yang seringkali berdampak pada perkembangan sebuah wilayah yang sebelumnya berkembang, namun mendapat pengaruh positif yang memberi dampak terhadap perkembangan sebuah wilayah perkotaan. Tambahan pula perkembangan itu sejalan dengan perkembangan perdagangan dan perekonomian serta situasi peta politik di sebuah wilayah sehingga sebuah kota menjadi tidak hanya sebagai sebuah pusat ekonomi dan perdagangan, namun juga sebagai sebuah pusat kekuasaan.

Karakteristik sebuah kota sebagai pusat ekonomi dan perdagangan dan politik itu, tidak hanya terjadi di kawasan Asia Tenggara saja, tetapi juga di tempat lainnya. Sebagaimana diketahui pada umumnya bahwa di Asia Tenggara perkembangan kota modern banyak didasari pada perkembangan sejarah masa lalunya (Ardhana 2004 dan juga lihat: Nas 1979). Dalam kaitan ini, di kawasan tersebut juga tampak bahwa pusat perkembangan kota diwarnai oleh adanya fasilitas-fasilitas publik seperti istana, katedral, gereja, pasar, lapangan atau alun-alun sebagai tempat untuk penyelenggaraan pertemuan

umum, terjadi juga di Eropa atau tempat-tempat lainnya. Demikian pula di Jawa, dapat dijelaskan bahwa sebelum terbentuknya sebuah kota modern di wilayah itu, banyak pusat kebudayaan yang berawal dari sebuah sentra-sentra kekuasaan, baik di wilayah pantai pedalaman yang dicirikan dengan adanya bangunan istana, alun-alun, tempat suci seperti masjid, gereja, balai pertemuan dan sebagainya. Inilah pada awalnya yang menjadi ciri terbentuknya sebuah pusat perkotaan yang kemudian berkembang menjadi lebih kompleks sebagaimana dapat dilihat dengan terbentuknya kota-kota modern di Indonesia pada awal abad ke-20.

Karakteristik sebuah kota yang mencakup keberadaan istana kesultanan, masjid, alun-alun, dan pasar seperti itu dapat dilihat secara jelas dalam studi yang dilakukan oleh Sarkawi B. Husain tentang “*Negara di Tengah Kota: Politik Presentasi dan Symbolisme Perkotaan (Surabaya, 1930-1960)*”. Studi perkotaan yang dianalisis berdasarkan pendekatan sejarah dan antropologi ini penting untuk dibaca tidak hanya bagi kalangan sejarawan, tetapi juga bagi kalangan ilmuwan sosial lainnya yang berminat dengan isu-isu perkotaan. Sarkawi melalui studinya itu tidak hanya menjelaskan bagaimana munculnya sebuah kota seperti Surabaya sebagai kota terbesar di Jawa Timur, melainkan berupaya untuk menjelaskan dengan analisis yang lebih tajam secara lebih khusus tentang bagaimana setiap perubahan, khususnya perubahan kekuasaan akan mengakibatkan terjadinya perubahan, penciptaan, dan pelestarian simbol-simbol kota. Analisis tentang simbol kota ini dapat dilihat dalam studi yang dilakukan oleh Sarkawi B. Husain yang menekankan makna simbol kota yang mencakup masalah penggunaan ruang fisik dalam konteks pendirian monumen, tugu, patung, dan juga tempat ibadah yang terdapat di pusat perkotaan itu. Selain itu, analisis tentang penggunaan simbol kota itu mencakup pengaruh penggunaan ruang lainnya yang pada akhirnya ditegaskan bahwa simbol kota itu mencerminkan adanya perubahan dalam struktur kekuasaan (Colombijn 1994).

Dengan bantuan konsep ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, sejarah, dan aspek studi agama ia mampu menganalisis bagaimana dinamika sebuah kota yang terletak di Jawa Timur mampu mempresentasikan berbagai kandungan nilai sosial, budaya, ekonomi, agama, dan politik dari masyarakat pendukungnya yang mayoritas adalah suku Jawa, Madura, dan bahkan Cina. Tidak hanya heterogenitas suku yang mendiami wilayah perkotaan Kota Surabaya, namun heterogenitas aspek religiusitas juga memainkan peranan penting dalam perkembangan Kota Surabaya. Lihat saja misalnya peran suku Jawa yang secara dominan menganut agama Islam maka dapat dilihat perannya melalui pendirian masjid-masjid di wilayah kota itu. Berbagai aspek seperti peran agama dalam kaitannya dengan peran masjid di wilayah itu yang menjadi salah satu karakteristik perkembangan Kota Surabaya. Secara lebih jauh Sarkawi B. Husain menjelaskan bahwa sebuah masjid dibangun di dekat pusat kota dengan maksud pelokasian sebagai sebuah tempat strategis agar umat Muslim melakukan persembahyangan bersama di saat-saat peringatan hari raya tertentu. Selain adanya bangunan masjid itu, banyak didirikan gereja, kelenteng, juga sebagai tempat ibadah, yang sekaligus sebagai simbol agama yang menempati posisi penting di Kota Surabaya. Hampir di setiap pusat perkotaan dibangun masjid, gereja, dan klenteng yang tersebar di banyak tempat. Tambahan pula bahwa pada zaman Belanda terdapat dua masjid penting di Kota Surabaya, yakni Masjid Ampel dan Masjid Kemayoran. Masjid Ampel terletak di pemukiman etnik Arab dan agak jauh dari pusat kota. Meskipun demikian, masjid ini merupakan simbol yang sangat kuat karena didirikan oleh seorang wali yang sangat terkenal, yaitu Sunan Ampel yang juga dikenal sebagai Raden Rahmat. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya makam Sunan Ampel yang terletak di belakang, masjid ini mempunyai daya tarik yang sangat kuat bagi warga NU untuk datang berziarah dan *bertawassul*. Masjid yang kedua adalah Masjid Kemayoran yang cikal bakalnya diberikan oleh pemerintah Belanda sebagai kompensasi atas dirobokkannya sebuah

masjid yang terletak di alun-alun karena dibangun kantor *Raad van Justitie*. Selain masjid tersebut terdapat dua masjid besar lainnya, yakni Masjid Al-Falah dan Masjid Mujahidin yang dibangun setelah proklamasi kemerdekaan. Berbeda dengan dua masjid sebelumnya yang dapat dikatakan sebagai representasi kaum nahdliyin (Nahdlatul Ulama), masjid ini dapat dianggap sebagai masjid yang dekat dengan gerakan modernis Muhammadiyah. Hal tersebut tampak dari tidak adanya simbol-simbol seperti yang terdapat pada masjid NU, seperti bedug, khatib yang memakai tongkat, azan dua kali pada shalat Jumat, Qunut pada waktu subuh, dan lain-lain. Perlu dicatat bahwa baik ‘Masjid NU’ maupun ‘Masjid Muhammadiyah’ memiliki satu simbol yang sama berupa *loudspeaker* untuk azan dan mengaji.

Sarkawi menjelaskan bahwa kekuasaan itu sangat berpengaruh sebagaimana terlihat pada dua domain simbol kota, yaitu domain politik-sejarah dan agama. Apabila diperhatikan, aspek arsitektur bangunan di Kota Surabaya untuk semua monumen dan patung beraroma kolonial. Kemudian apabila dilihat pengaruh kolonial terhadap perkembangan kota di Surabaya dapat dikatakan bahwa sampai akhir masa kekuasaan pemerintah Belanda telah didirikan lebih kurang 14 monumen dan patung. Namun, tampaknya setiap pemerintah imperialis dan kolonialis memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam kaitan ini, apa yang dianggap baik sebelumnya, belum tentu dianggap baik, malahan diupayakan untuk diruntuhkan untuk menghilangkan kesan atau ikatan pengaruh mereka terhadap penduduk setempat. Di zaman okupasi Jepang misalnya dapat dilihat bagaimana pemerintah pendudukan Jepang menghancurkan satu per satu monumen dan patung Belanda. Akan tetapi, ada perbedaan antara pemerintah pendudukan Jepang dan pemerintah kolonial Belanda sebelumnya. Di era Belanda banyak upaya mendirikan patung atau monumen. Di Surabaya, salah satu tugu yang terkenal adalah tugu pahlawan yang didirikan di bekas kantor *Raad van Justitie* pada zaman Belanda dan gedung Kempetai pada masa Jepang. Namun, sebaliknya, pada era pendudukan Jepang tidak pernah

mendirikan monumen dan patung. Disebutkan oleh Sarkawi bahwa selama kekuasaan Jepang, mereka tidak memberikan penanda kekuasaannya pada nama-nama jalan. Namun, hanya satu-satunya jalan yang diubah namanya adalah Jalan Prambanan menjadi Jalan Kempetai. Dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Tengah seperti Semarang dan Madiun yang pada zaman Jepang mengubah nama-nama jalan berbau Belanda menjadi nama lokal. Selain itu, dalam hal ini kekuasaannya disimbolkan melalui keharusan mengibarkan bendera Jepang pada hari raya *'Meizi-Setu'*, pemberian salam untuk menghormati prajurit Jepang, dan kewajiban membungkukkan badan ke arah kaisar Jepang. Di era setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia mulai mendirikan monumen, patung, dan tugu di beberapa kota. Tugu yang didirikan pada tahun 1952 (lebih dahulu didirikan dibandingkan dengan Monas Jakarta) ini, menjadi contoh yang baik dari sebuah proses dekolonisasi.

Dari hasil studi yang dilakukan oleh Sarkawi B. Husain dapat dilihat bahwa selain monumen, patung, dan tugu, nama-nama jalan juga menjadi media untuk merepresentasikan kekuasaan. Misalnya saja ia menyebutkan beberapa contoh, yaitu jalan-jalan yang terletak di sebelah barat Jembatan Merah yang merupakan tempat kediaman orang-orang Eropa, diberi nama dengan nama-nama Belanda, seperti Heerenstraat, Willemstraat, Werfstraat, dan lain-lainnya. Ketika kota ini berkembang ke arah selatan, di mana terdapat pemukiman elit orang-orang Belanda, yakni sekitar Darmo Boulevard, nama-nama Gubernur Jenderal menghiasi pula nama-nama jalan di wilayah itu, seperti Altینگstraat, J.B. van Heutszstraat, dan lain-lainnya. Jalan-jalan sebelah timur Jembatan Merah yang dihuni oleh mayoritas etnik Cina diberi nama seperti Chinesevorstraat, Tepekongstraat, Tienstraat, dan lain-lain, sementara di wilayah yang dihuni oleh orang-orang Arab dan Melayu dapat dijumpai misalnya Jalan Ampel, Mas Mansur, dan lain-lainnya. Tambahan pula, Sarkawi B. Husain mencatat bahwa ada hal yang menarik dari pemberian nama jalan pada masa pemerintahan Belanda, yaitu dengan dipertahankannya sebagian

besar nama-nama lokal yang mungkin sudah ada sejak abad ke-19. Dari 1.113 nama jalan pada tahun 1940, hanya terdapat lebih kurang 21% atau 236 nama jalan yang berbahasa Belanda, dan sebagian besar mempergunakan nama-nama lokal, seperti Blimbingstraat, Dinojo, Djagalan, Gembong, Kaliasin, Kalianjar, dan lain-lainnya. Paska pengakuan kedaulatan, nama-nama jalan mengalami perubahan secara besar-besaran. Misalnya saja nama-nama pahlawan, baik di tingkat nasional maupun lokal kemudian menggantikan nama-nama jalan di Kota Surabaya yang bernuansa Belanda. Perubahan nama berlangsung hingga tahun 1990-an. Sebagai dampak perubahan nama terhadap kehidupan masyarakat adalah adanya pertentangan sehingga harus dikembalikan pada nama semula, seperti kasus Jalan Darmo dan Jalan Jemursari. Sarkawi mencatat bahwa hasil studi ini menunjukkan bahwa baru sebagian kecil dari simbol kota di Kota Surabaya yang berhasil diungkapkan. Keberadaan simbol kota yang tercakup dalam domain adat, ekonomi, etnik, dan lain-lain tampaknya tidak luput dari pengaruh kekuasaan. Diharapkan melalui studi perkotaan ini akan diberikan kontribusi bagi peneliti untuk melakukan elaborasi lebih jauh tentang bagaimana kekuasaan memperlakukan simbol-simbol kota.[]

**Prof. Dr. I Ketut Ardhana**

Kepala Bidang Penelitian Asia Tenggara  
Pusat Penelitian Sumber Daya Regional  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
(PSDR-LIPI)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

## PRAKATA

Simbol kota selalu menjadi perbincangan menarik. Simbol tidak hanya menjadi asesori untuk mempercantik sebuah kota, akan tetapi lebih dari itu, simbol telah menjadi media untuk merepresentasikan sebuah kekuasaan. Studi ini berusaha mengungkapkan apa, mengapa, dan bagaimana simbol-simbol kota berubah seiring dengan perubahan kekuasaan, khususnya dalam periode 1930–1960. Sejak memulai menggarap studi ini, berbagai tantangan datang silih berganti. Mulai dari perumusan sasaran penelitian, pelacakan, pengumpulan, dan pengorganisasian sumber hingga penulisan laporan yang ternyata tidak mudah. Namun, lebih dari itu ternyata “persediaan pengetahuan” penulis tentang topik yang diteliti masih perlu ditambah. Akan tetapi, seperti biasa, menyadari kelemahan—kemudian memperbaikinya—selalu datang terlambat. Oleh karena itu, segala puji saya haturkan kepada Allah Rabbul Aalamin atas selesainya studi ini. Satu hal yang saya selalu sadari, bahwa dalam menyelesaikan studi ini bahkan sejak memulai pelatihan di Ciawi, Cikarang, dan Jakarta, saya mendapat banyak kebaikan dari orang lain. Mereka dengan caranya masing-masing telah banyak membantu yang tidak mungkin dapat penulis balas, kecuali doa dan harapan agar kebaikan mereka dicatat di sisi Allah sebagai suatu amalan saleh.

Pertama-tama saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada mereka yang menggagas lahirnya kerja sama antara Nederlands

Institute voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) dan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI) yang karenanya memungkinkan saya untuk mendapat pengetahuan dari berbagai ilmuwan, baik dari dalam maupun dari luar Indonesia. Diajar oleh mereka yang sudah “malang-melintang” dalam berbagai disiplin sungguh sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kepada Ibu Els Bogaerts, M. A. sebagai Co-ordinator Research Programme, NIOD dan Prof. Dr. Taufik Abdullah sebagai Penanggung Jawab Proyek sekaligus sebagai Penasihat Akademis, secara khusus saya sampaikan penghargaan yang tidak ternilai. Keduanya telah melapangkan jalan bagi saya untuk lebih mencintai ilmu pengetahuan. Penghargaan dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. Muhamad Hisyam, M. A. Beliau tidak hanya bertindak sebagai Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI yang mengoordinasi Proyek Pelatihan dan Penelitian Sejarah dengan NIOD, tetapi juga menjadi media yang memungkinkan saya bisa bergabung dalam pelatihan dan penelitian. Dari *e-mail* beliaulah saya mengetahui dengan jelas Program Pelatihan dan Penelitian NIOD-PMB LIPI.

Penghargaan, terima kasih, dan rasa hormat juga saya sampaikan kepada Dr. Freek Colombijn, Prof. Dr. Djoko Surjo, dan Dr. Roger Tol selaku pembimbing dalam penelitian maupun dalam lokakarya. Saran dan pertimbangan akademisnya sangat bermanfaat dalam penyelesaian penelitian ini. Pengetahuannya yang luas melahirkan perspektif baru terhadap suatu masalah yang tidak terpikir sebelumnya. Dalam berbagai kesempatan, Freek Colombijn bersama Martine Barwegen bahkan merepotkan diri untuk memfoto kopi dan mengirimkan beberapa bahan yang sangat berguna bagi penelitian ini.

Penulis juga berhutang budi kepada mereka yang dengan ikhlas telah membagi ilmunya. Oleh karena itu, rasa hormat dan terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Dr. A. B. Lopian, Prof. Dr. Anthony Reid, Prof. Dr. Taufik Abdullah, Dr. Robert Cribb, Dr. Fridus Steilen, Dr. Roger Toll, Dr. J. Thomas Lindblad, Dr. Thee Kian Wie,

almarhum Prof. Ibrahim Alfian, Prof. Bambang Purwanto, M.A., Prof. Syafrî Sairin, Prof. Dr. I Ketut Ardhana, M.A., Dr. Erwiza Erman, Dr. Nina Herlina, Dr. Mona Lohanda, Dr. Salim Said, Dr. Muhamad Hisyam, Dr. Yekti Maunati, Dr. Pudentia, Prof. Dr. Djoko Suryo, Dr. Gunawan Wiradi, Dr. Ikhsan Malik, Els Bogaerts, M. A., Dr. John Haba, Dr. Freek Colombijn, Prof. Dr. Leirissa, Dr. Aswatini, Dr. Hans Antlov, Prof. Sediono Tjondronegoro, Dr. Aiko Kurasawa, Prof. Sutandyo Wingnjosoebroto, dan pengajar lain yang tidak tertulis dalam prakata ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada staf PMB-LIPI yang dengan kerja keras mereka membuat Program Pelatihan dan Penelitian berjalan dengan sukses dan lancar. Bapak Sukri Abdurrahman, S.H., Mbak Yuli, Mbak Ana, Mbak Mensi, Pak Carsum, Pak Min, Mas Joko, selain sebagai panitia, mereka telah menjadi kawan yang baik dan membuat pelatihan dan lokakarya tidak membosankan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan dan staf Arsip Nasional Jakarta, Perpustakaan Monumen Pers Surakarta, Arsip Kota Surabaya, Perpustakaan Bappeda Jawa Timur, Ketua Yayasan Bhakti Surabaya Post, Perpustakaan Kota Surabaya, yang telah banyak membantu dalam penyediaan sumber. Hal yang sama saya sampaikan kepada seluruh narasumber, antara lain Bapak Edi Samson, Hernoko, Peck Dijono, Oei Him Hwie, JS. Kwee Ping Hwie, Arnold C.L. Tobing, H. Baidhawi Muri, H. Husnan Sanusi, Suparto Brata, dan Alm. Imam Supadi yang setiap saat siap diganggu dengan pertanyaan-pertanyaan penulis. Kepada kawan-kawan, baik yang bersama dalam pelatihan maupun dalam penelitian serta lokakarya, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekhilafan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, saya hadapkan karya kecil ini kepada tim NIOD-PMB LIPI yang terhormat. Dengan dada yang lapang, saya siap menerima masukan demi perbaikannya.

Sarkawi B. Husain

Buku ini tidak diperjualbelikan.

## DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	vii
PRAKATA .....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
DAFTAR TABEL.....	xxvii
RINGKASAN .....	xxix
PENDAHULUAN .....	1
A. Surabaya dalam “Kepungan” Simbol .....	1
B. Ruang Lingkup dan Pertanyaan Utama Penelitian .....	6
C. Tinjauan Atas Beberapa Studi Terdahulu .....	7
D. Orientasi Teoretis dan Sistematika Penulisan.....	9
1. Orientasi Teoretis .....	9
2. Sistematika Penulisan.....	12
SURABAYA DALAM LINTASAN KEKUASAAN.....	15
A. Surabaya dan Hegemoni Belanda .....	15
B. Jatuhnya Kekuasaan Belanda dan Peralihan ke Zaman Jepang .....	22
C. Memudarnya Cahaya Asia: Surabaya Menyambut Kemerdekaan .....	28
D. Bertiupnya Angin Kebebasan: Surabaya Pasca-Proklamasi Kemerdekaan .....	31
MEREKA TIDAK BISU: MAKNA DAN PEREBUTAN SIMBOL MONUMEN, PATUNG, DAN TUGU.....	35
A. Monumen, Tugu, dan Patung Sebagai Tanda .....	35
B. Dari Monumen Bali Hingga Patung Dada Wilhelmina: Monumen dan Patung Pada Masa Kolonial.....	38

C. Revisi, Destruksi, dan Bangunan yang Baru: Monumen, Tugu, dan Patung di Era Jepang dan Republik.....	44
1. Monumen W.R. Soepratman: Impian yang Tidak Pernah Terwujud.....	50
2. Dari L.M.S. (Lucas Martin Sarkies) Oranye Hotel, Yamato Hoteru, Hingga Hotel Majapahit: Monumen yang Terus Hidup.....	59
3. Jembatan Merah: Mencari Jejak Sang Pahlawan .....	62
4. Tugu Pahlawan: Ikon Kota yang Kesepian .....	65
D. Membangun Kebesaran Jiwa atau Penghamburan Uang: Tanggapan Masyarakat atas Pendirian Berbagai Monumen dan Tugu .....	72
SEPANJANG JALAN KENANGAN: MAKNA DAN PEREBUTAN	
SIMBOL NAMA JALAN DI KOTA SURABAYA.....	77
A. Mengusik Kenangan .....	77
B. Proses Pergantian dan Pemberian Nama Jalan .....	81
C. Kontrol Atas Memori Kolektif: Nama Jalan di Era Belanda.....	84
D. Menghapus Ingatan Lama dan Membangun Ingatan Baru: Nama Jalan di Era Jepang dan Republik.....	87
1. Menghidupkan Semangat Perjuangan: Nama-nama Jalan Pahlawan Versi Pemerintah Versus Masyarakat .....	89
2. Menghentikan Geliat Ular Naga: Nama Jalan Berbahasa Cina dan Perubahannya.....	95
3. Kota-kota di Dunia Sebagai Nama Jalan dan Perubahannya: Sebuah Proses Domestifikasi.....	97
E. Nama yang Berbicara: Klasifikasi dan Makna Nama Jalan .....	99
DARI IKAN HIU DAN BUAYA HINGGA SINGA DAN TUGU PAHLAWAN: LAMBANG KOTA DALAM PUSARAN	
KEKUASAAN .....	109
A. Manusia dan Lambang.....	109
B. Singa Mencengkeram Soera-Ing-Baia: Lambang Kota di Era Belanda .....	110
C. Menyingkirkan Singa dan Benteng, Menghadirkan Tugu Pahlawan: Lambang Kota di Era Jepang dan Republik .....	113
DARI MESJID, GEREJA, HINGGA KLENTENG: RUMAH IBADAH SEBAGAI SIMBOL EKSPRESI KEAGAMAAN MASYARAKAT .....	
A. Rumah Ibadah dan Religiusitas .....	119

B. Masjid adalah Rumah Tuhan: dari Masjid Kemayoran, Ampel, Hingga Al-Falah.....	120
C. Menyebar Kasih: Gereja dan Dinamika Umat Nasrani .....	134
D. Menebar Wangi Dupa: Klenteng sebagai Pusat Keagamaan dan Kebudayaan Tionghoa .....	143
1. Klenteng di Era Kolonial dan Pendudukan Jepang .....	143
2. Klenteng pada Masa Republik.....	147
<b>MAKAM TIONGHOA SEBAGAI SIMBOL RUANG SUCI:</b>	
<b>KONTROL, KONFLIK, DAN NEGOSIASI .....</b>	<b>155</b>
A. Hidup adalah Menunda Kekalahan .....	155
B. Kematian dan Makam dalam Pandangan Orang Tionghoa .....	157
C. Makam Tionghoa pada Masa Kolonial dan Pendudukan Jepang.....	162
D. Makam Tionghoa pada Masa Republik.....	165
1. Bergelut dengan Konflik .....	165
2. Penutupan Makam dan Konflik yang Berlanjut .....	169
3. Respons Masyarakat Tionghoa atas Pengumuman Rencana Penutupan Makam.....	178
<b>SIMPULAN.....</b>	<b>183</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>189</b>

## DAFTAR SINGKATAN

AKS	: Arsip Kota Surabaya
AMACAB	: Allied Military Administration Civil Affairs Branch
Bakopda	: Badan Koordinasi Pembangunan Daerah
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
CPM	: Corps Polisi Militer
Depdikbud	: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
DHC	: Dewan Harian Cabang
Dj.	: Djalan
Djatim	: Djawa Timur
DJln.	: Djalan
DPD	: Dewan Pemerintah Daerah
DPDP	: Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR-GR	: Dewan Perwakilan Rakyat–Gotong Royong
DPRDS	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara
G 30 S	: Gerakan 30 September
GNI	: Gedung Nasional Indonesia
G.P.P	: Gerakan Pembela Pantjasila
GUP	: Gereja Utusan Pantekosta
HBS	: Hogere Burgerschool
H.M.	: Hare Majesteit
Ir.	: Insinyur
ITS	: Institut Sepuluh November

Jatim	: Jawa Timur
JiIS	: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial
Jln.	: Jalan
JMP	: Jembatan Merah Plaza
KBS	: Kota Besar Surabaya
Kep.	: Keputusan
KITLV	: Koninklijk Instituut voor Taal-Land-en Volkenkunde
K.M.A.A.	: Konferensi Mahasiswa Asia Afrika
KMKB	: Komando Militer Kota Besar
Kol.	: Kolonel
Korem	: Komando Resort Militer
KPS	: Kota Pradja Surabaya
Leknas	: Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional
LIPi	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Letjen	: Letnan Jenderal
L.M.S.	: Lucas Martin Sarkies
Masjumi	: Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia
Mayjend	: Mayor Jenderal
MGP	: Majelis Gereja Protestan
MNC	: Movement National Congolais
Moh.	: Mohammad
Monas	: Monumen Nasional
MSI	: Masyarakat Sejarawan Indonesia
Murba	: Musyawarah Rakyat Banyak
NIOD	: Nederlands Instituut voor Oorlogdocumentatie
NU	: Nahdatul Ulama
Ny.	: Nyonya
Ormas	: Organisasi Masyarakat
Parkindo	: Partai Kristen Indonesia
Parpol	: Partai Politik
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pepelrada	: Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PKR	: Panitia Keamanan Rakyat
Pekuper	: Pelaksana Kuasa Perang

PMB	: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
PN	: Perusahaan Negara
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Prov.	: Provinsi
PSI	: Partai Sosialis Indonesia
PSII	: Partai Sjarikat Islam Indonesia
Perda	: Peraturan Daerah
PRRI	: Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
PTDI	: Pendidikan Tinggi Dakwah Islam
PU	: Pekerjaan Umum
Pusura	: Putra Surabaya
RECOMBA	: Regerings Commisariss Bestuurs Aangelenheden
RK	: Rukun Kampung
RRT	: Republik Rakyat Tiongkok
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SDN	: Sekolah Dasar Negeri
Sdri.	: Saudari
S.H.	: Sarjana Hukum
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UGM	: Universitas Gadjah Mada
VIP	: Very Important Personal
WK	: Wali Kota
VOC	: Vereenigde Oost-Indische Compagnie

## DAFTAR GAMBAR

1. Peta penyebaran simbol di Kota Surabaya .....	xxxv
2. Permintaan untuk mengibarkan bendera Jepang .....	27
3. Monumen Bali di Surabaya dan Monumen Michiels di Padang ..	39
4. Monumen G. von Bultzingslöwen .....	40
5. Monumen Husni, 1922 yang kini di lokasinya telah berdiri Masjid Al-Falah .....	41
6. Patung Setengah Badan Ratu H.M. (Hare Majesteit) Koningin ..... Wilhelmina dan Patung Ohannes Kurkdjian .....	43
7. Patung Raffles yang berdiri pada zaman kolonial dan Patung Raffles yang didirikan pada tahun 2004 & mendapat protes banyak pihak .....	44
8. “Gapura Jepang” yang didirikan di sebuah jembatan menuju kantor wali kota .....	46
9. Dua dari puluhan patung yang didirikan pasca-kemerdekaan .....	49
10. Lokasi pembangunan Monumen W. R. Soepratman yang disetujui oleh Presiden Soekarno.....	57
11. Maket Monumen W. R. Soepratman .....	57
12. Hotel Majapahit dalam bentuk awalnya tahun 1911 .....	60
13. Sebuah rekonstruksi “Insiden Bendera” pada tanggal 19 September 1945 .....	60
14. Jembatan Merah yang dibangun pada zaman kolonial .....	64
15. Gedung Raad van Justitie yang kemudian menjadi gedung kempetai.....	69

16. Tugu Pahlawan yang didirikan di bekas areal Gedung Raad van Justitie.....	69
17. Jalan Pasar Besar (kini Jln. Pahlawan). Foto atas diambil pada tahun 1935 dan foto bawah diambil pada tahun 1953.....	86
18. Lambang pertama dan kedua Kota Surabaya.....	112
19. Lambang ketiga Kota Surabaya (sejak 1856–sekarang) .....	118
20. Bentuk awal Masjid Kemayoran .....	124
21. Masjid Sunan Ampel dilihat dari jalan masuk .....	129
22. Masjid Al-Falah dilihat dari perempatan Jln. Raya Darmo, Jln. Mayangkara, Jln. Citarum, dan Jln. Porong.....	133
23. Gereja Protestan Bubutan yang dibangun pada tahun 1922.....	135
24. Gereja Maranatha yang selesai dibangun pada tahun 1959.....	138
25. Klenteng Boen Bio di Jalan Kapasan .....	145
26. Makam Tionghoa yang menyatu dengan kawasan Pemukiman mereka.....	162
27. Iring-iringan pemakaman Tionghoa pada tahun 1900 .....	163
28. Berita Duka Cita yang terbit di koran Jepang ‘Soeara Asia’ Jepang .....	165
29. Beberapa makam di Kota Surabaya .....	166
30. Makam Tionghoa di Embong Malang .....	168

## DAFTAR TABEL

1. Jumlah penduduk Kota Surabaya tahun 1857, 1905, 1920, 1930, & 1940 .....	18
2. Tingkat pertumbuhan penduduk (persentase rata-rata/tahun) .....	19
3. Nama kepala jabatan pada masa pendudukan Jepang .....	29
4. Perubahan nama-nama jalan menjadi nama pahlawan .....	91
5. Nama-nama yang diusulkan oleh masyarakat menjadi nama jalan .....	94
6. Nama-nama jalan Cina dan perubahannya .....	97
7. Jalan-jalan dengan nama internasional dan perubahannya .....	98

Buku ini tidak diperjualbelikan.

## RINGKASAN

### Negara di Tengah Kota: Politik Symbolisme Perkotaan (Surabaya, 1930–1960)

Sarkawi B. Husain  
Universitas Airlangga Surabaya

Setiap kekuasaan membutuhkan media untuk merepresentasi kekuasaannya dan simbol kota menjadi salah satu media yang banyak digunakan untuk kepentingan itu. Simbol kota juga menjadi alat untuk melihat relasi sosial dalam masyarakat. Secara umum, simbol dapat dipahami sebagai sesuatu yang menceritakan tentang sesuatu. Freek Colombijn yang mengutip Schefold (1988: 36) mendefinisikan simbol sebagai sebuah perwujudan dengan makna tertentu yang dilekatkan padanya. Sifat-sifat dari perwujudan tersebut berhubungan dengan pengalaman-pengalaman keseharian yang berada di luar perwujudan itu sendiri. Studi tentang simbol kota menarik dan penting untuk dilakukan dengan tiga pertimbangan. *Pertama*, sebagian besar simbol menggunakan ruang fisik, misalnya monumen, tugu, patung, dan tempat ibadah. *Kedua*, simbol-simbol berpengaruh terhadap penggunaan ruang lainnya, dan sebaliknya dipengaruhi oleh penggunaan ruang yang lain. *Ketiga*, dinamika simbol-simbol kota merefleksikan perubahan dalam struktur kekuasaan (Colombijn 1994: 330).

Politik simbolisme berubah dari waktu ke waktu. Pada zaman kolonial, simbol-simbol kota seperti monumen, patung, nama jalan, makam, tempat ibadah dibangun mengikuti tempat konsentrasi mereka. Sampai akhir masa kekuasaannya, pemerintah Belanda

mendirikan ± 14 monumen dan patung. Seperti yang terjadi di Padang, monumen dan tugu di Surabaya juga banyak didirikan atas prakarsa perorangan dan kelompok. Akan tetapi, jika di Padang pemerintah Belanda masih menyisakan tempat untuk tugu berukuran kecil yang secara resmi untuk menghormati organisasi nasionalis JSB, maka di Surabaya semua monumen dan patung beraroma kolonial. Dengan semangat menghilangkan jejak kekuasaan sebelumnya, Jepang menghancurkan satu per satu monumen dan patung Belanda, termasuk patung dada Wilhelmina yang terletak di taman kota (*stadstuin*). Namun, Jepang tidak pernah mendirikan monumen dan patung. Kekuasaannya disimbolkan antara lain melalui keharusan mengibarkan bendera Jepang pada hari raya ‘Meizi-Setu’, pemberian salam untuk menghormati prajurit Jepang dan kewajiban membungkukkan badan ke arah kaisar Jepang.

Sampai tahun 1960-an, hanya ada dua monumen yang tersisa, tetapi kemudian juga harus rata dengan tanah dan diganti dengan patung perjuangan. Ketika keadaan kota mulai stabil, khususnya pasca penyerahan kedaulatan, pemerintah mulai mendirikan banyak monumen, patung, dan tugu. Salah satu tugu yang terkenal adalah tugu pahlawan yang didirikan di bekas kantor Raad van Justitie pada zaman Belanda dan gedung Kempetai pada masa Jepang. Tugu yang didirikan pada tahun 1952 (lebih dahulu dibandingkan Monas Jakarta) ini, menjadi contoh yang baik dari sebuah proses dekolonisasi. Selain itu, “campur tangan” Soekarno dalam proses pendiriannya sangat kental, terutama dalam desain. Salah satu monumen yang juga sangat ambisius, tetapi tidak terwujud hingga sekarang adalah rencana pendirian monumen W. R. Supratman di atas areal ± 240 hektare. Pada monumen ini “campur tangan” Soekarno juga sangat kuat, khususnya dalam desain dan persetujuan atas tanah tempat pendiriannya. Namun, monumen ini tidak pernah terwujud akibat ketiadaan dana. Bagi sebagian penduduk, pendirian monumen dan patung ini tidak lebih sebagai penghamburan uang, apalagi saat itu kondisi ekonomi baru saja pulih dari perang. Untuk menghormati W.

R. Supratman misalnya, masyarakat menganggap lebih bermanfaat jika mendirikan sekolah rakyat yang kemudian diberi nama Sekolah W. R. Supratman dibanding mendirikan monumen untuknya.

Selain pada monumen, patung, dan tugu, nama jalan juga menjadi media untuk merepresentasi kekuasaan. Jalan-jalan yang terletak di sebelah barat Jembatan Merah yang merupakan tempat kediaman orang-orang Eropa misalnya, dinamai dengan nama-nama Belanda seperti Heerenstraat, Willemstraat, Werfstraat, dan lain-lain. Ketika kota ini berkembang ke arah selatan, tempat terdapat pemukiman elite orang-orang Belanda, yakni sekitar Darmo Boulevard, nama-nama gubernur jenderal juga menghiasi nama-nama jalan di wilayah itu, seperti Altingstraat, J.B. van Heutszstraat, dan lain-lain. Jalan-jalan sebelah timur Jembatan Merah yang dihuni oleh orang-orang Cina diberi nama seperti Chinesevorstraat, Tepekongstraat, Tienstraat, dan lain-lain, sedangkan wilayah yang dihuni oleh orang-orang Arab dan Melayu dapat dijumpai misalnya Jalan Ampel, Mas Mansur, dan lain-lain.

Satu hal yang menarik dari pemberian nama jalan pada masa pemerintahan Belanda adalah dipertahankannya sebagian besar nama-nama lokal yang mungkin sudah ada sejak abad ke-19. Dari 1.113 nama jalan pada tahun 1940, hanya terdapat  $\pm 21\%$  atau 236 nama jalan yang berbahasa Belanda, selebihnya memakai nama-nama lokal seperti Blimbingstraat, Dinojo, Djagalan, Gembong, Kaliasin, Kalianjar, dan lain-lain. Seperti pada monumen dan patung, Jepang yang berkuasa di daerah ini sejak 1942–1945 juga tidak memberikan penanda kekuasaannya pada nama-nama jalan. Satu-satunya jalan yang diubah namanya adalah Jalan Prambanan menjadi Jalan Kempetai. Hal ini berbeda dengan Madiun dan Semarang yang pada zaman Jepang mengubah nama-nama jalan berbau Belanda menjadi nama lokal.

Ketika kekuasaan berganti pada republik, khususnya setelah pengakuan kedaulatan, nama-nama jalan mengalami perubahan secara besar-besaran. Nama-nama pahlawan nasional dan lokal pun kemudian menghiasi jalan-jalan di kota ini sebagai pengganti nama-

nama Belanda. Perubahan dan pengabdian nama dari mereka yang dianggap berjasa bagi negara dan Kota Surabaya terus berlangsung sampai tahun 1990-an. Namun, perubahan nama jalan ini tidak jarang menimbulkan pertentangan sehingga harus dikembalikan pada nama semula, seperti kasus Jalan Darmo dan Jalan Jemursari. Sebagai salah satu simbol kekuasaan, lambang kota juga tidak luput dari berbagai upaya untuk mengubahnya. Sampai saat ini, lambang Kota Surabaya yang berintikan gambar Ikan Hiu (*Sura*) dan Buaya (*Baya*) sudah tiga kali mengalami perubahan. Benteng dan Singa yang mencengkeram tulisan Sura-Ing-Baya menunjukkan dengan jelas siapa penguasa kota ketika itu. Setelah melalui serangkaian “perdebatan” di parlemen, pada tahun 1956, Dewan Perwakilan Daerah Sementara Kota Besar Surabaya (DPRD-KBS) akhirnya memutuskan lambang Kota Surabaya seperti yang kita saksikan sekarang ini.

Tempat ibadah sebagai simbol agama menempati posisi penting di Kota Surabaya. Hal ini tercermin dari banyaknya masjid, gereja, dan klenteng yang tersebar di banyak tempat. Pada zaman Belanda terdapat dua masjid penting, yakni masjid Ampel dan Kemayoran. Masjid pertama terletak di pemukiman Arab dan agak jauh dari pusat kota. Namun demikian, masjid ini merupakan simbol yang sangat kuat karena didirikan oleh seorang wali yang sangat terkenal, yaitu Sunan Ampel (Raden Rahmat). Makam Sunan Ampel yang terletak di belakang masjid ini merupakan daya tarik yang sangat kuat bagi warga NU untuk datang berziarah dan *bertawassul*<sup>1</sup>. Adapun Masjid Kemayoran cikal bakalnya merupakan pemberian pemerintah Belanda sebagai kompensasi atas dirobohkannya sebuah masjid yang terletak di alun-alun, karena hendak dibangun kantor Raad van Justitie.

Dua masjid besar lainnya, yakni Masjid Al-Falah dan Masjid Mujahidin dibangun setelah proklamasi kemerdekaan. Berbeda dengan

---

<sup>1</sup> Tawassul memiliki dua pengertian, yakni 1) Mengerjakan suatu amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt, 2) Memohon atau berdoa kepada Allah Swt dengan perantaraan nama seseorang yang dianggap suci dan dekat kepada Tuhan. Lihat Hasan Alwi, dkk. (ed.), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga (Jakarta: Depdiknas-Balai Pustaka, 2001), hlm. 1151.

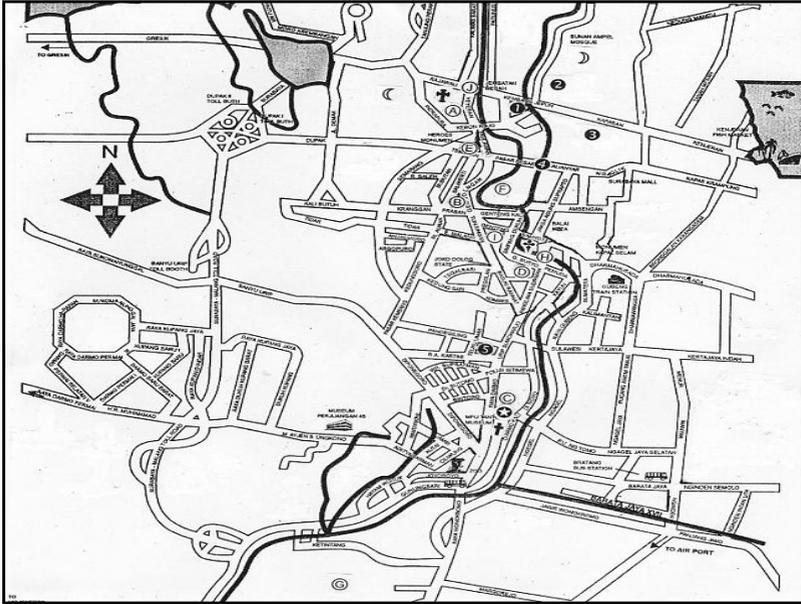
dua masjid sebelumnya yang dapat dikatakan sebagai representasi kaum nahdliyin (NU), masjid ini dapat dianggap sebagai masjid yang dekat dengan gerakan modernis Muhammadiyah. Hal tersebut tampak dari tidak adanya simbol-simbol seperti yang terdapat pada masjid NU, seperti bedug, khatib yang memakai tongkat, azan dua kali pada shalat Jumat, Qunut pada waktu subuh, dan lain-lain. Akan tetapi, baik ‘Masjid NU’ maupun ‘Masjid Muhammadiyah’ memiliki satu simbol yang sama berupa *loudspeaker* untuk azan dan mengaji. Masyarakat Tionghoa adalah komunitas yang sangat memperhatikan aspek-aspek religi di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pembangunan tempat ibadah yang sering disebut dengan klenteng menjadi salah satu persoalan yang krusial. Klenteng bukan hanya tempat upacara keagamaan, melainkan juga sebagai ungkapan lahiriah masyarakat yang mendukungnya. Sejak zaman kolonial hingga tahun 1958, terdapat empat klenteng yang tersebar di kawasan Pecinan. Pada saat pendudukan Jepang, tidak ada kebijakan khusus yang dikeluarkan berkaitan dengan keberadaan klenteng. Namun, kebijakan yang diterapkan bersifat lebih lunak. Bagi pemerintah Jepang, tekanan dan sikap keras terhadap orang-orang Tionghoa hanya akan menimbulkan konflik baru. Oleh karena itu, potensi yang dimiliki oleh penduduk Tionghoa lebih baik dimanfaatkan untuk membantu jalannya mesin perang Jepang.

Antara tahun 1945 hingga 1960 hanya terdapat satu klenteng baru. Klenteng tersebut dibangun pada tahun 1951 dengan nama klenteng Pak Kik Bio yang terletak di Jalan Jagalan. Kenyataan tersebut sangat berbeda dengan Jakarta yang pada periode sama memiliki jumlah klenteng baru sebanyak 12 buah. Selain itu, dalam banyak kesempatan, kegiatan klenteng mengundang pro dan kontra. Pada tanggal 27 Maret 1959 misalnya, diumumkan adanya arak-arakan Toapekong, tetapi Pelaksana Kuasa Perang (Pekuper) Kotapradja Surabaya tidak menyetujui adanya arak-arakan Toapekong di luar klenteng. Setelah melalui negosiasi dengan pihak keamanan, akhirnya Toapekong dapat diarak keliling kota. Pelarangan ini berkaitan

dengan persoalan keamanan dan ketertiban umum. Alasan yang sama dipakai juga setahun sebelumnya yang melarang penggunaan tulisan huruf Tionghoa.

Sejak abad ke-19, di Surabaya telah terdapat areal pemakaman bagi orang-orang Tionghoa. Pada awalnya, areal pemakaman tersebut menyatu dengan kawasan pemukiman mereka di Kembang Jepun. Antara tahun 1867–1940 terdapat areal pemakaman baru yang terletak di Embong Malang, Kupang, dan Kembangkuning. Berbeda dengan kota-kota lain seperti Yogyakarta dan Padang yang areal makamnya sangat sesuai dengan pemakaman Tionghoa, yakni terletak di perbukitan, terlindung dari angin, serta menghadap ke sungai dan laut, di Kota Surabaya terletak di areal yang rata dan sangat dekat dengan pemukiman penduduk. Akibatnya, konflik perebutan ruang yang mewarnai Kota Surabaya pada tahun 1950-an, khususnya antara penduduk yang tidak mempunyai rumah (penduduk liar) dengan orang-orang Tionghoa tidak terhindarkan. Dengan demikian, jika bagi orang Tionghoa makam merupakan simbol yang sangat sakral, maka bagi penduduk makam tersebut merupakan areal yang siap huni. Konflik yang terjadi terutama pada pasca-penyerahan kedaulatan tersebut, tidak terjadi pada zaman Belanda dan Jepang. Hal ini antara lain disebabkan oleh sikap tegas pemerintah dalam menjaga tempat-tempat publik, selain tentunya jumlah penduduk yang belum mengalami ledakan.

Keseluruhan studi yang dipaparkan dalam buku ini, baru sebagian kecil dari banyaknya simbol-simbol kota yang tersebar di Surabaya. Keberadaan simbol-simbol kota lainnya seperti yang tercakup dalam domain adat, ekonomi, etnik, dan lain-lain sesungguhnya juga tidak luput dari pengaruh kekuasaan. Dalam naskah penelitian dibahas tentang proses pendirian sebuah simbol kota termasuk berbagai konflik yang menyertainya, aktor di balik pembangunan, dan tanggapan masyarakat. Penelitian yang berlangsung selama dua tahun ini menggunakan data arsip, surat kabar, dan wawancara.[]



**Gambar 1.** Peta Penyebaran Simbol di Kota Surabaya

**KETERANGAN:**

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| Ⓐ Monumen Bali   | † Gereja Darmokapel       |
| Ⓑ G. von Bultzingslöwen  | † Gereja Maranatha        |
| Ⓒ Monumen Husni  | † Gereja Katolik Pertama  |
| Ⓓ Monumen Rambaldo   | ❶ Klenteng Hok An Kiong   |
| Ⓔ Patung Wilhelmina  | ❷ Klenteng Hong Tik Hiang |
| Ⓕ Mon. Martinus van den Elzen,<br>Mon. Mej. R. J. Almerood,<br>Mon. Mayor P.P.C.Q. Ondaatje. | ❸ Klenteng Boen Bio       |
| Ⓖ Monumen W.R. Supratman   | ❹ Klenteng Pak Kik Bio    |
| ⓗ Gapura Jepang  | ❺ Klenteng Hong San Ko Te |
| ❶ Hotel Majapahit  | Ⓜ Masjid Kemayoran,       |
| Ⓡ Jembatan Merah   | Ⓒ Masjid Ampel            |
|  | ⚠ Masjid Al-Falah         |

Buku ini tidak diperjualbelikan.

## PENDAHULUAN

“Jembatan Merah”  
Jembatan Merah, sungguh gagah, berpagar gedung indah  
Sepanjang hari yang melintasi, silih berganti  
Mengenang susah hati patah, ingat zaman berpisah kekasih pergi,  
sehingga kini belum kembali  
Biar Jembatan Merah, andainya patah aku pun bersumpah,  
Akan kunanti, dia di sini, bertemu lagi

(Gesang)

### A. SURABAYA DALAM “KEPUNGAN” SIMBOL

Ada perasaan bangga, haru, dan sedih ketika mendengar lagu “Jembatan Merah” dilantunkan. Jembatan Merah adalah jembatan yang paling terkenal di Surabaya. Jembatan ini berfungsi untuk menghubungkan daerah sebelah barat Kalimas yang dahulu menjadi daerah pemukiman orang Eropa (*Europeesche Wijk*) dengan daerah sebelah timur Kalimas yang dahulu menjadi daerah pemukiman orang Cina (*Pecinan*), orang Arab (*Arabische Kamp*), dan daerah Melayu. Tepat di sebelah timur jembatan tersebut sampai tahun 1925 terdapat kantor residen yang merupakan pusat pemerintahan Kota Surabaya waktu itu sehingga Jembatan Merah menjadi tempat yang sangat ramai pada zamannya dan melegenda sampai sekarang (Handinoto 1996: 28; 35).

Akan tetapi, ketika menulis lagu tersebut, Gesang Martohartono yang lahir pada 1 Oktober 1917 pasti tahu kalau Jembatan Merah tidak hanya menjadi penghubung antara daerah sebelah barat dan sebelah timur Kalimas, tetapi telah menjadi saksi bisu dari rasa cinta dan benci *arek-arek Suroboyo* yang meletup menjadi pertempuran

dahsyat di sekitarnya pada 10 November 1945.<sup>1</sup> Jembatan Merah tidak lagi sekadar sarana lalu lintas, tetapi telah menjadi monumen dan simbol abadi dari kesadaran sejarah *arek Suroboyo* untuk tidak lagi hidup di bawah kolonialisme.

Sekitar dua bulan sebelum terjadinya pertempuran di sekitar Jembatan Merah, pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Oranye (sekarang Hotel Majapahit Mandarin Oriental) terjadi insiden bendera. Insiden terjadi ketika beberapa pemuda berhasil mencapai tiang bendera di atas hotel dan merobek warna biru bendera Belanda sehingga membentuk warna merah putih bendera Indonesia. Menurut Frederick, walaupun pengutaraan kembali cerita tersebut di kemudian hari telah dibumbui, insiden bendera memiliki tempat yang terhormat di dalam cerita revolusi Surabaya dan sesungguhnya juga di seluruh negeri (Frederick 1986: 254–262). Tidak pelak lagi, insiden itu telah menjadikan Hotel Majapahit sebagai salah satu monumen yang sangat penting di Kota Surabaya.

Jembatan Merah dan Hotel Majapahit merupakan dua contoh sesuatu yang sebelumnya sudah ada dan dengan sebab-sebab tertentu ditetapkan sebagai simbol kota.<sup>2</sup> Sebaliknya, beberapa simbol kota lainnya seperti monumen, tugu, dan patung adalah simbol yang direkonstruksi atau diciptakan kembali. Simbol jenis ini memiliki

---

<sup>1</sup> Taufik Abdullah menyatakan bahwa pada tanggal 10 November telah menjadi simbol abadi dalam kesadaran bangsa. Tanggal tersebut tidak hanya melambangkan sebuah peristiwa yang keras dan riil, tetapi serasa merangkul seluruh peristiwa kepahlawanan patriotik putra bangsa, di mana saja, seluruh persada tanah air. Dalam kesadaran ini, Surabaya pun tidak lagi sekadar sebuah nama pada peta geografi. Taufik Abdullah, “Pengalaman, Kesadaran, dan Sejarah”, dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra UGM, Yogyakarta 27 November 1995, hlm. 1–2.

<sup>2</sup> Hotel Majapahit didirikan tahun 1911 dan dibuka secara resmi pada tahun 1912. Pentingnya makna hotel ini tercermin dari dimasukkannya sebagai salah satu dari 163 benda cagar budaya yang dilindungi. Berdasarkan SK Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/251/402.1.04/1996 dan SK No. 188.45/004/402.1.04/1998 ditetapkan sebanyak 163 bangunan cagar budaya yang wajib dilindungi di Kota Surabaya.

arti penting tidak hanya karena tingkat rujukan dan kekuatan daya perlambangannya, tetapi juga perhatian resmi yang dicurahkan terhadapnya cukup besar dan menghabiskan biaya yang sangat tinggi<sup>3</sup>. Bahkan kadang-kadang pembangunan monumen, tugu, dan patung justru menjadi sumber konflik, seperti yang terjadi pada pembangunan monumen perjuangan '45 di Dukuh Kupang yang menimbulkan persengketaan lahan.<sup>4</sup>

Sejarah simbolisme Surabaya, baik yang diambil alih dari sesuatu yang sebelumnya ada maupun yang direkonstruksi dapat dibagi dalam empat masa: masa kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang, masa Orde Lama, dan masa Orde Baru dan saat ini sebuah tahapan baru tengah berlangsung. Setiap masa berusaha membangun kenangan kolektif, tetapi ketika masa itu berakhir, masa berikutnya akan berusaha menghapus ingatan kolektif itu dan membangun sebuah ingatan kolektif baru. Berkaitan dengan upaya menghapus ingatan kolektif dari masa tertentu itu, maka tidaklah mengherankan jika beberapa monumen dan patung yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda saat ini tidak ditemukan lagi jejaknya. Demikian pula dengan nama-nama jalan<sup>5</sup> yang berbahasa Belanda yang ada di kota ini tempo dulu seperti Coen Boulevard, Altingsstraat, Speelmanstraat, Daendelsstraat, dan lain-lain tidak ditemukan lagi saat ini. Setelah proklamasi kemerdekaan, nama-nama

---

<sup>3</sup> Untuk menutupi biaya pendirian Tugu Pahlawan misalnya, panitia perlu minta izin dari menteri sosial agar diperbolehkan mengadakan undian. Untuk keterangan lebih jauh tentang masalah ini, lihat bagian satu.

<sup>4</sup> Koleksi AKS, box 33, no. 387; box 103, no. 1626; box 628, no. 12.609. Contoh lain dari pertentangan ini adalah Taman Mini yang didirikan oleh Yayasan Harapan Kita di bawah pimpinan Ny. Soeharto, menimbulkan tantangan kuat dari kelompok-kelompok mahasiswa. Presiden Soeharto sendiri sampai turun tangan untuk menghadapi penentangan ini pada tahun 1971. P.J.M. Nas, "Tatanan Simbolik Jakarta: Dari Kosmos ke Kondominium", dalam *JHS* (4), 1993, hal. 62.

<sup>5</sup> Sampai tahun 1940, jumlah nama jalan di Surabaya terdapat lebih kurang 1026 buah. Nama-nama tersebut dapat dilihat secara lengkap pada peta Gemeente Soerabaja tahun 1940.

jalan yang diambil dari nama-nama gubernur jenderal atau nama-nama setempat tersebut dihapus dan diganti dengan nama-nama pahlawan nasional dan pahlawan lokal Surabaya. Coen Boulevard diubah menjadi Jalan Raya Dr. Sutomo, Altingsstraat diubah menjadi Jalan Trunojoyo, Speelmansstraat diubah menjadi Jalan M. H. Thamrin, Daendelsstraat diubah menjadi Jalan Imam Bonjol, dan Jalan van Heutz diubah menjadi nama jalan musuhnya Teuku Umar. Nama jalan merupakan salah satu simbol yang menyimpan kenangan kolektif. Oleh karena itu, setelah kemerdekaan semua kenangan itu dianggap perlu dihapus. Nama-nama jalan menjadi semacam kenyataan sosial kolektif. Himpunan nama jalan perkotaan memadukan ruang dan waktu—nama jalan adalah waktu yang membeku di dalam kota dan merupakan bayangan dan etos kota. Nama-nama jalan yang berbahasa Belanda dianggap sebagai bukan kenangan kolektif orang Indonesia, tetapi kenangan orang Belanda. Sebuah kenangan yang dipaksakan, yang sedikit sekali relevansinya bagi orang Indonesia yang menganggap masa kolonial sebagai semata-mata masa penghinaan oleh Belanda (Nas 1993: 64–65).

Akan tetapi, nama yang menjadi pengganti nama sebelumnya walaupun nama seorang pahlawan nasional, bagi banyak orang Surabaya tidak begitu familiar. Akibatnya, terdapat beberapa nama jalan lama yang justru lebih populer dibanding dengan nama yang baru, seperti jalan di sepanjang Tunjungan Plaza (Jalan Basuki Rahmat) masyarakat masih sering menyebutnya Jalan Kaliasin. Penggantian nama jalan berhubungan juga dengan upaya menghormati jasa-jasa seseorang bagi kota yang bersangkutan. Jalan sepanjang depan kantor wali kota misalnya, dahulu bernama Jalan Weth van Gennepegw kemudian berubah menjadi Jalan Ondomohen dan saat ini berubah menjadi Jalan Wali Kota Mustajab sebagai penghormatan atas jasa-jasa beliau sebagai Wali Kota Surabaya periode 1952–1956.<sup>6</sup> Hal yang berkaitan dengan nama jalan hanya bagian kecil dari simbol

---

<sup>6</sup> Dukut Imam Widodo, *Soerabaia Tempo Doeloe*. Buku 2 (Surabaya: Dinas Pariwisata Surabaya, 2002), hlm. 451–459.

kota yang oleh Colombijn<sup>7</sup> dimasukkan dalam domain *politico-history*. Bagian lain dari domain ini adalah patung, prosesi, makam, dan lambang. Simbol-simbol kota lainnya yang termasuk dalam domain modernisasi (bank, hotel, mal, toko komputer) juga banyak terdapat di kota ini. N.V. Algemene Volkscrediet Bank yang menjadi cikal bakal BRI Kaliasin (sekarang Jalan Basuki Rahmat) adalah contoh simbol kota yang masuk dalam domain ini yang gedungnya sudah dirobohkan dan dijadikan BRI Tower (Widodo 2002: 294). Contoh lain dari simbol kota yang termasuk dalam domain modernisasi adalah Pasar Wonokromo. Ketika pasar ini dibongkar pada April 2003 lalu, banyak pihak yang menyesalkan. Penyesalan tidak hanya karena pembongkaran itu diwarnai dengan tindak kekerasan, tetapi juga menyebabkan hilangnya satu dari beberapa bangunan berarsitektur *Jengkei* yang ditandai dengan atap pelana yang sangat langka. Menurut Johan Silas, bangunan dengan arsitektur *Jengkei* sangat sedikit karena arsitektur ini hanya ada di Indonesia, tepatnya di sekitar Jawa Timur dan Jawa Tengah sekitar tahun 1950-an sampai 1960-an. Selain itu, pasar Wonokromo merupakan salah satu upaya warga Kota Surabaya untuk lepas dari pengaruh arsitektur bergaya Belanda. Pasar yang kini sudah berganti dengan mal ini merupakan salah satu dari tiga proyek besar yang dibangun oleh *arek-arek Suroboyo* pada tahun 1950-an selain Tugu Pahlawan, dan Hotel Olympic (Silas 1996:104–107).

Bertitik tolak dari fenomena historis di atas, studi ini terutama menyoroti keberadaan berbagai simbol kota yang selama kurun 1930–1960 terus diproduksi, diubah, dan dilestarikan. Simbol-simbol kota yang dipilih sebagai pokok kajian dapat menjelaskan pada kita siapa, bagaimana, dan dengan mekanisme apa kota ini dikendalikan.

---

<sup>7</sup> Dalam penelitian tentang simbol-simbol Kota Padang, Colombijn membaginya menjadi enam domain: etnik, religi, politik-sejarah, pemimpin informal, modernisasi, dan sakral. Freek Colombijn, *Patches of Padang: The history of an Indonesia town in the twentieth century and the use of urban space* (Leiden: Research School CNWS, 1994), hlm. 294.

## B. RUANG LINGKUP DAN PERTANYAAN UTAMA PENELITIAN

Studi ini hanya akan menyoroti simbol-simbol Kota Surabaya, khususnya simbol yang termasuk dalam domain politik-sejarah dan domain agama. Untuk domain politik-sejarah, studi difokuskan pada monumen, tugu, patung, nama jalan, dan lambang kota, sedangkan untuk domain agama difokuskan pada masjid, gereja, klenteng, dan makam Tionghoa. Pembatasan demikian dilakukan agar lebih memungkinkan dilakukannya kajian yang lebih detail terhadap masalah ini. Dengan demikian, tujuan studi ini tidak hanya untuk menggambarkan simbol-simbol yang ada, tetapi juga bagaimana dan mengapa simbol itu dibentuk, diubah, dan dilestarikan.

Kajian ini mengambil rentang waktu 1930–1960. Periode ini paling tidak meliputi empat masa: periode akhir kolonial Belanda sampai 1942, pendudukan Jepang (1942–1945), Revolusi Indonesia (1945–1949), periode Demokrasi (1949–1959), dan periode Demokrasi Terpimpin (1959–1966). Namun, dalam studi ini disederhanakan menjadi tiga periode, yakni Pemerintah Kolonial Belanda, Pendudukan Jepang, dan Orde Lama. Tentunya, *mainstream* dari tiap-tiap periode tersebut berbeda antara satu dengan lainnya yang akan berpengaruh pada keberadaan berbagai simbol kota di Surabaya. Akan tetapi, seperti yang dikatakan oleh Kuntowijoyo—cakupan waktu dalam studi sejarah tidaklah secara langsung menunjuk pada suatu perodesasi, sebab dalam perkembangan sejarah dan sosial tidak ada permulaan maupun akhir (Kuntowijoyo, 1988:1). Dengan demikian, studi ini akan dijumpai tidak hanya dalam tempo yang sudah ditetapkan tetapi juga akan bergerak ke belakang (sebelum 1930), khususnya dalam melihat sistem pemerintahan kolonial Belanda dan ke depan (sesudah 1960) untuk melihat perkembangan lebih jauh dari keberadaan simbol kota. Selain itu, beberapa masalah simbol kota sesudah tahun 1960 merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.

Secara umum, penelitian ini memfokuskan pada pertanyaan: *Bagaimana perubahan kekuasaan yang terjadi di Indonesia pada kurun 1930-1960 berpengaruh terhadap perubahan, pembentukan, dan pelestarian simbol-simbol kota dan sebaliknya seberapa jauh tingkat rujukan dan kekuatan daya perlambang simbol tersebut.* Secara lebih spesifik, penelitian ini ingin menjawab beberapa pertanyaan berikut.

- 1) Bagaimana proses pembentukan simbol-simbol kota, khususnya yang tercakup dalam domain politik-sejarah dan domain agama?
- 2) Dengan upaya apa dan mengapa struktur kekuasaan memengaruhi, mengubah, ataupun melestarikan sebuah simbol kota? Dalam bagian ini ditelusuri juga beberapa konflik yang mengiringi proses pembentukan sebuah simbol kota.
- 3) Siapa aktor di balik pembangunan tiap-tiap simbol dan bagaimana mereka mengusahakan dana untuk pembangunannya?
- 4) Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pembangunan sebuah simbol kota?

### **C. TINJAUAN ATAS BEBERAPA STUDI TERDAHULU**

Sebagaimana diketahui bahwa hingga kini sejarawan, sosiolog, dan antropolog yang mengkonsentrasikan diri pada kajian tentang simbol-simbol kota di Indonesia masih sangat terbatas. Di antara yang sedikit itu, pertama-tama dapat disebut Peter J. M. Nas. Dalam buku yang dieditnya, *Urban Symbolism* (Nas, 1993), tujuh dari dua puluh satu babnya berisi tentang kajian simbol di berbagai kota di Indonesia, yakni Jakarta (empat tulisan), Padang (dua tulisan), dan Bali (satu tulisan). Bab-bab lainnya berisi studi tentang simbol-simbol dari berbagai kota di dunia, seperti Buenos Aires (Argentina), Vitoria (Brazil), Cina, Toto (Tokyo), Francistown (Botswana), Bangkok, Baghdad, dan lain-lain. Ditampilkannya tulisan dari berbagai kota tidak hanya berguna untuk mengetahui berbagai dinamika simbol-simbol di kota lain, tetapi juga memberi perspektif komparatif pada

kajian ini. Dalam buku tersebut memang tidak ada tulisan tentang simbol-simbol Kota Surabaya, namun demikian buku itu sangat membantu khususnya dalam membangun konsep yang akan dipakai dalam penelitian. Pada dasarnya buku ini berisi tiga perspektif utama studi tentang simbol, yakni sudut pandang material, kultural, dan struktural. Selain itu, beberapa tulisan Nas lainnya, tulisan Colombijn dan Evers memberikan orientasi teoretis yang cukup jelas dalam memahami proses pembentukan, perubahan, dan pelestarian simbol kota.

Freek Colombijn dalam bukunya tentang Kota Padang (Colombijn, 1994), khususnya bab sepuluh memberikan uraian yang menarik tentang ruang simbolik di Kota Padang. Bagian awal dari bab ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan simbol, pentingnya dilakukan studi tentang simbol, dan domain-domain simbol. Selain itu, Colombijn menguraikan sembilan konsep yang diberikan oleh Nas dan memberikan tiga konsep tambahan, yaitu tipe-tipe lokasi, kejenuhan masyarakat terhadap simbol, dan tingkat keseragaman pesan-pesan simbol. Bagian selanjutnya dari buku ini menjelaskan tentang simbol-simbol Kota Padang yang dibaginya ke dalam enam domain, yaitu domain etnik, agama, politik-sejarah, pemimpin informal, modernisasi, dan sakral. Dua dari enam domain ini, yakni domain politik-sejarah dan agama dipakai untuk memetakan simbol-simbol yang ada di Kota Surabaya.

Jika Colombijn memakai istilah domain, maka Hans-Dieter Evers dan Rüdiger Korff dalam bukunya: *Urbanisme di Asia Tenggara* (Evers dan Rüdiger, 2002), khususnya bagian ketiga menggunakan konsep ranah untuk mengidentifikasi simbol-simbol di Kota Padang. Empat ranah tersebut adalah Islam, Adat Mingkabau, Modernitas, dan Nasionalisme. Namun demikian, kata Evers, batas-batas di antara empat ranah ini sering kabur dan tumpang tindih. Dari keseluruhan uraian Evers tentang ranah simbol di Kota Padang, ada satu hal yang menurut hemat saya sangat menarik dan inspiratif, yakni pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya tentang pertumbuhan simbol-simbol

urban yang begitu cepat di Indonesia. Apakah maraknya simbolisme urban di Indonesia merupakan ekspresi dari regionalisme baru? Ekspresi dari kebangkitan kembali identitas etnik, ataukah ini hanya sekadar indikasi berlimpahnya dana publik dan sebagai cara mudah untuk menyelesaikan “proyek” yang mendatangkan uang bagi penanggungjawabnya? Menurut Evers, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini harus dicari dalam konteks kenegaraan (*statecraft*) Indonesia modern yang secara umum negara yang multi-etnik ini telah diintegrasikan oleh kebijakan budaya yang konsisten.

Dalam konteks Surabaya, buku *Soerabaja Tempo Doeloe* yang ditulis oleh Dukut Imam Widodo (Widodo, 2002), walaupun tidak bermaksud memfokuskan diri pada kajian simbol kota, sangat sayang untuk dilewatkan. Buku yang menurut penulisnya dipersiapkan selama  $\pm$  30 tahun ini terdiri atas dua jilid. Dengan menggunakan bahasa “Suroboyoan”, Dukut menguraikan aspek-aspek tertentu dari Kota Surabaya tempo dulu. Buku ini memang tidak berpretensi untuk melakukan analisis sejarah, tetapi beberapa paparannya bermanfaat bagi penelitian ini, seperti nama jalan tempo dulu dan perubahannya, perubahan lambang Kota Surabaya dari periode ke periode, dan lain-lain. Untuk memakai buku ini sebagai bahan tentunya perlu kehati-hatian karena menurut beberapa saksi sejarah, ada bagian yang ditulis dalam buku ini tidak sesuai dengan realitas yang sebenarnya.

## **D. ORIENTASI TEORETIS DAN SISTEMATIKA PENULISAN**

### **1. Orientasi Teoretis**

Secara umum simbol dapat dipahami sebagai sesuatu yang menceritakan tentang sesuatu. Freek Colombijn yang mengutip Schefold mendefinisikan simbol sebagai sebuah perwujudan dengan makna tertentu yang dilekatkan padanya. Sifat-sifat dari perwujudan tersebut berhubungan dengan pengalaman-pengalaman keseharian

yang berada di luar perwujudan itu sendiri (Colombijn, 1994: 330). Dalam kamus sosiologi, simbol didefinisikan sebagai sesuatu yang menjadi pengganti atau lambang dari hal tertentu, atau ekspresi dari fakta yang tidak diketahui (Soekanto, 1983: 357).

Untuk mengkaji simbol-simbol tersebut terdapat dua konsep yang dapat dipakai, yakni tingkat rujukan serta kekuatan atau daya perlambangannya. Hotel Majapahit sebagai tempat berlangsungnya insiden bendera pada 19 September 1945, walaupun berlokasi di Surabaya, dapat dianggap sebagai simbol yang rujukannya tingkat nasional. Itulah saat, kata Ruslan Abdulgani “rakyat mulai menangkap bau darah” (Abdulgani, 1975: 16) dan saat dimulainya sebuah revolusi (Achmad, 1990: 17). Selain dua konsep itu, studi tentang simbol kota menarik dan penting untuk dilakukan dengan tiga pertimbangan. *Pertama*, sebagian besar simbol menggunakan ruang fisik, misalnya monumen. *Kedua*, simbol-simbol berpengaruh terhadap penggunaan ruang lainnya, dan sebaliknya dipengaruhi oleh penggunaan ruang yang lain. *Ketiga*, dinamika simbol-simbol kota merefleksikan perubahan dalam struktur kekuasaan (Colombijn, 1994).

Dalam konteks pembentukan simbol-simbol di Kota Surabaya, tidak jarang ketiga hal tersebut menjadi masalah yang serius. Misalnya, kasus pembangunan monumen W. R. Soepratman yang hingga kini tidak pernah terwujud. Selain itu, pada saat ideologi, hubungan kekuasaan, dan tatanan kelembagaan berubah, simbol-simbol pun biasanya turut diubah, meskipun adakalanya tidak langsung (Nas, 1993: 62–63). Perubahan atau pembentukan sebuah simbol kota tidak jarang menimbulkan konflik antara berbagai kelompok masyarakat. Oleh karena itu, berbagai konflik tersebut akan digunakan sebagai alat untuk memahami pentingnya simbol kota dalam proses dekolonisasi. Selain itu, dalam riset ini akan dibedakan antara simbol-simbol yang sengaja diciptakan, seperti sebuah tugu dan patung serta simbol-simbol yang muncul ketika sebuah makna dilekatkan pada bentuk yang telah ada seperti masjid atau kuburan sakral (Colombijn, 1994: 62).

Dalam tulisannya tentang simbol-simbol di Jakarta, Peter J. M. Nas menggunakan sembilan konsep untuk data yang telah dikumpulkannya. Kesembilan konsep tersebut adalah: 1) Tipe atau kategori-kategori simbol. Dalam penelitian ini, hanya akan dilihat beberapa tipe, yakni monumen, tugu, patung, nama-nama jalan, lambang kota, masjid, gereja, klenteng, dan makam Tionghoa; 2) Elemen-elemen simbol; 3) Domain-domain simbol. Simbol-simbol tersebut dapat diklasifikasi berdasarkan domainnya masing-masing. Dalam studi ini, akan dilihat simbol yang termasuk dalam domain politik-sejarah, domain agama, dan domain etnik; 4) Nilai atau kekuatan simbol; 5) Ekologi simbol. Konsep ini dapat digunakan dalam hubungan dengan penyebaran atau distribusi simbol; 6) Level dan simbol-simbol. Hal ini berkaitan dengan tingkat rujukan simbol, seperti level internasional, regional, kota, desa, dan level institusional yang bersifat lokal; 7) Makna formal dan informal. Simbol-simbol memiliki makna yang tetap dan formal tetapi makna informal sering juga dilekatkan padanya; 8) Dinamika simbol. Simbol-simbol dibentuk, disebarkan, dan dihapuskan; dan 9) Fungsi-fungsi simbol. Simbol sering menjadi alat komunikasi kelompok tertentu, menjadi legitimasi kepemimpinan, dan menjadi alat kontrol kekuasaan.

Dengan menggunakan beberapa konsep di atas, penelitian ini diharapkan menghasilkan analisis yang bersifat kualitatif atas data yang dikumpulkan dari dokumen dan bahan sekunder serta dari hasil wawancara dengan para pelaku sejarah dan masyarakat umum yang hidup dalam kurun 1930–1960. Dokumen dikumpulkan untuk mendapatkan informasi tentang proses pembentukan, perubahan, atau pelestarian simbol kota. Keterangan mengenai hal tersebut terutama diperoleh dari Arsip Kota Surabaya, Arsip Surabaya Post, dan beberapa surat kabar lama di Monumen Pers Surakarta. Data dari koran, terutama dari koran-koran yang terbit pada periode itu seperti *Soeara Asia*, *Surabaya Post*, *Djawa Pos*, *Pewartas Soerabia*, dan *Perdamaian* sangat bermanfaat untuk menjelaskan dinamika dan perdebatan yang muncul di masyarakat seputar keberadaan sebuah simbol kota.

Sebagai sebuah penelitian sejarah (*historical research*), penelitian ini bermanfaat untuk memahami perubahan dan pergeseran struktur kekuasaan dan pengaruhnya terhadap simbol-simbol kota. Namun, penelitian jenis ini umumnya lebih berkonsentrasi pada urutan kronologis atau diakronis, sedangkan aspek-aspek yang sifatnya sinkronis kurang mendalam. Oleh karena itu, kedua aspek tersebut (diakronis maupun sinkronis) akan diusahakan secara lebih berimbang dan saling melengkapi.

## 2. Sistematika Penulisan

Keseluruhan tulisan dalam buku ini dibagi menjadi delapan bab yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian, pembahasan yang utuh tentang politik simbolisme di Kota Surabaya, khususnya dalam domain politik-sejarah dan agama diharapkan dapat tercapai. Penjelasan yang berisi tentang latar belakang, ruang lingkup dan pertanyaan penelitian, tujuan dan tinjauan atas beberapa studi terdahulu, orientasi teoretis dan sistematika ditempatkan dalam bab satu. Proses pembentukan, perubahan, dan pelestarian simbol kota tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks historis Kota Surabaya. Oleh karena itu, pada bab dua akan diuraikan secara singkat perkembangan sejarah kota ini yang dimulai dengan kedatangan orang-orang Eropa, masa-masa akhir kekuasaan Belanda dan pendudukan Jepang hingga pasca- proklamasi kemerdekaan.

Proses pembentukan, perubahan, dan pelestarian simbol-simbol kota, khususnya yang tercakup dalam domain politik-sejarah dan agama merupakan inti dari studi ini. Masalah tersebut ditempatkan dalam lima bab, yakni bab tiga, empat, lima, enam, dan tujuh. Pada bab tiga dibahas makna dan perebutan simbol monumen, tugu, dan patung, sedangkan makna dan perebutan simbol nama-nama jalan, serta proses perubahan lambang kota dibahas dalam bab empat dan lima. Pada bab enam dibahas rumah ibadah yang meliputi masjid, gereja, klenteng, sedangkan pada bab tujuh dibahas makam Tionghoa. Sebagai penutup dikemukakan beberapa catatan akhir dari studi ini.

Dalam upaya memperoleh gambaran tentang keseluruhan masalah dan data penelitian, dilakukan studi atas berbagai dokumen yang tersimpan di arsip dan beberapa surat kabar yang terbit di Surabaya. Studi ini juga mengandalkan pada wawancara dengan sejumlah orang yang mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan topik penelitian dan memiliki pengalaman tentang masa lalu kota ini.[]

Buku ini tidak diperjualbelikan.

# SURABAYA DALAM LINTASAN KEKUASAAN

## A. SURABAYA DAN HEGEMONI BELANDA

Setelah melewati serangkaian peperangan yang mengakibatkan hancurnya Surabaya pada tahun 1743, kota ini resmi berada dalam kekuasaan kompeni (VOC). Kekuasaan itu diberikan kepada VOC oleh Pakubuwono II atas jasa-jasanya membantu memadamkan pemberontakan dan peperangan yang seolah tanpa henti. Konsesi itu antara lain diserahkannya kedaulatan penuh kepada VOC atas Madura Barat, Surabaya, Rembang, Jepara, serta Ujung Timur.<sup>8</sup> Ketika memasuki Kota Surabaya, VOC mula-mula membangun loji dan benteng yang diletakkan di sebelah utara Kota Surabaya lama (sekitar kompleks kantor Gubernur Jawa Timur di Jln. Pahlawan sekarang). Selain itu, karena letaknya yang strategis, Surabaya dipilih menjadi tempat bagi penguasa Jawa bagian timur (*Gezaghebber in den Oosthoek*). Pemukiman awal orang-orang Belanda terletak di sekitar kompleks gubernur sekarang ini, sedangkan pemukiman keluarga

---

<sup>8</sup> Pada tanggal 11 November 1743 Pakubuwono II dari Mataram dan Gubernur Jenderal van Imhoff di Surakarta menandatangani sebuah persetujuan bahwa ia menyerahkan haknya atas seluruh Pantai Utara Pulau Jawa dan Madura kepada pihak VOC yang telah memberikan bantuan sehingga dia berhasil naik tahta di kerajaan Mataram. M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm. 143; Handinoto, *Perkembangan dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870–1940* (Surabaya: Universitas Kristen PETRA-Andi Press, 1996), hlm. 21.

tentara terletak di selatan benteng Retranchement. Pemukiman ini terus berkembang ke arah utara yang pusatnya terdapat di depan jembatan merah, yang di “mulut” jembatan itu dibangun Kantor Dinas Residen Surabaya. Daerah inilah yang kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan karena letaknya yang strategis di pinggir Kalimas (Veth, 1882: 847; Handinoto, 1996: 34–35).

Sejak kebangkrutan VOC pada tahun 1799, pemerintah Belanda mengambil-alih kekuasaan. Sebagai akibat ditaklukkannya Belanda oleh Prancis dalam perang Napoleon di daratan Eropa, maka pada tahun 1808 Surabaya langsung berada di bawah pemerintah Belanda yang dikepalai oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Pada masa Daendels ini, Surabaya “disulap” menjadi sebuah kota Eropa kecil. Surabaya dibangun sebagai kota dagang dan kota benteng. Berbagai infrastruktur kota juga dibangun, seperti Jalan Raya Pos (*Grote Postweg*) yang menghubungkan kota-kota pantai utara Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan. Sebagai kota benteng, Daendels melengkapi juga kota ini dengan pabrik senjata (*artillerie constructie winkel*), serta benteng Lodewijk. Selain itu, dibangun pula asrama dan rumah sakit militer (sekarang menjadi mal Surabaya Plaza di Jalan Pemuda) (Hadinoto, 1996: 36–37). Kota ini terus berkembang dan pada tahun 1835 telah menjadi pusat kedudukan utama pasukan Belanda dengan menghancurkan kawasan lama dan memaksa penduduknya yang padat untuk melakukan pemukiman kembali (Hageman, 1986:2). Mereka yang pribumi seperti Jawa, Madura, Bugis, dan orang-orang Indonesia lainnya dipaksa pindah, sementara tempat-tempat di pusat kota diperuntukkan bagi orang Eropa, Cina, serta beberapa orang Kristen Indonesia (Hageman, 1986: 2). Tindakan ini dilakukan pemerintah Belanda mengingat jumlah orang-orang Eropa dan Timur Asing lainnya dari waktu ke waktu terus bertambah yang tentunya membutuhkan pemukiman.

Pada tahun 1830 hingga tahun 1850, Surabaya menjelma menjadi kota benteng dengan benteng Prins Hendrik yang dibangun di muara

Kalimas. Di bagian selatan benteng tersebut didirikan pemukiman orang-orang Eropa. Selain itu, Surabaya tumbuh kembali menjadi kota pelabuhan yang penting di samping sebagai kota militer dan gudang makanan. Surabaya menjadi kota yang khas Asia Tenggara dengan bangunan kayu yang didirikan berselang-seling pepohonan dan aliran sungai, muncul suatu struktur baru dalam bentuk jembatan-jembatan, kanal-kanal, jalan-jalan beraspal, serta bangunan bertembok. Di belakang kawasan sempit ini, orang-orang Indonesia Surabaya berusaha membangun kembali lingkungan asal mereka dan menyesuaikan diri dengan pendatang baru, terutama buruh kecil dari tempat-tempat jauh seperti Rembang, Kediri, dan Banyuwangi (Hageman, 1986: 2). Perkembangan pesat kota ini dan kedudukannya yang penting dalam roda perekonomian—yang berkembang terutama setelah dibukanya wilayah pedalaman Jawa Timur untuk kepentingan Sistem Tanam Paksa Belanda—diimbangi dengan dibagunnya berbagai infrastruktur kota, seperti *city hall*, kantor pos, rumah toko, barak militer, bengkel, gereja, dan unsur yang selalu terdapat pada setiap pemukiman orang Belanda, yakni rumah yatim piatu (Hageman, 1986: 37). Menjelang akhir abad ke-19, Surabaya telah menjelma menjadi kota terbesar di Hindia Belanda, dengan gaya dan nilai kultural yang penuh semangat, sekalipun kusut tidak terencana (Frederick, 1986: 2; Toer: 1980a; Toer 1980b).

Perkembangan lebih pesat dari Kota Surabaya mendapatkan momentumnya pada tahun 1870 ketika dikeluarkannya Undang-Undang Gula (*Suikerwet*) dan Undang-Undang Agraria (*Agrarischewet*) pada tahun 1870. Undang-undang yang keluar akibat tekanan pihak liberal di Belanda ini sekaligus mengakhiri praktik *Cultuurstelsel* (tanam paksa) yang saat itu menjadikan pemerintah Hindia Belanda sebagai satu-satunya pengusaha pertanian. Dengan Undang-Undang Gula

---

<sup>9</sup> *City hall* adalah sebutan untuk kantor Residen Belanda yang terletak tepat di hadapan Jembatan Merah. Di depan *city hall* tersebut terdapat sebuah lapangan yang cukup luas yang disebut sebagai *Willemsplein* (sekarang Taman Jayengrono). Lihat: Handinoto, (1996: 37).

dan Agraria memungkinkan para pengusaha Belanda dan orang-orang Eropa lainnya untuk menyewa tanah pada pemerintah atau dari penduduk sampai maksimum 500 bau (1 bau = 7096 m<sup>2</sup>) untuk jangka waktu selama 75 tahun (Kasdi, 1986: 13).

Selain dua undang-undang di atas, masih terdapat dua hal yang dapat disimpulkan menjadi faktor yang memengaruhi perkembangan Kota Surabaya. *Pertama*, dibukanya Terusan Suez pada tahun 1870 yang menyebabkan semakin singkatnya perjalanan dari negeri Belanda ke Hindia Belanda (termasuk Surabaya). Walaupun tidak ada data yang menyebutkan jumlah orang-orang yang melewati terusan itu yang akhirnya tiba di Surabaya, dapat dipastikan bahwa pembukaan terusan tersebut memudahkan terjadinya migrasi ke kota ini. *Kedua*, semakin besarnya peluang untuk mengadakan perluasan kota ke arah selatan. Hal ini disebabkan oleh dikeluarkannya keputusan untuk membongkar benteng yang mengelilingi Kota Surabaya pada tanggal 19 April 1871 (Handinoto, 1996: 45).

Pembongkaran tembok kota dilakukan untuk kepentingan pemukiman penduduk yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Adapun jumlah penduduk Surabaya dari tahun 1875 hingga 1940 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.** Jumlah Penduduk Kota Surabaya Tahun 1857, 1905, 1920, 1930, & 1940

Tahun	Eropa	Cina	Orang Asia Lainnya	Pribumi	Total
1857	7.518	5.728	2.762	141.804	157.812
1905	8.063	14.843	2.819	124.473	150.198
1920	17.497	22.118	4.164	148.411	192.190
1930	26.502	38.871	5.629	271.275	341.675
1940	34.576	47.884	6.269	308.000	396.720

**Tabel 2.** Tingkat Pertumbuhan Penduduk (persentase rata-rata/tahun)

Tahun	Eropa	Cina	Orang Asia Lainnya	Pribumi	Total
1857/1905	0,15	2,0	0,04	-0,3	-0,1
1905/1920	5,7	2,0	3,0	1,3	1,1
1920/1930	4,4	6,5	3,4	7,0	6,6
1930/1940	3,4	2,3	1,2	1,6	1,9

Sumber: *Volkstelling Nederlandsch-Indie* 1905, 1920, 1930 (Batavia 1906, 1921, 1931); *Verslag stadgemeente Soerabaja 1940 statische berichten der gemeente Soerabaja 1931*; Jamie Mackie, “Sejarah ...”, dalam Lindblad (2000: 322).

Tabel satu menunjukkan bahwa penduduk kota ini mengalami pertumbuhan yang pesat pada periode 1920–1930. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan Kota Surabaya yang menjadi daya tarik bagi migran dari daerah-daerah lain. Pada tahun 1905, kota ini memiliki penduduk 150.000 jiwa, suatu jumlah yang tidak terlalu jauh dari jumlah yang dilaporkan lima belas tahun sebelumnya. Akan tetapi, jumlah itu mulai meningkat dengan mantap yang disebabkan karena perluasan industri gula antara 1890–1920, meskipun terjadi penurunan pada 1918–1919 ketika Surabaya terserang wabah influenza dunia. Jumlah tersebut terus meningkat hingga mendekati 7% pertahun pada 1920-an selama masa kejayaan industri gula, yang lebih cepat dari waktu-waktu sebelumnya (Mackie, 2000: 321). Pertumbuhan yang pesat ini tidak hanya terjadi pada penduduk pribumi, tetapi juga pada orang Cina<sup>10</sup>, Timur Asing lainnya, dan orang Eropa.

Pemukiman penduduk dari berbagai macam ras dan suku bangsa ini diatur berdasarkan *wijkenstelsel* (undang-undang wilayah). Pada tahun 1843 kota lama dibagi menjadi dua wilayah utama berdasarkan etnis, yakni pemukiman orang Eropa yang terletak di sisi barat jembatan merah dan pemukiman masyarakat timur asing (*vreemde oosterlingen*) di sisi timur yang terdiri atas kampung Cina

<sup>10</sup> Tentang penduduk Cina dalam berbagai aspeknya, dapat dibaca: Andjarwati Noordjanah, *Komunitas Tionghoa di Surabaya* (1910–1946) (Semarang: Mesiass, 2004).

(*Chineesche kamp*), Arab (*Arabische kamp*), dan masyarakat pribumi yang menyebar di dekat hunian orang Cina dan Arab (Kwanda dan Handinoto, 2003: 6). Undang-Undang Wilayah (*wijkenstelsel*)<sup>11</sup> tampaknya tidak sanggup membendung pertumbuhan penduduk dan kota yang semakin pesat. Pengembangan pelabuhan pada tahun 1916 menjadi pemicu tumbuhnya gedung-gedung baru, rel kereta api, dan jaringan jalan untuk menopang pertumbuhan perdagangan dan lalu lintas. Oleh karena itu, pada tahun 1920-an, pusat kota lama Surabaya di Jembatan Merah yang dikenal juga sebagai kota bawah (*benenstad*), dipindahkan ke selatan kota sebagai pusat kota baru yang dikenal juga sebagai kota atas (*bovenstad*). Pusat kota di selatan ini ditandai dengan pembangunan gedung balai kota yang baru pada tahun 1920 di Jalan Jimerto (Kwanda dan Handinoto, 2003: 6).

Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda mengumumkan suatu haluan politik baru yang kemudian dikenal sebagai politik etis (*ethische politiek*). Kebijakan ini berpangkal pada gagasan “kewajiban moral” dan “hutang budi” (*een eereschuld*) pemerintah kolonial terhadap tanah jajahan. Pandangan ini dikemukakan pada tahun 1899 oleh C.Th. van Deventer, seorang ahli hukum yang pernah menetap di Indonesia selama tahun 1880–1897, dan menulis sebuah artikel yang berjudul “*Een Eereschuld*” dalam majalah *de Gids*. Menurutnya, negeri Belanda berhutang budi kepada bangsa Indonesia terhadap semua kekayaan yang telah diperas dari negeri mereka. Hutang ini sebaiknya dibayar kembali dengan jalan memberi prioritas utama pada kepentingan rakyat Indonesia di dalam kebijakan kolonial (Bosch, 1941: 64 dan Nagazumi, 1989:27). Salah satu program yang berada di bawah kebijakan politik etis adalah program desentralisasi<sup>12</sup>, yang salah satu hasilnya adalah Surabaya

<sup>11</sup> Walaupun Undang-Undang Wilayah (*Wijkenstelsel*) telah dihapus pada tahun 1900-an, bekas pemukiman orang-orang Eropa, Cina, dan Arab masih dapat dikenali dengan mudah hingga saat ini.

<sup>12</sup> Perdebatan tentang perlunya undang-undang desentralisasi di Hindia Belanda telah diperdebatkan di parlemen Belanda sejak tahun 1880-an. Pada tanggal 23 Juli 1903, undang-undang mengenai desentralisasi pemerintahan di Hindia Belanda, bernama *De*

memperoleh status sebagai *gemeente* pada tahun 1906. Secara harafiah, *gemeente* berarti “komunitas” tetapi lebih sering disebut dengan “kota praja” (Frederick, 1986: 3 dan Dick, 2002: 159). Status baru ini sesungguhnya lebih menegaskan pemisahan secara defenitif antara orang-orang Belanda dan Indonesia di dalam kawasan perkotaan yang sama. Orang-orang Belanda dan Indonesia memang sama-sama tinggal dalam batas Kota Praja Surabaya yang sama, tetapi bermukim pada kategori tanah yang berbeda, dan dipungut pajak yang berbeda pula. Selain itu, orang-orang Indonesia tidak diperintah oleh dewan kota praja melainkan oleh *pangreh praja*, korps pegawai tradisional Jawa yang sudah lama dididik oleh pemerintah kolonial dan hanya diarahkan dari jauh oleh pejabat Belanda yang dikenal dengan residen.

Hubungan antara orang-orang Belanda dan Indonesia seperti ini juga terefleksi pada wajah fisik kota. Bagi komunitas Eropa tersedia fasilitas kota yang memadai, baik fasilitas perumahan, pendidikan, kesehatan, hiburan, dan lain-lain. Menjelang 1930-an, kota Surabaya semakin berkembang ke arah selatan sepanjang Kalimas, sebuah cabang Sungai Brantas, sampai ke Jembatan Wonokromo yang diakhiri oleh kawasan eksklusif orang Eropa di Darmo, yang terkenal dengan jalan-jalannya yang lebar, perumahan mewah, lapangan terbang, dan kebun binatang. Sebaliknya, orang-orang Indonesia harus rela terpojok dalam kantung-kantung wilayah yang menyempit dan tersingkir dari wilayah pusat perkotaan dan harus berjuang di tengah gubuk-gubuk dan pemukiman liar mereka.<sup>13</sup>

---

*Wet Houdende Decentralisatie van Het Bestuur in Nederlands-Indie*, berhasil diterima sidang dan diundangkan dalam *Staatsblad van Het Koninkrijk Der Nederlanden* tahun 1903 N0 219. Soetandyo Wingnjosoebroto, *Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial di Hindia-Belanda: Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900–1940)* (Malang: Bayumedia, 2004), hlm. 10.

<sup>13</sup> Perkembangan sarana dan prasaran kota di Surabaya, baik sebelum maupun sesudah memperoleh status *gemeente*, baca: Handinoto (2003: 103–128).

## B. JATUHNYA KEKUASAAN BELANDA DAN PERALIHAN KE ZAMAN JEPANG

Sesungguhnya dekade pertama sampai ketiga abad ke-20 dapat dikatakan sebagai masa-masa yang menyulitkan pemerintah kolonial Belanda. Dalam masa itu muncul elite-elite baru—sebagian dari akibat politik etis—dengan kesadaran yang baru. Dalam masa itulah tumbuh dan berkembang organisasi-organisasi pergerakan, baik yang bercorak nasionalis maupun religius. Hal ini sangat dirasakan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai ancaman yang sangat serius terhadap eksistensi kekuasaannya di Hindia Belanda. Dengan kesadaran itu, pemerintah kolonial melakukan pengawasan sedemikian rupa dan larangan-larangan terhadap pers maupun gerakan-gerakan lainnya dengan demikian keras, sehingga banyak orang beranggapan bahwa sejak saat itu pemerintah Hindia Belanda menjadi suatu sistem diktator yang terselubung (Leirissa, 1985: 69). Pengawasan pemerintah kolonial ini diwujudkan dalam serangkaian ordonansi, seperti *pelgrims ordonantie* (ordonansi haji)<sup>14</sup> dan ordonansi guru<sup>15</sup>.

Menjelang peralihan kekuasaan, keberadaan Belanda pada dekade ketiga abad ke-20 memasuki tahapan yang bersifat menindas karena disibukkan dengan usaha untuk mengatasi masa-masa sulit yang ditimbulkan oleh depresi ekonomi. Pada periode ini, Belanda benar-benar menguasai Hindia Belanda karena gubernur jenderal yang berkuasa pada 1931–1936 adalah Bonifacius C. de Jonge menentang semua bentuk nasionalisme dan menekan peranan *volksraad*. Pemimpin-

---

<sup>14</sup> Ordonansi haji dikeluarkan dalam bentuk *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1927, no. 286 dan 1932 no. 554. Baca juga G. F. Pijper, 'Politik Islam Pemerintah Belanda' dalam: H. Baudet dan I. J. Brugmans, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan* (Jakarta: Obor, 1987), hlm. 238–253; H. M. Soleh Hayat, (*et al.*), *Peranan Ulama dalam Perjuangan Kemerdekaan* (Surabaya: PWNJ Jatim, 1995).

<sup>15</sup> Ordonansi guru dituangkan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1905, no. 550 dan 1925 no. 25, no. 219. Baca juga Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900–1942* (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 195–203.

pemimpin politik yang beraliran dan bereaksi terlalu keras terhadap pemerintah kolonial ditangkap dan dipenjarakan.<sup>16</sup>

Untuk menghadapi berbagai kemungkinan, pada tahun-tahun berikutnya Belanda sudah mempersiapkan diri untuk menanggulangi kemungkinan buruk yang akan terjadi. Setelah pertengahan tahun 1938, pengawasan diperketat atas pergerakan-pergerakan yang ada dan memperlakukan hukum dalam hal pernyataan pendapat dan berkumpul secara lebih keras. Hal ini mengakibatkan hubungan orang-orang Belanda dengan orang-orang Indonesia semakin memburuk ketika tumbuhnya *chauvinisme* Belanda dan berkembangnya ketakutan akan mata-mata. Untuk Kota Surabaya, pihak Belanda mulai menerapkan larangan-larangan terhadap konsentrasi massa, seperti olah raga kampung dan perlombaan burung merpati dengan alasan untuk mencegah disembarkannya berita buruk (Frederick, 1986: 5). Sebagai sebuah kota besar, Surabaya merupakan salah satu kota pertama yang memperhitungkan secara serius kedatangan perang. Untuk menghadapinya, pemerintah Hindia Belanda membentuk korps sipil pertahanan udara sejak tahun 1937, serta mulai melembagakannya dalam peringatan-peringatan. Ketika negeri Belanda dapat dijatuhkan oleh Jerman yang merupakan kelompok Jepang dan Italia pada bulan Mei 1940, kegelisahan terhadap serangan yang akan dilancarkan oleh Jepang mulai tampak dengan pemadaman lampu, serta munculnya usul-usul yang secara serius menjadi pembicaraan tentang pendirian kantor enerangan berbahasa Indonesia dan penempatan radio umum di setiap kampung<sup>17</sup>.

Sikap-sikap keseharian antara orang-orang Eropa dan orang-orang Indonesia mulai memburuk, jaksa melarang penggunaan bahasa

---

<sup>16</sup> Contoh untuk kasus ini adalah Soekarno yang diajukan ke pengadilan umum di Bandung tahun 1930 yang dijatuhi hukuman empat tahun penjara di penjara Sukamiskin dengan tuduhan membahayakan ketertiban umum. Tahun 1933 ditangkap dan diasingkan ke Flores, pada bulan Februari 1934, Hatta, Sjahrir, dan pemimpin yang lain diasingkan ke Boven Digul.

<sup>17</sup> Lihat: *Soera Oemoem*, 22 Januari; 24 Agustus 1941.

Indonesia, serta proyek-proyek yang dilakukan bukan untuk pembangunan fasilitas kota, akan tetapi usaha-usaha pertahanan dengan jalan melakukan penggalian-penggalian tanah untuk ber-lindung dari serangan bom<sup>18</sup>. Sejak pertengahan tahun 1940, Belanda semakin bingung dan perhatiannya tersita oleh peperangan yang secara tepat belum diketahui.

Menjelang awal tahun 1941, Surabaya mulai di ambang keruntuhan. Pengungsian masyarakat Surabaya terjadi secara besar-besaran dan terus-menerus ke wilayah pedalaman dan segera diikuti dengan gerak yang berkebalikan yang dilakukan oleh para pangreh praja dan orang-orang Belanda menuju kota. Gelombang perpindahan masyarakat awam ini akar permasalahannya adalah ketidakstabilan karena pokok perhatian pemerintah kota hanya kepada persiapan-persiapan militer sehingga timbul kecemasan-kecemasan akan terjadinya perang yang besar di Surabaya. Sampai bulan Januari hingga Februari 1942, perang yang sebelumnya masih tampak jauh dan samar-samar bagi masyarakat umum Surabaya meskipun indikasi ke arah perang itu ada, kini tiba-tiba datang dan jelas menjadi kenyataan saat pasukan Jepang melakukan pengeboman pertama dari lebih enam puluh kali di atas Kota Surabaya selama kurang dari satu bulan.<sup>19</sup>

Situasi perang sudah benar-benar terjadi antara serdadu Belanda dengan pasukan Jepang. Dalam siasat perang, Jepang lebih cerdik dan mempunyai semangat dengan membuat konfigurasi nyanyian yang

---

<sup>18</sup> Lihat: *Soera Oemoem*, 22 Januari; 24 Agustus 1941.

<sup>19</sup> Baca juga: William H. Frederick (1986:110). Kedatangan orang-orang Jepang di Jawa Timur, khususnya Surabaya telah berlangsung sejak akhir zaman Meiji (1867–1912) dengan profesi sebagai pedagang. Di Surabaya pula untuk pertama kalinya didirikan sekolah Jepang atas inisiatif Asosiasi Orang Jepang pada tahun 1925. Pada tanggal 8 Desember 1938 mereka juga membentuk *Surabaya Nihon-jin Seinen-kai* (Asosiasi Pemuda Jepang) dengan jumlah anggota 230 orang. Ken' Ichi Goto, *Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor, 1998), hlm. 187 dan 203; Mattulada, *Pedang dan Sempoa: Suatu Analisa Kultural "Perasaan Kepribadian" Orang Jepang* (Ujung Pandang: LEPHAS Unhas, 1979), hlm. 127.

dilakukan secara kompak, berbarengan, dan saling sahut-menyahut untuk menimbulkan kesan sebagai pasukan yang besar supaya dapat didengar oleh serdadu Belanda. Dengan demikian, secara mental serdadu Belanda dapat dijatuhkan. Dalam hitungan jam serbuan pertama dari wilayah selatan untuk merebut daerah Wonokromo dapat dilakukan. Dalam perang itu keterlibatan masyarakat pribumi hanya sebagai penonton.<sup>20</sup> Keadaan menjadi kacau, pada tanggal 26 Februari 1942 hubungan telepon dengan ibu kota terputus, kehidupan keseharian yang semula normal berhenti, sekolah-sekolah ditutup, bahan-bahan pokok dan uang disembunyikan, persediaan bahan makanan tidak bisa diharapkan lagi, pelayan serta pekerja kasar menghilang dari tempat kerja, dan peraturan keluar rumah diabaikan karena orang mencari selamat. Puluhan ribu pengungsi terus bergerak ke arah selatan seiring berkobarnya secara besar perang laut Jawa di perairan Kota Surabaya. Dalam situasi ketegangan ini jaksa agung memerintahkan kepada dinas intelijen politik untuk memusnahkan hasil-hasil catatannya.

Sebagian kecil penduduk Surabaya memunculkan gelombang kekerasan dan perampokan terhadap toko-toko, kantor-kantor yang ditinggalkan dan sarana-sarana umum dengan memanfaatkan situasi. Sementara pangreh praja, hampir tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya sebagai penonton. Sikap ini diambil untuk menunjukkan kebencian masyarakat terhadap pemerintah jajahan. Tindakan-tindakan ini hanya sebagai tindakan yang tidak direncanakan oleh penduduk setempat. Motivasinya hanya karena situasi yang tidak menentu dan beragamnya ketegangan. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, ketegangan dan kekisruhan di masyarakat dan perang sudah berakhir. Sekelompok kecil orang Belanda termasuk Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Surabaya bertemu dengan komandan Divisi ke-48 Angkatan Darat Jepang di Sidoarjo. Para pejabat Belanda melakukan hormat kepada para perwira Jepang. Sejumlah tentara

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Imam Supadi pada tanggal 11 September 2003 di Jln. Manyar Sabrangan Surabaya.

Jepang diberikan kepada para pejabat Belanda untuk dibawa ke kota. Ketika pasukan Jepang berbaris memasuki Kota Surabaya, penduduk melakukan penyambutan sementara sebagian orang-orang Belanda yang ada tetap di dalam rumah dan tidak menyaksikan peristiwa-peristiwa ini (Frederick, 1986: 115). Perubahan yang tampak jelas dari pergantian kekuasaan adalah perubahan kebijakan. Penguasa baru secara serta merta mengubah atau mengganti tatanan yang semula sudah jadi atau disesuaikan dengan selera penguasa yang memegang otoritas. Masa pendudukan Jepang tidak hanya melanjutkan kebijakan yang telah digariskan oleh Belanda, tetapi mengganti dan menerapkan beberapa kebijakan baru. Salah satu kebijakan penting yang diambil adalah memerintahkan agar semua perkumpulan dibubarkan. Namun, perkumpulan tersebut masih diberi kesempatan untuk mengajukan surat permohonan kepada pemerintah untuk mendirikan kembali perkumpulannya, tetapi perhimpunan politik sama sekali dilarang.<sup>21</sup>

Ketika Jepang berkuasa, telah memungkinkan adanya perkembangan-perkembangan yang luar biasa yang mengarah pada perubahan status terutama semakin mengarah pada revolusi Indonesia. Meskipun sangat terasa sekali bahwa seluruh rakyat dipolitisasi secara sengaja untuk selalu tunduk dan patuh kepada Jepang, sehingga rezim kolonial ini bersifat menindas dan merusak. Ada dua prioritas kebijakan terhadap rakyat pada masa transisi kekuasaan oleh Jepang yang telah memegang suatu peran yang berarti, yaitu menghapus pengaruh Barat dan memobilisasi rakyat demi kemenangan Jepang (Ricklefs, 1994: 300). Untuk memulai dua prioritas utama tersebut, secara cepat Jepang mengambil alih kekuasaan atas Indonesia dari tangan Belanda dengan memecat dan menggiring semua personel Belanda, Indo, dan orang-orang yang dicurigai Jepang untuk dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi, dan sebagai penggantinya diambil dari personel Jepang yang dibantu oleh pribumi untuk

---

<sup>21</sup> Lihat: "Larangan Bersidang dan Berkoempoel. Semoea Perkoempoelan Haroes Diboebarkan" dalam *Soeara Asia*, 27 D'juli 2602.

mengisi kekurangannya. Kesempatan ini diberikan kepada pemimpin-pemimpin nasional untuk tampil di tengah-tengah masyarakat secara resmi.



Sumber: *Soeara Asia*, Senin 2 November 1902

**Gambar 2.** Permintaan untuk mengibarkan bendera Jepang

Pada tahun-tahun permulaan pendudukannya, Jepang melakukan propaganda dengan sangat intensif dan melibatkan banyak kalangan dan media seperti film dan surat kabar. Dengan kelihaiannya, Jepang berhasil menggunakan Masyumi untuk kepentingan propagandanya. Dalam sebuah propaganda misalnya, Masyumi mengagendakan dalam acaranya 'Doa Mempercepat Keruntuhan Sekutu'.<sup>22</sup> Selain propaganda, Jepang juga memasang para pemimpin nasional dan

<sup>22</sup> Tentang masalah ini, lihat: "Madjelis Sjoero Moeslimin Indonesia. Mengadakan Propaganda Keliling", dalam *Soeara Asia*, 27 Djanuari 1905.

pemimpin agama pada organisasi kemasyarakatan (Suwarno, 1990: 67), sedangkan untuk menghilangkan pengaruh Barat, pihak Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris, sebaliknya menganjurkan pemakaian bahasa Jepang, patung-patung Eropa diruntuhkan, dan pengenalan kalender Jepang untuk tujuan-tujuan resmi. Sementara itu, untuk memulihkan keamanan dan ketertiban kota, pemerintah Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 tanggal 7 Maret 1942 yang menyatakan bahwa balatentara Jepang menjalankan pemerintahan sementara waktu di daerah-daerah yang didudukinya agar mendatangkan keamanan yang sentosa dan segera (Setiadijaya, 1991: 116).

Dengan undang-undang tersebut, Jepang berharap dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kota dan dapat menerima kehadirannya sebagai saudara, bukan sebagai musuh. Harapan Jepang mendapat dukungan pejabat kota yang mengumumkan bahwa kehidupan kota sehari-hari tetap tunduk kepada semua keputusan dan peraturan di bawah pengawasan balatentara Jepang.<sup>23</sup>

### **C. MEMUDARNYA CAHAYA ASIA: SURABAYA MENYAMBUT KEMERDEKAAN**

Untuk sementara waktu, undang-undang yang dikeluarkan pemerintah Jepang dapat memulihkan situasi. Hal itu terbukti dengan kembalinya warga kota ke rumah masing-masing yang sebelumnya mengungsi ke berbagai daerah di Jawa Timur. Kantor-kantor pemerintahan mulai beraktivitas kembali. Demikian juga dengan industri, perdagangan, perbankan didorong agar segera beroperasi kembali.<sup>24</sup>

Selain itu, “suasana Eropa” lenyap mengingat banyaknya warga negara Belanda yang ditawan dan yang meninggalkan Indonesia. Pemerintah

---

<sup>23</sup> “Madjelis Sjoero Moeslimin Indonesia. Mengadakan Propaganda Keliling”, dalam *Soeara Asia*, 27 Djanuari 2605: hlm. 3.

<sup>24</sup> “Madjelis Sjoero Moeslimin Indonesia. Mengadakan Propaganda Keliling”, dalam *Soeara Asia*, 27 Djanuari 2605: hlm. 3.

Kota Surabaya jatuh ke tangan kekuasaan Tentara Pendudukan Jepang dengan Takahashi Ichiro sebagai wali kotanya (Shi-Tyo) dan Radjamin Nasution sebagai wakilnya. Adapun susunan pemerintahan waktu itu terdiri atas: Shi-Tyo dibantu seorang Asisten Shi-Tyo (Fuku Shi-Tyo), seorang wedana (Gun-Tyo), 5 orang Assisten Wedana (Shiku-Tyo), sedangkan eselon pemerintah terbawah, yakni Wijk diubah menjadi Ku dengan pejabatnya Ku-Tyo. Berikut ini susunan pemerintahan seperti yang diumumkan dalam Soeara Asia.

**Tabel 3.** Nama Kepala Jabatan pada Masa Pendudukan Jepang

<b>Nama Daerah</b>	<b>Nama Kepala Pembesar</b>	<b>Nama Kantornya</b>
Si	Si-Tyo	Si- Yakusyo
Siku	Siku- Tyo	Siku- Yakusyo
Ken	Ken- Tyo	Ken- Yakusyo
Gun	Gun- Tyo	Gun- Yakusyo
Son	Son- Tyo	Son- Yakusyo
Ku	Ku- Tyo	Ku- Yakusyo

Sumber: “Nama Kepala Djabatan. Kantor Pemerintah Dalam”, dalam *Soeara Asia*, 19 Oktober 2602.

Dalam masa pendudukan Jepang pulalah, dualisme pemerintahan yang berlaku saat pemerintahan Gemeente Surabaya dihapus karena kewenangan di bidang kepamongprajaan maupun bidang otonomi berada pada satu tangan, yakni Shi-Tyo dengan pembantunya.<sup>25</sup> Namun, kehadiran Jepang—dengan propagandanya yang terkenal sebagai Gerakan Tiga A—yang semula mendapat simpati masyarakat lambat tapi pasti berubah menjadi kebencian. Perlindungan yang semula diharapkan justru berbuah penderitaan dan kesengsaraan. Ruslan Abdulgani (salah satu tokoh pemuda saat itu) menggambarkan penderitaan itu, sebagai berikut.

<sup>25</sup> Lebih jauh baca: *Surabaya dalam Lintasan Pembangunan* (Surabaya: Sub Bagian Humas & Protokol Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya, 1980), hlm. 25.

“Zaman Jepang adalah zaman penderitaan bagi rakyat kita, lahiriyah dan batiniyah. Lahiriya, karena adanya paksaan di bidang pencakupan romusha, di bidang pengumpulan padi, bambu, jagung, jarak, dan sebagainya. Batiniyah, karena adanya tekanan-tekanan oleh Barisan Propagandanya dan sebagainya. Dan di atas itu semua militerisme Jepang mempunyai Kompetainya, yaitu Polisi Militernya dan Intelnya .... Setiap malam orang yang melalui Gedung Kemptei mendengar anjing-anjing galak menggonggong dan menyerang para tahanan; diselingi dengan teriakan dan rintihan mereka yang disiksa. Setiap hari pula kita melihat di tempat-tempat tertentu ratusan rakyat kita yang sudah jadi jembel dan kere berebutan di sekitar tempat sampah restoran-restoran, sedangkan hampir setiap hari di pinggir-pinggir jalan terdapat mayat rakyat kita mati kelaparan.” (Abdulgani, 1975: 7).

Di bawah institusi Kemptai<sup>26</sup>-nya, Jepang melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh Surabaya yang dicurigai. Tokoh-tokoh seperti Pamudji, A. Rachum Sukajat meninggal di bawah penyiksaan kemptai, sedangkan Doel Arnowo dijebloskan ke penjara selama setahun lebih (Abdulgani, 1975: 7). Sikap keras dan kekejaman Jepang di satu sisi memang menimbulkan ketakutan dan kengerian di tengah rakyat. Akan tetapi, di sisi lain membangkitkan semangat arek-arek Suroboyo untuk melakukan perlawanan. Namun, kekejaman Jepang di satu pihak dan ketakutan masyarakat di pihak lain tidak berlangsung lama. Jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus yang menyebabkan bertekuk lututnya Jepang. Pada 15 Agustus 1945 Jepang mengakhiri kekuasaan di Indonesia dan juga di kota ini. Tentara Jepang yang berada di Kota Surabaya sangat terpukul atas kekalahannya dengan tentara sekutu. Reaksi mereka digambarkan dengan baik oleh seorang penulis dalam majalah *Gapura*. Ketika Jepang berkuasa, penulis yang memakai inisial S.B. tersebut adalah murid di Sekolah Mohan Kokumin Gakko di Cannalan (sekarang SDN Kusumabangsa). Berikut kisahnya:

“Pada tanggal 15 Agustus 1945, sejak pagi di sekolah, kami sudah dengar kasak-kusuk bahwa Jepang menyerah kepada tentara Sekutu. Sejak pagi

---

<sup>26</sup> Lokasi Kemptei saat ini ditempati oleh Tugu Pahlawan. Pada masa kolonial di lokasi ini berdiri gedung *Raad van Justitie* (Kantor Pengadilan Tinggi) Surabaya.

hari tidak ada siaran radio. Pada sore harinya waktu kami mengadakan latihan baris-berbaris, banyak terdapat orang Jepang yang mestinya juga latihan di lapangan itu, hanya duduk-duduk saja. Mereka tidak bersemangat seperti hari-hari biasanya. Mereka bahkan melihat kami berbaris dengan mata nanar. Hari itu kami mendapat pemimpin baru untuk baris-berbaris, yaitu seorang senior yang telah lulus penataran Kaibodan. Kemudian hari kami maklum mengapa orang-orang Jepang itu terbungong-memangdangi kami berbaris secara semangat, sebab kami justru sedang bergairah mendapat pimpinan baru, berbaris pakai aba-aba bahasa Jepang: “Kios-keee!! Migimokeee-migii!! Rei!! Naure!! Wakare!”

Berita tentang takluknya Jepang lebih santer terdengar dan waktu pulang dari berbaris, lampu di rumah sudah tidak terselubung lagi! Cahayanya sudah terang-benderang. Aku berteriak kegirangan. Sekalipun waktu itu belum tahu apa arti Jepang takluk, tetapi tiba-tiba terasa bahwa hidup di zaman penjajahan Jepang, terasa tertekan.<sup>27</sup>

#### **D. BERTIUPNYA ANGIN KEBEBASAN: SURABAYA PASCA-PROKLAMASI KEMERDEKAAN**

Pada 17 Agustus 1945, fajar kemerdekaan telah menyingsing di ufuk timur dari seluruh pelosok negeri. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta di Jakarta, walaupun terlambat, segera menyebar di Kota Surabaya. Masyarakat Surabaya mendengar berita proklamasi tersebut melalui radio Jepang Hosokyoku. Walaupun dihalang-halangi oleh kempetai, berita proklamasi dapat diselundupkan oleh pemuda-pemuda yang tergabung dalam “Gerakan Pemuda Kantor”, pada malam harinya dalam siaran berbahasa Madura. Pada sore harinya, dalam ruangan Pancaran Sastra, dibacakan tulisan R. Sukarjo Wiryopranoto dalam harian *Suara Asia* yang berjudul “Pro Patria” dan berisi nasihat tentang hal-hal yang harus dilakukan tiap putra Indonesia terhadap negara dan tanah airnya sesudah merdeka (Sudarno, 1993: 64 dan Abdulgani, 1975: 10). Untuk mendapatkan sedikit suasana pasca-proklamasi

<sup>27</sup> Tentang hal ini, lihat: “Sekelumit Kenangan: Surabaya Tiga Puluh Tahun yang Lalu”, dalam *Gapura* (5) 1975, hlm. 6.

kemerdekaan di Kota Surabaya, berikut pengalaman seorang penulis berinisial S.B. dalam majalah *Gapura*. Inilah kisahnya:

“Setelah peristiwa itu suasana mereka segera terasa di kota Surabaya. Terutama warna merah-putih tersebar di mana-mana. Saya ingat mendapat tugas dari sekolah untuk menempelkan bendera kertas merah-putih dengan tulisan hitam: Milik Republik Indonesia. Dan dengan keberanian tanpa pikir panjang, aku dengan beberapa orang teman membawa kertas dan lem masuk ke gedung-gedung yang dulu dipakai Jepang, menempelkan kertas merah-putih itu. Tempat-tempat yang dulunya angker karena dilarang masuk oleh Jepang, kami masuki begitu saja. Kebanyakan telah dikosongkan atau sebenarnya memang lama kosong. Juga mobil-mobil yang masih dipakai orang Jepang, kami tahan dan kacanya kami tempeli, sekalipun mobil yang pakai bendera biru, hijau ataupun kuning (tanda di dalamnya ada perwira-perwira tinggi Jepang). Setelah kami tempel, mobil boleh melanjutkan perjalanan.

Perubahan suasana dari penjajahan Jepang menjadi merdeka segera terasa. Terutama sinar lampu yang bebas. Radio yang pada zaman Jepang dibatasi penerimaannya (hanya bisa menangkap siaran lokal Surabaya *Hoshookyoku*), dirusak segelnya sehingga siaran luar negeri pun bisa kami tangkap. Kakakku yang pandai memperbaiki radio, segera memasang radio bebasnya dengan musik-musik Barat.” (“Sekelumit Kenangan” 1975: 7).

Seperti lazimnya pergantian kekuasaan, maka pejabat pemerintah kota juga turut berubah. Rajamin Nasution Gelar Sutan Kumala Pontas yang pada masa pendudukan Jepang menjadi wakil wali kota, kini menjadi penguasa kota. Akan tetapi, kedatangan sekutu yang “mengobrak-abrik” kota ini membuat penduduk dan walikota serta pejabat-pejabat pemerintahan lainnya mengungsi ke Mojokerto. Sementara itu, pemerintahan kota dikuasai oleh tentara sekutu yang dikenal dengan Allied Military Administration Civil Affairs Branch (AMACAB). Untuk menangani penduduk yang masih tinggal di kota, maka dibentuklah “Sektor” sebagai pengganti *Ku* di zaman Jepang (*Wijk* di masa pemerintahan *Gemeente* Soerabaja), yang merupakan organ pemerintah terendah. Selanjutnya, penguasaan pemerintahan Kota Surabaya diserahkan dari AMACAB ke RECOMBA (*Regerings*

*Commissaris Bestuurs Aangelenheden*) Jawa Timur (*Surabaya dalam Lintasan ...* 1980: 27).

Ketika tentara sekutu meninggalkan Kota Surabaya, maka pemerintahan dikuasai kembali oleh tentara kolonial Belanda. Dengan demikian, dibentuklah Pemerintahan Sementara (*Hoofd Tijdelijk Bestuur*) dengan C.J.C. Becht sebagai Kepala Urusan Haminte (*Kantoor voor Bevolkings Zaken*). Selain itu, Becht mengajak organisasi yang ada di Kota Surabaya untuk menyusun Dewan Perwakilan Sementara Kota Besar Surabaya. Mr. Indrakoesoema diangkat sebagai wali kota yang kemudian digantikan oleh Mr. Soerjadi. Setelah pengakuan kedaulatan pada akhir Desember 1949, pemerintahan kota mengalami perubahan. Doel Arnowo yang masuk kembali ke Kota Surabaya diangkat sebagai wali kota (1950–1952)<sup>28</sup>.

Pada 14 Agustus 1950, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar. Undang-undang tersebut memberi kewenangan pada kota-kota besar untuk mengatur rumah tangga daerah sebagaimana disebutkan dalam pasal 4, baik urusan pembantuan maupun 14 urusan daerah. Dengan merujuk pada undang-undang itu, Kota Besar Surabaya dibagi menjadi 36 lingkungan yang ketentuan daerah administrasinya sebagai instansi pemerintahan baru ditetapkan pada tanggal 5 April 1954 dengan Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 30/DPRDS. Kemudian jumlah lingkungan menjadi 38, dan dengan UU No. 2 Tahun 1965 daerah Kota Besar Surabaya ditambah dengan 5 Kecamatan yang meliputi 103 desa. Kelima kecamatan tersebut semula merupakan daerah Kabupaten Surabaya.<sup>29</sup> Bersamaan dengan itu, ditetapkan pula Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 yang

---

<sup>28</sup> Doel Arnowo merupakan wali kota pertama pasca Penyerahan Kedaulatan. Agak mengherankan, wali kota yang sangat dicintai oleh rakyat Surabaya ini hanya bertugas selama 2 tahun dan namanya tidak diabadikan di tempat-tempat tertentu seperti beberapa wali kota lainnya. 'Kotapradja Diliputi Suasana Terharu. Selamat Djalan, Tjak Doel.' Dalam *Perdamaian*, 28 Djanuari 1952.

<sup>29</sup> "Sekali Lagi Tentang: 31 Mei, Hari Jadi Kota Surabaya", dalam *Gapura*, No. 3/VIII/Mei 1975, hlm. 9.

mengatur pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRDS). Untuk Kota Besar Surabaya, pembentukan DPRDS-nya dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 1950 dengan anggota sebanyak 25 orang yang kemudian ditambah menjadi 35 orang. Dengan undang-undang itu pula, sebutan Kota Surabaya berubah menjadi Kota Besar Surabaya.<sup>30</sup> Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1956, DPRD peralihan Kota Besar Surabaya dibentuk dan mengakhiri masa jabatannya bulan Mei 1958, yaitu bersamaan dengan terbentuknya DPRD sebagai Badan Perwakilan yang dipilih oleh rakyat, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Juncto Undang-undang No. 19/1958 tentang Pemilihan Anggota DPRD (*Sekali Lagi ...* 1975: 28). Seiring dengan semakin tertatanya pemerintahan, kota ini kemudian menjadi magnet bagi masyarakat yang berasal dari desa. Kondisi ini menyebabkan Surabaya menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rakyat dan pemakaian tanah secara liar. Pada tahun 1955, jumlah penduduk yang bermukim di Kota Surabaya mencapai telah 935.688 jiwa yang berarti mengalami kenaikan hampir tiga kali lipat dari tahun 1940 (*"Sekali Lagi..."*, 1975: 28).[]

---

<sup>30</sup> Lihat: *"Sekali lagi..."*, (1975:28). Keterangan lebih jauh tentang pembentukan DPRD ini, baca Sarkawi B. Husain, "Posisi dan Peran Perempuan dalam Parlemen di Jawa Timur", dalam A. B. Lopian, dkk., (Ed.), *Sejarah dan Dialog Peradaban: Persembahan 70 Tahun Prof. Dr. Tanfik Abdullah* (Jakarta: Obor-LIPI, 2005), hlm. 563–580.

## MEREKA TIDAK BISU: MAKNA DAN PEREBUTAN SIMBOL MONUMEN, PATUNG, DAN TUGU

### A. MONUMEN, TUGU, DAN PATUNG SEBAGAI TANDA

“Anasionalis, Patung Raffles Harus Dirobuhkan”, “Lupakan Predikat Kota Pahlawan: Patung Penjajah Bertebaran di Surabaya” (“Anasionalis ...”, 2004: 20; “Lupakan ...” 2004: 9)

Kalimat di atas adalah *headline* dua tabloid yang terbit di Surabaya berkaitan dengan dijadikannya patung Raffles sebagai *landmark* kawasan Citra Raya. Bagi masyarakat Surabaya, keberadaan perumahan mewah yang terletak di Surabaya Barat dan berslogan *Citra Raya, The Singapore of Surabaya* tersebut sesungguhnya tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi, ketika pengembangnya menjadikan patung Raffles sebagai *landmark*-nya, maka protes dari berbagai kalangan pun tidak terhindarkan. Berikut beberapa protes masyarakat yang disampaikan lewat media cetak.

“Mungkin Raffles adalah pahlawan di Singapura, namun di Indonesia Raffles adalah seorang kapitalis yang menjajah bangsa kita. Kalau mengaku mempunyai jiwa kebangsaan mengapa tidak memilih ikon-ikon nasional saja untuk dibuat patungnya di Citra Raya” (Anasionalis ... 2004: 20).

“... Coba patung Raffles itu berdiri di depan kantor Pusura (Putra Surabaya) sini, *wis tak teplok celetong kit bijen* (sejak dulu saya lempari tahi sapi)” (Lupakan ... 2004: 9).

“Citra Raya dan Yakobus sudah harus dikatakan sebagai anasionalis dengan pemasangan Raffles di Kota Pahlawan. Saya mendukung bila ada gerakan untuk merobuhkan patung penjajah di Citra Raya” (Anasionalis ... 2004: 20).

Dewan Harian Cabang (DHC) Angkatan '45, Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Jawa Timur dan Tim Cagar Budaya Kota Surabaya adalah tiga lembaga yang getol menyampaikan protes atas patung Raffles lewat jumpa pers bersama. Bagi sebagian masyarakat Surabaya, kehadiran patung Raffles sebagai salah seorang mantan gubernur jenderal Hindia Belanda seolah membuka kembali “luka” lama akibat penjajahan, sehingga ingatan terhadapnya tidak boleh dihadirkan kembali. Sementara itu, pihak Citra Raya yang diwakili oleh direktur utamanya (Sutoto Yakobus) justru tidak menganggap Raffles sebagai penjajah, sebaliknya menganggap sebagai ilmuwan yang banyak memberi kontribusi di bidang ilmu botani, yang namanya dipakai sebagai nama latin bunga bangkai yang ditemukannya (“Lupakan ...” 2004:9).

Kontroversi atas pendirian sebuah patung, monumen atau tugu sesungguhnya tidak hanya terjadi dengan kasus patung Raffles. Pendirian monumen Husni pada masa kolonial misalnya, juga menuai protes. Demikian pula dengan pendirian tugu pahlawan pada tahun 1952 dan rencana pendirian monumen W.R. Soepratman pada tahun 1950-an. Oleh karena itu, merujuk pada kasus di atas, keberadaan sebuah patung, monumen atau tugu menarik untuk menjadi titik tolak analisis, karena mereka merupakan objek yang semata-mata dibangun untuk kepentingan simbolik (Colombijn, 2004). Kehadiran sebuah patung bukanlah sesuatu yang tidak disengaja, melainkan dicipta, direvisi, bahkan diganti. Dengan demikian, sebagai sebuah produk kebudayaan, melihat atau memaknai sebuah patung, tugu, atau monumen memiliki konsekuensi teoretis yang mengharuskan kita memperlakukannya sebagai “tanda” (*sign*). Tentunya, tanda bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi pasti sangat berhubungan dengan yang ditandai (*signifier*).

Lalu apa yang menentukan sehingga sesuatu dapat disebut sebagai tanda? Menurut Aart van Zoest, paling tidak ada tiga unsur yang menentukan tanda, yakni 1) tanda yang dapat ditangkap itu sendiri, 2) yang ditunjuknya, dan 3) tanda baru dalam benak si penerima

tanda. Dengan kata lain, antara tanda dan yang ditunjuknya terdapat relasi: tanda mempunyai sifat representatif. Tanda dan representasi kemudian mengarahkan pada interpretasi (Zoest 1993: 14–15). Bertitik tolak dari pandangan Zoest, tulisan ini akan memperlakukan monumen, patung, dan tugu sebagai sebuah tanda. Persoalan yang akan dilihat adalah bagaimana penandaan dapat menunjukkan proses representasi sebuah kekuasaan dan bagaimana kekuasaan baru memperlakukan tanda yang sebelumnya sudah ada. Baik proses representasi terhadap tanda yang sudah ada maupun penciptaan kembali sebuah tanda baru dapat dikatakan selalu beraroma politis.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah monumen, patung, dan tugu memiliki pengertian yang berbeda. Monumen adalah bangunan atau tempat yang mempunyai nilai sejarah yang penting dan karena itu harus dipelihara dan dilindungi oleh negara. Patung adalah tiruan bentuk orang, hewan, dan sebagainya yang dibuat dari batu, kayu, dan sebagainya, sedangkan tugu adalah tiang besar dan tinggi yang dibuat dari batu, bata, dan lain-lain (Alwi, 2001). Untuk kepentingan analisis, tulisan ini akan mengacu pada perbedaan pengertian tersebut. Pada masa kolonial, terdapat tiga istilah yang sering digunakan, yaitu *monument* (monumen) misalnya Bali-*monument*, *borstbeeld* (patung orang dari dada ke atas) misalnya *borstbeeld* van H.M. Koningin Wilhelmina, dan *buste* (patung dari dada ke atas) misalnya *buste* van Sir Thomas Stamford Raffles. Pada masa republik, istilah yang banyak digunakan adalah monumen (misalnya monumen W.R. Soepratman), tugu (misalnya tugu pahlawan), dan patung (misalnya patung Gubernur Suryo).

## **B. DARI MONUMEN BALI HINGGA PATUNG DADA WILHELMINA: MONUMEN DAN PATUNG PADA MASA KOLONIAL**

Selama rentang waktu kekuasaannya di Kota Surabaya, pemerintah kolonial Belanda mendirikan lebih kurang 14 monumen dan patung yang tersebar di berbagai kawasan. Sayang sekali, tidak satupun dari

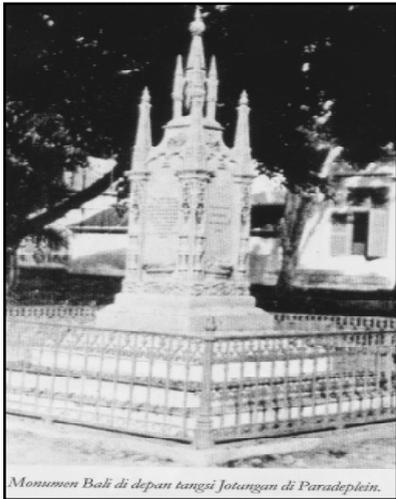
tugu dan monumen tersebut dapat kita saksikan hari ini. Berikut ini saya akan deskripsikan secara singkat beberapa monumen tersebut. Pada 4 September 1869, dilakukan pembukaan Monumen-Bali yang terletak di bekas tangsi Djotangan (sekarang di depan Polwiltabes, Jalan Sikatan). Monumen ini didirikan untuk memperingati kemenangan Belanda dalam perang di Bali (Gambar 3). Dalam perang yang berlangsung pada April 1849 ini, pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Michiels.<sup>31</sup>

Monumen terbuat dari besi tuangan yang berlantai marmer dan bentuknya sangat mirip dengan monumen Michiels yang didirikan di Padang, sebagai peringatan atas kemenangan Belanda dalam perang di Sumatra Barat yang juga dipimpin oleh Jenderal Michiels bersama Raaff (Colombijn, 1994: 345–346).

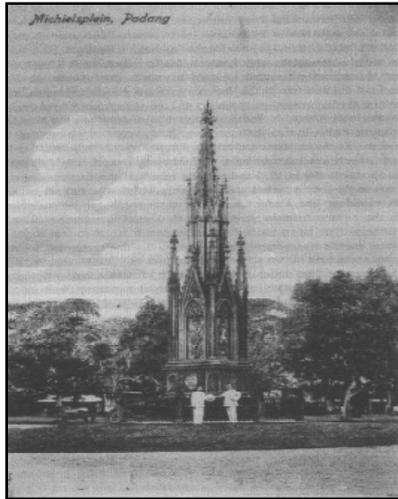
Kedua monumen tersebut (Gambar 3) merupakan ekspresi dominasi Belanda atas daerah-daerah di nusantara. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, seluruh daerah di nusantara (Maluku, Sulawesi Selatan, Sumatra Barat, Aceh, Jawa Tengah dan Timur, dan lain-lain) telah berhasil ditaklukkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa monumen Bali sebagai simbol kemenangan Belanda atas raja-raja Bali itu tidak didirikan di Bali, tetapi justru di Surabaya. Ada dua dugaan yang dapat diajukan untuk menjawab pertanyaan ini. *Pertama*, tujuan pemerintah kolonial Belanda memang tidak hendak menguasai Bali, tetapi hanya untuk menciptakan dasar hukum untuk menutup Bali dari kekuatan-kekuatan Barat lainnya. Untuk itu, monumen sebagai simbol kekuasaan mereka tidak perlu dihadirkan. *Kedua*, rasa kemerdekaan

---

<sup>31</sup> Perang ini diawali dengan diterapkannya hukum *tawan karang*, yaitu hak kerajaan-kerajaan di Bali untuk merampas perahu yang terdampar di pantai wilayah kekuasaannya. Hukum *tawan karang* ini telah menimpa kapal-kapal Belanda seperti yang dialami pada tahun 1841. Meskipun dalam tahun 1843 raja-raja Buleleng, Karangasem, dan beberapa raja lainnya telah menandatangani perjanjian penghapusan hukum ini, ternyata tidak pernah sungguh-sungguh dilaksanakan. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (Ed.), *Sejarah Nasional Indonesia IV* (Jakarta: Depdikbud-Balai Pustaka, 1992), hlm. 231.



Monumen Bali di depan tangki Jotangan di Paradeplein.



Sumber: Faber, 1931: 118; Colombijn, 1994: 346

**Gambar 3.** Monumen-Bali di Surabaya (kiri) dibandingkan dengan monumen Michiels di Padang (kanan)

orang-orang Bali sangat kuat sehingga kehadiran monumen sebagai simbol kemenangan pemerintah kolonial akan sangat menyinggung perasaannya dan akan menimbulkan perlawanan (Ricklefs, 1994: 203).

Monumen yang juga menarik dan pernah berdiri di kota ini adalah sebuah monumen yang diperuntukkan bagi G. von Bultzingslöwen. Pada salah satu sisi dari monumen yang terletak di persimpangan Pasar Besar–Gemblongan Baliwerti, terdapat gambar atau relief yang menggambarkan G. von Bultzingslöwen sedang menolong dan merawat seorang serdadu Belanda yang tewas dalam Perang Aceh. Atas pengabdiannya ini, G. von Bultzingslöwen mendapat penghargaan dari palang merah (*Ridder van het Roode Kruis*). Pada saat kembali di Surabaya tahun 1874, G. von Bultzingslöwen yang juga banyak menulis puisi dalam bahasa Belanda, Prancis, dan Jerman ini disambut dengan meriah (Faber, 1931: 124). Ini adalah satu dari dua monumen yang bertahan hingga tahun 1960-an.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sumber: *Soerabaja ...* 2004: 149

**Gambar 4.** Monumen G. von Bultzingslöwen yang terletak di Aloen-aloen Tjontong

Pembangunan sebuah monumen pada zaman kolonial bukanlah tanpa protes. Hal ini misalnya terjadi pada *Monumen Husni* yang didirikan di Darmo Plein. Pada papan marmer monumen terdapat tulisan:

“Untuk mengenang Achmad Dechawad Husni, lahir tanggal 5 September 1897, wafat tanggal 6 Juni 1911 karena kecelakaan pesawat udara di atas Ancol, Batavia, pada permulaan upaya penerbangan pertama antara Kota Batavia – Soerabaia”.

Bagi beberapa orang Belanda sendiri, pendirian monumen ini tidaklah pantas, apalagi ditempatkan di sebuah kawasan yang indah, yakni Darmo yang merupakan kawasan elite. Berikut ungkapan protes tersebut:

“Apakah tidak merupakan jeritan skandal bahwa di tempat umum yang terindah di seluruh kota dijadikan untuk pendirian monumen untuk mengenang seorang Turki yang hanya tinggal beberapa waktu di sini dan sama sekali tidak berbuat apa untuk kepentingan kota dan meninggal

dunia di kota lain. Banyak orang Belanda Tempo Doeloe yang sebetulnya lebih berhak untuk mendapat peringatan yang memadai. Sebagai pembandingan, monumen Van Goor-plein yang dibangun sangat sederhana untuk mengenang seorang tokoh (Van Goor. *pen.*) yang merancang pelabuhan dan kawasan Tanjung Perak. Nyata benar perbedaan pemberian penghargaan. Monumen Husni ini bisa berbicara. Monumen Husni selalu menimbulkan rasa ketidakpuasan masyarakat dalam wujud monumen batu.” (Faber, 1933: 22).

Kontroversi atas monumen ini tidak lantas membuatnya dihancurkan atau diganti dengan monumen lain. Sebaliknya, tetap bertahan setidaknya sampai akhir tahun 1960-an. Selain monumen untuk tokoh-tokoh politik, pada masa kolonial juga didirikan monumen untuk memperingati jasa seseorang dalam bidang-bidang tertentu, seperti *Monumen Rambaldo*. Monumen ini terletak di Taman Kroesepark (sekarang taman Aspari depan Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo). Pada dinding monumen terdapat tulisan yang berbunyi: “In memoriam A.E. Rambaldo letnan laut kelas 2. lahir di Rembang, 16 November 1879 yang mendapat kecelakaan dekat



Sumber: *Soerabaja...*, 2004: 192)

**Gambar 5.** Monumen Husni, 1922 yang kini di lokasinya telah berdiri Masjid Al-Falah

Blora pada tanggal 5 Agustus 1911 ketika dalam perjalanan udara dengan menggunakan balon “Batavia”. Rambaldo adalah seorang yang paling penting dan perintis perjalanan lewat udara. Antara tahun 1908–1911 diorganisasi sebuah perjalanan udara dengan menggunakan balon. Pada tahun 1910 didirikan perkumpulan N.V. Vereniging untuk perjalanan udara. Pendirian monumen ini adalah bentuk penghargaan dan ungkapan rasa terima kasih dari N.V. ini pada Rambaldo (Faber, 1933: 22). Nasib monumen ini sama dengan yang lainnya. Di lokasi tempatnya berdiri tidak ada jejak yang dapat meyakinkan kita pernah berdiri sebuah monumen. Dugaan saya monumen ini dihancurkan dan digantikan dengan patung Gubernur Suryo<sup>32</sup> yang saat ini berdiri di Taman Aspari (Depan Gedung Grahad).

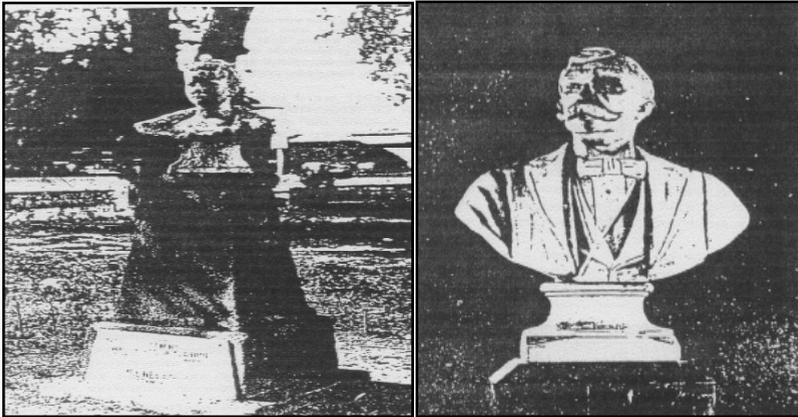
Selain monumen-monumen di atas, masih terdapat beberapa monumen untuk mengenang jasa orang-orang Belanda yang dianggap berjasa bagi negaranya. Misalnya monumen untuk mengenang E.B. van den Bosch sebagai penggagas *cultuurstelsel*, Monumen untuk Martinus van den Elzen (seorang pastor Gereja Katolik Roma yang dimakamkan di Peneleh), Monumen Mej. R. J. Almerood (Direksi pertama Meisjesschool), monumen untuk mayor P.P.C.Q. Ondaatje, dan lain-lain. Di samping mendirikan monumen, pada masa kolonial juga terdapat beberapa patung. Salah satu patung yang penting pada masa itu adalah *Patung Setengah Badan Ratu H.M. (Hare Majesteit) Koningin Wilhelmina*. Patung ini merupakan sumbangan dari Tuan J.A. Stroop kepada *Stadstuin*<sup>33</sup> Soerabaia (Taman Kota yang terletak

---

<sup>32</sup> R.T. Suryo adalah Gubernur Jawa Timur Periode 1945–1948. Sebelum menjadi gubernur, Suryo adalah Residen (*Syu Chokan*) Bojonegoro Sudarno, dkk., *Sejarah Pemerintahan Militer dan Peran Pamong Praja di Jawa Timur Selama Perjuangan Fisik 1945–1950* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 69–71.

<sup>33</sup> Sejak zaman kolonial hingga republik, *stadstuin* atau taman kota ini memiliki posisi yang penting. Pada tahun 1952, siapa yang seharusnya mengelola taman ini menjadi perdebatan serius dalam dewan. Lihat ‘Sidang DPRDS ‘sidang DPRDS kota besar Surabaya: Sedjarah ‘Stadstuin’ diachiri. DPD tak berdaja mengahadapi modal raksasa?’ Dalam *Perdamaian*, 27 Februari 1952; ‘Stadstuin boleh dioper tapi...’ Dalam *Djawa Post*,

di depan Kantor Pos Besar) untuk memperingati penobatan H. M. Wilhelmina sebagai ratu pada September 1898 (Faber, 1933: 22).



Sumber: Faber, 1931: 367 & 161

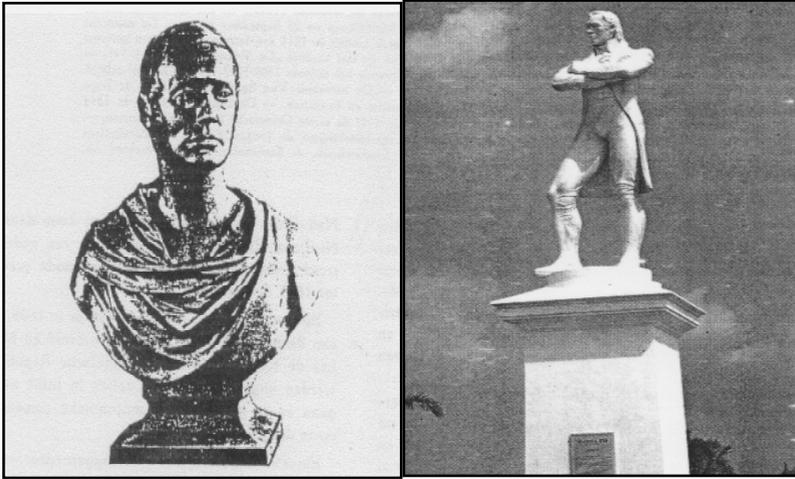
**Gambar 6.** Patung Setengah Badan Ratu H.M. (Hare Majesteit) Koningin Wilhelmina (kiri) dan Patung Ohannes Kurkdjian (kanan)

Tidak ada keterangan yang saya temukan kemana patung yang cukup indah ini sekarang berada. Akan tetapi, sangat mungkin patung ini dibongkar pada zaman Jepang mengingat di lokasi yang sama terdapat gedung Kempetai yang sebelumnya merupakan gedung Raad van Justitie. Saat ini di lokasi tersebut sudah berdiri gedung Bank Indonesia, sebuah simbol yang dalam klasifikasi Colombijn termasuk dalam domain modern. Selain patung dada Ratu Wilhelmina, terdapat juga patung dada dari G. F. A. Galati dan patung Sir Thomas Stamford Raffles. Dengan berakhirnya kekuasaan Belanda, maka satu per satu monumen dan patung ini juga menghilang, baik yang dirobuhkan begitu saja maupun yang diganti dengan simbol baru yang lebih berbau Indonesia.

---

29 Februari 1952; Sidang DPRDS perdjandjian dengan Stadstuin tidak diperpanjang' Dalam *Djawa Post*, 27 Februari 1952; "Sidang DPRDS jad.: Stadstuin diganti Taman Krida-Budaya", dalam *Djawa Pos*, 27 Maret 1952.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sumber: Faber, 1931: 310; *Sapujagat*, no. 59, tahun V, 1–15 Juli 2004, hlm. 9

**Gambar 7.** Patung Raffles yang berdiri pada zaman kolonial (kiri) dan Patung Raffles yang didirikan pada tahun 2004 dan mendapat protes banyak pihak di Kota Surabaya (kanan)

### **C. REVISI, DESTRUKSI, DAN BANGUNAN YANG BARU: MONUMEN, TUGU, DAN PATUNG DI ERA JEPANG DAN REPUBLIK**

Untuk menghilangkan pengaruh dan jejak penguasa sebelumnya, pemerintah pendudukan Jepang melakukan banyak penghancuran terhadap monumen, patung, atau tugu yang didirikan oleh Belanda. Namun demikian, sepanjang pengetahuan dan penelusuran sumber yang dilakukan, saya tidak menemukan satu pun tugu atau monumen yang didirikan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Kehadirannya yang sangat singkat (hanya lebih kurang empat puluh bulan, dari Maret 1942 hingga Agustus 1945) hanya membawa perubahan pada beberapa aspek sosial, politik, dan pemerintahan. Upaya untuk mendirikan monumen, patung, atau tugu sebagai tanda bagi kehadirannya di kota ini tidak sempat dilakukan. Namun, sebagai penanda banyaknya orang Jepang dan hubungan dagang dengan mereka,

dalam momen-momen tertentu (seperti peringatan ulang tahun ratu Belanda) didirikan sebuah “gapura Jepang” yang diletakkan di depan jembatan kantor wali kota. Pendirian ”gapura Jepang” inilah saya kira menyebabkan mereka yang hidup pada zaman tersebut hingga kini menyebut jembatan tersebut sebagai jembatan Jepang<sup>34</sup>.

Menurut data yang ada, hanya terdapat dua “monumen kolonial” yang bertahan setelah kemerdekaan hingga tahun 1960-an, yakni Monumen Husni yang terletak di Darmo-Plein (Taman Mayangkara) dan Monumen G. Bultzingslöwen yang terletak di Alun-alun Tjontong. Kedua monumen ini menarik tidak hanya karena dapat bertahan hingga tahun 1960-an, tetapi juga bangunan simbolik yang kemudian menjadi penggantinya memiliki persoalan tersendiri.

Bertahannya monumen Husni hingga tahun 1960-an dapat dipahami mengingat perwujudan dan maknanya tidak merujuk kepada kolonial. Sebaliknya bagi orang Surabaya, Achmad Dechawad Husni memiliki kedekatan ideologis, yakni Islam mengingat dari nama dan asal beliau adalah Turki. Akan tetapi, walaupun terdapat kedekatan ideologis, tidak berarti monumen ini dapat terus bertahan.

Pada akhir tahun 1960-an, monumen ini mengalami nasib yang serupa dengan monumen-monumen lain, yakni dirobuhkan dan diganti dengan simbol religi berupa pembangunan rumah ibadah. Pembongkaran ini dilakukan karena di lokasi berdirinya (Taman Mayangkara) akan dibangun Masjid Al-Falah. Izin penggunaan lokasinya dikeluarkan oleh Wali Kota Madya Surabaya, Soekotjo dengan surat No. 7804/88 tanggal 9 Mei 1969<sup>35</sup>. Selain itu, pembangunan Masjid Al-Falah menarik untuk dilihat lebih jauh dengan dua pertimbangan, *pertama*, ide awal lokasi pendirian masjid ini adalah di depan kantor wali kota, tepatnya di persil yang sekarang tempat berdirinya Gereja Maranatha (Jalan Yos Sudarso dahulu Jalan

---

<sup>34</sup> Menurut keterangan beberapa responden yang penulis wawancarai, gapura ini sudah berdiri jauh sebelum Jepang menduduki Kota Surabaya.

<sup>35</sup> Lihat: *Kenangan Masjid Al-Falah* (Surabaya: Yayasan Masjid Al-Falah, 1997), hlm. 12.



Sumber: Kwanda, 2004

**Gambar 8.** Gapura Jepang yang didirikan di sebuah jembatan menuju kantor wali kota.

Sindhunegara), akan tetapi tidak mendapat persetujuan<sup>36</sup>. *Kedua*, tokoh-tokoh penting yang berperan dalam proses pendiriannya adalah berlatar belakang militer, misalnya Kol. KKO Mohammad Anwar, Letjen H. Sudirman, Letjen Moh. Yasin (saat itu Pangdam VIII/Brawijaya). Apakah ini merupakan cermin dominasi militer dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat mengingat baru saja terjadi peristiwa G 30 S yang menyebabkan berkuasanya militer dalam panggung politik Indonesia? Berbeda dengan monumen Husni yang dirobohkan pada akhir tahun 1960-an, proses penghancuran terhadap monumen G. Bultzingslöwen tidak diketahui dengan

---

<sup>36</sup> Zein M Wiryoprawiro, *Perkembangan Arsitektur Masjid di Jawa Timur* (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hlm. 289. Masjid Al-Falah adalah satu dari dua masjid penting yang dibangun setelah kemerdekaan. Keterangan lebih jauh tentang proses pembangunan masjid ini dapat dilihat pada domain religi. Masjid lainnya adalah Masjid Mujahidin yang terletak di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak.

jelas. Akan tetapi, pada saat Moerachman, S.H.<sup>37</sup> menjadi Wali Kota Surabaya (1964–1965), monumen ini akan dirobohkan dan akan diganti dengan tugu petani. Alasan rencana pembongkaran yang dikemukakan dalam sambutan resepsi peringatan Hari Wanita Internasional ini adalah penghargaan terhadap para petani. Lebih jauh Wali Kota Moerachman mengatakan:

“...kita yang berada di kota ini sekali2 tidak boleh melupakan jasa2 para petani kita. Barang2 jg kita makan sehari2 adalah hasil dari pak tani. Oleh karenanja setiap waktu kitapun harus mengingatkan akan hasil jerih pajahnja. Untuk itu maka baiklah kalau tugu kolonial jang terletak di alun2 Tjontong jang hingga kini masih tegak berdiri diganti dengan tugu petani. Bentuk dari petani tersebut akan diwujudkan sebagai pak Sakerah dengan tjelana pandjang dan sarung dibebankan. Ujud tersebut kecuali juga kita mengingatkan diri tjerita2 Pak Sakerah jang berjuang melawan Belanda, djuga ujud dari pakaian itu jang sering kita jumpai pada petani2 di Madura”<sup>38</sup>.

Dari sejumlah wawancara dan penelusuran sumber tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa ide Moerachman mengganti tugu ini menjadi tugu Pak Sakerah sempat terwujud. Menurut hemat saya, hal ini paling tidak disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, setahun

---

<sup>37</sup> Moerachman lahir pada 25 November 1929 di Bentjuluk Banjuwangi dan menamatkan pendidikannya pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 4 Oktober 1961 dan tiga tahun kemudian terpilih menjadi wali kota dengan dukungan PKI. Sebelum menjadi wali kota, Moerachman telah memiliki banyak pengalaman, antara lain: 1) Polisi Militer tahun 1946, 2) Komandan Bataljon 400 Tentara Pelajar di Besuki (1946/1947), 3) Komandan Operasi di Sektor TRIP daerah Gunung Argopuro dan Komandan Operasi Sektor III/qa Kes. Co. Kawi Selatan (clash I dan II), dan 4) Aktif dalam organisasi pe-lajar/mahasiswa (1950/1953), 5) Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universiteit Negeri Gadjah Mada Tjabang Hukum di Surabaya, 6) Sekretaris I Dewan Mahasiswa Universiteit Airlangga (1955/1956). Selain pengalaman kerja tersebut, Moerachman pernah menjadi anggota delegasi Indonesia pada Konferensi Mahasiswa Asia-Afrika (KMAA.) dan menjadi anggota DPRDP Propinsi Jawa Timur atas pencalonan PKI. Di DPRDP, Moerachman tergabung dalam Fraksi Progressief. Parlinah Moedjono, dkk. (peny.), *20 Tahun Universitas Airlangga 10 November 1954–1974* (Surabaya: Unair, 1975), hlm. 168; *Gema Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Provinsi Djawa-Timur* (Surabaya: DPRDP, 1958), hlm. 75.

<sup>38</sup> “Tugu Pak Sakerah”, dalam *Surabaya Post* 11 Maret 1964.

setelah Moerachman menyampaikan gagasannya meletus peristiwa G 30 S. Peristiwa ini menyebabkan terhentinya berbagai program pembangunan, termasuk pendirian bangunan simbolik. *Kedua*, berkaitan dengan pemberhentiannya sebagai Wali Kota Surabaya (AKS, box 1227, no. 25813). Oleh karena itu, kalau kita jalan-jalan ke alun-alun Tjontong yang kita temukan saat ini adalah patung perjuangan, bukan patung Pak Sakerah.

Walaupun ide ini tidak sempat terwujud, tetap menarik diajukan pertanyaan mengapa wali kota (Moerachman) hendak mengganti tugu kolonial ini dengan tugu pak tani (Pak Sakerah), bukan tugu atau patung perjuangan? Dengan menelusuri latar belakang historis, politis, dan ideologis Moerachman, maka ide tersebut dapat dipahami. Keterangan yang ada menyebutkan walaupun beliau bukan PKI, tetapi memiliki hubungan yang dekat dengan partai yang pada Pemilu 1955 ini memperoleh suara terbanyak di Kota Surabaya.<sup>39</sup>

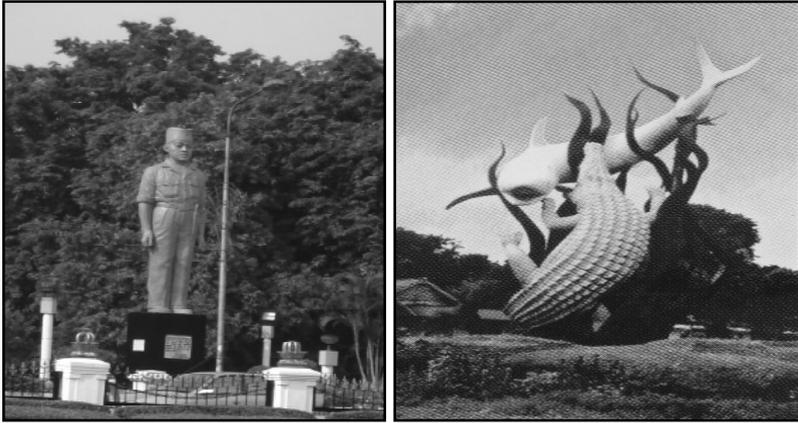
Dari latar belakang tersebut, dapat ditarik hipotesis bahwa tujuan penggantian tugu kolonial menjadi tugu pak tani (Pak Sakerah) sesungguhnya merupakan gambaran perjuangan dari PKI yang membela kaum buruh dan tani. Dalam banyak literatur disebutkan bahwa petani selalu diharapkan menjadi sumber kekuatan politik oleh PKI.<sup>40</sup> Dalam lima dokumen penting politbiro CC PKI, kekuatan petani dan buruh masih sangat diharapkan sebagai mesin politik untuk memenangkan cita-cita perjuangan PKI seperti yang terlihat dalam salah satu kutipan berikut ini:

“... perjuangan parlementer sadja tidaklah tjukup untuk mentjapai tudjuan membentuk suatu pemerintah Demokrasi Rakjat” dan bahwa “Djalan keluar terletak dalam mengubah imbangn kekuatan antara kaum

---

<sup>39</sup> Dari jumlah pemilih sebesar 367.799 orang dalam pemilihan umum DPR 1955 di Kota Surabaya, partai politik memperoleh suara sebagai berikut: PNI 46.282; GPP 1.518; Masjumi 17.727; NU 61.544; **PKI 129.449**; Parkindo 7.766; PSII 3.080; dan Barisan Kesadaran Rakyat 26. Alfian, *Hasil Pemilu Tahun 1955 untuk DPR*. (Jakarta: Leknas, 1971), hlm. 90–91.

<sup>40</sup> Untuk analisis kedekatan PKI dengan petani, baca Arbi Sanit, *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).



Keterangan: Gambar kiri adalah Patung Gubernur Suryo yang terletak di depan Gedung Negara Graha di dan kanan adalah patung lambang Kota Surabaya

**Gambar 9.** Dua dari puluhan patung yang didirikan pemerintah pasca kemerdekaan

imperialis, kelas tuan tanah dan burjuasi komprador di satu pihak, dan kekuatan Rakyat di pihak lain. Jalan keluar terletak dalam membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa, terutama kaum **buruh** dan **tani**”<sup>41</sup>.

Beberapa tahun setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, kota-kota di Indonesia (termasuk Surabaya) seolah berlomba untuk mendirikan monumen, tugu, dan patung sebagai tanda penghargaan atas jasa para pahlawan yang telah gugur dalam banyak pertempuran. Dengan demikian, di beberapa lokasi pertempuran melawan pemerintah kolonial dapat disaksikan monumen, tugu, dan patung, yang berdiri megah.

<sup>41</sup> *Tegakkan PKI yang Marxis-Leninis untuk Memimpin Revolusi Demokrasi Rakyat Indonesia. Lima Dokumen Penting Politbiro CC PKI.* (S.l: Delegasi CC PKI, 1971), hlm. 244.

# 1. Monumen W. R. Soepratman: Impian yang Tidak Pernah Terwujud

Indones, Indones, Merdeka, Merdeka  
Tanahku, negeriku, jang kutjinta  
Indones, Indones, Merdeka, Merdeka  
Hiduplah Indonesia Raya  
(W.R. Soepratman)<sup>42</sup>

Bait-bait di atas adalah *refrein* dari lagu Indonesia Raya yang ditulis oleh W. R. Soepratman yang kemudian menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda Indonesia II (26-29 Oktober 1928 di Jakarta). Dalam suasana tumbuh suburnya pergerakan nasional, lagu ini dengan cepat menyebar ke seluruh nusantara. Kepopulerannya semakin bertambah ketika direkam dalam piringan hitam oleh Firma Tio Tek Hong dan disebarakan ke berbagai daerah. Dalam pandangan pemerintah kolonial Belanda, lagu ini dianggap sebagai hal yang membahayakan kepentingan penjajahan sehingga dilarang untuk menyanyikannya. Larangan ini memicu protes dari berbagai kalangan terutama politisi

---

<sup>42</sup> Wage Rudolf Soepratman lahir di Djatinegara, 9 Maret 1903. Wage adalah penanda kalau dia dilahirkan pada hari pasaran Wage, sedangkan Rudolf diberikan oleh kakak iparnya, W. M. van Eldik. Nama itu ditambahkan sebagai strategi agar Soepratman diterima di sekolah Belanda. Pada tahun 1914, Soepratman dibawa oleh kakak iparnya ke Makassar & disekolahkan di ELS. Akan tetapi, Soepratman dikeluarkan karena bukan anak kandung van Eldik, kemudian dia sekolah di sekolah Melayu. Sepulang dari sekolah, belajar gitar dan biola dari kakak iparnya yang menguasai berbagai macam instrumen musik. Setelah tamat sekolah Melayu pada tahun 1917, Soepratman kursus bahasa Belanda & pada tahun 1919 lulus ujian Klein Ambtenaar Examen. Kemampuan bahasa Belanda inilah yang memungkinkan Soepratman dapat bersekolah di Normaal School. Setelah lulus, diangkat menjadi guru di Makassar selain tetap menekuni bakat musiknya. Pada tahun 1920, dia mendirikan Jazz Band “Black and White”. Setelah ± 10 tahun di Makassar, pada tahun 1924 dia memutuskan pindah ke Jawa. Pada tahun 1926, Soepratman bekerja sebagai wartawan “Sin Po” & rajin mengunjungi berbagai rapat partai politik yang diadakan di Gedung Pertemuan di Jalan Kenari Jakarta. Aktivitas inilah yang mendorong Soepratman untuk “menceburkan” diri dalam kegiatan politik yang kemudian menginspirasi penciptaan lagu Indonesia Raya. Oerip Kasansengari, *Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan W. R. Soepratman Pentjijntanja* (Surabaya: Grafika Karya, 1967), hlm. 64.

seperti M. H. Thamrin—yang ketika itu sebagai anggota Dewan Rakyat (*Volkstraad*). Akibat berbagai protes tersebut, pemerintah Hindia Belanda kemudian menyatakan tidak keberatan jika lagu itu dinyanyikan dengan syarat kalimat '*Indones, Indones, Merdeka, Merdeka*' tidak boleh dicantumkan. Oleh W. R. Soepratman kalimat tersebut diganti menjadi '*Indonesia Raya, mulia, mulia/Tanahku, Negeriku jang kutjinta*' (Kasansengari, 1967: 64).<sup>43</sup>

Dua tahun setelah Jepang berhasil merebut kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda, pada tahun 1944 lagu tersebut diizinkan untuk dinyanyikan kembali dalam rapat-rapat dengan memakai kalimat pertama dari *refreinnya* yang lama. Pada tahun itu juga dibentuk Panitia Lagu Kebangsaan yang diketuai oleh Soekarno dengan anggota-anggotanya: Ki Hajar Dewantara, Achiar, Soedibyo, Darmawidjaja, Koesbini, K.H.M. Mansjur, Mr. Mohamad Yamin, Mr. Sastromoeljono, Sanoesi Pane, Simandjuntak, Mr. Achmad Soebardjo, dan Mr. Oetojo. Pada tanggal 8 September 1944, panitia tersebut telah menetapkan beberapa keputusan yang menyempurnakan lagu Indonesia Raya seperti yang dikenal saat ini. Pada tahun 1958, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selain penetapan sebagai lagu kebangsaan, peraturan ini juga berisi tentang kapan dan bagaimana lagu ini seharusnya dinyanyikan.<sup>44</sup> Seperti halnya bendera, lagu kebangsaan sebuah negara merupakan simbol yang sangat penting. Lagu kebangsaan memiliki arti yang mendalam di lubuk hati setiap warganya. Demikian pula dengan lagu Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Soepratman. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, pemerintah merencanakan untuk membangun sebuah penanda yang diberi nama Monumen W. R. Soepratman yang sekaligus akan

---

<sup>43</sup> Selain menulis lagu Indonesia Raya, W. R. Soepratman juga menulis beberapa lagu lainnya, seperti Bendera Kita, Indonesia Ibuku, Ibu Kita Kartini, Mars K.B.I., Mars Surya Wirawan, Mars Parindra, Di Timur Matahari, Bangunlah Hai Kawan, dan Matahari Terbit.

<sup>44</sup> Tentang hal ini lihat: *Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1958* tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

menjadi pusat perkembangan dan pengembangan bidang karyanya dan sebagai pusat kebudayaan Indonesia.

Sebelum rencana pembangunan monumen, pihak keluarga mengajukan permohonan untuk perbaikan dan pemindahan makam beliau. Permohonan tersebut diajukan oleh Kasansengari, sebagai keluarga dan sebagai sekretaris Kwartir Besar Surya Wirawan. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Mei 1958 oleh Perwakilan Jawatan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur di Surabaya dibentuklah Panitia Pemuliaan W.R. Soepratman dengan R. Moestadjab (Wali Kota Surabaya) sebagai ketua kehormatan. Tujuan pembentukan panitia ini adalah untuk memindahkan makam W.R. Soepratman yang semula berada di Kuburan Umum Kapas ke tempat yang baru di Tambak Segaran Wetan. Pada tanggal 25 Oktober 1953, bertepatan dengan peringatan 25 tahun Lagu Indonesia Raya telah dilakukan upacara peletakan batu pertama pada makam W. R. Soepratman yang dihadiri oleh Gubernur Samadikun, Residen Winarno, Kepala Kepolisian Provinsi, Wali Kota Moestadjab, konsul negara-negara lain, dan lain-lain. Pada tanggal 31 Maret 1956, makam baru W. R. Soepratman selesai diperbaiki dan jenazahnya dipindahkan dengan upacara yang khidmat<sup>45</sup>.

Rencana pembangunan monumen W.R. Soepratman dapat dikatakan merupakan rencana proyek prestisius kedua setelah pembangunan tugu pahlawan. Berbeda dengan pemindahan dan pembangunan makam baru bagi W.R. Soepratman yang dengan mudah diwujudkan, pembangunan monumen yang digagas sejak awal tahun 1950-an mengalami berbagai masalah bahkan tidak terlihat wujudnya hingga sekarang. Dari berbagai sumber yang ada, tampaknya rencana pembangunan monumen ini tersangkut persoalan keuangan. Pada tanggal 1 April 1959 dan 16 Juli 1959 misalnya, Madjelis Musyawarah Kebudayaan Surabaya mengajukan resolusi kepada dewan yang

---

<sup>45</sup> “Tadi Pagi: Perletakan Batu Pertama Makam Baru W.R. Soepratman”, dalam *Surabaya Post*, 28 Oktober 1953; “Pemindahan Makam Soepratman”, dalam *Surabaya Post*, 3 April 1956.

isinya mempertanyakan tindakan untuk melakukan penyelidikan dan mempertanyakan apakah dalam waktu singkat dapat dilaksanakan pembangunan monumen komponis nasional W. R. Soepratman. Resolusi ini ditanggapi oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kota Praja Surabaya dengan suratnya tertanggal 1 September 1959 yang meminta kepada DPD untuk memberitahukan Madjelis Musyawarah Kebudayaan Surabaya tentang pembangunan monumen tersebut (AKS, box 100, no. 1556).

Pada tanggal 8 Oktober 1959, DPD Kotapradja mengirimkan surat kepada Majelis Musyawarah Kebudayaan Surabaya yang memberitahukan bahwa masalah tersendatnya pembangunan monumen komponis W.R. Soepratman sedang dalam penyelidikan oleh Dept. P.P. dan K Bagian Keuangan Pusat Jawatan Kebudayaan. Dalam surat tersebut disebutkan pula bahwa pihak perwakilan Dept. P.P. dan K Daerah Jatim telah selesai penyelidikannya dan sudah dilaporkan kepada Jawatan Kebudayaan Dept. P.P. dan K (AKS, box 100, no. 1556). Akibat tersendat-sendatnya pembangunan monumen ini, maka Kepala Jawatan Kebudayaan Kementerian P.D. dan K (R. O. Joedakoesoemah) dengan suratnya tertanggal 7 September 1960 meminta kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur agar pembangunan monumen W.R. Soepratman yang memiliki nilai nasional dan telah lama menjadi persoalan segera membentuk panitia dan agar gubernur bersedia mengetuai kepanitiaan tersebut. Adapun biayanya, selain subsidi dari pemerintah, harus pula diusahakan sokongan dari rakyat, agar monumen itu sungguh-sungguh mempunyai nilai nasional dan menjadi milik seluruh rakyat. Ditambahkan pula agar panitia mempertimbangkan, apakah rencana yang semula akan dilanjutkan atau akan dibuat rencana baru (Kasansengari, 1967:118).

Menindaklanjuti surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, maka pada tanggal 6 September 1961, atas inisiatif Inspeksi Jawatan Kebudayaan Jawa Timur telah dibentuk Panitia Pendirian Monumen Soepratman yang diketuai oleh Kolonel Mohammad Wijono (gubernur Jawa Timur) dengan anggota yang

terdiri atas pejabat pemerintahan sipil dan militer, kejaksaan, serta tokoh-tokoh front nasional, kesenian, usahawan, dan lain-lain. Oleh Kolonel Wijono yang juga sebagai Ketua Yayasan Sosial dan Pembangunan Jawa Timur telah diserahkan sumbangan sebesar setengah juta rupiah<sup>46</sup>.

Pada tanggal 5 Januari 1962, Gubernur Soewondo Ranoewidjojo atas nama Menteri P.P. dan K melantik panitia. Untuk menyukseskan rencana pembangunan monumen ini, gubernur dengan suratnya tertanggal 25 November 1962 menyampaikan instruksi kepada semua bupati dan wali kota di seluruh Jawa Timur agar mendirikan cabang panitia di daerahnya masing-masing (Kasansengari, 1967: 121).

Dalam instruksi gubernur tersebut tidak ada alasan mengapa perlu dibentuk panitia di tingkat kabupaten atau kota madya, akan tetapi kemungkinan besar ini adalah upaya untuk memobilisasi penggalangan dana. Rencana pembangunan monumen W. R. Soepratman ini mendapat perhatian serius dari Presiden Soekarno. Dalam amanatnya, presiden menyarankan supaya: "... berilah tempat pada tugu Soepratman ini yang bewaga (luas-lapang). Berilah tinggi 5 x 17 m. sama dengan 85 meter" ("Tugu", dalam *Surabaya Post*, 15 Oktober 1962). Saran yang disampaikan oleh Bung Karno tersebut disesuaikan dengan angka-angka "keramat", 5 untuk Pancasila dan 17 untuk tanggal proklamasi. Sebagai seorang presiden yang kata-katanya bagai mantra, apa yang disampaikan atau disarankannya pasti diamini oleh banyak kalangan. Berkaitan dengan saran Soekarno untuk monumen W. R. Soepratman misalnya, seorang wartawan *Surabaya Post* menimpali:

"Kalau direncanakan tugu veteran berupa bambu runcing itupun akan tinggi menjulang, maka memanglah tepat kalau sekali kita bikin tugu-tugu, haruslah yang besar-besar sekali, melambangkan kebesaran jiwa kita." ("Tugu", dalam *Surabaya Post*, 15 Oktober 1962).

---

<sup>46</sup> "Rp½ djuta untuk mulai pembangunan Monumen Supratman", dalam *Surabaya Post*, 7 September 1961.

Saran atau tepatnya instruksi Presiden Soekarno atas bentuk dan ukuran monumen ini merupakan instruksi kedua setelah pada tahun 1952 menentukan bentuk dan tinggi dari tugu pahlawan. Selain pandangannya bahwa jiwa bangsa tercermin dari bangunan-bangunannya, turut campur tangannya Soekarno dalam penentuan bentuk dan ukuran terhadap beberapa monumen di Kota Surabaya, berkaitan dengan ikatan emosional beliau dengan kota ini. Soekarno menghabiskan sebagian waktu mudanya di kota ini untuk bersekolah di *Hogere Burger School* (HBS) dan tinggal di rumah H.O.S. Tjokroaminoto di Jalan Peneleh.

Untuk melaksanakan amanat presiden maka melalui suratnya tertanggal 30 Maret 1963, panitia mengajukan pendapat dan permohonan kepada gubernur agar tanah yang terletak di Wonocolo yang cukup luas dan memenuhi syarat untuk dapat ditentukan sebagai tempat monumen W. R. Soepratman dan tempat Pusat Kebudayaan serta dicantumkan dengan resmi di dalam rencana perluasan Kota Surabaya. Berkaitan dengan lokasi tersebut, pada tanggal yang sama, panitia telah mengajukan usul kepada Jawatan Planologi di Jakarta dan diperoleh sebidang tanah di Wonocolo dengan luas 240 hektare. Lokasi ini diberikan atas persetujuan Presiden Soekarno (Kasansengari, 1967: 122).

Selain menyetujui tanah yang terletak di Wonocolo sebagai lokasi pembangunan monumen, Presiden Soekarno menyarankan juga agar makam W. R. Soepratman dipindahkan ke tempat yang sama. Di areal monumen tersebut akan dibangun juga pusat kebudayaan bangsa Indonesia. Tempat-tempat tersebut adalah: Akademi Musik Timur dan Barat, Akademi Seni Tari Timur, Gedung Phylharmony Orkes, Gedung Seni Drama Timur, Gedung Seni Teater, Gedung Rapat Besar, Perpustakaan Kebudayaan, Art Gallery, Museum Kebudayaan, Teater Terbuka (Bowl), Stadsbosch dan Vyver, Taman Bunga, dan Lapangan terbuka di muka monumen dan Vyver (Kasansengari, 1967: 125).

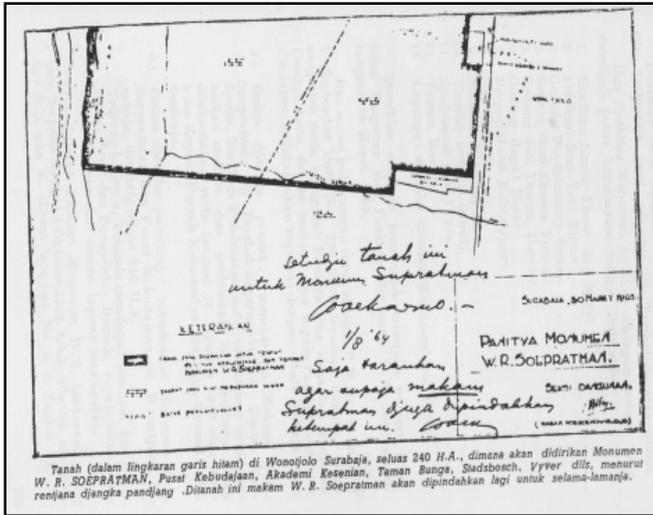
Namun, rencana yang ambisius itu tidak pernah terwujud. Panitia yang diberi amanat untuk mewujudkan monumen tersebut tidak berhasil mewujudkannya walaupun sudah dibentuk silih berganti. Mengingat panitia yang dibentuk pada tanggal 5 Januari 1962 dengan ketua Kolonel TNI Mochamad Wijono tidak menunjukkan hasil apa-apa, maka pada tanggal 9 Oktober 1963 menteri P.D. dan K kembali melantik pengurus baru yang diketuai oleh Dr. Satrio Sastrodiredjo yang saat itu menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Timur dan Moeljono Soerjopramono (Kepala Inspeksi Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Timur) sebagai sekretaris (Kasansengari, 1967: 145). Harapan besar untuk terwujudnya monumen sangat dinanti lewat kepengurusan baru ini. Untuk itu, pada tanggal 17 Agustus 1963, R. Moeljono Soerjopramono mengundang budayawan-budayawan untuk meminta saran-saran mengenai pembangunan monumen epratman.<sup>47</sup> Tidak ada keterangan yang penulis temukan bagaimana panitia ini bekerja dan apa yang telah dihasilkannya. Sebaliknya, yang terjadi justru diberhentikannya Dr. Satrio Sastrodiredjo, Soetojo, dan Roeslan Kamaloedin, berturut-turut sebagai ketua, pembantu seksi keuangan, dan sebagai penasihat panitia.

Pemberhentian tersebut diputuskan dalam sebuah rapat pleno panitia pada tanggal 14 Juli 1966. Tindakan ini didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Oktober 1965 No. 1155/X/65, BB yang memperhatikan Surat Keputusan Peperlrada Daerah Jawa Timur tanggal 22 Oktober 1965 mengenai Parpol/Ormas yang terlarang, yang memberhentikan Dr. Satrio Sastrodiredjo untuk sementara sebagai anggota Bakopda (Badan Koordinasi Pembangunan Daerah) Jawa Timur dan Soetojo sebagai pejabat pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dan sebagai anggota Bakopda Jawa Timur.

Pemberhentian Dr. Satrio Sastrodiredjo, Soetojo, dan Roeslan Kamaloedin dari pemerintahan sekaligus dari kepanitiaan pembangunan monumen sangat berkaitan dengan 'gonjang-ganjing' politik yang

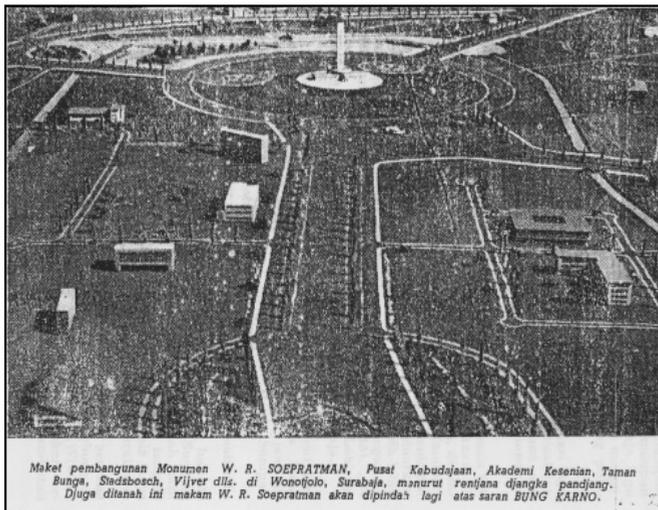
---

<sup>47</sup> "Pekerjaan Pembangunan Monumen Supratman di S'baja Segera Dimulai", dalam *Surabaya Post*, 18 Agustus 1963.



Sumber: Kasansengari, 1967: 123

**Gambar 10.** Lokasi Pembangunan Monumen W. R. Soepratman yang disetujui oleh Presiden Soekarno.



Sumber: Kasansengari, 1967: 129

**Gambar 11.** Maket Monumen W.R. Soepratman

terjadi saat itu. Siapa sesungguhnya Dr. Satrio Sastrodiredjo sehingga namanya harus dicoret dari aktivitas sosial dan pemerintahan? Tidak banyak keterangan tentang sosok ini. Dalam beberapa sumber disebutkan, Dr. Satrio Sastrodiredjo merupakan calon tunggal yang diajukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menjabat sebagai kepala daerah Kota Praja Surabaya<sup>48</sup>. Dr. Satrio Sastrodiredjo yang kemudian menjadi wali kota Surabaya periode 1958–1964 ini merupakan anggota PKI sejak tahun 1953 dan menjadi dosen dalam ilmu Neorologi dan Psikiatri pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Selain itu, dia juga menjabat sebagai wakil ketua Lembaga Persahabatan Indonesia-RRT dan pada masa revolusi menjabat sebagai Menteri Muda Kesehatan.<sup>49</sup>

Pemecatan Dr. Satrio Sastrodiredjo dan dua orang lainnya dari kepanitiaan pembangunan monumen W. R. Soepratman akibat tersangkut dengan organisasi terlarang, sekali lagi menjadi bukti betapa perubahan peta politik dapat ‘menjungkirbalikkan’ karier politik seseorang. Namun demikian, menurut keterangan Soetrisno (mantan bupati Nganjuk dan satu-satunya anggota panitia yang masih hidup) gagalnya pembangunan monumen W. R. Soepratman tidak ada kaitan dengan ‘gonjang-ganjing’ politik pada waktu itu. Akan tetapi, semata-mata karena tidak tersedianya dana yang cukup untuk membangun monumen yang sangat prestisius tersebut. Dengan demikian, rencana pembangunan monumen yang ambisius itu akhirnya menjadi impian yang tidak pernah terwujud.

---

<sup>48</sup> Sesudah debat tentang tata-tertib dan prosedur pemilihan, akhirnya Dr. Satrio terpilih secara aklamasi menjadi Kepala Daerah Kotapradja Surabaya periode 1958–1964. Pemilihan kepala daerah ini merupakan pertama kalinya di Kota Surabaya. ‘Sesudah debat tentang prosedur. Dengan aklamasi Dr. Satryo dipilih djadi Kepala Daerah Kota Surabaya’ Dalam *Surabaya Post*, 12 Djuni 1958; ‘Besok malam pilihan kepala daerah Kotapradja Surabaya’ Dalam *Djawa Pos*, 10 Djuni 1958.

<sup>49</sup> ‘PKI Tjalonkan Dr. Satrio sebagai Kepala Kotapradja Surabaya’ Dalam *Djawa Pos*, 3 Juni 1958.

## 2. Dari L. M. S. (Lucas Martin Sarkies) Oranye Hotel, Yamato Hoteru, Hingga Hotel Majapahit: Monumen yang Terus Hidup

Hingga tahun 1925, di Kota Surabaya terdapat 45 hotel. L.M.S. atau Oranye Hotel merupakan salah satu hotel yang terkenal pada saat itu. Hotel yang dibangun oleh Eugene Lucas Sarkies ini terletak di Jalan Tunjungan, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng. Hotel ini dibangun sekitar tahun 1910 dan mulai dibuka pada tahun 1911 kemudian direnovasi menjadi hotel yang berarsitektur modern pada tahun 1925, sedangkan siapa arsiteknya tidak diketahui dengan pasti. Pada zaman Belanda, hotel yang bernama LMS atau Oranye Hotel ini digunakan sebagai tempat menginap keluarga elite. Pada zaman Jepang, hotel yang berubah nama menjadi Yamato Hoteru ini sering menjadi tempat pertemuan barisan propaganda Dai Nippon dan tokoh-tokoh masyarakat Kota Surabaya.<sup>50</sup>

Sampai pertengahan September 1945, hotel yang bernama Mandarin Oriental Hotel Majapahit ini tidak ubahnya dengan hotel-hotel lain, yakni sebagai tempat menginap para tamu yang berkunjung ke Surabaya. Hanya saja, dibandingkan dengan hotel lain, Oranye Hotel menjadi tempat tinggal banyak orang-orang Belanda. Tanggal 19 September 1945, segalanya berubah. Pada tanggal itu, hotel yang cukup mewah ini tidak lagi sekadar berfungsi sebagai tempat menginap para tamu, tetapi menjadi ajang terjadinya bentrokan antara arek-arek Surabaya dan orang-orang Belanda yang terkenal dengan “Insiden Bendera”. Peristiwa ini bermula dari tindakan orang-orang Belanda yang mengibarkan bendera merah-putih-biru di atas hotel. Salah satu pelaku insiden menuturkan tindakan orang-orang Belanda ini.

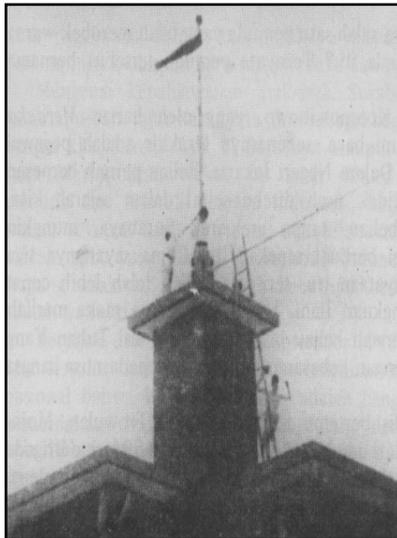
“... pada waktu itu sekitar jam 06.30 saya menyaksikan 8 orang pemuda Belanda keluar dari toko Mataliti dengan membawa bendera Belanda, sambil menyanyikan lagu Wilhelmina masuk ke dalam Oranye Hotel kemudian menaikkannya ke atas Hotel tersebut ....” (Barwogo, 1974: 41).

<sup>50</sup> “Pertemuan di Yamato Hotel”, dalam *Soeara Asia*, 13 Juni 2602.



Sumber: Hotel Majapahit

**Gambar 12.** Hotel Majapahit dalam bentuk awalnya pada tahun 1911



Sumber: Foto Jawatan Penerangan 1958

**Gambar 13.** Sebuah rekonstruksi 'Insiden Bendera' pada 19 September 1945

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tidak pelak lagi, tindakan orang-orang Belanda ini memicu kemarahan arek-arek Surabaya. Pemuda-pemuda yang menyaksikan peristiwa itu segera memobilisasi massa sehingga dalam waktu singkat terkumpulah pemuda-pemuda yang siap mengepung dan menurunkan bendera Belanda. Pada saat yang sama, Residen Soedirman dikabarkan sedang berunding dengan pihak Inggris untuk menurunkan bendera tiga warna itu, tetapi sebelum tercapainya perundingan pemuda tidak sabar lagi. Mereka bertindak sendiri-sendiri mencari tangga dan kemudian naik ke atas hotel. Bendera Belanda diturunkan dan warna birunya disobek kemudian dinaikkan kembali disertai teriakan ramai penduduk.

Dalam novelnya, Idrus menggambarkan peristiwa perobekan bendera ini dengan gaya teateral:

“Waktu beberapa orang Belanda-Indo berani menaikan bendera merah-putih-biru di hotel Yamato, orang-orang Indonesia tertjengang-tjengang. Orang-orang tertjengang bertambah banjak dan bertambah lama bertambah mendekati hotel itu. Tiba-tiba melompat seorang pemuda kedepan. Dipandjatnja tiang bendera, dirobeknja kain biru dari bendera itu. Orang-orang tertjengang bertepuk dan bersorak, tapi orang-orang Belanda-Indo marah-marah. Bukan untuk disorati mereka menaikan bendera. Mereka terkenang kepada masa tiga setengah tahun jang lalu dan kepada ajah-ajahnya, Belanda betul-betul. Karena itu mereka marah-marah. Dan waktu marahnja mendjelma mendjadi pukulan dan tindju, terjadi keributan, seperti dalam pilem cowboy-cowboy ....” (Idrus, 1948: 120).

Menurut Frederick, walaupun pengutaraan kembali cerita tersebut di kemudian hari telah dibumbui, insiden bendera memiliki tempat yang terhormat di dalam cerita revolusi Surabaya dan sesungguhnya juga di seluruh negeri.<sup>51</sup> Tidak pelak lagi, peristiwa ini telah menjadikan Hotel Majapahit sebagai salah satu monumen

---

<sup>51</sup> Keterangan lebih jauh tentang insiden bendera ini dapat dibaca dalam William H. Frederick, *Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Labirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926–1946)* (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 254–262.

yang sangat penting di Kota Surabaya.<sup>52</sup> Seperti yang saya tulis di pendahuluan, Hotel Oranye (sekarang Mandarin Oriental Hotel Majapahit) dan juga Jembatan Merah merupakan sesuatu yang sebelumnya telah ada dan dengan sebab-sebab tertentu dijadikan sebagai simbol kota. Selain itu, peristiwa insiden bendera dan tempat berlangsungnya (Oranye Hotel atau Hotel Majapahit) menjadi peristiwa dan monumen yang memiliki tingkat rujukan nasional. Di buku-buku pelajaran sejarah yang dipergunakan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia kita dapat membaca peristiwa ini dan melihat gambar pemuda–pemuda yang sedang menurunkan bendera Belanda.

### 3. Jembatan Merah: Mencari Jejak Sang Pahlawan

Seperti halnya hotel Majapahit, Jembatan Merah adalah contoh sesuatu yang sebelumnya sudah ada dan dengan sebab-sebab tertentu menjadi simbol kota. Jembatan Merah dan sekitarnya—seperti halnya tugu pahlawan dan sekitarnya serta Hotel Majapahit—menjadi salah satu lokasi terjadinya pertempuran antara arek-arek Surabaya dengan tentara sekutu. Saya tidak menemukan data tentang siapa dan bagaimana jembatan ini dibangun. Akan tetapi Jembatan Merah adalah jembatan yang paling terkenal di Surabaya. Pada zaman kolonial, jembatan ini berfungsi untuk menghubungkan daerah sebelah barat Kalimas yang dahulu menjadi daerah pemukiman orang Eropa (*Europeesche Wijk*) dengan daerah sebelah timur Kalimas yang dahulu menjadi daerah pemukiman orang Cina (*Pecinan*), orang Arab (*Arabische Kamp*), dan daerah Melayu. Tepat di depan jembatan tersebut sampai tahun 1925 terdapat gedung (kantor) residen yang merupakan pusat pemerintahan Kota Surabaya waktu itu sehingga Jembatan Merah menjadi tempat yang sangat ramai pada zamannya dan melegenda sampai sekarang (Handinoto, 1996:28; 35).

---

<sup>52</sup> Pentingnya makna hotel ini tercermin dari dimasukkannya sebagai salah satu dari 163 benda cagar budaya yang dilindungi. Berdasarkan SK Wali Kota Madya Kepala daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/251/402.1.04/1996 dan SK No. 188.45/004/402.1.04/1998 ditetapkan sebanyak 163 bangunan cagar budaya yang wajib dilindungi di Kota Surabaya.

Hanya saja, Jembatan Merah yang kita saksikan sekarang adalah hasil peremajaan pemerintah kota. Dengan kata lain, jembatan tersebut bukan lagi jembatan sebagaimana yang pernah dipakai oleh arek-arek Surabaya sebagai benteng pertahanan ketika bertempur dengan sekutu. Upaya pemerintah ini mendapat tantangan dari masyarakat, sedangkan perguruan tinggi bersikap ambigu, ada yang ikut merusak dan ada yang membela. Dalam berbagai kesempatan, Johan Silas (seorang guru besar ITS Surabaya) misalnya, selalu mengecam tindakan pemerintah kota yang melakukan pemugaran Jembatan Merah tanpa memperhatikan aspek historisnya. “Agaknya dosa terhadap sejarah ini sudah harus selesai sampai di sini, dan tak boleh terulang lagi” demikian kata Silas (Silas, 1996: 77 dan Silas, 2004).

Di kawasan Jembatan Merah inilah terjadi serangkaian pertempuran yang dahsyat antara pejuang republik dengan tentara sekutu. Menurut cerita orang-orang tua, di kolong jembatan inilah pasukan arek-arek Surabaya mempertahankan diri dari serangan musuh. Bagi sebagian masyarakat Surabaya, Jembatan Merah tidak lagi sekadar sebagai sarana transportasi, tetapi sudah menjadi simbol semangat perjuangan yang tidak pernah lekang. Dengan demikian, sangat bisa dipahami jika peremajaan Jembatan Merah tanpa memperhatikan aspek sejarahnya mengundang pro dan kontra. Bagi pemerintah, Jembatan Merah tampaknya tidak cukup untuk menjadi simbol perjuangan arek-arek Surabaya di kawasan ini. Oleh karena itu, pada tahun 1970 di kawasan ini dibangun sebuah patung yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Korem Bhaskara Jaya/Korem 084. Patung tersebut terletak di depan JMP (Jembatan Merah Plaza) dan berhadapan dengan gedung PT Aneka Niaga (Ltd) yang ketika revolusi fisik bernama gedung Internatio. Patung yang dibangun atas prakarsa Komando Resort Militer 04/Bhaskara Jaya dengan restu Panglima Kodam VIII Brawijaya ini diresmikan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur pada tanggal 11 November 1970 (Kartomihardjo, 1986:126–132).



Sumber: *Soerabaja...*, 2004: 114

**Gambar 14.** Jembatan Merah yang dibangun pada masa kolonial

Patung tersebut menggambarkan seorang pejuang sedang berdiri dengan kaki terbuka, ekspresi wajahnya menggambarkan sedang berteriak sambil memberi komando atau aba-aba. Pada tangan kirinya memegang sepucuk senjata yang teracung ke atas dan di ujung senjatanya terpasang bendera merah putih, sedangkan tangan kanannya terkepal di muka dada. Di bahu kiri terdapat peluru yang menjuntai ke pinggang kanan dan di pinggang kirinya tergantung sebuah granat (Kartomihardjo, 1986: 127).

Pertempuran di sekitar Jembatan Merah adalah pertempuran yang paling hebat. Saat itu tentara Inggris menduduki gedung Internatio yang berada di kawasan itu. Dalam pertempuran yang mulai berkobar pada tanggal 27 Oktober 1945 di depan gedung Internatio itu, Brigjen Mallaby terbunuh yang menyebabkan kemarahan tentara Inggris. Sebagai akibatnya, terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat yang kemudian melahirkan Hari Pahlawan 10 November 1945.

#### 4. Tugu Pahlawan: Ikon Kota yang Kesepian

**Proses pendirian.** Bagi Kota Surabaya, tampaknya tanggal 10 November yang menurut Taufik Abdullah (Abdullah, 1995: 1–2) tidak hanya sebuah peristiwa yang keras dan riil, tetapi juga sebuah simbol abadi dalam kesadaran sejarah bangsa, tidaklah cukup diperingati sebagai hari pahlawan. Bagi arek-arek Surabaya, sebuah tanda yang kasat mata masih perlu didirikan. Tugu yang pertama didirikan pasca-proklamasi adalah Tugu Pahlawan yang terletak di bekas gedung *raad van justisie* (zaman Belanda) atau bekas gedung *kempetai* (zaman Jepang). Pendirian tugu ini digagas oleh Doel Arnowo (1950–1952), wali kota pertama sesaat setelah penyerahan kedaulatan.

“...saya pikir untuk apa tempat bekas gedung Kempetai tersebut. Kalau dibuat gedung lagi seperti dulu terang tidak mungkin karena biaya tidak ada. Oleh karena di tempat itu dulu pernah ada pertempuran yang hebat antara pemuda-pemuda kita dengan Jepang, maka di tempat itu lalu saya rencanakan untuk dibuat Tugu Pahlawan” (Barwogo, 1974: 31).

Untuk menindaklanjuti gagasan ini, maka pada tahun 1951 dibentuklah sebuah panitia untuk pendirian tugu. Semula panitia pendirian tugu ini diketuai oleh Doel Arnowo (AKS, box 225, no. 4137). Pada tahun 1952, jabatan beliau sebagai wali kota diganti oleh R. Moestadjab Soemowidigdo. Dengan demikian, ketua panitia pendirian tugu ini diserahkan kepada wali kota yang baru dengan susunan sebagai berikut: 1) R. Moestadjab Soemowidigdo sebagai ketua, 2) Ir. Tan Giok Tjauw (Ir. Ibrahim Suchahyo), Kepala Pekerjaan Umum Kota Besar Surabaya sebagai Manejer Proyek (direksi), 3) Soebangun, Kepala Pekerjaan Baru Kota Besar Surabaya sebagai wakil manajer proyek, 4) Ir. Abdul Kadir, Kepala Jawatan Kereta Api Wilayah Timur sebagai anggota, 5) Soemarsono, Kepala Jawatan Pelabuhan sebagai anggota, dan 6) Soeratmoko, kepala Jawatan Gedung-gedung sebagai anggota (AKS, box 225, no. 4137). Pada tanggal 1 November 1951, gambar-gambar rancangan tugu mulai dipersiapkan oleh para staf ahli dari Kota Besar Surabaya. Gambar yang telah disetujui oleh para panitia berupa Tugu Pahlawan yang

tingginya hanya 30 meter, dengan di atasnya terpasang tiang bendera setinggi 15 meter dalam dasar segi delapan (Sarodja, 1992: 1) Dari rancangan ini segera dapat ditangkap maknanya, bahwa tinggi tugu ditambah dengan tinggi tiang bendera adalah simbol dari tahun kemerdekaan, sedangkan dasar segi delapan menandakan bulan Agustus.

Pada tanggal 10 November 1951, Presiden Soekarno melakukan peletakan batu pertama disertai permintaan agar dibuatkan beberapa gambar rencana tugu dan segera dikirim ke Jakarta. Gambar-gambar yang dikirim oleh tim dari Kota Surabaya tampaknya tidak berkenan di hati Bung Karno. Sebaliknya, beliau memutuskan sendiri bentuk tugu tersebut, yakni seperti “paku duduk” yang dibalik kepalanya dan mempunyai tinggi 45 meter<sup>53</sup>. Selanjutnya, beliau meminta agar gambar perencanaan tugu tersebut dilakukan oleh Soeratmoko (Kepala Jawatan Gedung-gedung Surabaya yang merupakan salah seorang anggota panitia). Hal ini dilakukan mengingat waktu yang sangat mendesak (tinggal 2,5 bulan), karena Bung Karno meminta agar pada 10 November 1952 tugu tersebut sudah dapat diresmikan (Sarodja, 1992: 1). Keputusan Soekarno yang menghendaki tugu ini memiliki tinggi 45 meter membuat Ir. Soendjasmono dari NV. Indonesia Engineering Corp (NIVIC) Surabaya sebagai pelaksana mengundurkan diri. Tidak ada keterangan mengapa Soendjasmono mengundurkan diri, tetapi R. Sarodja (pelaksana berikutnya) menduga hal ini berkaitan dengan penambahan tinggi tugu, sedangkan fondasi sudah telanjur dibuat sehingga secara teknis beliau tidak bisa menerima atau mempertanggungjawabkan.<sup>54</sup> Dengan pekerjaan yang sangat singkat dan tergesa-gesa (hanya 13 bulan sejak peletakan batu pertama), tugu yang diharapkan akan berumur 100 tahun lebih

---

<sup>53</sup> Menurut Mustadjab, Tugu Pahlawan itu akan mirip sedikit dengan Tugu Nasional yang ada di Pasuruan. Tugu itu direncanakan dapat dimasuki oleh 5 orang dan dapat naik ke atas atau dengan kata lain pengunjung dapat memasuki tubuh tugu. Lihat: “Tugu Nasional Lambang Revolusi”, dalam *Java Post*, 8 Maret 1952.

<sup>54</sup> Karena Ir. Soendjasmono mengundurkan diri, maka Soeratmoko (Kepala Jawatan Gedung-gedung) menunjuk R. Sarodja untuk membantu merencanakan dan sekaligus melaksanakan pendirian tugu tersebut. Lihat: AKS, box 225, no. 4137.

ini, pada tanggal 10 November 1952 pukul 10.00 WIB diresmikan oleh Presiden Soekarno.

Tugu ini melambangkan perjuangan arek-arek Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945. Tinggi tugu 45 yard (41,13 meter) melambangkan tahun 1945; 10 lengkungan (*canalures*) pada badan tugu melambangkan tanggal 10; dan 11 bagian (*geledingen*) melambangkan bulan 11 (November). Pada bagian bawah (dinding relief) dihiasi dengan ornamen-ornamen yang berbentuk trisula, cakra, cangka, stambha, dan padma mula. Makna filosofis dari ornamen ini adalah asal mula manusia yang dalam perjuangan timbul kekuatan keberanian berkobar dalam hati nurani membela kepentingan/kemerdekaan sesama manusia yang dalam pewayangan memakai senjata yang ampuh yakni Cakra pusaka Kresna dan Trisula pusaka Arjuna (Kartomihardjo, 1986: 123 dan Sarodja, 1992: 4).

**Bagaimana membiayai pendirian tugu pahlawan.** Proses pendirian tugu ini menyedot perhatian begitu besar dari pemerintah Kota Surabaya. Singkatnya waktu pendirian yang ditetapkan oleh Presiden Sukarno membuat pemerintah kota menempuh segala upaya untuk mengumpulkan dana. Dalam suratnya kepada Menteri Urusan Sosial, d.p.a. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, wali kota (R. Moestadjab) melaporkan bahwa dana yang dibutuhkan untuk pendirian tugu ini yang meliputi pekerjaan fondasi, pekerjaan tugu (menara), termasuk pemasangan tangga-tangga, kolam, dan taman adalah sebanyak Rp323.100. Padahal, sampai tanggal 2 Agustus 1952 dana yang tersedia baru Rp 160.000 (AKS, box 225, no. 4137).

Artinya, tugu ini baru memiliki dana setengah dari anggaran yang ditetapkan. Tidak pelak lagi, rentang waktu yang tinggal empat bulan (Agustus–November) membuat panitia menempuh berbagai cara untuk mengumpulkan dana. Salah satu cara yang hendak dilakukan adalah memohon izin kepada Menteri Urusan Sosial di Jakarta untuk melakukan undian. Undian direncanakan sebesar Rp500.000 dengan harga Rp10,- per lembar. Adapun hadiahnya direncanakan sebesar Rp250.000. Untuk menarik minat masyarakat

membeli kupon undian, panitia menyediakan hadiah-hadiah yang cukup menggiurkan, yakni berupa rumah yang lengkap dengan perabot-perabotnya. Sayang sekali, dengan suratnya tertanggal 22 Juli 1952 Menteri Sosial tidak dapat mengabulkan permohonan izin undian ini, karena undian yang besarnya lebih dari Rp50.000 adalah di luar kompetensi kementerian sosial, tetapi kewenangan menteri keuangan. Menyusul penolakan menteri sosial atas permohonan ini, maka pada tanggal 2 Agustus 1952, panitia mengirim surat kepada menteri keuangan agar diberi izin mengadakan undian sebagai undian negara. Besarnya undian dan jumlah hadiah tidak berubah.<sup>55</sup>

Setelah melalui berbagai kendala, baik persoalan finansial, maupun masalah kepanitiaan, akhirnya tugu tersebut diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1952. Bagi Soekarno, tugu pahlawan tidaklah sekedar bangunan materil, tetapi dia adalah lambang dari sebuah jiwa besar. Hal ini tampak dari pidatonya ketika meresmikan tugu tersebut.

“Tuguh pahlawan jang gagah perkasa, jang mendjulang langit ini, adalah sebagai lambang pengisi dada pahlawan jang telah gugur pada tudjuh tahun jang lampau. Hendaknja kita jang mengelilingi Tugu inipun akan mengisi dada kita dengan tekad jang sebulat2nja untuk mengisi kemerdekaan kita dan tjita2 kita jang sediakala.

Baiklah rakjat Indonesia mengambil tjontoh djiwa pahlawan jang besar ini. Karena tjita2 mereka jang besar, karena tekad mereka jang sebulat2nja, karena persatuan mereka jang seerat2njalah, maka pada tgl. 10 Nopember 1945 meletuslah di Surabaja suatu peristiwa jang dapat membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa jang berdjiwa besar.

Peristiwa 10 Nopember inilah jang membuktikan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia tidak berdjiwa ketjil seperti jang mereka tahu. Djiwa jang besar jg diiringi oleh tekad jang sebulat2nja dibuktikan oleh pahlawan2 kita kepada dunia.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> AKS, box 225, no. 4137. Sayang sekali penulis tidak menemukan keterangan apakah menteri keuangan memberi izin atau tidak atas permohonan panitia untuk mengadakan undian.

<sup>56</sup> “Peresmian Tugu Pahlawan: Lambang daripada Djiwa Besar”, dalam *Djawa Pos*, 11 November 1952.



**Gambar 15.** Gedung Raad van Justitie, kemudian didirikan di bekas areal gedung Raad van Justitie dan gedung Kempetai



**Gambar 16.** Tugu Pahlawan yang menjadi gedung Kempetai yang hancur akibat perang

Sumber: *Surabaya dan Perkembangannya*, 2004: 27

Bagi Soekarno, mahalny biaya untuk membangun sebuah monumen tidak ada artinya dibandingkan dengan kebesaran jiwa yang disimbolkan melalui monumen atau tugu tersebut. Hal ini pernah disampaikan Soekarno menanggapi mahalny biaya untuk pembangunan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, ia berkata:

“Tidak, saudara-saudaraku, kita tidak membangun sebuah Monumen Nasional yang berharga setengah juta dolar hanya untuk membuang uang. Tidak! Kita sedang membuat ini karena kita menyadari bahwa sebuah bangsa yang hebat, jiwanya dan hasratnya adalah kebutuhan yang absolut untuk kehebatannya, harus disimbolkan dengan sebuah benda materiil, sebuah benda yang hebat bahkan, yang kadang akan membuka mata dari bangsa-bangsa lain dengan penuh kekaguman.”<sup>57</sup>

Bertitik tolak dari pandangannya itu, maka pendirian berbagai monumen, tugu, patung ataupun bangunan-bangunan megah lainnya seperti Hotel Indonesia dapat dipahami. Ketika Soekarno tidak lagi menjadi penguasa, pembangunan berbagai simbol masih terus dilakukan oleh penerusnya dengan cara dan bentuk yang berbeda.

**Tiga Kekuasaan: Tiga Simbol.** Survei yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah Kota Surabaya menetapkan lokasi berdirinya tugu pahlawan sebagai kelompok fokus. Artinya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di lokasi tersebut sangat penting dan menonjol peranannya dalam peristiwa-peristiwa 10 November 1945.<sup>58</sup> Ketika zaman Belanda, lokasi tempat berdirinya tugu ini adalah gedung *Raad van Justitie*, gedung pengadilan bagi orang-orang

---

<sup>57</sup> Pernyataan tersebut disampaikan oleh Soekarno saat pamancangan fondasi Masjid Istiqlal, Jakarta 24 Agustus 1961, ANRI, Pidato Kepresidenan, No. 326, teks asli dalam bahasa Inggris, sebagaimana dikutip oleh Farabi Fakhri, *Membayangkan Ibu Kota Jakarta di Bawah Soekarno* (Yogyakarta: Ombak, 2005), hlm. 52.

<sup>58</sup> Survei ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai lokasi-lokasi bersejarah di Kota Surabaya yang selanjutnya akan diwujudkan dalam bentuk konservasi bangunan, monumen, tugu peringatan, lambang, *landmark*, bentuk relief, dan sebagainya. Survei tersebut mengklasifikasi dua kelompok lokasi, yakni fokus dan percikan yang terdiri atas percikan I, II, dan III. Fokus sebanyak tiga lokasi, Percikan I 20 lokasi, Percikan II 30 lokasi, dan Percikan III 35 lokasi.

Eropa. Bagi orang Indonesia ketika itu, Raad van Justitie atau sering disebut juga dengan Istana Pengadilan (*Het Paleis van Justitie*) adalah simbol ketidakadilan dan penderitaan rakyat. Salah satu contoh ketidakadilan itu kata Doel Arnowo, terjadi ketika mengadili seorang administratur Belanda dari suatu *onderneming* di Sumber Bokong di Klakah, karena memperkosa wanita-wanita Indonesia yang ada di *onderneming* tersebut hanya dihukum enam bulan (Barwogo, 1974: 31). Pada masa Jepang, gedung ini dijadikan markas kempetai dan sebagai tempat tawanan. Doel Arnowo bersama-sama tawanan K.I., KNIL dan dari Gerindo (Sikayat, Abdul Rakhim, Pamudji, Kusnan, dan Tjugito, dan lain-lain) pernah menikmati ditawan di gedung ini selama 41 hari (Barwogo, 1974: 31).

Ketika berlangsung Perang Revolusi 1945, gedung kempetai menjadi salah satu sasaran gempuran pasukan Indonesia. Setelah terdesak dengan kepungan dan bombardir dari pasukan arek-arek Surabaya selama  $\pm$  5 jam, Jepang akhirnya menyerah dan gedung kempetai yang sudah menjadi puing-puing diserahkan pada pemerintah daerah Surabaya (Soewito, 1994: 16–17 dan Gatot Barwogo, 1974: 32). Gedung yang telah berhasil direbut arek-arek Surabaya dengan tumpahan darah itu pada pertempuran dengan tentara Inggris, empat bulan kemudian (November) mendapat serangan berat, dihantam dengan mortir dan kanon laut, sehingga rusak sama sekali (“Sekelumit... 1975: 5–7). Selain tugu pahlawan, terdapat puluhan tugu dan patung yang dibangun di atas kawasan yang menjadi titik-titik pertempuran arek-arek Surabaya melawan penjajah. Tugu dan patung yang umumnya dibangun pada tahun 1970-an ini, antara lain Patung Panglima Besar Jenderal Sudirman di Jalan Yos Sudarso, Patung Karapan Sapi di Jalan Urip Sumohardjo, Patung setengah badan Dr. Soetomo di depan Gedung Nasional Indonesia (GNI) Jalan Bubutan, Patung Bahari di depan bekas Museum Mpu Tantular, Patung Perjuangan di Alun-alun Contong, Patung Perjuangan di depan Bioskop REX (RIA), dan lain-lain.

Semua monumen, patung, dan tugu yang dibangun, baik oleh pemerintah kolonial maupun oleh pemerintah Kota Surabaya memiliki makna dan simbol-simbol tertentu. Selain itu, kita dapat menyaksikan bentuknya yang besar dan mencolok mata. Hanya saja menyaksikan monumen, patung, dan tugu perjuangan saat ini sungguh menyisakan sebuah ironi. Banyak dari patung dan monumen itu dibiarkan tidak terawat dan justru menjadi, maaf, tempat buang air kecil para tukang becak dan sopir-sopir angkutan kota. Jika mengunjungi monumen pejuang di Jembatan Merah misalnya, maka bau pesing akan menyengat kita. Demikian pula monumen di depan Jln. Kombes Duryat justru menjadi pangkalan para tukang becak.

#### **D. MEMBANGUN KEBESARAN JIWA ATAU PENGHAMBURAN UANG: TANGGAPAN MASYARAKAT ATAS PENDIRIAN BERBAGAI MONUMEN DAN TUGU**

Kondisi kota-kota di Indonesia termasuk Surabaya pada pasca penyerahan kedaulatan akhir Desember 1949 mulai stabil. Pemerintahan yang semula diambil alih oleh tentara Belanda, kini berganti dengan diangkatnya Doel Arnowo sebagai wali kota. Dalam kondisi yang stabil ini Kota Surabaya mulai membenahi diri dengan membangun berbagai infrastruktur kota. Pada awal tahun 1950-an terdapat tiga hal penting yang dibangun, yaitu Pasar Wonokromo<sup>59</sup>, Hotel Olympic, dan Tugu Pahlawan. Selain itu, direncanakan pula untuk membangun sebuah monumen untuk mengenang jasa-jasa W.R. Soepratman.

Sebagai sebuah bangsa yang baru terbebas dari hegemoni asing, berbagai monumen, tugu, dan patung pun dibangun sebagai simbol dari kebesaran jiwa dan sekaligus sebagai penghargaan atas jasa para

---

<sup>59</sup> Pasar Wonokromo merupakan pasar paling besar dan paling modern pada saat itu. Pasar yang lokasinya berdekatan dengan Kebun Binatang ini dibuka pada tanggal 10 November 1958. "Pasar Wonokromo Dibuka 10 November", dalam *Malang Post*, 25 Juni 1958.

pahlawan. Alasan pembangunan tersebut tentunya dapat diterima, tetapi persoalannya adalah pembangunan itu dilaksanakan di tengah kondisi ekonomi kota yang baru pulih dari keterpurukan akibat perang. Akibatnya, banyak kalangan yang menilai pembangunan simbol-simbol kota ini sebagai sebuah pemborosan keuangan yang semestinya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih riil dan mendesak.

Keresahan masyarakat tersebut dapat dibaca dalam berbagai harian yang terbit pada saat itu. *Djawa Pos*, 8 November 1952 misalnya, menurunkan sebuah tulisan yang ditulis oleh Sukarsono yang berisi kritikan dan seruan untuk menghentikan berbagai pembangunan monumen dan mengalihkannya ke bentuk yang menurutnya lebih bermanfaat. Berikut kutipan sebagian dari tulisan tersebut.

‘Sungguh amat bermanfaat bila penghormatan terhadap pahlawan-pahlawan yang gugur itu tidak dengan mendirikan tugu<sup>2</sup> atau memindahkan makam; melainkan dengan mendirikan jajasan<sup>2</sup> yang memelihara jatim-piatu tinggalan pahlawan<sup>2</sup> itu, rumah<sup>2</sup> sekolah dan lain<sup>2</sup> pendirian sosial. Dengan diberi nama pahlawan yang dimaksud itu.

Misalnya ongkos pendirian tugu WR. Supratman sampai Rp150.000,- dipergunakan pendirian rumah sekolah sudah mendapat satu rumah sekolah rakjat. Dan sekolah itu dinamakan Sekolah Rakjat WR. Supratman<sup>60</sup>.

Tulisan yang diturunkan oleh *Djawa Pos* dua hari sebelum diresmikannya Tugu Pahlawan oleh Presiden Soekarno ini, sesungguhnya ingin mengeritik rencana pembangunan monumen W.R. Soepratman yang saat itu sedang dipersiapkan. Bagi beberapa kalangan, memberi perhatian yang lebih terhadap janda-janda yang suaminya meninggal dalam peperangan atau anak-anak yang harus kehilangan ayahnya akibat gugur dalam pertempuran adalah lebih penting dibanding mendirikan tugu atau monumen.

‘Sekarang kita lebih menanjung–njanjung arwah<sup>2</sup> yang telah meninggal tetapi sebaliknya membiarkan–atau sedikit sekali perhatian terhadap

---

<sup>60</sup> “Hentikan tugu<sup>2</sup>an! Hentikan tugu<sup>2</sup>an! Dirikanlah sekolah-sekolah Wr. Supratman”, dalam *Djawa Pos*, 8 November 1958.

djanda2 dan jatim-piatu pahlawan itu dalam keadaan terlantar. Bagaimanakah sukarnja atau lambatnja keluarnja pensiunja djanda dan piatu, tidak hanya karena soal2 administratif yang harus dipenuhi, tetapi djuga karena semangat indolensi [*sic.*] dan kurangnya sosial gevoel terhadap nasib para djanda dan piatu itu?.<sup>61</sup>

Beberapa bulan sebelum munculnya kritik ini, pada bulan Maret 1958, wali kota yang waktu itu dijabat oleh Moestadjab Soemowidigdo (1952–1956), harus memberi penjelasan kepada wartawan sehubungan dengan banyaknya tanggapan dari masyarakat atas pendirian Tugu Pahlawan. Bagi masyarakat, pembangunan tugu itu hanya menghambur-hamburkan uang yang semestinya digunakan untuk keperluan yang lebih penting buat rakyat. Namun, di tengah berbagai kritikan wali kota tetap bersikukuh untuk melanjutkan pembangunan tugu tersebut. Menurut Moestadjab, tugu itu merupakan lambang Revolusi 10 November 1945, saat perjuangan kemerdekaan kita bergema dalam udara internasional. Berkaitan dengan dana pembangunan tugu, Moestadjab menambahkan bahwa uang yang diperoleh untuk pendirian tugu tidak hanya ditanggung oleh pemerintah, tetapi mendapat bantuan dari pengusaha-pengusaha dan Persibaja.<sup>62</sup>

Dalam bentuk dan skala yang berbeda, kritik atas pendirian sebuah monumen, tugu, atau patung hingga kini masih terus berlanjut. Protes masyarakat atas pendirian patung Raffles yang penulis sampaikan di awal bagian ini merupakan contoh yang baik untuk menerangkan protes yang terus berlanjut ini. Jauh sebelum munculnya protes atas patung Raffles, sebuah patung Karapan Sapi yang terletak di salah satu jalan utama (antara Jalan Urip Sumohardjo dan Jalan Basuki Rahmat) juga menjadi pembicaraan banyak kalangan. Menurut beberapa pihak, patung yang cukup indah tersebut salah tempat, dia seharusnya tidak berada di Kota

---

<sup>61</sup> "Hentikan tugu2an! Hentikan tugu2an! Dirikanlah sekolah-sekolah Wr. Supratman", dalam *Djawa Pos*, 8 November 1958.

<sup>62</sup> Lihat: "Tugu Nasional Lambang Revolusi", dalam *Jawa Post*, 8 Maret 1952.

Surabaya, tetapi di Madura. Hal ini karena karapan sapi adalah tradisi masyarakat Madura, bukan Surabaya. Persoalannya kemudian adalah kenapa patung tersebut berada di Kota Surabaya bukan di Madura. Menurut banyak kalangan, hal ini sangat berkaitan dengan Gubernur Jawa Timur ketika itu yang berasal dari Madura, yakni M. Nur.[]

Buku ini tidak diperjualbelikan.

# SEPANJANG JALAN KENANGAN: MAKNA DAN PEREBUTAN SIMBOL NAMA JALAN DI KOTA SURABAYA

## A. MENGUSIK KENANGAN

Menjelang hari jadi ke-708 Kota Surabaya (31 Mei 2001), berbagai surat kabar yang terbit di kota ini diramaikan oleh komentar yang berisi penolakan atas rencana pemerintah kota—yang saat itu dijabat oleh Sunarto Sumoprawiro—untuk mengganti nama Jalan Raya Darmo<sup>63</sup> menjadi Jalan Soekarno-Hatta. Berikut beberapa komentar masyarakat atas rencana perubahan nama jalan ini.

“Saya paling tidak setuju kalau nama Jalan Raya Darmo diubah, hanya dengan alasan menghargai pahlawan nasional. Sebaiknya sebelum mewujudkan rencana tersebut wali kota konsultasi dengan sejarawan Surabaya serta DPRD...Tanpa persetujuan DPRD, perubahan nama jalan tidak bisa direalisasikan” (Ketua Komisi E DPRD Surabaya, Gatot Sudjito).<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Dalam serat Pararaton karya Mpu Tantular, nama Darmo sudah disebut-sebut. Tentang asal usul dan arti kata Darmo terdapat beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa Darmo adalah nama seorang tuan tanah pribumi yang menjadi penguasa di kawasan itu. Selain itu, ada yang mengatakan Darmo adalah nama seorang *jongos* (pesuruh) orang Belanda. Ada juga yang mengatakan Darmo berasal dari bahasa Jawa “Darma” yang berarti: *kewajiban, undang-undang, tjandi, kuburan, tempat sutji, dan bapa*. Duket Imam Widodo, *Soerabaia Tempo Doeloe*. Buku 2 (Surabaya: Dinas Pariwisata, 2002), hlm. 321; S. Prawiroatmodjo, *Bansastra Djawa-Indonesia* (Surabaya: Expres & Marfiah, 1957), hlm. 53.

<sup>64</sup> Tentang hal ini lihat: “Jangan Ganti Nama Jalan Raya Darmo”, dalam *Kompas* 5 April 2001.

“... Pemerintah Kota Surabaya harus sadar (atau dipaksa sadar?) bahwa hak representasi tidak bersifat mutlak. Selain itu, kepentingan siapa yang sedang mereka perjuangkan? Adakah korelasi rencana pergantian nama jalan itu dengan konstelasi politik nasional dewasa ini? Kalaupun tetap bersikeras mau menggantinya, mengapa tidak mengabadikan nama Doel Arnowo yang lebih identik dengan Kota Surabaya dibandingkan dengan nama jalan yang direncanakan” (Juliartono, 2001).

Dari pihak pemerintah (baca: wali kota) alasan rencana perubahan ini adalah untuk menghargai jasa Soekarno-Hatta sebagai proklamator (pahlawan nasional). Kota Surabaya mungkin satu-satunya kota besar yang tidak menjadikan Soekarno-Hatta sebagai salah satu nama fasilitas publik. Di Jakarta misalnya, nama proklamator ini menjadi nama bandar internasional, sedangkan di Makassar menjadi nama pelabuhan laut.

Akan tetapi, masyarakat yang menolak perubahan nama jalan tersebut juga mendasarkan diri pada alasan historis. Dengan demikian, perebutan simbol antara negara (baca: pemerintah) dengan masyarakat yang menggunakan alasan sejarah pun tidak terhindarkan. Seperti yang diketahui, sejak zaman kolonial hingga saat ini, Darmo merupakan jalan dan kawasan yang sangat penting dan strategis. Pada zaman Belanda, jalan ini diberi nama Darmo Boulevard dan kawasan sekitarnya yang luasnya hampir 230 hektare merupakan tempat perumahan elite tempo dulu (Widodo, 2002: 320–322). Upaya untuk menghapus nama jalan Raya Darmo dan menggantinya dengan nama lain sesungguhnya bukan yang pertama kali. Pada tahun 1961, berdasarkan keputusan wali kota, kepala daerah Kota Pradja Surabaya, tertanggal 13 Maret 1961 nomor 187-k (pembetulan), Jalan Raya Darmo diubah menjadi Jalan Patrice Lumumba. Saya tidak menemukan alasan penggantian nama jalan ini. Akan tetapi, menilik keputusan wali kota yang keluar tepat sebulan setelah terbunuhnya Patrice Lumumba, dapat diduga bahwa upaya ini adalah untuk menghormati beliau sebagai mantan pemimpin rakyat Kongo.

Patrice Lumumba yang lahir di Ohalua, 2 Juli 1925 adalah tokoh gerakan politik Kongo dan salah seorang pendiri *Movement National Congolais* (MNC) pada tahun 1958. Dalam pemilihan umum 1960, MNC memperoleh kemenangan besar dan Juni 1960 terbentuk pemerintahan Kongo pertama di bawah pimpinannya. Pemerintahan ini harus menghadapi pemberontakan tentara Kongo dan pemisahan Katanga di bawah pimpinan Moise Tsombe (Juli 1960) dan September 1960, Lumumba dibebastugaskan oleh Presiden Kasavubu. Pada Desember 1960 dan Januari 1961, Lumumba ditangkap dan dipindahkan ke Katanga lalu dibunuh pada 13 Februari 1961 (Shadiliy 2061–2062).<sup>65</sup> Kematian Lumumba menimbulkan simpati pada dunia termasuk dengan Presiden Soekarno dan seperti diketahui, pada saat itu elite sangat mengagung-agungkan Bung Karno. Mereka rela berbuat apa saja yang dapat menyenangkan hati beliau. Dalam bahasa Jawa, sikap ini tercermin dari ungkapan: *pejah gesang nderek Bung Karno* (hidup mati ikut Bung Karno. *pen.*). Selain itu, atas permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia pernah mengirim pasukan perdamaian ke Kongo (pasukan garuda) semasa pemerintahan Lumumba. Untuk itulah, pemberian nama jalan Patrice Lumumba pada jalan Darmo di Surabaya dapat dimaknai dengan dua hal, yakni sebagai simbol solidaritas Asia dan simbol loyalitas pada Bung Karno.<sup>66</sup>

Namun, umur nama jalan baru ini hanya bertahan selama lima bulan, karena pada Agustus 1961, Tritunggal Kota Praja Surabaya (komandan Komando Militer Kota Besar, kepala Polisi Inspeksi/ Kota Besar Surabaya dan Wali Kota Kepala Daerah Kota Praja Surabaya) mengeluarkan keputusan dan pengumuman yang memandang perlu untuk: 1) Mengembalikan nama “DJln. Patrice Lumumba” menjadi nama semula, ialah “Djalan Raya Darmo” dan 2) Mengubah Djalan Ngagel mulai jembatan Ngagel/Dinoyo sampai

---

<sup>65</sup> Lihat: “Siapa Pembunuh Patrice Lumumba?”, dalam *Surabaya Post* 6 Februari 1964.

<sup>66</sup> Wawancara, Peck Dijono, 17 Juli 2004; Wawancara, Hernoko Judobintoro, 13 Juli 2004.

jembatan Ngagel Wonokromo menjadi DJln. Lumumba”.<sup>67</sup> Usia nama jalan yang sangat singkat di atas disebabkan oleh banyaknya protes warga yang dengan alasan tertentu tetap menginginkan nama Darmo tetap dipertahankan. Kasus di atas merefleksikan betapa simbol kota, khususnya nama jalan menjadi salah satu ajang atau ruang untuk berlangsungnya kompetisi antara berbagai kepentingan politik. Proses penamaan jalan, seperti kata Brenda S. A. Yeoh, tidak hanya berkaitan dengan arti nama-nama tempat, tetapi juga wujud dari perebutan sosial untuk kontrol atas produksi makna simbolik dalam pembangunan lingkungan kota (Yeoh, 1996: 221).

Bagian ini antara lain bertujuan untuk mempelajari bagaimana simbol-simbol di Kota Surabaya, khususnya nama jalan merefleksikan keseimbangan kekuasaan, dan bagaimana dinamika kekuasaan membawa perubahan pada sebuah simbol. Tulisan ini menggunakan berbagai bahan, di antaranya peta tahun 1935 dan 1940, daftar nama jalan tahun 1935, daftar perubahan nama jalan yang kemungkinan besar dibuat setelah tahun 1949,<sup>68</sup> arsip-arsip pemberian dan perubahan nama jalan, surat kabar *Surabaya Post* yang terbit antara tahun 1950-an sampai 1960-an, dan wawancara dengan beberapa orang yang mengalami masa lalu Kota Surabaya.

---

<sup>67</sup> Lihat: “Djadi DJln. Raya Darmo Lagi”, dalam *Surabaya Post* 9 Agustus 1961; F.J.B.T. Putro Adi, “Nama Djalan dan Letak Nomor Rumah Di Kota Surabaya”, dalam *Liberty* 10 Agustus 1968; Wawancara, Edi Samson, 8 Juni 2004.

<sup>68</sup> Terima kasih atas kebaikan Freek Colombijn yang telah mengirimkan dua daftar nama jalan di Surabaya. *Pertama*, daftar nama jalan pada tahun 1935, sedangkan yang *kedua* adalah daftar perubahan nama jalan yang sayang sekali tidak ada tahunnya. Namun demikian, menilik ejaan yang digunakan yang tidak lagi memakai oe untuk u, saya menduga daftar ini (dan tentunya perubahan nama jalan di dalamnya) dikeluarkan sesudah tahun 1949, mengingat pada tahun 1949 pemerintah mengeluarkan peraturan ejaan yang mengganti huruf oe menjadi u. Selain itu, dalam arsip tahun 1948 nama “Jalan Belanda” seperti van Heutzstraat, van Deventerlaan masih digunakan. Lihat misalnya AKS, box 10, no. 70; box 11, no. 74. Untuk ejaan lihat Soekono Wirjosoedarmo, *Tata Bahasa Indonesia* (Edisi Lengkap) (Surabaya: Sinar Wijaya, 1987), hlm. 68–76.

## B. PROSES PERGANTIAN DAN PEMBERIAN NAMA JALAN

Pada masa pemerintahan Belanda, proses penamaan jalan-jalan di Kota Surabaya diatur dalam “*Verordening regelende het geven van namen aan straten, wegen, pleinen en dergelijke voor het publiek toegankelijke plaatsen, andere dan die door den Gemeenteraad zijn vastgesteld*” yang ditetapkan pada tanggal 1 Februari 1918 dan diundangkan dalam *Javasche Courant* tanggal 12 April 1918 No. 30. Aturan ini tidak memperkenankan kepada masyarakat untuk memberi nama-nama jalan selain yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan kata lain, wewenang pemberian nama jalan berada di tangan pemerintah kota lewat penetapan DPRD. Pada tahun 1955, pemerintah daerah Kota Besar Surabaya menetapkan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 1955 tentang Pemberian Nama Jalan, akan tetapi ketentuan-ketentuannya sama dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda pada 1918.<sup>69</sup> Dua puluh tahun kemudian atau tepatnya pada tanggal 3 Juli 1975, Peraturan Daerah (Perda) tahun 22 Tahun 1955 itu dicabut dan DPRD Kota Madya Surabaya mengeluarkan perda tentang pemberian nama-nama jalan, tempat rekreasi, taman, dan tempat serupa untuk umum. Dalam perda tersebut, tata cara pemberian nama jalan antara lain diatur seperti berikut ini.<sup>70</sup>

- a) Dengan memperhatikan segi sejarah, perjuangan bangsa kepahlawanan dan ciri khas kota;
- b) Daerah/tempat yang bersangkutan belum ada perencanaan detailnya;
- c) Daerah/tempat yang bersangkutan telah tumbuh perumahan, prasarana serta kedudukan tanahnya sah;

---

<sup>69</sup> Tentang hal ini lihat: Peraturan Daerah (Perda) Kota Besar Surabaya No. 22 Tahun 1955.

<sup>70</sup> Baca: “Perda Pemberian Nama Jalan dan Segala Ikhwalnya”, dalam *Gapura* (4) 1975, hlm. 13.

- d) Adanya kehendak dari masyarakat, agar kepala daerah menetapkan nama-nama kepada jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat serupa untuk umum di daerah/tempat yang bersangkutan.

Walaupun kewenangan perubahan dan pemberian nama jalan berada pada pemerintah kota dan dewan, masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu sering mengajukan usul perubahan dan pemberian nama sesuai dengan pertimbangan mereka. Dalam beberapa kasus, usul dari masyarakat kadang-kadang dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, atau justru ditolak. Pada tahun 1953 misalnya, panitia 17 Agustus 1953 mengajukan usul kepada Kota Besar Surabaya (KBS) agar nama Jalan Pemuda diganti dengan nama Jalan Pahlawan dan nama Jalan Pahlawan diganti dengan nama Jalan Merdeka. Atas usul pertama, DPD tidak keberatan, tetapi usul kedua tidak dikabulkan. Sebaliknya, DPD mengajukan usul agar bagi Jalan Pahlawan dipergunakan lagi nama aslinya, yaitu Jalan Simpang dengan alasan nama itu masih umum dipakai, misalnya Rumah Sakit Umum Pusat Simpang, Taman Simpang, Simpang Lonceng, Simpang Maxim, dan sebagainya. Usul DPD ini telah disepakati oleh Panitia PU dan Pembangunan dalam rapatnya pada tanggal 8 September 1953.<sup>71</sup>

Tarik-menarik perihal perubahan dan pemberian nama jalan antara pemerintah kota (DPD dan DPRD) dengan masyarakat kadang-kadang menghabiskan waktu yang berbulan-bulan. Hal ini bisa dilihat pada kasus Jalan Tambak Segaran Gang Timur Kalimir. Pada tanggal 23 Maret 1957, ketua Rukun Kampung I Kampung Tambak Segaran Gang Timur Kalimir (Moch. Basir) mengirim surat kepada Ketua DPDP yang memberitahukan bahwa rapat pemuda tanggal 17 Maret 1957 memutuskan mengganti Jalan Tambak Segaran

---

<sup>71</sup> 'Pemuda Djadi Pahlawan' Dalam *Surabaya Post* 23 Oktober 1953. Usul perubahan nama jalan yang dirapatkan dalam Sidang Dewan Kota pada 29 Oktober 1953 ini, tampaknya tidak terealisasi. Hal ini terbukti nama Jalan Pemuda dan Pahlawan tidak berubah.

Gang Timur Kalimir menjadi Jalan Kuburan W.R. Supratman Baru (AKS, box 673, no. 13.917).

Atas masalah ini, DPDP dengan suratnya No. 4100/243 mengirim surat kepada Kepala PU KBS tertanggal 17 April 1957 yang berisi permohonan untuk diberi pertimbangan atas usul rapat pemuda pada 17 Maret tersebut. Surat ini tampaknya tidak mendapat tanggapan cepat dari Kepala PU, sehingga DPDP Kota Praja Surabaya mengirimkan dua kali surat peringatan, berturut-turut pada tanggal 25 Juli 1957 dan 6 September 1957. Setelah surat peringatan yang kedua, barulah Kepala Dinas PU dengan suratnya tertanggal 17 September 1957 memberi tanggapan yang menjelaskan bahwa usul rapat pemuda tersebut sudah diselesaikan oleh dinas PU (AKS, box 673, no. 13.917).<sup>72</sup>

Penyelesaian atas usul dari masyarakat yang membutuhkan waktu sekitar tujuh bulan itu, tidak hanya menunjukkan lemahnya koordinasi pemerintah kota dengan dinasnyanya, tetapi juga menunjukkan kurang tanggapnya pemerintah kota (dalam hal ini Dinas PU) atas usul perubahan nama jalan dari masyarakat. Lebih dari itu saya kira, keinginan masyarakat di satu pihak untuk mempertahankan nama jalan yang lama sering berbenturan dengan keinginan pemerintah agar nama lama itu dilupakan dan dihapus dalam memori masyarakat. Dengan demikian, kasus seperti nama Jalan Raya Darmo dapat dipahami. Bahkan, pada tanggal 5 April 1968, Kepala Bagian Pengawasan Umum Kota Madya Surabaya (R. Herman Soewoto) merasa perlu untuk mengeluarkan edaran tentang nama-nama jalan yang terlarang karena tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang (AKS, box 1567, no. 35.325).

---

<sup>72</sup> Penulis tidak menemukan keterangan apakah usul dari pemuda tersebut dikabulkan atau tidak. Akan tetapi, dari peta dan nama jalan yang ada saat ini penulis tidak menemukan nama Jalan Kuburan W.R. Supratman Baru. Yang ada adalah Jln. W.R. Supratman yang terletak di kawasan Jln. Raya Darmo/Dipenogoro.

### C. KONTROL ATAS MEMORI KOLEKTIF: NAMA JALAN DI ERA BELANDA

Dalam bukunya, *Niemw Soerabaia*, Von Faber mengemukakan bahwa dari semua kota di Hindia Belanda, Surabaya adalah kota yang pembangunan dan jalannya paling tidak teratur. Hal ini disebabkan pembangunan dan jalan yang mengikuti alur sungai yang berkelok-kelok di tengah kota, yaitu Kali Surabaya (Kalimas, *pen.*) dan cabangnya Kali Pegirian (Faber, 1933: 17). Salah satu konsekuensi pembangunan kota yang mengikuti alur sungai ini adalah terkonsentrasinya perkampungan-perkampungan penduduk di tepi sungai. Perkampungan Eropa misalnya, memiliki letak yang memanjang di tepi barat Kalimas, yang bagian baratnya berbatasan dengan kampung-kampung Jawa, seperti kampung Pekalongan, Gatotan, Krembangan, Kramat Ujung, Pesapen, dan lain-lain. Sementara itu, perkampungan Cina, Melayu, dan Madura terletak di sisi sebelah timur Kalimas dan berhadapan dengan perkampungan Eropa.

Tentunya, penduduk menggunakan sungai sebagai sarana transportasi yang utama (Husain, 2003: 109–117). Selain sebagai sarana transportasi, masyarakat khususnya orang-orang Belanda juga menggunakan Kalimas sebagai tempat rekreasi. Duket Imam Widodo, dalam artikelnya “Berpesiar di Kalimas Diiringi Orkes Budak” menulis bahwa pada hari minggu, para petinggi pemerintah kolonial Belanda dan keluarganya setelah pulang dari gereja bersampan ria menyusuri Kalimas. Perahu-perahu tersebut didayung oleh budak-budak mereka. Perahu-perahunya dihias dan diiringi oleh permainan musik yang dimainkan oleh para budak lainnya dan dijadikan ajang pamer kekayaan antarkeluarga Belanda (Widodo, 2001).

Selain sungai, terdapat juga jalan besar dan terpenting yang memanjang dari pelabuhan ke Simpang. Jalan ini memanjang sebelah barat dan sejajar dengan Kalimas. Di sinilah terdapat gedung-gedung yang bagus. Selain Balai Kota yang terletak kurang lebih di tengah-tengah kota lama di tepi Kalimas, di sebelah utaranya

masih terdapat berbagai bangunan, seperti gereja Protestan, gedung senjata, sekolah, galangan kapal, dan lain-lain (Tjiptoatmodjo, 1983: 111). Seperti yang diuraikan oleh Handinoto, pola jalan dalam Kota Surabaya sampai tahun 1900-an dapat dikelompokkan ke dalam dua pola. *Pertama*, pola jalan yang tidak direncanakan dan timbul sebagai akibat kegiatan ekonomi serta hubungan sosial penduduknya. Walaupun *Wijkenstelsel* (undang-undang wilayah) sudah tidak berlaku lagi setelah tahun 1900-an, bekas-bekas pembagian wilayah masih terlihat dengan jelas (Handinoto, 1996: 90–93). Jika di sebelah barat Jembatan Merah dihuni oleh orang-orang Eropa, maka di sebelah timurnya dihuni oleh orang-orang Cina serta orang-orang Melayu dan Arab. Jalan-jalan utama di pemukiman ini adalah Handelstraat, Chinesevoorstraat, Chinesche Breestraat, Chinesche Buitenweg, Chinesche Heerenstraat, Chinesche Tempelstraat, dan lain-lain. Adapun jalan-jalan di daerah pemukiman orang Arab dan Melayu antara lain Kampemenstraat, Ampel, dan sekitarnya.

Pola jalan yang *kedua*, adalah yang terletak di daerah bagian selatan kota yang merupakan daerah perumahan dan pemukiman baru. Jaringan jalan di kawasan ini sengaja direncanakan untuk keperluan perumahan orang-orang Eropa. Sampai tahun 1900-an pola jalan yang sengaja direncanakan di Kota Surabaya baru ada di daerah yang disebut sebagai daerah T<sup>73</sup>. Daerah T ini dibatasi oleh daerah Simpang (sekarang Jalan Pemuda), Kaliasin (sekarang Jln. Basuki Rahmat), Lemah Putro, dan Kayoon. Pola jalan yang *ketiga*, adalah daerah yang menghubungkan Surabaya Utara (yang tumbuh menjadi kawasan perkantoran dan perdagangan) dan Surabaya Selatan (daerah perumahan). Jaringan jalan ini, antara lain Jalan Simpang, Kaliasin (sekarang Jalan Basuki Rahmat), Jalan Tunjungan, Jalan Gemblongan, Jalan Pasar Besar, Jalan Baliwerti, dan sekitarnya. Di kawasan jalan-jalan ini kemudian muncul daerah pertokoan,

---

<sup>73</sup> Pola jalan yang direncanakan menyerupai huruf T, dengan rusuk utamanya adalah Palmenlaan (sekarang Jln. Panglima Sudirman), dan *focal point*-nya adalah bangunan Kota Madya Surabaya. Lihat: Handinoto (1996: 91).

misalnya di kawasan Toendjoengan, Gemblongan, Pasar Besar, dan Baliwerti.

Satu hal yang menarik berkaitan dengan pemberian nama jalan pada masa pemerintahan Belanda adalah dipertahankannya sebagian besar nama-nama lokal yang mungkin sudah ada sejak abad ke-19. Dari 1113 nama jalan pada tahun 1940, hanya terdapat  $\pm 21\%$  atau 236 nama jalan yang berbahasa Belanda, selebihnya memakai nama lokal seperti Blimbingstraat, Dinojo, Donorejo, Djagalan, Gembong, Kaliasin, Kalianjar, dan lain-lain.



Sumber: *Soerabaja...*, 2004: 135

**Gambar 17.** Jalan Pasar Besar (kini Jln. Pahlawan). Foto atas diambil pada tahun 1935 dan foto bawah diambil pada tahun 1953

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Nama-nama Belanda terletak di perumahan-perumahan Eropa, kawasan pelabuhan, serta daerah perdagangan. Jalan-jalan yang berada di kawasan elite Darmo misalnya, diberi nama yang merujuk nama para gubernur jenderal Belanda yang pernah memerintah di Indonesia. Nama-nama tersebut antara lain Altingstraat, Baudstraat, van den Boschlaan, Coen Boulevard, van Heutzstraat, van Hoogendorp, dan lain-lain. Meskipun di kawasan ini memakai nama Belanda, Jalan Raya Darmo yang merupakan jalan utama dan strategis tidak mengalami pergantian, tetapi hanya ditambah menjadi Darmo Boulevard.

#### **D. MENGHAPUS INGATAN LAMA DAN MEMBANGUN INGATAN BARU: NAMA JALAN DI ERA JEPANG DAN REPUBLIK**

Seluruh upaya Belanda mengatur dan menguasai kota ini berakhir setelah masuknya pendudukan Jepang yang secara resmi menduduki Surabaya pada 8 Maret 1942. Menyusul pendudukannya yang begitu cepat, ada dua prioritas kebijakan yang dilakukannya, yakni menghapus pengaruh Barat di kalangan rakyat dan memobilisasi rakyat demi kemenangannya. Walaupun pihak Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris, sebaliknya menganjurkan pemakaian bahasa Jepang, nama-nama jalan yang berbahasa Belanda tidak mengalami perubahan. Dibanding mengubah nama jalan, Jepang lebih tertarik untuk memobilisasi massa demi kelangsungan kekuasaannya, baik dengan cara kekerasan maupun dengan cara yang lebih simpatik. Tampaknya Jepang tidak punya banyak waktu untuk mendirikan simbol yang akan dikenang oleh banyak orang. Dalam masa pendudukannya yang sangat singkat, Jepang hanya sibuk dengan latihan perang. Anak-anak sekolah lebih banyak latihan baris-berbaris, menanam dan mencari jarak.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Wawancara, Edi Samson, 8 Juni 2004; 8 dan 14 Juli 2004. Seorang penulis di majalah *Gapura* yang berinisial SB menuturkan, ketika bersekolah di Mohan Kokumin Gakko di Cannalan (sekarang SDN Kusuma Bangsa), mencari buah jarak bersama murid-

Satu-satunya nama jalan yang diganti oleh Jepang adalah Jalan Prambanan menjadi Jalan Kempetai. Di jalan ini sebenarnya tidak ada markas kempetai dan balatentara Jepang, tetapi di jalan ini serta Kalasan, dan sebagainya merupakan pemukiman orang-orang Jepang Sakura, yaitu orang-orang Jepang yang bukan tentara tetapi orang-orang sipil yang dipekerjakan pada instansi-instansi Jepang.<sup>75</sup> Hal yang tertinggal dari pemerintahan Jepang adalah organisasi pemukiman RT (rukun tetangga), penerus langsung Tonari Gumi, yang lebih dari sekadar simbol. Kenyataan satu-satunya perubahan nama jalan pada masa Pendudukan Jepang sangat berbeda dengan Madiun dan Semarang. Melalui *Soera Asia*, Semarang Si mengumumkan bahwa nama-nama jalan yang masih berbau barat, harus diganti dengan nama-nama yang selaras dengan zaman baru. Nama-nama yang diganti adalah Heerenstraat menjadi Poerwodinatan, Dr. De Nooyweg menjadi Jalan Kartini, Karrenweg menjadi Karangtempel, dan lain-lain.<sup>76</sup>

Beberapa tahun setelah Indonesia merdeka (1949), penghapusan nama-nama jalan yang berbahasa Belanda mulai dilakukan secara besar-besaran. Kecenderungan mengganti nama jalan tanpa memperhatikan sejarah dan ciri khas suatu tempat berlangsung pada masa DPR-GR. Pada masa ini ditetapkan nama-nama jalan seperti Jalan Patrice Lumumba, Yos Sudarso, Ade Irma Nasution, Jaksa Agung Suprpto, (dulu hampir bernama Letjen Suparman), Wali Kota Mustadjab, Basuki Rahmat, Samodra, dan lain-lain.<sup>77</sup>

Penghapusan ini dilakukan karena nama jalan merupakan salah satu simbol yang menyimpan kenangan kolektif. Oleh karena itu,

---

murid di kelasnya dan bersama menjelajahi kota sepanjang Kali Berantas, yakni di tepi Kali Undaan, Ngemplak, Ketabangkali, Kayun, sampai di Karimunjawa. “Sekelumit Kenangan: Surabaya Tiga Puluh Tahun yang Lalu” dalam *Gapura* 5, Tahun 1975, hlm. 5.

<sup>75</sup> Wawancara, Judobintoro, 13 Juli 2004.

<sup>76</sup> “Penggantian Nama2 Djalan”, dalam *Soera Asia*, 14 Oktober 2620:

<sup>77</sup> “Perda Pemberian Nama Jalan dan Segala Ikhwalnya.”, dalam *Gapura* (4) 1975, hlm. 13–14.

setelah kemerdekaan semua kenangan itu dianggap perlu dihapus. Nama-nama jalan menjadi semacam kenyataan sosial kolektif. Himpunan nama jalan perkotaan memadukan ruang dan waktu—nama jalan adalah waktu yang membeku di dalam kota. Ia adalah bayangan dan etos kota, serta melambangkan hakikatnya.<sup>78</sup> Nama-nama jalan yang berbahasa Belanda dianggap sebagai bukan kenangan kolektif orang Indonesia, tetapi kenangan orang Belanda. Sebuah kenangan yang dipaksakan, yang sedikit sekali relevansinya bagi orang Indonesia yang menganggap masa kolonial sebagai semata-mata masa penghinaan oleh Belanda.<sup>79</sup>

## 1. Menghidupkan Semangat Perjuangan: Nama-Nama Jalan Pahlawan Versi Pemerintah Versus Masyarakat

Pada Maret 1968, Sanento Yuliman menulis sebuah esai yang sangat menarik di majalah *Horison* dengan judul “Dalam Bayangan Sang Pahlawan”. Di bagian pertama, Yuliman menulis bahwa pahlawan adalah tokoh teatral. Untuk jadi pahlawan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat seni teater: ia mesti cukup agung, cukup dramatis, cukup fiktif, namun cukup meyakinkan. Tentu saja, kata Yuliman, hanya orang mati dapat memenuhi syarat-syarat demikian. Sebab, orang mati hidupnya telah selesai. Ia telah menjadi masa silam. Dengan demikian, dapat disimpulkan, disaring, dan dibuat ikhtisarnya, bahkan dapat direvisi. Lebih jauh Yuliman menulis:

“... teater memerlukan penonton-penonton. Tanpa penonton, tidak ada teater. Aktor-aktor di atas panggung perlu merasa bahwa mereka sedang diperhatikan secara serius oleh hadirin dalam jumlah besar. Siapakah penonton-penonton lakon kepahlawanan kita? Penonton yang mendapat prioritas pertama—yaitu undangan VIP—dengan sendirinya pahlawan-pahlawan, yaitu orang-orang mati. Kita berpartisipasi dengan sejarah—jadi juga dengan masa lampau, dengan perjuangan kepahlawa-

---

<sup>78</sup> Peter J.M. Nas, “Tatanan Simbolik Jakarta: Dari Kosmos ke Kondomium”, dalam: *JiIS* (4), 1993, hlm. 64.

<sup>79</sup> *Ibid.*

nan yang abadi. Arwah para pahlawan harus selalu dibangkitkan, —yaitu ditampilkan ke dalam kesadaran kita. Hal ini kita lakukan dengan jalan pengheningan cipta, ikrar-ikrar, upacara-upacara, pidato-pidato pada setiap kesempatan—makin sering makin baik. *Nama pahlawan tercantum di jalan-jalan, idealnya pada semua jalan dan gang?*<sup>80</sup> [cetak miring oleh penulis]

Gambaran yang dikemukakan oleh Yuliman di atas itulah yang sesungguhnya melanda Indonesia (termasuk Surabaya) di awal-awal masa kemerdekaan, bahkan berlanjut sampai tahun 1990-an. Atas nama nasionalisme dan penghargaan atas jasa pahlawan, maka nama-nama jalan setempat yang sudah lama melekat dalam memori masyarakat harus diganti dengan nama pahlawan yang justru tidak dikenal oleh masyarakat. Seperti yang ditulis oleh P.J.M. Nas untuk kota Jakarta, setelah kemerdekaan, dianggap perlu untuk menghapus sama sekali kenangan kolektif. Semua nama Belanda digantikan dengan nama Indonesia dan jarang sekali yang merujuk pada nama yang lama.<sup>81</sup> Hal yang sama juga terjadi dengan Kota Surabaya. Demikianlah misalnya, Altingstraat diubah menjadi Jalan Trunodjoyo, Bothstraat menjadi Jalan Dr. Wahidin, Carpentierstraat menjadi Jalan Untung Surapati, Coen Boulevard menjadi Jalan Raya Dr. Sutomo, Daendelstraat diubah menjadi Jalan Imam Bonjol, van Heutzstraat diganti dengan nama musuhnya Jalan Teuku Umar.

Beberapa tahun setelah kemerdekaan (1949), nama-nama yang berjasa dalam perjuangan kemerdekaan, baik dalam skala nasional maupun lokal mulai terlihat dalam peta dan daftar nama jalan di Surabaya. Dari 279 nama jalan yang mengalami penghapusan atau perubahan pada tahun 1949, terdapat 30 nama pahlawan nasional dan lokal yang dianggap berjasa dalam memperjuangkan Indonesia merdeka. Perubahan berikutnya terjadi pada tahun 1960-1970-an

---

<sup>80</sup> Sanento Yuliman, “Dalam Bayangan Sang Pahlawan”, dalam *Horison* Maret 1968. Esai ini mendapat hadiah Horison untuk kategori esai terbaik 1968. Terima kasih atas kebaikan Dias Pradadimara yang telah memberikan salinan dari esai ini.

<sup>81</sup> Peter J. M. Nas, *Tatanan ...*, *op. cit.*, hlm. 65.

dan terus berlanjut pada tahun 1990-an. Berikut ini daftar nama jalan yang diganti dengan nama pahlawan.

**Tabel 4.** Perubahan Nama-Nama Jalan Menjadi Nama Pahlawan

No.	TAHUN		
	1925–1940	1949>	1962, 1977, dan 1996
1.	Adm. Ferwerdaweg	Dj. Pati Unus	Jln. Patiunus
2.	Adm. Helfrich Boulevard	Dj. Raja Hang Tuah	Jln. Raya Hang Tuah
3.	Altingstraat	Dj. Trunodjojo	Jln. Trunojoyo
4.	Bataviaweg	Dj. Djakarta	Jln. Sisingamangaraja (1974)
5.	Bothstraat	Dj. Dr. Wahidin	Jln. Dr. Wahidin
6.	Brouwerstraat	Dj. Haji Misbach	Jln. Haji Misbakh
7.	Camphuislaan	Dj. Chairil Anwar	Jln. Khairil Anwar
8.	Carpentierstraat	Dj. Untung Suropati	Jln. Untung Suropati
9.	Cloonstraat (van)	Dj. Ir. Anwari	Jln. Ir. Anwari
10.	Coen Boulevard	Dj. Raya Dr. Sutomo	Jln. Raya Dr. Sutomo Jln. Polisi Istimewa (1996)
11.	Daendelstraat	Dj. Imam Bonjol	Jln. Imam Bonjol
12.	Dijkermanstraat	Dj. Sindhu Negara	Jln. Yos Sudarso (1962)
13.	Gang Pasar Genteng	Dj. Doerasim	Jln. Durasim
14.	Heutzstraat	Dj. Teuku Umar	Jln. Teuku Umar
15.	Hoogendorplaan (van)	Dj. R.A. Kartini	Jln. R.A. Kartini
16.	Hoorstraat (van)	Hamsjah Fansuri	Jln. Hamsahfansuri
17.	Idenburgstraat	Dj. Tjokroaminoto	Jln. Cokroaminoto
18.	Ijzerstraat	Dj. Kencana	Jln. Bung Tomo (1994)
19.	Julianaboulevard	Dj. Tjendana	Jln. Kombes Polisi Duryat
20.	Kaliasin	Kaliasin	Jln. Basuki Rahmat
21.	Kampemenstraat	Di. Kijai Mas Mansjur	Jln. K.H. Mansyur
22.	Melchior	Dj. Raden Saleh	Jln. Raden Saleh
23.	Palmenlaan	Dj. Panglima Sudirman	Jln. Panglima Sudirman
24.	Palmenlaan Z.	Dj. Urip Sumohardjo	Jln. Urip Sumohardjo
25.	Patrasstraat	Dj. Amir Hamzah	Jln. Amir Hamzah? Jln. Tentara Genie Pelajar ('96)
26.	Plampitanstraat	Dj. Achmad Djais	Jln. Ahmad Jaiz
27.	Pijnacker Hordijkstraat	Dj. Dr. Tjipto	Jln. Dr. Cipto
28.	Reesstraat (van)	Dj. Dr. Ratulangi	Jln. Samratulangi
29.	Reiniersz Boulevard	Di. Dipenogoro	Jln. Raya Dipenogoro
30.	Ribeecklaan (van)	Dj. W.R. Supratman	Jln. W.R. Soeptratman
31.	Sandickstraat (van)	Dj. Soedirman	Jln. Residen Sudirman
32.	Scheepmakerspark	Taman Embong Matjan	Taman A.H. Nasution

33.	Sibergstraat (van)	Dj. Monginsidi	Jln. Monginsidi
34.	Speelmanstraat	Dj. M.H. Thamrin	Jln. M.H. Thamrin
35.	Vanderlijnstraat	Dj. Mangukenegoro IV	Jln. Mangukenegoro
36.	Viaductstraat	Dj. Darma Husada ('74)	Jln. Mayjen Prof. Dr. Moestopo ('90)
37.	Weth. V. Gennepweg	Dj. Ondomohen	Jln. Walikota Mestadjab
38.	Wonokitri Boulevard	Wonokitri Boulevard	Jln. Adityawarman Jln. May. Jend Soengkono (1977)
39.	Singaporeweg	Dj. Tanjung Priuk	Jln. Tanjung Priuk Jln. Laksda M. Nazir (1996)
40.	Evertszestraat	Dj. Embong Baskoro	Jln. R.M.H. Soejono (1996)
41.	Trompstraat	Embong Purnomo	Jln.R.P.Soenarto Goendokoesoemo (1996)
42.	Piet Heinstraat	Jln. Embong Asoko	Jln. Mas Soenjoto (1996)
43.	Pekoelen	Jln. Danakarya	Jln. Sultan Iskandar Muda (1996)
44.	Simpangplein	Jln. Pemuda	Jln. Pemuda Jln. Gubernur Suryo (1996)
45.	Djimertoweg	Jln. Jimerto	Jln. Jimerto Jln. B.K.R. Pelajar (1996)
46.	-	Jln. Raya Darmo Permai	Jln. Mayjend H.R. Mohammad Mangoendiprodjo (1993)

Sumber: Perda No. 03/DPRD/KEP/74, tanggal 27 Juli 1974; AKS, box 27, no. 1273; *Surabaya Post* 3 Oktober 1962; Keputusan Wali Kota Daerah Tingkat II Surabaya No. 206, tanggal 22 Agustus 1994 dalam AKS, box 27, no. 1272; Keputusan Wali Kota Surabaya No. 256 Tahun 1990, 29 Oktober 1990 dalam AKS, box 27 no. 1269; Keputusan DPRD Kota Madya Dati II Surabaya No. 12/DPRD/Kep/1977, tertanggal 7 Desember 1977 dalam AKS, box 27 no. 1268; SK Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 46, tanggal 9 Mei 1996 dalam AKS, box 27, no. 1274

Perubahan nama jalan ini menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat. Beberapa nama jalan yang diubah tidak menjadi masalah dan dapat diterima oleh masyarakat. Akan tetapi, beberapa perubahan nama jalan membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan ada yang ditolak oleh masyarakat. Contoh kasus adalah Jalan Sisingamangaraja. Pada tanggal 27 Juli 1974, DPRD Kodya Dati II Surabaya mengeluarkan keputusan No. 63/DPRD/Kep/1974 yang

menyetujui pengabdian nama Raja Sisingamangaraja XII sebagai pengganti nama Jalan Jemursari di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo. Akan tetapi, keputusan ini tidak pernah terlaksana sehingga Wali Kota Surabaya (H. Sunarto Sumoprawiro) —atas desakan Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Provinsi Jatim dengan suratnya No. 317/Sekum/III/1993 tanggal 15 Maret 1993—kembali mengeluarkan surat persetujuan perubahan nama jalan tersebut. Namun demikian, keputusan wali kota ini juga tidak terlaksana. Sebagai kompromi, wali kota kembali mengeluarkan keputusan dengan surat No. 207/1994 yang mengubah nama Jalan Jakarta menjadi Jalan Sisingamangaraja (AKS, box 27, no. 1271 dan 1273).

Namun, walaupun perubahan nama jalan ini sudah hampir satu dasawarsa, masyarakat tetap menggunakan nama lama (minimal dalam komunikasi lisan). Ketika beberapa orang yang berdomisili di kawasan ini saya tanya di mana alamat rumahnya, mereka tidak pernah menyebut di Jalan Sisingamangaraja, tetapi di Jalan Jakarta. Demikian pula ketika saya minta kepada abang becak untuk diantar ke kantor Kecamatan Semampir di Jalan Sultan Iskandar Muda, dia bingung dan menjawab tidak tahu di mana letak jalan tersebut. Akan tetapi, setelah saya menyebut Jalan Danakarya barulah dia paham. Sampai sekarang, di jalan ini masih terdapat dua papan nama jalan, yakni Jalan Danakarya yang berdampingan dengan Jalan Sultan Iskandar Muda.

Pertanyaannya kemudian adalah mengapa masyarakat melakukan “pembangkangan” atas keputusan pemerintah kota yang mengubah nama jalan ini? Mengapa masyarakat lebih suka menggunakan nama lama dibandingkan dengan nama baru yang *notabene* adalah pahlawan nasional? Menurut hemat saya, hal ini disebabkan antara lain karena perubahan nama jalan menjadi nama pahlawan hanya dilakukan atas keinginan dan prakarsa pemerintah kota atau paling tidak berdasarkan usul dari Dewan Harian Daerah Angkatan ‘45 Provinsi Jawa Timur. Nama mereka yang diabadikan di jalan adalah

nama pahlawan versi pemerintah, sedangkan nama pahlawan versi masyarakat yang diusulkan menjadi nama jalan (sepanjang arsip yang penulis temukan) tidak mendapat respons. Contoh kasus adalah surat dari masyarakat RW 5 (Lingkungan Nyamplungan) No. 55/R.W.5/5/1972 tertanggal 27 September 1972 (ketua R.W., H. Zamri Adnan) kepada ketua DPRD Surabaya. Surat ini berisi keinginan untuk melakukan perubahan nama jalan di sekitar Masjid Ampel. Nama jalan yang diusulkan diubah adalah:

**Tabel 5.** Nama-nama yang Diusulkan oleh Masyarakat untuk Menjadi Nama Jalan

No.	Nama Jalan Semula (Lama)	Nama-nama Jalan Baru yg diusulkan	Keterangan
1.	Jalan Nyamplungan	Jln. K.M. Jasin	Pada masa revolusi 1945 s.d. 1950 ditawan Belanda (almarhum)
2.	Jalan Pegirian	Jln. K.H.M. Dachlan	Pada masa revolusi 1945 s.d. 1950 ikut berjuang melawan penjajah Belanda
3.	Jalan Panggung	Jln. K.H. Gufron	Pada masa revolusi 1945 s.d. 1950 ikut berjuang melawan penjajah Belanda
4.	Jln. Karang Tembok	Jln. K. H.M. Cholil	Almarhum pahlawan Islam dan anti penjajahan Belanda
5.	Jalan Sawah	Jln. H.M. Adnan	Pada tahun 1945 s.d. 1950 turut serta berjuang dari kota sampai gerilya melawan Belanda di daerah Kediri.
6.	Jln. Sawah Pulo	Jln. K. Cholil Hasyim	Almarhum ex. Daidantjo PETA th. 1945 untuk pimpinan Hizbullah Surabaya
7.	Jln. Sidorame	Jln. K.H.M. Hasyim Asy'ari	Almarhum mengikuti perjuangan para alim ulama di seluruh Jawa Timur.

Sumber: AKS, box 168, no. 2813

Akan tetapi, jika nama yang diusulkan masyarakat bukan nama pahlawan tampaknya tidak terlalu menjadi masalah. Hal ini misalnya terlihat dengan usul penduduk Kampung Kapas Krampung pada Februari 1958 yang meminta perubahan nama “Bogen Tengah”

menjadi “Kampung Tengah” mengingat jalan ini terletak di kampung Krampung. Usul perubahan yang diajukan pada Februari 1958 ini langsung mendapat respons dan persetujuan baik DPDP Kota Pradja maupun DPRDP dengan surat putusannya No. 90 tertanggal 16 Mei 1958 (AKS, box 667, no. 13.753). Satu hal yang menarik sekaligus mengherankan, di kota ini kita tidak menemukan banyak nama jalan pahlawan revolusi. Berbeda dengan Yogyakarta, Surakarta, dan Malang<sup>82</sup> yang dapat kita temukan Jalan Mayjend D.I. Panjaitan, Jalan M.T. Haryono dan nama pahlawan revolusi lainnya, di Surabaya hanya ditemukan satu nama jalan pahlawan revolusi, yakni Jalan Ahmad Yani, salah seorang jenderal yang terbunuh pada tahun 1965. Namun demikian, walaupun hanya satu nama jalan pahlawan revolusi, Ahmad Yani—seperti kata P. J. M. Nas—secara anumerta telah menaklukkan sebuah tempat di antara nama-nama jalan di nyaris semua kota Indonesia, termasuk Surabaya.

## **2. MENGHENTIKAN GELIAT ULAR NAGA: NAMA JALAN BERBAHASA CINA DAN PERUBAHANNYA**

Satu hal yang “menarik” di Kota Surabaya, ternyata tidak hanya nama-nama berbahasa Belanda yang mengalami penghapusan, tetapi juga nama-nama jalan yang berbahasa Cina. Nama-nama Cina yang masih dapat dijumpai dalam peta 1925, 1935, dan 1940, pada tahun 1958 mulai ada upaya untuk menghapusnya. Pada tanggal 8 September 1958 salah satu anggota Panitia Pekerjaan Umum Kota Praja Surabaya (Jasin Umar) mengirim surat kepada Panitia PU Kota Praja Surabaya yang mengusulkan agar dilakukan perubahan nama-nama Jalan yang berbahasa Cina. Berikut petikan lengkap surat tersebut:

---

<sup>82</sup> Sebuah tulisan yang menarik tentang perubahan nama jalan di Malang dapat dibaca dalam Josef Prijotomo, “Lupa dan Kenang di Dua Sub-era Modern Kota Malang”, dalam Gunawan Tjahjono dan Putu Ayu P. Agustiananda, *Nyala Nirmana 72 tahun Dipl.-Ing Han Awat* (Jakarta: Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2002), hlm. 201.

“Kami usulkan dan kami pandang perlu diadakan perubahan nama-nama jalan di sekitar lingkungan Simokerto, misalnya Jln. Hongkong, Jln. Shanghai, Jln. Peiping, Tjaipo, Topekong, Jln. Leong. Permintaan ini disampaikan kepada ketua panitia PU Kotapraja Surabaya agar diteruskan pada DPRD dan DPD dan dibahas dalam sidang panitia PU. Karena tidak sesuai lagi dan kami usulkan sebagai ganti hendaknya diberi nama dari nama-nama wali songo, sebagai contoh DJln. Sunan Giri, DJln. Sunan Bonang, Sunan Demak karena perjuangan walisongo tersebut sangat terkenal bagi bangsa Indonesia” (AKS, box 676, no. 13.979).

Usul perubahan ini ditindaklanjuti dengan surat ketua panitia PU kepada DPRD Kota Praja Surabaya tertanggal 10 Oktober 1958 yang selanjutnya direspons oleh DPRD dengan suratnya kepada Ketua Dewan Kota Praja Surabaya tertanggal 25 Oktober 1958. Permintaan pertimbangan DPRD kepada DPD tentang masalah ini tampaknya tidak dapat dipenuhi. Hal ini tercermin dari surat yang kembali dikirim oleh DPD Kota Praja Surabaya (Sekretaris: Mr. R. Soetopo Danoesobroto) kepada Kepala PU tertanggal 5 November 1958 untuk meminta pertimbangan atas usul perubahan nama jalan tersebut (AKS, box 676, no. 13.979).

Usul perubahan nama jalan Cina ke nama Indonesia menghabiskan waktu empat tahun. Dalam rapatnya tanggal 13 Oktober 1962, seksi pembangunan DPRD-GR telah menyetujui perubahan nama-nama jalan di kompleks Topekong ini dengan nama Karet, Teh, dsb. Hal ini diperkuat dengan surat putusan wali kota No. 33/DPRD-GR tanggal 25 September 1963 (AKS, box 225, no. 4158). Satu hal yang menarik dari perubahan nama Cina ini, selain keputusannya baru keluar setelah empat tahun, nama penggantinya ternyata juga tidak memakai nama-nama wali seperti yang diusulkan oleh salah satu anggota Panitia Pekerjaan Umum Kota Praja Surabaya. Tidak ada penjelasan mengapa nama-nama jalan Cina ini akhirnya diganti dan mengapa tidak memakai nama wali sebagai penggantinya. Dugaan saya, ini merupakan bentuk kompromi yang dilakukan oleh pemerintah kota, apalagi daerah ini merupakan kawasan perdagangan Cina, sehingga nama-nama seperti kopi, cokelat, teh,

dan lain-lain yang merupakan komoditas perdagangan tidaklah terlalu menyimpang.

Dari 702 nama jalan pada tahun 1925, terdapat 13 nama jalan berbahasa Cina, sedangkan dari 1113 nama jalan pada tahun 1935, terdapat 13 nama jalan berbahasa Cina. Secara bertahap, nama-nama Cina itu dihapus dan digantikan dengan nama yang berbahasa Indonesia. Berikut daftar dan perubahannya.

**Tabel 6.** Nama-nama 'Jalan Cina' dan Perubahannya

No.	TAHUN		
	1925 – 1940	1949 >	1962
1.	Chinese Breestraat	Chinese Breestraat	Jln. Slompretan
2.	Chinese Buitenweg	Chinese Buitenweg	Jln. Sambongan
4.	Chinese Heerenstraat	Chinese Heerenstraat	Jln. Bonkaran
5.	Chinese Tempelstraat	DJln. Kepadjen	Jln. Cokelat
6.	Chinese Voorstraat	DJln. Petjinan Kulon	Jln. Karet/Bibis
7.	Chinese Kerkhofweg	DJln. Girilaja	Jln. Girilaya
8.	Hongkongstraat	Hongkongstraat	Jln. Simolawang Baru III
8.	Peipingstraat	Peipingstraat	Jln. Simolawang Baru
9.	Shanghaistraat	Shanghaistraat	Jln. Simolawang Baru IV
10.	Tien Tjingstraat	Tien Tjingstraat	Jln. Simolawang Baru IV
11.	Tepekongstraat	Tepekongstraat	Jln. Cokelat
12.	Thesingstraat	DJln. Ketjilung	Jln. Kecilung
13.	Tjaistraat	Tjaistraat	Jln. Kopi

Sumber: Widodo, 2002: 451-459; *Alphabetisch...*, th: 1-32; *Genijzigd...*, th: 3-14; AKS, box 676, no. 13.979; box 225, no. 4158.

### 3. Kota-Kota di Dunia sebagai Nama Jalan dan Perubahannya: Sebuah Proses Domestifikasi

Pada tahun 1925 dan 1935 di Kota Surabaya dapat dijumpai beberapa nama jalan yang merupakan nama-nama kota di dunia seperti yang tampak dalam Tabel 7. Nama-nama jalan yang terdapat pada tabel tersebut sesungguhnya menyiratkan kepada kita betapa kosmopolit dan majunya kota ini. Jalan-jalan tersebut berada di kawasan pelayaran, industri, dan perdagangan yang sejak abad ke-

19 telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Seperti diketahui, sampai akhir abad ke-19, Surabaya telah menjadi salah satu kawasan industri yang termaju di antara daerah-daerah lain di Hindia Belanda. Bahkan pada saat itu perkembangan industri di Surabaya sudah setaraf dengan yang dicapai oleh Calcutta, Bombay dan Osaka, serta berada satu tingkat di atas Singapura, Bangkok, Hongkong, Shanghai, dan Tokyo (Dick, 1993: 125–126).

**Tabel 7.** Beberapa Nama Kota di Dunia sebagai Nama Jalan dan Perubahannya

No.	1925 & 1935	< 1959	3 Februari 1959*	Sekarang
1.	Algiersstraat	-	-	Jalan Nilam I
2.	Amsterdamskade	Pangkalan Amsterdam	Tambatan Jamrud Selatan	Tambatan Jamrud Selatan
3.	Amsterdamweg	DJln. Amsterdam	Dj. Jamrud Selatan	Jln. Jamrud Selatan
4.	Colomboweg	-	-	Jln. Tanjung Sadar
5.	Dwars-Nieuw Hollandsstraat	DJln. Pesapen Djetic	-	Jln. Pesapen I
6.	Gibraltarstraat	DJln. Gibraltar	Dj. Nilam Tengah II	Jln. Nilam Tengah
7.	Hollandpier	Tambatan Berlian	Dj. Berlian	Jln. Berlian
8.	Honkongstraat	-	-	Jln. Simolawang Baru III
9.	Kantonstraat	-	-	Jln. Simolawang Baru II
10.	Lissabonweg	Djalan Lissabon	Dj. Nilam Tengah I	Jln. Nilam Selatan
11.	Londonstraat**	Djalan Blambangan	-	Jln. Blambangan
12.	Manillastraat	-	-	Jln. Teluk Semangka
13.	Nw.Hollandstraat	DJln. Belakang Penjara	-	Jln. Belakang Penjara
14.	Rotterdamkade	Pangkalan Rotterdam	Tambatan Jamrud Utara	Tambatan Jamrud Utara
15.	Marseillegweg	Djalan Marseille	Dj. Nilam Barat	Jln. Nilam Barat

\* Putusan No. 21/D.P.R.D. Kotapradja Surabaya, tanggal 3 Pebruari 1959. Lihat AKS, box 665, no. 13.701.

\*\* Dalam daftar nama jalan tahun 1935 tertulis Londonstraat, sedangkan dalam peta tahun 1925 tertulis Loudonstraat.

16.	Rotterdamweg	Jln. Rotterdam	Dj. Jamrud Utara	Jln. Jamrud Utara
17.	Shanghaystraat	-	-	Jln. Simolawang Baru IV
18.	Singaporeweg	-	-	Jln. Tanjung Priuk & Jln. Laksda M. Nazir (1996)

Sumber: Widodo, 2002: 451-459; *Alphabetisch...*, th: 1-32; *Gewijzigde...*, th: 3-14; AKS, box 665, no. 13.701.

Pada masa Dr. R. Satrio Sastrodiredjo (1958–1964) menjadi Wali Kota Surabaya, beberapa nama kota di dunia tersebut diganti dengan nama-nama yang berbau Indonesia. Di masa wali kota yang ke-16 ini (seperti yang saya sebutkan pada pendahuluan) sebenarnya terdapat usaha untuk mengabadikan nama seorang tokoh dari Kongo, yakni Jalan Patrice Lumumba sebagai pengganti nama Jalan Raya Darmo. Akan tetapi, nama jalan ini hanya bertahan selama lima bulan, karena pada Agustus 1961 dikembalikan ke nama semula dengan kompromi bahwa Jalan Ngagel mulai Jembatan Ngagel/ Dinoyo sampai Jembatan Ngagel Wonokromo diubah menjadi Jalan Patrice Lumumba. Namun demikian, Jalan Patrice Lumumba kembali harus hilang dengan keluarnya Surat Keputusan DPRD Kota Madya Surabaya pada tahun 1974 yang mengembalikan Jln. Patrice Lumumba ke nama aslinya, yakni Jln. Ngagel (AKS, box 1130, no. 23.275).

## **E. NAMA YANG BERBICARA: KLASIFIKASI DAN MAKNA NAMA JALAN**

Beberapa peneliti mencoba mengklasifikasi nama-nama jalan berdasarkan golongan tertentu. P.J.M. Nas misalnya, merangkum nama-nama jalan di Jakarta kedalam lima golongan utama, yakni 1) Nama-nama sejarah, 2) Nama-nama yang berkaitan dengan lingkungan manusia, 3) Nama yang berkenaan dengan keadaan serta perasaan manusia, 4) Nama lembaga-lembaga dan keadaan sosial, dan 5) Nama-nama benda buatan manusia, sedangkan Raulin menggolongkan nama-nama

jalan atas tiga golongan, yaitu kenangan kolektif, sejarah, dan ingatan proyektif (Nas, 2000: 216–217). Selain dua orang peneliti di atas, Kees Grijns dan Sandra Taal juga melakukan klasifikasi nama jalan. Grijn untuk nama-nama tempat dan jalan di Jabotabek, sedangkan Taal di Palembang. Klasifikasi Grijn meliputi: A. Lingkungan fisik yang terdiri atas: 1) lingkungan alam (bukit atau pegunungan; dataran rendah atau lembah; daerah/tanah berhutan; tanah rawa; tanjung atau teluk; sungai-sungai; kolam, danau, sumur, mata air; arungan, jeram, riam, tepi/pinggir sungai; karang, dan warna, 2) Penggunaan tanah, 3) Tumbuhan, 4) Hewan, 5) Perkampungan, 6) Lokasi dari suatu tempat, dan 7) Teknologi. B. Lingkungan sosial yang terdiri atas: 1) Tradisi, kepercayaan, fantasi, (kuasi)-etimologi, dan terjemahan, 2) Agama beserta aliran-alirannya, 3) Tempat keramat (orang-orang yang disucikan), 4) Laki-laki atau perempuan, semangat, dewa, orang-orang yang suci, pahlawan nasional; 5) Kejadian-kejadian, kondisi-kondisi, dan fakta-fakta; 6) Lama, baru, gengsi, status, (moral) sikap, 7) Pemerintahan, administrasi pengadilan, 8) Hubungan resmi, perumahan, pemukiman, 9) Perdagangan, pasar, dan profesi, 10) Ukuran, jumlah, harga, hasil, dan 11) Pemburuan, pemancingan, permainan, olahraga, pertunjukan rakyat (Nas, 2000: 216–223). Dibanding dengan klasifikasi Grijns, klasifikasi Taal lebih sederhana, yaitu dibagi ke dalam tujuh kategori pokok: nama-nama yang berhubungan dengan nama tempat; netral atau nama-nama yang puitis (seperti burung, bunga, dan buah-buahan); nama yang berhubungan dengan tertib sosial atau komunitas lokal; nama-nama yang merujuk pada kontes nasional (seperti pahlawan nasional); nama yang merujuk pada lokal atau kontes regional; nama-nama yang merujuk pada internasional.

Bertitik tolak dari berbagai klasifikasi di atas, saya membagi nama-nama jalan di Kota Surabaya berdasarkan sepuluh kategori pokok: 1) Nama-nama atau tokoh yang berjasa bagi pemerintah kolonial yang kemudian diganti dengan nama Indonesia; 2) Nama-nama yang merujuk pada nama-nama Cina; 3) Nama-nama yang merujuk pada

nama internasional; 4) Nama yang berhubungan dengan religi; 5) Nama yang merujuk pada pertunjukan seni dan olahraga; 6) Nama yang merujuk pada aktivitas ekonomi; 7) Nama yang berhubungan dengan lingkungan alam; 8) Nama yang merujuk pada nama pulau dan daerah di luar Surabaya; 9) Nama yang berhubungan dengan hewan, dan 10) Nama yang merujuk pada tumbuhan. Tentunya ada beberapa nama yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori di atas, khususnya nama-nama jalan yang dilatarbelakangi oleh cerita atau riwayat tertentu.

Pada masa kolonial, nama-nama jalan yang memakai nama-nama orang Belanda cukup banyak tersebar di kota ini. Di kawasan elite Darmo-Boulevard misalnya, terdapat nama-nama seperti Altingstraat, Daendelsstraat, Heutzstraat, Idenburgstraat, Speelmanstraat. Pada pasca-kemerdekaan Indonesia, nama-nama Belanda tersebut diubah menjadi nama-nama yang merujuk pada nama pahlawan Indonesia, berturut-turut Jln. Trunojoyo, Jln. Imam Bonjol, Jln. Teuku Umar, Jln. Cokroaminoto, dan Jln. M.H. Tamrin. Nama-nama yang merujuk pada nama Cina misalnya Chinese Breestraat, Chinese Buitenweg, Chinese Heerenstraat, Chinese Tempelstraat, Chinese Voorstraat, dan lain-lain. Pada tahun 60-an, nama-nama Cina ini kemudian berturut-turut diubah menjadi Jln. Slompretan, Jln. Sambongan, Jln. Bongkaran, DJln. Kepandjen kemudian diubah lagi menjadi Jln. Cokelat, DJln. Petjinan Kulon yang selanjutnya diubah lagi menjadi Jln. Karet/Bibis.

Adapun nama-nama yang merujuk pada nama internasional antara lain Amsterdamskade (Pangkalan Amsterdam dan sekarang berubah menjadi Tambatan Jamrud Selatan), Colomboweg (sekarang Jln. Tanjung Sadar), Gibraltarstraat (menjadi DJln. Gibraltar kemudian menjadi Dj. Berlian dan berubah lagi menjadi Jln. Nilam Tengah II), Hollandpier (Tambatan Berlian), Honkongstraat (Jln. Simolawang Baru III), Kantonstraat (Jln. Simolawang Baru II), Lissabonweg (Djalan Lissabon kemudian berubah menjadi Jln. Nilam Tengah I dan kemudian jadi Jln. Nilam Selatan), Londonstraat (Jln. Blambangan),

dan lain-lain. Nama-nama yang berhubungan dengan religi dapat dijumpai misalnya Kerkstraat, Roomse Kerkstraat, Tempelstraat, dan sebagainya, sedangkan yang merujuk pada pertunjukan (seni) dan olahraga misalnya Comediestraat (sekarang Jln. Merak), Ketjapiweg (sekarang Jln. Kecapi), Dwars-Paradestraat (sekarang Jln. Sriti), Marine Sportterrein-straat, Renbaanweg. Adapun nama-nama yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi antara lain Handelstraat, Pasar Babaan Straat (sekarang Jln. Pasar Babaan), Pasar Besar (sekarang Jln. Pahlawan), Pasar Kembangstraat (sekarang Jln. Pasar Kembang), Pasar Toerie (sekarang Jln. Pasar Turi).

Untuk nama-nama yang berhubungan dengan lingkungan alam misalnya nama gunung dan bukit. Sepanjang mata memandang, di Kota Surabaya, kita tidak akan melihat gunung atau bukit, tetapi jalan-jalannya banyak yang memakai nama gunung dan bukit. Nama-nama itu misalnya Ardjoenaboulevard (sekarang Jln. Raya Arjuna), Ardjoeno-park dan Kawistraat (sekarang Jln. Kawi). Jalan ini merupakan jalan raya utama yang terletak di Sawahan. Sekarang ini, di kawasan Sawahan terdapat banyak jalan dengan nama gunung, seperti Jln. Anjasmoro, Jln. Bukit Barisan, Jln. Klabat, Jln. Bromo, Jln. Kinibalu, Jln. Penanggungan, bahkan dewasa ini sudah menyebar ke wilayah lain, seperti ke Surabaya Barat dan Selatan, misalnya Jln. Bukit Darmo, Jln. Gunung Sari, Jln. Bukit Pakis, dan lain-lain. Selain itu, dalam peta 1940, ditemukan juga nama-nama jalan dengan menggunakan kata *boelak* yang berarti padang antara desa-desa. Jalan-jalan tersebut adalah Boelakbanteng (sekarang Jln. Bulakbanteng), Boelakroekem (sekarang Jln. Bulakrukun), Boelaksari, dan Boelaksari Gang Koeboeran. Adapun yang berkaitan dengan hutan misalnya Wonokoesoemo (sekarang Jln. Wonokusumo), Wonokromoweg (sekarang Jln. Raya Wonokromo), Grogol (sekarang Jln. Grogol). Terdapat juga nama jalan yang memakai nama tanjung seperti Tandjoeng Baleistraat (sekarang Jln. Tanjung Balai), Tandjoeng Perakkade (sekarang Tambatan Tanjung Perak), dan Tandjoeng Perakweg (-boulevard) (sekarang Jln. Tanjung Perak).

Untuk nama-nama sungai banyak terdapat di kawasan Darmo dan Dipenogoro. Jalan-jalan tersebut antara lain: Baritoestraat, Bengawanstraat (sekarang Jln. Bengawan), Brantasstraat, Kalianjar (sekarang Jln. Kalianyar), Kaliasin (sekarang Jln. Basuki Rahmat), Kalimalang (sekarang Jln. Kalimalang), Kalimati (sekarang Jln. Kalimati), Kaliondo (sekarang Jln. Kapasan), Kalimas, Kapoeasstraat (sekarang Jln. Kapuas), Moesistraat (Jln. Musi), Tjiliwoengstraat (sekarang Jln. Ciliwung), Tjimanoeckstraat (sekarang Jln. Cimanuk), Tjitandoeistraat (sekarang Jln. Citandui), dan sebagainya. Nama yang merujuk pada nama pulau dan daerah di luar Surabaya dapat dijumpai misalnya Balistraat (sekarang Jalan Bali), Bankastraat (sekarang Jln. Bangka), Bataviaweg (sekarang Jln. Jakarta yang kemudian diubah lagi menjadi Jln. Sisingamangaraja), Bimastraat (sekarang Jln. Bima), Bodjonegoroweg (sekarang Jln. Bojonegoro), Boelelengstraat (sekarang Jln. Teluk Nibung), Borneostraat (sekarang Jln. Kalimantan), Bromostraat (sekarang Jln. Bromo), Celebesstraat (Jln. Sulawesi), Ceramstraat (sekarang Jln. Teluk Lampung), Floristraat (sekarang Jln. Floris), Grisseesche plein, Grisseesche weg (sekarang Jln. Gresik), Jambistraat (sekarang Jln. Jambi), Javastraat (sekarang Jln. Jawa), Lombokstraat (sekarang Jln. Lombok), Martapoerastraat (sekarang Jln. Martapura), Merapistraat (sekarang Jln. Merapi), Niasstraat (sekarang Jln. Nias), Palembangstraat (sekarang Jln. Tanjung Pinang), Soembawastraat (sekarang Jln. Sumbawa), Sumaterstraat (sekarang Jln. Sumatera), Sumateradwasstraat, Timorstraat (sekarang Jln. Karimata).

Nama yang berhubungan dengan buah-buahan, tumbuhan, dan pohon merupakan kategori yang juga banyak dijumpai sebagai nama jalan di Surabaya pada tahun 1940. Ampel adalah nama sejenis bambu yang banyak digunakan sebagai nama jalan. Ampel atau Ngampel adalah tempat kelahiran agama Islam di Jawa. Pemberian nama Ampel disebabkan ketika Raden Rachmad (kemudian bergelar Sunan Ngampel) membentuk masyarakat Islam, kawasan ini masih merupakan hutan bambu. Di kawasan ini terdapat banyak jalan yang

didahului oleh kata Ampel, seperti Ampel Asahan, Ampel Blakang, Ampel Bloembang, Ampel Goebah Kidoel, Ampel Kembang, Ampel Kendjeran, Ampel Kenongo, Ampel Kesoemba, Ampel Kresan, Ampel Lontjeng, Ampel Magepoor, Ampel Martabak (Soetji), Ampel Masdjit, Ampel Patjar (Sirihstraat), Ampel Sawahan, Ampel Tebasan, Ampel Tjempaka, dan lain-lain.

Nama pohon lainnya yang menjadi nama jalan adalah: Waroesstraat (sekarang Jln. Waru), Kembodjastraat (sekarang Jln. Kemboja). Adapun nama buah dan dapat dikonsumsi dapat dijumpai: Blimbingstraat (sekarang Jln. Blimbing), Boengoeran (sekarang Jln. Bunguran), Djamboeweg (sekarang Jln. Jambu), Djarak (Gang), Doerenweg, Delimaweg (sekarang Jln. Delima), Doekoehstraat (Jln. Dukuh), Djagoeweg, Djeroekweg (sekarang Jln. Jeruk), Katesweg (sekarang Jln. Kates), Nangkaweg (sekarang Jln. Nangka), Ramboetanweg (sekarang Jln. Rambutan), Salakweg (sekarang Jln. Salak), Sirikajaweg (sekarang Jln. Sirikaya), Nanasweg (sekarang Jln. Nanas), Katjapiring (sekarang Jln. Kacapiring), Kedondongstraat (sekarang Jln. Kedondong). Bunga yang menjadi nama jalan adalah: Mawarstraat (sekarang Jln. Mawar), Melatiweg (sekarang Jln. Melati), Patjarweg (sekarang Jln. Pacar), Kemuningstraat (sekarang Jln. Kemuning). Untuk nama jalan yang menggunakan nama hewan adalah: *Bibisstraat* (sekarang Jln. Bibis), Djagir(an)-anak kerbau (jantan), Djagir Wonokromo, Djagir Wonokromo Masigit, Djagir Wonokromo Lor, Djagir Wonokromo Tengah, Djagir Wonokromo Wetan.

Selain klasifikasi di atas, beberapa nama jalan di Surabaya memiliki cerita di baliknya. Berikut ini saya tampilkan beberapa nama jalan yang saya kutip dari tulisan Romo (R.M) Bintarti, berjudul “Meneliti Nama-nama Jalan” yang dimuat dalam *Surabaya Post* (Bintarti, 1964). SEMUT adalah tempat tinggal atau asrama para karyawan muda yang mengabdikan kepada sang Adipati Surabaya. Dalam Kamus Jawa Gericke Roorda “semut” diartikan sebagai korps karyawan-karyawan atau abdi-abdi yang masih muda. Dapat diambil

kesimpulan, Semut adalah tempat tinggal karyawan-karyawan yang pekerjaannya di tempat pembongkaran barang-barang (Bogkaran) dan tempat-tempat pandai-pandai pembuat pisau yang mempunyai dua bagian yang tajam (tjantik).

PENELEH pada zaman raja Wisnuwardhana alias Ronggowuni dari Singosari. Penilih adalah tempat bersemayam seorang pangeran pilihan (pinilih) putra Wisnuwardhana yang pangkatnya Kanuruhan sama dengan pangkat bupati. Kiranya pada waktu nama Surabaya belum tercipta karena di situ hanya disebutkan: “sang pangeran pinilih atau kinasih diangkat menjadi Kanuruhan di tanah Glagah Arum yang terletak di antara sungai Brantas dengan sungai Pegirian”.

KEMBANG KUNING. Menurut Adi Sukirna dalam bukunya yang berjudul Mahua nama Islamnya adalah Rachmad kemudian mendapat gelar Raden dari raja Majapahit dan kemudian bergelar Sunan Ngampel, bukan karena ditempat ini terdapat banyak tumbuh-tumbuhan yang bunganya berwarna kuning, tetapi asalnya Kumbang Kuning. Ma'Hua dengan sahabatnya Ki Wirjosarodjo penyebar agama Islam di Gunungsari untuk pertama kali menemukan pohon-pohon Gebang yang dikerumuni oleh binatang-binatang kumbang yang berwarna kuning.

PARABAN. Menurut Gericke Roorda pengarang kamus Djawa-Belanda, *praban* berasal dari kata *praba* yang artinya barang yang bersinar atau pakaian yang biasa dipakai oleh raja (keprabon). Selain itu, juga berarti permulaan dari purba. Karena praban itu terletak di dekat Baliwerti atau Balowerti maka yang dimaksud tentunya “permulaan”. Jadi, praban adalah permulaan dari Balowerti (tembok) kraton kediaman adipati yang menguasai Surabaya pada zaman sebelum Mataram.

KALONGAN merupakan selimpangan dari kata Kalangan untuk mudahnya lalu diucapkan Kalongan. Ini adalah semacam arena yang berbentuk bundar tempat menyabung ayam jantan (jago) atau binatang jangkrik dan perjudian lainnya. Kalongan terletak sebelah kanan kabupaten (sekarang kantor pos besar) sehingga dapat

dipastikan bahwa bupati atau putra-putranya jang menyelenggarakan perjudian itu.

PETOMON adalah tempat pertemuan para kepala-kepala desa atau pegawai kadipaten. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa di Petemon dahulunya terdapat sebuah rumah besar atau pasanggahan untuk pertemuan-pertemuan itu. Mungkin juga kebun tanaman semacam Temu seperti Temugiring, Temulawak, dan lain-lain.

AMBENGAN dalam kamus Gericke-Roorda diberi arti sebagai “tempat yang terkepung” (*omsingelde plaats*) ialah tempat penjagaan untuk melarang anasir-anasir yang tidak disukai memasuki Kota Surabaya. Letaknya dekat Ketabang yang menurut kamus tersebut berarti “pinggir atau tepi”. Jadi Ambengan dapat diartikan sebagai desa di tepi kota dekat penjagaan daerah yang terkepung itu.

TUNDJUNGAN dahulu adalah tempat tukang pembuat tunjung tombak. Kembang tunjung ialah bunga teratai (lotus). Seperti diketahui pada bagian besi di bawahnya diberi ornamen semacam bunga tunjung (bunga teratai). Akan tetapi ada juga orang jang memberi arti bahwa Tundjungan adalah tempat tukang yang membuat *prusi-zwavelzuur ijzer* atau *ijzervitriool*—untuk mengobati luka-luka terutama bubul (borok di telapak kaki).

BUNGKUL. Bahasa Jawa “Bungkul” artinya tunas untuk bunga. Untuk barang, berarti tombol atau combol. Untuk tongkat “pemegang” (Jawa Penthol). *Figuurlijk* seorang pemuda atau seorang calon dapat disebut “calon” (tunas). Memang Pesarean Bungkul adalah makam “calon empu” (ahli membuat keris) dari keraton Majapahit. Ia adalah putra Kyai Empu Supa, pembuat keris-keris pusaka Majapahit. Dalam perjalanan dari rumahnya di Tuban ke Majapahit putra Empu Supa itu meninggal dunia di Surabaya dan dikubur di daerah Dinaja (Dinoyo, Surabaya). Kabarnya putra empu Supa itu bukan di makam yang sekarang ini tetapi di tempat lain. Karena tempat ini dibangun rumah-rumah Belanda maka makam putra Supa itu dipindahkan ke tempatnya sekarang di atas gumuk

atau bungkul (anak bukit) katanya lebih sesuai dengan nama “bungkul empu” itu.

BLAURAN. Mungkin ini berasal dari kata *Balur* atau *mblaur* yang artinya “mengeringkan ikan”, jadi tempat penjemuran ikan ini disebut “Mbaluran” yang lalu menjadi Blauran. Istilah *hambalur iwak* artinya memotong-motong ikan yang hendak dijemur.

Dari uraian di atas, khususnya tentang klasifikasi nama jalan menunjukkan adanya kebijakan segregasi etnik dan status sosial masyarakat. Jalan yang memakai nama-nama Belanda misalnya dipergunakan untuk kawasan elite yang dihuni oleh orang-orang Belanda, sedangkan nama jalan Cina dipakai untuk kawasan perdagangan yang memang banyak dihuni oleh orang-orang Tionghoa. Untuk kawasan yang dihuni oleh penduduk pribumi, nama-nama jalannya banyak memakai nama-nama tumbuhan, hewan, dan nama-nama lokal lainnya.<sup>83</sup> Ketika Indonesia merdeka, kecenderungan segregasi di atas tampaknya tidak begerak. Nama-nama jalan di kawasan elite yang dahulunya memakai nama-nama Belanda diganti dengan nama-nama Indonesia yang juga elite (baca: pahlawan), sedangkan di kawasan pecinan diubah dengan nama komoditas perdagangan seperti Jln. Cokelat, Jln. Kopi, Jln. Karet, dan lain-lain.[]

---

<sup>83</sup> Bandingkan dengan segregasi etnik yang tercermin dengan nama jalan di Medan, seperti yang terdapat dalam Freek Colombijn, “Sign of the Times: Symbolic Change Around Indonesian Independence”, dalam *International Workshop Urban Symbolism*, Leiden, Juni 16–18, 2004, hlm. 15.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

# DARI IKAN HIU DAN BUAYA HINGGA SINGA DAN TUGU PAHLAWAN: LAMBANG KOTA DALAM PUSARAN KEKUASAAN

## A. MANUSIA DAN LAMBANG

Manusia dan lambang merupakan dua entitas yang tampaknya sulit dipisahkan. Di gua-gua tempat tinggal manusia pada zaman prasejarah misalnya, ditemukan banyak gambar dan lambang yang dilukis di dinding gua. Di gua-gua Irian Jaya terdapat lukisan-lukisan yang menyerupai manusia dan binatang, manusia dengan topinya yang lancip, orang yang berjongkok dengan tangannya diangkat, dan gambar kadal sebagai lambang nenekmoyang mereka (Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1992: 165–166). Di kerajaan-kerajaan di nusantara juga dikenal adanya berbagai lambang yang digunakan sebagai perlengkapan upacara dan pesta. Keraton Surakarta misalnya, memiliki banyak *songsong* (payung) yang jenis dan warnanya melambangkan status, kedudukan, dan jabatan seseorang.<sup>84</sup>

Bahkan di Sulawesi Selatan, lambang-lambang kerajaan yang sering disebut dengan *kalompoang* pernah menjadi sumber konflik

---

<sup>84</sup> Keterangan lebih lengkap tentang berbagai lambang di keraton ini dapat dibaca dalam Darsiti Soeratman, *Kebudayaan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1989), hlm. 672–678. Untuk contoh bentuk dan warna *songsong* di kerajaan Jawa, lihat: M, J. Th., *soerat kandoengan boeat goenanja segala prijaie-prijaie, jang memegang pekerdjaan di tanah gouvernemennan di poelo Djawa dan Madoera, ia-itoe katrangan atas segala hoekoeman dan prentab, jang patoet di kataboei oleh-nja* (Semarang: G.C.T. van Dorp & Co., 1890), hlm. 83–84.

antara kerajaan Bone dan Gowa pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 (Husain, 2000). Tampaknya, perhatian akan pentingnya lambang ini tidak hanya milik masyarakat yang hidup di zaman pra-sejarah atau zaman kerajaan-kerajaan, tetapi juga menjadi perhatian masyarakat dan kota-kota yang sudah “modern”. Oleh karena itu, hampir dapat dipastikan, bahwa semua kota pasti memiliki lambangnya sendiri dengan ciri yang berbeda antara satu kota dengan kota lainnya. Lambang kota, adalah salah satu tipe simbol yang tercakup dalam domain politik-sejarah yang menarik untuk dipelajari. Menarik, karena lambang kota tidak hanya digunakan sebagai salah satu perlengkapan dalam berbagai upacara atau acara resmi sebuah kota atau sebagai lencana yang dilekatkan di baju PNS atau kop-kop surat dinas, akan tetapi lambang kota sesungguhnya merefleksikan karakteristik, sejarah, spirit, dan cita-cita sebuah kota. Lebih dari itu, lambang kota juga merefleksikan siapa yang sesungguhnya menguasai kota tersebut. Oleh karena itu, perubahan kekuasaan tidak jarang berimplikasi pada perubahan lambang kota.

Bagian ini akan memusatkan perhatian pada lambang Kota Surabaya yang sampai saat ini sudah mengalami tiga kali perubahan. Dengan menggunakan berbagai sumber, baik dokumen-dokumen arsip, koran, maupun wawancara, tulisan ini akan berusaha melihat bagaimana dan mengapa kekuasaan memengaruhi perubahan lambang kota.

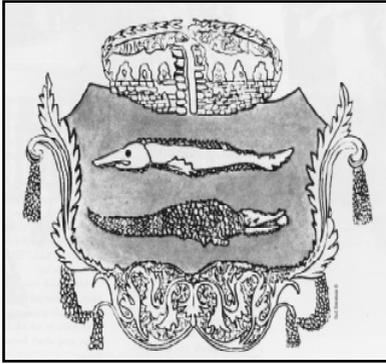
## **B. SINGA MENCENKERAM *SOERA-ING-BAIA*: LAMBANG KOTA DI ERA BELANDA**

Surabaya tidak sekadar nama sebuah kota. Nama itu sekaligus merupakan simbol yang memiliki sarat makna. Jika kita memasuki kota ini dari arah selatan, maka akan melewati sebuah patung yang sangat indah dan artistik yang terletak di depan kebun binatang. Patung yang diresmikan pada tahun 1988 dan terletak di depan kebun binatang tersebut menggambarkan pertarungan antara ikan

hiu (*sura*) dengan buaya (*baya*). Dua binatang itu kemudian menjadi nama dan lambang Kota Surabaya. Pertanyaannya kemudian adalah kapan sesungguhnya masyarakat Surabaya memiliki lambang kota, dan bagaimana pergantian kekuasaan memengaruhi bentuknya, serta apa makna di balik lambang tersebut? Dari sumber yang ada, tidak ada yang dapat memastikan kapan kota ini memiliki lambang. Akan tetapi, satu hal yang pasti adalah lambang kota sudah ditemukan pada sebuah *pening* tua yang dibuat untuk memperingati 10 tahun usia Perkumpulan Musik St. Caecilia (1848-1858). Selain itu, lambang yang sama ditemukan juga pada kepala “Soerabayasche Courant” terbitan tahun 1858 (Timoer, 1983: 45).

Berbeda dengan lambang yang dipakai saat ini, yakni buaya dan ikan hiu dalam posisi saling berkelahi, maka pada lambang (yang diyakini sebagai wujud yang paling tua) ini, ikan hiu dan buaya berada dalam posisi yang sejajar. Di atasnya terdapat gambar benteng yang berbentuk mahkota, sedangkan di kiri dan kanannya terdapat ornamen dedaunan. Dalam sebuah iklan (yang sayang sekali tidak ada angka tahunnya) lambang Kota Surabaya berupa ikan hiu dan buaya dalam posisi yang sejajar ini dapat juga kita temukan. Hanya saja, bentuknya lebih sederhana, tidak ada benteng ataupun ornamen-ornamen lainnya. Ketika Surabaya memperoleh status sebagai *gemeente* (kota praja) pada tahun 1906, maka muncullah sebuah lambang baru yang lebih artistik dan dramatis. Gambar ikan hiu dan buayanya berwarna perak dan dalam posisi berkelahi, sedangkan perisai yang berwarna biru menjadi latar belakangnya.

Seperti gambar pertama, pada lambang kedua ini juga terdapat benteng yang berbentuk mahkota yang digambar dengan lebih indah. Selain itu, di sisi kiri dan di kanannya terdapat dua ekor singa (*Nederlande Leeuwen*) berwarna emas yang berlidah dan berkuku merah sebagai lambang Kerajaan Belanda, sedangkan kaki kedua binatang buas itu mencengkeram pita yang bertuliskan kata-kata “SOE-RAING-BAIA”.



Sumber: Faber, 1931: 1 dan 5

**Gambar 18.** Lambang pertama dan kedua Kota Surabaya

Kehadiran sebuah benteng dalam bentuk mahkota dan dua ekor singa sebagai lambang Kerajaan Belanda di sisi kanan dan kiri lambang kota ini tidak saja dijumpai pada lambang Kota Surabaya, tetapi hal yang sama tampak pada lambang Kota Jakarta (Batavia),<sup>85</sup> Bandung,<sup>86</sup> Malang, dan Makassar. Pertanyaannya kemudian adalah apa makna di balik itu? Menurut hemat penulis, kehadiran singa tersebut merupakan simbol semakin intensifnya penguasaan pemerintah kolonial Belanda terhadap kota-kota di nusantara termasuk Surabaya. Pada awal abad ke-20 (1903) pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan undang-undang desentralisasi dan pada tahun 1905 Batavia sebagai kota yang berada di pusat pemerintahan untuk pertama kalinya menerapkan undang-undang tersebut. Penerapan undang-undang ini kemudian disusul oleh kota-kota lain seperti Surabaya, Bandung, dan Malang.

<sup>85</sup> Seekor singa mencengkeram lambang Batavia pernah divisualisasikan dalam sebuah patung yang dahulu dipasang di depan gedung Pancasila, Jln. Pejambon dan terdapat juga dalam cap resmi Dewan Kota Praja Batavia. A Heuken SJ., *Tempat-tempat Bersejarah di Jakarta* (Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1997), hlm. 49 dan 59.

<sup>86</sup> Pada lambang Kota Bandung terdapat juga dua di sisi kiri dan kanan dan mencengkeram sebuah pita dengan tulisan "Ex Undis Sol". Hal yang sama ada pada Kota Malang dengan tulisan "Malang Nominor Sursum Moveor". Edi S. Ekadjati, dkk., *Sejarah Kota Bandung 1945–1979* (Jakarta: Depdikbud, 1985), hlm. 107.

Dengan status yang diperolehnya sebagai *gemeente* pada 1 April 1906, Surabaya memang mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini dimungkinkan dengan diserahkannya secara berangsur-angsur wewenang untuk mengatur kota yang semula berada pada pemerintah pusat. Persoalan yang kemudian timbul adalah bagaimana membiayai pekerjaan dewan kota yang begitu banyak dan berat. Untuk hal ini, selain pemerintah kota mengandalkan pada pendapatan lama seperti penjualan air dan pemakaman, pada tahun 1907 sumber pendapatan ini bertambah antara lain dari bunga simpanan uang dan tontolan. Selanjutnya, pada tahun 1908 pendapatan diperoleh juga dari pembantaian, perusahaan tanah, pajak dan perizinan pendirian bangunan.<sup>87</sup>

Penerapan pajak di kalangan masyarakat kampung dengan dalih untuk membiayai pembangunan kota benar-benar membuat pemerintah kota praja (*gemeente*) benar-benar tidak populer. Bagi masyarakat, keharusan membayar pajak dengan jumlah yang beraneka ragam oleh pemerintah kota praja, dianggap sebagai paksaan tidak adil yang dikenakan oleh sistem administrasi asing yang sulit dipahami, yang membawahi kampung tetapi tidak memilikinya. Dengan humor pedasnya yang khas, arek Surabaya secara bercanda merancukan kata Belanda *gemeente* dengan kata Jawa *gua minta*, dengan artian yang lebih bermakna “lubang tanpa dasar”, yang mengandung rasa jijik yang sangat (Frederick, 1986: 12–13).

### **C. MENYINGKIRKAN SINGA DAN BENTENG, MENGHADIRKAN TUGU PAHLAWAN: LAMBANG KOTA DI ERA JEPANG DAN REPUBLIK**

Sebagaimana kota-kota lain di Pulau Jawa, kedatangan Jepang di Surabaya disambut oleh masyarakat dengan kegembiraan yang meluap. Bersamaan dengan itu, berlangsung pula “Nipponisasi” di tengah-tengah masyarakat. Bendera-bendera Jepang menghiasi

---

<sup>87</sup> Lihat lebih jauh tentang hal ini: Surabaya dalam Lintasan Pembangunan (Surabaya: Subbagian Humas & Protokol Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya, 1980), hlm. 21.

kantor-kantor pemerintah, sekolah-sekolah, dan kapal-kapal di pelabuhan, akan tetapi lambang kota tidak disentuhnya. Yang justru dilakukan adalah memaksa pemuda dan anak-anak sekolah untuk menggunduli rambutnya agar menyerupai tentara Jepang yang botak. Selain itu, masyarakat wajib menggunakan bahasa Jepang sebagai pengganti bahasa Belanda. Tambahan pula, penduduk pribumi dipaksa untuk membungkukkan badan 90 derajat (semacam ruku' dalam shalat) setiap pagi ke arah kaisar Jepang Tenno Haika. Sikap membungkukkan badan ini juga harus dilakukan ketika berpapasan dengan tentara Jepang, bila menolak maka popor senjata pasti akan menghantam kepala penduduk.<sup>88</sup>

Lambang kota yang tidak mengalami perubahan ataupun pergantian pada masa pendudukan Jepang tersebut tetap bertahan bahkan setelah cukup lama Indonesia merdeka. Upaya mengganti lambang kota yang dibuat ketika kota ini mendapat status *gemeente* baru diusulkan pada tahun 1953 lewat serangkaian perdebatan dan sidang dewan kota. Usul perubahan ini semula datang dari ketua DPRDS-KBS (Soeprapto). Menurutnya, DPD perlu melakukan sayembara guna membuat suatu lambang Kota Besar Surabaya yang dengan tegas dapat dilihat “SURA-BAJA” dan sifat istimewa dari Kota Surabaya, misalnya sebagai tempat kelahiran hari pahlawan.<sup>89</sup> Pada tanggal 29 Oktober 1953, usul Saudara Soeprapto tersebut dibahas dalam sidang dewan kota yang dihadiri 27 anggotanya.

“...Soeprapto menghendaki supaya lambang Kota Surabaya yang sekarang diubah begitu rupa sehingga pada lambang itu terdapat bukan saja ikan Sura dan Baja, tetapi juga Tugu Pahlawan supaya dapat menggambarkan sifat kota, tempat dilahirkan hari pahlawan”.<sup>90</sup>

Usul yang diajukan oleh ketua DPRDS-KBS tersebut menimbulkan polemik yang cukup seru dalam sidang. Soejoto, seorang

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Samson, 8 Juni 2004; 8 dan 14 Juli 2004.

<sup>89</sup> Lihat: “Sajembara Lambang Baru Surabaya”, dalam *Surabaya Post*, 28 Oktober 1953.

<sup>90</sup> Lihat: “Semanggi Lambang Surabaya”, dalam *Surabaya Post*, 31 Oktober 1953.

anggota dewan berpendapat bahwa lambang yang dipakai saat itu, yakni *Sura-ing-Baja* belum tentu ciptaan orang Belanda. Dia mengemukakan pendapat ini dengan mengambil analogi lambang kota Majapahit yang menurutnya adalah buah “madja”, sedangkan anggota dewan lainnya (Soewarimba) mengusulkan agar pada lambang Kota Surabaya tidak hanya dicantumkan Tugu Pahlawan, ikan sura, dan buaya saja, tetapi juga harus dicantumkan daun *semanggi*, karena menurutnya daun ini bermakna kesetiaan, dan arek Surabaya katanya, selalu setia dan taat berdiri di belakang pemerintah.<sup>91</sup>

Untuk menengahi polemik ini, saudara Amang Makmur dari DPD menganggap untuk mengubah lambang Kota Surabaya tidak cukup hanya dengan usul-usul yang disampaikan sebelumnya. Menurutnya, sebelum diselenggarakan sayembara perlu dibentuk sebuah komisi yang mempelajari berbagai hal tentang perubahan lambang kota tersebut. Usul yang dikemukakan Amang Makmur itu disetujui oleh peserta sidang sehingga dibentuklah sebuah komisi yang terdiri atas kepala daerah (Moestadjab Soemowidigdo) dan ketua DPRDS (Soeprapto) ditambah tiga lainnya dari DPRDS, yakni Mr. Dr. Soeripto, Sdr. Soenjoto, dan Sdr. Anwar Zen. Sidang juga mengamanatkan agar komisi yang telah dibentuk bekerja sama dengan DPD dan orang yang dianggap ahli dalam ilmu sejarah. Selain itu, komisi sudah harus menyelesaikan penelitiannya pada akhir Desember.<sup>92</sup>

Sampai batas waktu yang ditentukan, komisi yang diwajibkan untuk mempelajari dan meneliti lambang yang lebih sesuai dengan Kota Surabaya ini ternyata tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh ketua komisi (Soeprapto) adalah keterangan yang diminta dari Jakarta belum diterima.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Lihat: “Semanggi Lambang Surabaya”, dalam *Surabaya Post*, 31 Oktober 1953.

<sup>92</sup> Lihat: “Semanggi Lambang Surabaya”, dalam *Surabaya Post*, 31 Oktober 1953.

<sup>93</sup> Tidak ada keterangan lebih lanjut berkaitan dengan keterangan apa yang diminta dan diperlukan oleh komisi.

Walaupun komisi tidak dapat merampungkan pekerjaannya, Soeprapto sebagai ketua telah dapat memberikan gambaran tentang lambang tersebut yakni akan berupa, antara lain ikan sura dan buaya yang saling melingkar, di latar belakang akan berwarna mas kuning. Adapun usul yang dikemukakan Soewarimbo pada sidang Oktober lalu, agar lambang itu berupa ikan sura dan buaya serta Tugu Pahlawan berada di tengah daun *semanggi* (yang konon hanya terdapat di Surabaya) tidak disinggung oleh Saudara Soeprapto. Lebih jauh, komisi meminta kepada sidang agar diberikan waktu lagi untuk menyelesaikan pekerjaannya dan dikabulkan oleh sidang, namun tidak ada keterangan sampai kapan waktu yang diberikan tersebut.<sup>94</sup>

Belum ada keterangan yang penulis temukan menyangkut nasib proses pergantian lambang kota dan apa yang telah dilakukan komisi yang dibentuk untuk itu. Akan tetapi, pada tahun 1956 DPRDS mengeluarkan putusan tentang penetapan lambang kota yang baru. Dalam pasal tiga keputusan DPRDS-KBS, No. 34 disebutkan bahwa lambang Kota Surabaya berupa:

Lambang berbentuk perisai segi enam jang distilir (*gestyleerd*) dan berwarna biru. Di tengah-tengah perisai terdapat lukisan Tugu Pahlawan berwarna perak (putih)". Di belakang lukisan tugu pahlawan terdapat seekor sura berwarna emas (kuning) di sebelah atas dan sebelah bawah seekor buaya berwarna emas (kuning) pula dalam sikap serang menjerang (AKS, box 1814, no 45.356).

Dalam lampiran keputusan yang diperkuat juga dengan Keputusan Presiden No. 193 Tahun 1956 tersebut terdapat penjelasan tentang arti dan makna lambang yang juga menjadikan ikan dan buaya sebagai ikon utama. Berikut kutipan penjelasan yang dimaksud.

- I. Lambang berbentuk perisai segi enam jang distilir (*gestyleerd*), jang maksudnja melindungi Kota Surabaya.

---

<sup>94</sup> "Lambang Surabaya Pakai Tugu Tanpa Semanggi", dalam *Surabaya Post*, 30 Desember 1953.

- II. Lukisan tugu pahlawan melambangkan kepahlawanan putra-putra Kota Besar Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan melawan kaum pendjadjah.
- III. Lukisan Ikan sura dan baja jang berarti “Sura – Ing – Baja” melambangkan sifat keberanian putra-putra Kota Besar Surabaya jang tak gentar menghadapi sesuatu bahaya.
- IV. Warna-warna biru, hitam, perak (putih) dan emas (kuning) dibuat sedjernih dan setjemerlang mungkin, agar dengan demikian dapat dihasilkan suatu lambang jang memuaskan.<sup>95</sup>

Lukisan ikan *sura* dan *baja* yang mengandung arti *sura ing baja* (berani dalam bahaya) sesungguhnya masih mengadopsi semboyan yang tercantum dalam lambang Kota Surabaya (*gemeente*) pada masa kolonial Belanda. Bagi Soenarto Timoer (penulis buku *Mitos Cura-Bhaya*), Surabaya tidak sebagai “berani dalam bahaya” (*sura-ing-baya*), melainkan berarti “*sama-sama berani dan berbahaya*” (*cura dan bhaya*) yang dimaksudkan sebagai pujian kepada dua perkasa, penguasa lautan (hiu) dan buaya sebagai penguasa daratan karena hidupnya di daratan, di muara-muara sungai dekat pantai. Pujian-pujian tersebut dimaksudkan untuk mendinginkan amarah mereka, agar tidak bertarung lagi, sebab akibat pertarungan mereka akan membuat bencana bagi masyarakat. Kepercayaan mitis masyarakat yang masih sangat sederhana itu membuat mereka khawatir akan datangnya bencana besar yang ditimbulkan oleh gelombang laut besar atau gunung meletus dengan gempa bumi yang membawa banyak korban seperti yang dialami oleh nenek moyang mereka. Dengan kata lain, segala gejala alam yang membawa malapetaka tersebut mereka kembalikan sumbernya kepada anggapan mitis mereka: amarah kedua penguasa lautan dan daratan (Timoer, 1983: 43 dan 46).

---

<sup>95</sup> Lihat: Putusan DPRDS Kota Besar Surabaya, no. 34/D.P.R.D.S., 1956.



Sumber: Timoer, 1983: 44

**Gambar 19.** Lambang Ketiga Kota Surabaya (sejak 1956–sekarang)

Dalam perjalanan waktu, penafsiran ikan hiu dan buaya dalam lambang Kota Surabaya sebagai *sura-ing-baya* yang berarti berani menghadapi bahaya, tampaknya lebih banyak dianut oleh masyarakat. Bahkan simbol ini telah menjadi salah satu *myth of concern* bagi masyarakat Surabaya yang terus dipelihara. Dengan proses—meminjam istilah Taufik Abdullah (1999: 5)—mitologisasi ini maka segala pengorbanan arek-arek Surabaya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan mendapatkan pembenaran. Siapa pun tahu bahwa mitos bukanlah sejarah, tapi bahwa masyarakat percaya terhadap mitos adalah fakta yang tidak dapat dibantah.[]

Buku ini tidak diperjualbelikan.

# DARI MASJID, GEREJA, HINGGA KLENTENG: RUMAH IBADAH SEBAGAI SIMBOL EKSPRESI KEAGAMAAN MASYARAKAT

## A. RUMAH IBADAH DAN RELIGIUSITAS

Tidaklah berlebihan kiranya jika masyarakat Kota Surabaya dikategorikan sebagai masyarakat yang religius. Hal ini tampak dari ekspresi simbolis keagamaan masyarakatnya yang terwujud dalam bentuk banyaknya masjid, gereja, dan klenteng. Data yang ada, setidaknya tahun 1954, 1964, dan 1969 menunjukkan besarnya pertumbuhan rumah ibadah, khususnya masjid dan langgar. Pada akhir tahun 1964 misalnya, jumlah masjid adalah 31 buah dan 434 surau dan pada tahun 1969 meningkat menjadi 186 masjid dan 1231 langgar.<sup>96</sup> Dengan kata lain, dalam kurun waktu lima tahun jumlah masjid bertambah 155 dan surau 797 buah. Sekadar perbandingan, jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah masjid dan surau di Kota Padang yang masyarakatnya terkenal sebagai pemeluk Islam yang taat. Pada tahun 1969 misalnya, jumlah masjid di Padang hanya 169 dan surau hanya 298 (Evers dan Korff, 2002: 219). Perbandingan ini tentunya tidaklah adil jika tidak dilengkapi dengan data lain, misalnya luas wilayah dan jumlah penduduk masing-masing daerah (Surabaya dan Padang) pada tahun yang dibandingkan.

---

<sup>96</sup> Lihat: "Tempat2 Ibadah di kota S'bjaja dari Golongan Islam", dalam *Surabaya Post*, 29 Februari 1964; AKS box 691 no. 14.371.

Pertumbuhan jumlah masjid dan surau yang sangat besar ini tidak diikuti oleh pertumbuhan jumlah gereja. Menurut statistik gereja, pada tahun 1954 jumlah gereja adalah 115 buah dan pada tahun 1969 bertambah menjadi 126 (AKS, box 1111, no. 22.840). Artinya dalam kurun waktu 15 tahun hanya terdapat 11 gereja baru. Lambatnya pertumbuhan jumlah gereja disebabkan gereja yang ada masih dapat menampung penduduk yang beragama Kristen/Katolik karena jumlahnya lebih kecil dibanding dengan umat Islam. Sampai saat ini, pembangunan masjid dan surau baru terus dilakukan. Bersamaan dengan itu--meminjam istilah Evers--maraknya 'ibadah elektronik', maksudnya penggunaan kaset rekaman, *tape deck*, dan *loudspeaker* untuk azan dan mengaji, tampaknya tidaklah mengurangi kecenderungan pembangunan masjid dan surau baru (Evers dan Korff, 2002: 222). Sebaliknya, dengan alat elektronik ini semakin memacu dampak simbolisnya. Masjid dan surau seolah berlomba mana yang paling keras suara azan dan bacaan Alqurannya. Dengan alat penguat suara ini, maka *bedug* yang biasanya terdapat pada masjid kaum nahdiyin, menjadi tidak memiliki fungsi apa-apa kecuali sebagai simbol belaka, sebagai penanda kalau masjid tersebut milik kaum *ablusunnah wal-jamaah*.

Bagian ini ingin mempelajari rumah ibadah tiga kelompok masyarakat di Surabaya sebagai ekspresi simbolis keagamaan mereka. Ketiga kelompok masyarakat tersebut adalah Muslim (masjid/surau), Katolik/Kristen (gereja), dan Tionghoa (klenteng). Tulisan ini menggunakan berbagai bahan yang dihimpun dari kantor arsip Kota Surabaya, surat kabar *Surabaya Post*, *Pewartu Soerabaia*, dan wawancara.

## **B. MASJID ADALAH “RUMAH TUHAN”: DARI MASJID KEMAYORAN, AMPEL, HINGGA AL-FALAH**

Sampai tahun 1970-an, di Surabaya paling tidak terdapat empat masjid utama<sup>97</sup>, yakni Masjid Kemayoran di sekitar Jembatan Merah,

<sup>97</sup> Saat ini Kota Surabaya memiliki sebuah masjid utama yang bernama Masjid Agung. Masjid yang besar dan megah ini terletak di Kecamatan Gayung Sari. Di sebelah utara

Masjid Sunan Ampel di perkampungan Arab, Masjid Mujahidin di kawasan pelabuhan Perak, dan Masjid Al-Falah di kawasan Darmo. Dua masjid pertama merupakan masjid yang dibangun jauh sebelum orang-orang Belanda menguasai Kota Surabaya, sedangkan dua masjid lainnya dibangun setelah kemerdekaan. Masjid Kemayoran, Sunan Ampel, dan Mujahidin berlokasi di kawasan yang dahulunya merupakan kota lama Surabaya, sedangkan masjid Al-Falah berlokasi di kawasan yang relatif baru, yakni di ujung selatan Jalan Darmo.

Tambahan pula, Masjid Kemayoran dan Sunan Ampel dapat dianggap sebagai ‘masjid kaum nahdiyyin’, yang ditandai dengan berbagai simbol. Simbol-simbol yang dimaksud antara lain terdapatnya *bedug* dan tata cara ibadah yang khas seperti azan dua kali ketika hendak salat jumat, khatib yang memakai tongkat, salat tarawih 23 rakaat, *qunut* pada saat salat subuh, dan wirid yang panjang sesuai salat wajib. Adapun dua masjid lainnya (Mujahidin dan Al-Falah), dapat dianggap sebagai masjid yang dekat dengan gerakan modernis Muhammadiyah (walaupun tidak ada pernyataan demikian). Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya simbol-simbol seperti yang terdapat pada “masjid kaum nahdiyyin” dan tata cara ibadah yang umumnya dilakukan oleh orang-orang Muhammadiyah. Berikut ini, saya akan menguraikan sedikit berbagai hal yang berkaitan dengan masjid-masjid tersebut.

**Masjid Kemayoran.** Sampai tahun 1905, terdapat dua masjid besar di Surabaya, yakni Masjid Kemayoran yang terletak di Jalan Kemayoran dan Masjid Ampel yang terletak di perkampungan orang-orang Arab. Berdirinya masjid ini tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan sebuah masjid yang dibangun oleh umat Islam sebelum tahun 1772 yang terletak di Surapinggo yang di lokasinya saat ini berdiri Tugu Pahlawan (Murtadlo, 2005). Pada awalnya, lokasi tempat

---

masjid terdapat sebuah gereja yang juga cukup besar. Letak kedua tempat ibadah yang sangat berdekatan ini tampaknya ingin menyimbolkan eratnya kerukunan antarumat beragama di Kota Surabaya dan kelihatannya hendak meniru masjid Istiqlal yang bersebelahan dengan sebuah Katedral.

berdirinya masjid ini merupakan bagian dari kompleks alun-alun (masjid terletak di sebelah barat alun-alun).<sup>98</sup> Namun, pemerintah kolonial Belanda memerintahkan agar masjid dipindahkan ke tempat lain, karena di lokasinya akan didirikan Kantor Peradilan Pemerintah Hindia Belanda. Dipilihnya lokasi ini karena letaknya yang sangat strategis yakni berhadapan dengan gedung pemerintah Hindia Belanda (sekarang kantor Gubernur Jawa Timur). Ketika rencana tersebut disampaikan kepada jamaah masjid, mereka tidak setuju, sebaliknya justru menimbulkan konflik. Pemerintah kolonial yang berkuasa di daerah itu berusaha membongkar<sup>99</sup> dengan paksa masjid tersebut sehingga menimbulkan kemarahan para ulama dan jamaah masjid. Akibatnya, pertentangan fisik pun tidak terhindarkan sehingga menimbulkan pertempuran lokal. Perlawanan masyarakat semakin memuncak setelah tertembaknya seorang pimpinan umat Islam yang bernama Kyai Badrun yang dikenal dengan sebutan Kyai Sedo Masjid, artinya seorang kyai yang gugur karena membela masjid. Untuk menghargai jasa-jasanya, maka jasadnya dimakamkan di sebelah lokasi masjid dan diberi nama Jalan Tembaan (Murtdlo, 2005).

Bagi jamaah masjid, perang itu merupakan perang jihad dalam rangka mempertahankan ‘rumah Tuhan’. Dengan kekuatan militer yang lebih memadai maka perjuangan jamaah masjid akhirnya dapat dipatahkan (Wiryoprawiro, 1986: 260; Handinoto, 1996: 62). Sebagai kompensasi atas kekalahan tersebut, pada tahun 1844 pemerintah kolonial Belanda mengumpulkan jamaah masjid yang masih ter-

---

<sup>98</sup> Pada abad ke-19, alun-alun Surabaya terdapat di sekitar Jln. Pasar Besar (Aloen-aloen straat). Stadstuin (taman kota) yang terletak di Regenstraat (Jln. Kebon Rojo) mungkin dimaksudkan sebagai pengganti alun-alun yang letaknya di sekitar Jln. Pasar Besar tersebut. Handinoto, *Perkembangan dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya (1870-1940)* (Surabaya: Univesitas Kristen PETRA–Andi Press, 1996), hlm. 62.

<sup>99</sup> Tidak ada catatan tahun berapa terjadinya pembongkaran masjid ini. Akan tetapi, mengingat masjid ini dibangun sebelum tahun 1772 dan di bekas arealnya dibangun gedung Raad van Justitie pada tahun 1890, maka dapat diduga pembongkaran terjadi antara tahun 1772–1890.

sisanya dan memutuskan untuk memberikan sebidang tanah dan bangunannya di Westerbuitenweg (sekarang Jalan Indrapura). Hal ini diperkuat dengan adanya prasasti yang terbuat dari logam berwarna kuning bertuliskan huruf Jawa oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa pemerintahan Bupati Surabaya, Raden Tumenggung Kromojoyo Dirono (1772–1776). Adapun bunyi prasasti tersebut adalah sebagai berikut (Murtadlo, 2005).

Prasasti Ing Masjid Kemayoran Surabaya  
Puniko Sih Peparanganipun Kanjeng Gubernur  
Landa Dhumateng Sarupining Bongso Islam,  
Kala Pinarngaken Wau Duk Nalika  
Penjenenganipun Kanjeng Tuwan Inggang  
Wicaksana Jon Wakob Rengungsing Gunadur  
Jendral Ing Tanah Nederland Hindia  
Mister Daniel Frank Swawilam Ditermat  
Residen Ing Surapringga, Lan Radyan  
Tumenggungkrama Jaya Dirana  
Bupati Ing Negeri Surapringga  
Kala Kaysa Pinuju Warsa: 1772-1776 M.  
Kang Sampun Ayasa Van Wilem  
Bartulumeus War de Nar.

Artinya:

Prasasti Masjid Kemayoran Surabaya ini  
yang diberikan kanjeng Gubernur  
Belanda kepada serumpunnya bangsa Islam,  
kala itu pemberian tadi juga karena beliaunya kanjeng yang  
bijaksana Jon Wakob yang memegang  
jabatan jenderal di tanah Hindia Belanda,  
dan Mister Daniel Frank Swawilam  
sebagai Residen Surabaya, kepada  
Tumenggungkrama Jaya Dirana sebagai  
Bupati di Negeri Surabaya,  
kala itu menunjukkan tahun: 1772–1776 M,  
Yang bertanda tangan di bawah ini Van Willem  
Bartulumeus War De Nar.



(Dalam gambar tampak bekas rumah mayor, menara, dan pagar yang berbentuk rebung bambu. Sumber: Faber, 1931: 289)

**Gambar 20.** Bentuk awal Masjid Kemayoran Surabaya

Lokasi masjid yang baru ini merupakan bekas rumah tinggal seorang mayor tentara pemerintah Hindia Belanda dengan luas sekitar dua hektare. Setelah terjadi serah terima atas tanah tersebut, para ulama dan jamaah membentuk panitia untuk mengubah fungsi bangunan dan tapaknya menjadi kompleks masjid (Wiryoprawiro, 1986: 260). Masjid dibangun dengan gaya arsitektur Jawa kuno, direncanakan dan dibangun oleh seorang Belanda bernama J.W.B. Wardenaar (1786–1869). Untuk melengkapi masjid ini, dibangun dua menara yang terletak di sebelah selatan dan utara rumah bekas mayor yang berdenah segi delapan tersebut. Menara tersebut memiliki ketinggian  $\pm$  70 kaki dan di puncaknya diberi kubah. Seusai pembangunan menara, maka masjid segera diresmikan yang kemudian terkenal dengan nama Masjid Kemayoran. Akan tetapi,

dalam beberapa tahun kemudian, menara bagian selatan terbakar dan runtuh akibat tersambar petir dan tidak dibangun kembali.<sup>100</sup>

Mengingat pertumbuhan jamaah yang terus meningkat, maka pada tahun 1934, untuk pertama kalinya bangunan masjid ini diperluas ke arah utara, timur, dan selatan dari bangunan induk yang bekas rumah mayor itu. Walaupun tanah di sekitar masjid (alun-alun Kemayoran) ini sudah dihibahkan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada Perhimpunan Takmirul Masjid Kemayoran, sampai tahun 1958 pihak takmir belum mendapat pengesahan. Sebaliknya, pemerintah kota praja mengklaim tanah tersebut sebagai tanah milik kota praja. Klaim pemerintah didasarkan pada hasil penyelidikan Residen Pauwel pada tahun 1939. Menurut Pauwel, tanah itu adalah milik kota praja yang diperoleh dari usaha penghapusan tanah ‘perdikan’ dan ‘gogol desa’. Akibatnya, tanah ini menjadi sengketa antara pemerintah dan takmir masjid. Dalam dokumen yang dimiliki oleh takmir masjid disebutkan bahwa:

‘... tanah kantor Raad van Justisi dahulu (sekarang taman Tugu Pahlawan di depan kantor gubernur) adalah milik masjid besar yang didirikan oleh Sunan Ampel (Raden Rachmad) di tahun 1467. Masjid itu kemudian dibongkar dan sebagai gantinya diberikan tanah kosong yang merupakan bagian dari kemayoran yang letaknya di sebelah kabupaten (sekarang kantor pos) untuk dikuasai bagi pembangunan masjid yang didirikan dalam tahun 1850’.<sup>101</sup>

Walaupun pemerintah kota bersikeras mengklaim tanah itu sebagai tanah pemerintah, takmir Masjid Kemayoran tetap bertahan dengan alasan tanah Kemayoran diberikan untuk pengganti tanah wakaf, maka berdasarkan surat menteri agraria, pengganti tanah wakaf adalah tanah wakaf juga. Takmir melihat kasus ini sebagai

---

<sup>100</sup> Tentang hal ini lihat: G. H. von Faber, *Oud Soerabaia, De geschiedenis van Indië's eerste koopstad van de oudste tijden tot de instelling van den gemeenteraad* (Soerabaia: Gemeente Soerabaia), hlm. 289.

<sup>101</sup> “Soal Tanah di Depan Masjid Kemayoran”, dalam *Surabaya Post*, 19 Februari 1958.

siasat partai tertentu dalam dewan untuk merugikan kepentingan umat Islam. Lebih lanjut ta'mir Masjid Kemayoran mengatakan:

‘Setelah kita kehilangan sebidang tanah di depan gedung kota praja demikian takmirul masjid mengakhiri tulisannya, karena pengaruh partai tertentu kini berganti lagi sambungan siasat itu hendak menggunakan alun-alun kemayoran yang kini menjadi sengketa antara umat Islam dengan pihak pemerintah’.<sup>102</sup>

Sebidang tanah di depan gedung kota praja yang hilang adalah tanah yang saat ini menjadi lokasi berdirinya Gereja Maranatha yang pada tahun 1958 menjadi rebutan berbagai pihak. Adapun partai tertentu yang disinyalir telah melakukan siasat untuk merugikan kepentingan umat Islam dan memengaruhi pemerintah kota sehingga memperlmasalahkan tanah ini, tidak ada keterangan yang jelas. Akan tetapi, jika dilihat peta politik waktu itu, kemungkinan partai yang dimaksud adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Dugaan ini didasarkan atas dua alasan, *pertama*, pada Pemilihan Umum (Pemilu) untuk DPR tahun 1955, PKI merupakan partai pemenang di Kota Surabaya. *Kedua*, ketika kasus tersebut mencuat yang menjabat sebagai wali kota adalah Dr. R. Satrio Sastrodiredjo, yang juga anggota PKI.<sup>103</sup>

Bagaimana dan dengan cara apa sengketa ini diselesaikan menarik untuk dilihat, sayangnya belum ada catatan yang saya temukan berkaitan dengan masalah ini. Akan tetapi, tampaknya sengketa ini dimenangkan oleh takmir masjid mengingat pada tahun 1961, masjid yang letaknya berdekatan dengan gereja Emmanuele di Jln. Kepanjen ini kembali diperluas dan bangunan lama dipugar. Perbaikan dan perluasan masjid ini terus berlanjut hingga tahun

---

<sup>102</sup> Lebih lanjut, lihat: “Soal Tanah di Depan Masjid Kemayoran”, dalam *Surabaya Post*, 19 Februari 1958.

<sup>103</sup> PKI Tjalonkan Dr. Satrio sebagai Kepala Kotapradja Surabaya”, dalam *Djawa Pos*, 3 Juni 1958; “Dr. Satriyo Kepala Daerah Kotapradja Surabaya. Tjalon tunggal, Terpilih Setjara Aklamasi”, dalam *Djawa Pos*, 12 Juni 1958; “Dr. Satriyo Disahkan Pemerintah sebagai Kepala Daerah KBS”, dalam *Djawa Pos* 25 Juni 1958.

1964. Hal ini diperkuat dengan Keputusan Menteri Agraria dan Pertanian Nomor: SKIV/46/63 tanggal 14 Maret 1963. Untuk biaya pengelolaan, selain mengandalkan sumbangan dari para jamaah, Masjid Kemayoran memiliki puluhan petak tanah yang disewakan kepada para pemukim. Pengelolaan masjid mulai terorganisasi dengan terbentuknya Perhimpunan Takmir Masjid yang disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 9 Juni 1952. Saat ini perkembangan Masjid Kemayoran semakin pesat dengan dikelolanya berbagai lembaga pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Umum (Wiryoprawiro, 1986: 261).

**Masjid Sunan Ampel.** Masjid Sunan Ampel terletak di Ampel Denta (Ampel Suci) yang kini berada di kawasan Surabaya Utara, suatu daerah yang merupakan bagian dari kota lama. Masjid ini dibangun pada tahun 1421 oleh Raden Rakhmatullah atau Raden Rakhmat yang kemudian terkenal dengan sebutan Sunan Ampel. Masjid ini dibangun setelah Sunan Ampel mendirikan masjid dan pesantren di Kembangkuning,<sup>104</sup> yang bangunan aslinya sudah diganti dengan yang baru.<sup>105</sup>

Perluasan pertama dilakukan oleh Adipati Aryo Cokronegoro dengan menambah bangunan di sebelah utara bangunan lama. Perluasan yang kedua dilakukan oleh Adipati Regent Raden Aryo Niti Adiningrat pada tahun 1926 dengan menambah atau memperluas masjid ke bagian utara lagi. Perluasan ketiga dilakukan setelah masa kemerdekaan yang dilakukan oleh Panitia Khusus Masjid Agung Sunan Ampel dari tanggal 30 Agustus 1954 hingga 21 Februari

---

<sup>104</sup> Masjid yang dibangun oleh Sunan Ampel di Kembangkuning sekarang ini bernama Masjid Rachmad. Masjid ini merupakan masjid tertua di seluruh Jawa Timur (Masjid Rachmad 1960: 2).

<sup>105</sup> K.H. Dachlan (Penerjemah), Wali Songo. Kenang-kenangan haul agung ke-544 Sunan Ampel (Surabaya: Panitia Haul Agung Sunan Ampel, 1989), hlm. 43; 'Masjid "Rachmad" Kembang Kuning Akan Dibangun Dgn Beja 8,5 Djuta Rup.' 'Masjid jang Tertua di Seluruh Djawa' Dalam *Surabaya Post* 21 November 1960; 'Masjid Kembang Kuning Adalah Juga yang Paling Pertama di Pulau Jawa' Dalam *Surabaya Post* 16 Januari 1958.

1958 dengan memperluas masjid ke arah utara dan barat, sedangkan perluasan yang keempat dilakukan pada tahun 1974 dengan menambah bangunan di bagian barat. Dengan adanya perluasan ini maka bangunan yang semula luasnya hanya sekitar 2.069 m<sup>2</sup> kini telah mencapai 4.780 m<sup>2</sup>.<sup>106</sup>

Wilayah yang ditempati masjid ini dahulunya merupakan daerah pinggiran kali Surabaya (Brantas) yang merupakan urat nadi lalu lintas ke pusat Kerajaan Majapahit. Embrio pembangunan kawasan ini adalah sekitar tahun 1414, yakni ketika Raden Rachmad keponakan dari salah seorang istri raja Majapahit, Wikramawardhana yang berasal dari Champa datang ke Majapahit. Raden Rachmad yang ketika itu berusia 20 tahun, adalah putra dari seorang Arab penyebar agama Islam di Champa, yang menikah dengan saudara salah seorang istri raja Majapahit dari Champa tersebut. Oleh raja Wikramawardhana, Raden Rachmad ditunjuk untuk tinggal di Desa Ngampel dan diberi kesempatan untuk menyebarkan Islam kepada penduduk di daerah itu. Raden Rachmad yang sekarang ini dikenal dengan sebutan Sunan Ampel meninggal pada tahun 1467 di Ngampel dan dimakamkan di sekitar masjid (Handinoto, 1996: 63).

Pada tahun 1953, masjid ini hendak diperluas ke arah utara, akan tetapi rencana ini menghadapi kendala mengingat di sekitarnya terdapat 15 kuburan lama yang usianya  $\pm$  100 tahun. Untuk memecahkan masalah ini, pada hari Minggu 11 Oktober 1953, Panitia Persiapan Perluasan Masjid Ampel menyelenggarakan musyawarah yang dihadiri oleh ulama-ulama besar Jawa Timur seperti K.H. Bisri–Denanjar, K.H. Dachlan–Peterongan, K.H. Abdul Chamid–Tambakberas, K.A. Wahib–Tambakberas, K.H. Daclan Acjat–Surabaya, dan lain-lain. Dalam pertemuan tersebut, para kiai menyetujui pemakaian tanah kuburan tersebut guna perluasan

---

<sup>106</sup> Uraian singkat sejarah dakwah dan masjid peninggalan Sunan Ampel (Surabaya: Panitia Haul Agung Sunan Ampel ke-527, t. th.).



Sumber: Wiryoprawiro, 1986: 188

**Gambar 21.** Masjid Sunan Ampel dilihat dari jalan masuk

masjid.<sup>107</sup> Perluasan yang dimulai tahun 1953 hingga 1958 mendapat dukungan dana dari berbagai pihak antara lain dari Kementerian Agama, pemerintah Pakistan, hasil penjualan buku-buku, dan lain-lain.<sup>108</sup> Masjid Sunan Ampel menjadi magnet yang menarik banyak jamaah untuk mengunjunginya. Ketertarikan orang-orang mengunjungi masjid ini sesungguhnya tidak hanya karena memiliki nilai historis yang sangat tinggi sebagai masjid wali, akan tetapi makam Sunan Ampel yang terletak di belakang masjidlah yang

<sup>107</sup> “Perluasan Mesjid Ampel. So’al Tanah Kuburan di Sebelah Utara Mesjid Ampel”, dalam *Surabaya Post* 14 Oktober 1953; AKS, box 1179, no. 24.642.

<sup>108</sup> “Perluasan Mesjid Ampel Selesai”, dalam *Surabaya Post* 14 Januari 1959; “Pengurus Masjid Ampel terima 26.539,82”, dalam *Surabaya Post* 14 Februari 1959.

menjadi daya tarik terbesar. Di makam inilah jamaah melakukan *tawassul*<sup>109</sup> memohon segala hal kepada Tuhan. Bahkan dapat dikatakan, kuburan Sunan Ampel yang sesungguhnya menjadi simbol riil. Kenyataan ini mengundang komentar beberapa pihak. Pada suatu kesempatan salat Jumat di sebuah masjid di Surabaya misalnya, khatib dalam khotbahnya menyampaikan keprihatinannya atas masih banyaknya masyarakat yang mendatangi makam seperti makam Sunan Ampel untuk meminta sesuatu. “Kuburan Sunan Ampel lebih ramai dibandingkan masjidnya, apalagi kalau malam Jumat” demikian antara lain kata sang khatib. Fenomena seperti yang disinyalir oleh sang khatib tersebut, sesungguhnya merupakan fenomena yang dapat kita saksikan di berbagai tempat di wilayah nusantara ini.

Di Probolinggo misalnya, seseorang yang ingin naik pangkat, lancar dalam menjalankan tugas, atau murah rejeki akan mendatangi makam Kanjeng Bangir (Kiai Joyolelono), bupati pertama Probolinggo, sedangkan di Bondowoso, seorang pejabat yang menduduki posisi penting harus mendatangi makam Ki Ronggo—pembabat daerah itu—sebelum tugas itu diemban (Rato, 1992: 2). Demikian pula yang terjadi di Makassar, masyarakat yang ingin kaya, ramai-ramai mendatangi makam Syekh Yusuf. Maraknya masyarakat yang mendatangi makam tertentu untuk meminta sesuatu sangat berkaitan dengan pandangan mereka tentang makam. Bagi sebagian masyarakat, makam tidaklah sekadar tempat memakamkan jenazah, tetapi memiliki makna dan fungsi yang sakral. Dalam perkembangan yang lebih jauh, Masjid Sunan Ampel menjadi embrio tumbuhnya simbol lain, yakni simbol ekonomi. Dengan memanfaatkan keramaian pengunjung maka di sepanjang gang menuju masjid masyarakat membuka kios yang menjual berbagai macam dagangan. Seiring dengan hal tersebut, pengemis dan kaum gelandangan yang mengharap

---

<sup>109</sup> Tawassul memiliki dua pengertian, yakni: 1) Mengerjakan suatu amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt, 2) Memohon atau berdoa kepada Allah Swt dengan perantaraan nama seseorang yang dianggap suci dan dekat kepada Tuhan. Lihat Hasan Alwi, dkk. (Ed.), Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga (Jakarta: Depdiknas-Balai Pustaka, 2001), hlm. 1151.

belas kasihan pengunjung juga tumbuh subur di kawasan ini. Dengan demikian, Masjid Sunan Ampel dan kawasan sekitarnya menjadi simpul hadirnya berbagai simbol, baik simbol religi, simbol sakral, dan simbol ekonomi.

**Mujahidin dan Al-Falah: Masjid di era kemerdekaan.** Pada pasca-kemerdekaan paling tidak terdapat dua masjid besar yang dibangun di Kota Surabaya. Masjid tersebut adalah Masjid Mujahidin dan Masjid Al-Falah. Masjid Mujahidin dibangun sebagai respons atas semakin berkembangnya pemukiman penduduk masyarakat Tanjung Perak dan sekitarnya. Oleh umat Islam di kawasan tersebut dibentuklah sebuah Panitia Pendiri Masjid Jamik Tanjung Perak yang diketuai oleh H. Sabran Gazali, seorang wiraswasta. Pada tanggal 25 Agustus 1955 panitia ini mendapat izin dari Direktur Pelabuhan Surabaya untuk mendirikan masjid itu di atas sebidang tanah seluas  $\pm 5022 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Tanjung Perak Barat yang bersebelahan dengan kompleks Stanvac/Pertamina Pembekalan Surabaya (Wiryoprawiro, 1986: 275).

Masjid kedua yang dibangun pada pasca kemerdekaan adalah Masjid Al-Falah. Menurut Wiryoprawiro, pembangunan masjid ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan beberapa tokoh masyarakat Surabaya yang melihat kehidupan keagamaan yang lesu. Kelesuan disebabkan antara lain oleh intimidasi, tantangan, dan rintangan dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ormas-ormasnya. Situasi inilah yang mendorong tokoh-tokoh masyarakat untuk menyediakan satu fasilitas keagamaan berupa sebuah masjid jamik berskala kota. Usaha ini mendapat dukungan dari beberapa personel militer, seperti Moh. Suwasono (komandan Komptabes Surabaya), Moh. Anwar (Kolonel KKO TNI AL), dan lain-lain (Alwi, 2001: 298).

Namun, rencana pembangunan ini segera menghadapi masalah karena hendak dibangun di depan kantor kota madya, di persil Gereja Maranatha sekarang yang saat itu tanahnya dalam status sengketa dengan pihak pemerintah kota. Dalam buku *Kenangan Masjid Al-Falah* disebutkan bahwa kegagalan memperoleh tanah di depan kantor

wali kota disebabkan oleh lemahnya fraksi Islam di dalam DPR Peralihan Kota Madya Surabaya, dan akhirnya tanah tersebut jatuh ke tangan Kristen.<sup>110</sup> Untuk mengatasi kesulitan tanah atau lokasi pembangunan masjid ini, maka ibu-ibu pengurus Pengajian Wanita Surabaya (PENGAWAS) menawarkan penghibaan hak pakai tanah di Taman Mayangkara yang semula direncanakan untuk masjid wanita. Setelah dipertimbangkan dengan saksama, maka tawaran tersebut diterima, sedangkan pembangunan masjid wanita ditangguhkan dan baru pada tahun 1978 dicetuskan kembali pembangunannya di Jalan Bratang Binangun (Wiryoprawiro, 1986).

Masjid Al-Falah dibangun di atas sebidang tanah seluas 3206 m<sup>2</sup> dan terletak di ujung Jln. Darmo, di pusat Kota Surabaya. Tanah ini dahulu terkenal dengan nama ‘Taman Mayangkara’ yang di atasnya berdiri sebuah tugu peringatan yang dibangun pada zaman pemerintah kolonial Belanda (Kenangan Masjid, 1977: 12). Izin penggunaannya diberikan oleh Wali Kota Madya Surabaya, Soekotjo dengan suratnya No. 7804/88 tertanggal 9 Mei 1969 kepada Badan Koordinator Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) Jawa Timur yang dipimpin oleh Kolonel KKO Mohammad Anwar dan Dr. R. Daldiri Mangundiwirjo. Untuk memperjuangkan tanahnya dibantu oleh Letjen H. Sudirman dan Letjen Moh. Yasin yang saat itu sebagai Pangdam VIII/Brawijaya (Kenangan Masjid, 1977: 12).

Pembangunan masjid yang semula mendapat kesulitan dana, dapat diselesaikan dengan kesanggupan Ibnu Sutowo, Direktur Utama PN Pertamina untuk membantu terwujudnya masjid ini. Sumbangan Pertamina untuk pembangunan masjid Al-Falah merupakan sumbangan yang paling besar. Berikut beberapa penyumbang yang cukup besar: 1) Gubernur Jawa Timur Rp1.500.000; 2) Wali Kota Madya Surabaya Rp2.000.000; dan 3) Pertamina Rp50.000.000 (Kenangan Masjid, 1977: 15). Pada tanggal 27 September 1973 selesailah pembangunan masjid jamik ini dan diberi nama Masjid

---

<sup>110</sup> Lihat lebih lanjut: *Kenangan Masjid Al-Falah* (Surabaya: Yayasan Masjid Al-Falah, 1977), hlm. 11.



Sumber: Wiryoprawiro, 1986: 296

**Gambar 22.** Masjid Al-Falah dilihat dari perempatan Jln. Raya Darmo, Jln. Mayangkara, Jln. Citarum, dan Jln. Porong

Al-Falah. Masjid ini terletak di kawasan pemukiman elite Darmo dan berdekatan dengan bekas Museum Mpu Tantular dan Kebun Binatang Wonokromo (Wiryoprawiro, 1986: 300).

Selain menggusur sebuah monumen yang bagi masyarakat merupakan simbol pemerintah kolonial, pembangunan masjid ini menarik untuk dicermati karena dua hal. *Pertama*, panitia pembangunan masjid melibatkan banyak anggota militer dan *kedua*, masjid ini mendapat sumbangan dari Ibnu Sutowo (yang juga militer) dengan jumlah sangat besar yang tidak diperoleh masjid-masjid lain. Bertitik tolak dari kenyataan ini dan salah satu pertimbangan pendirian karena lesunya kehidupan keagamaan akibat intimidasi PKI, maka dapat diduga kalau pendirian masjid ini merupakan upaya militer untuk

Buku ini tidak diperjualbelikan.

memperoleh simpati dari umat Islam. Dalam beberapa hal mungkin dapat disamakan dengan pendirian Masjid Nurul Iman di Padang yang didirikan sebagai simbol rekonsiliasi setelah penumpasan pembontakan PRRI (Colombijn, 1994: 345 dan Korff, 2002: 222–3).

### C. MENYEBAR KASIH: GEREJA DAN DINAMIKA UMAT NASRANI

Sampai awal abad ke-20, semua gereja berada di sekitar Jembatan Merah. Hal ini sangat berkaitan dengan pemukiman Eropa yang pada awalnya memang terletak di kawasan tersebut. Berbeda dengan masjid dan surau, pertumbuhan gereja di Kota Surabaya sangat lambat. Pada tahun 1954 misalnya, jumlah gereja 115 buah dengan jumlah pendeta 63 orang dan jemaah sebesar 35.612 orang (AKS, box 1111, no. 22.840). Sampai tahun 1969, jumlah gereja adalah 126 buah yang tersebar di beberapa kecamatan. Gubeng, Krembangan, Simokerto, Tambaksari, dan Wonokromo merupakan daerah yang penyebaran gerejanya cukup besar (AKS, box 691, no. 14.371). Pada umumnya, gereja di Surabaya terdiri atas dua yakni gereja Protestan dan gereja Katolik. Ketika orang-orang Belanda yang beragama Protestan mulai menetap di Surabaya pada abad ke-17, maka oleh *Opperkooptman VOC en Gezaghebber in den Oosthoek* (Kepala Perwakilan Dagang dan Penguasa Jawa bagian Timur) Abraham Christopher Coertsz mendirikan sebuah gereja di Willemsplein (sekarang Taman Jayengrono). Akan tetapi, gereja ini tidak bertahan lama karena di bekas bangunannya dibangun gedung *Internationale Crediet en Handelsvereniging Rotterdam* (Internatio) yang sekarang menjadi gedung PT Panca Niaga (Faber, 1931: 293; Handinoto, 1996: 65).

Pada tahun 1808, Gubernur Jenderal Daendels menggunakan gereja tersebut untuk pabrik pembuatan uang logam. Sebagai gantinya umat Kristen Protestan dipersilakan menggunakan salah satu ruangan yang berada di gedung kantor residen Surabaya. Baru pada tahun 1815, gereja yang di Willemsplein difungsikan kembali dan pada tahun 1920 umat Kristen Protestan di Surabaya membangun



Sumber: Handinoto, 1996: 230; Faber, 1931: 294

**Gambar 23.** Gereja Protestan Bubutan yang dibangun pada tahun 1922

sebuah gereja baru di Jalan Bubutan (Boeboetankerck atau Gereja ‘Immanuel’). Pembangunan gereja ini dilaksanakan oleh Abraham Christoffel Coertsz (kuburannya berada di sebelah kiri gereja) dan diresmikan pada tahun 1920 oleh Ds. J.A. Broers (Lontoh, 2001: 50; Faber, 1931: 294).

Sepuluh tahun kemudian sebuah gereja baru yang dikenal dengan nama Darmokapel diresmikan penggunaannya. Gereja yang dikenal juga dengan nama Gereja Ebenhaezer diresmikan pada tanggal 29 Mei 1930 oleh Ds. K. Kostelijck. Gereja ini merupakan bagian dari “De Protestantsche Gemeente te Soerbaia” dan bermuara pada “Indische Kerk” yang dikenal sebagai Gereja Negara-Staats Kerk. Lima tahun setelah peresmian Darmokapel, sebuah gereja baru yang bernama Noorderkerck atau Gereja “PNIEL” dibangun dan diresmi-

kan pada tanggal 30 Mei 1935 D.V. (Lontoh, 2001: 51–52). Berbeda dengan gereja Protestan yang sudah ada tidak lama setelah kedatangan orang-orang Belanda, gereja Katolik baru berdiri pada awal abad ke-19. Pada tanggal 12 Juli 1810, dua orang pastor, yakni Hendricus Waanders dan Phillipus Wedding, datang dari Belanda dengan kapal ke Surabaya. Pastor Wedding kemudian pergi ke Batavia, sedangkan pastor Waanders menetap di Surabaya (Faber, 1931: 300).

Untuk umat Katolik, gereja yang pertama dibangun terletak di pojok Roomsche Kerkstraat/Komedi weg (sekarang Jalan Kepanjen/Kebonrojo). Gereja ini kemudian mengalami kerusakan sehingga gereja Katolik pertama tersebut dipindah ke gedung sebelah utaranya, yaitu di Jalan Kepanjen. Seiring dengan perkembangan kota yang makin ke selatan, maka pada awal abad ke-20, misi Katolik melebarkan sayapnya ke kawasan Darmo yang ditandai dengan berdirinya beberapa gereja di kawasan tersebut.

Pada masa pendudukan Jepang, saya tidak menemukan keterangan menyangkut keberadaan gereja, baik gereja Protestan maupun Katolik. Pada pasca-kemerdekaan, umat Protestan hendak mendirikan gereja yang berlokasi di Jalan Sindhunegara (sekarang Jalan Yos Sudarso, depan kantor walikota). Tanah ini telah dibeli oleh Majelis Gereja Protestan dengan pemerintah kota seharga f. 36.525 dengan catatan bahwa di tanah itu hanya akan didirikan sebuah gereja dengan dua buah rumah tempat tinggal dan harus selesai pada 1 Januari 1946. Kalau pembangunan itu terlambat maka MGP dikenakan denda 350 gulden sebulan. Namun, MGP tidak dapat menyelesaikan pembangunan sesuai perjanjian dan diberi dispensasi selambat-lambatnya dua tahun, tetapi DPD mendadak mengusulkan agar tanah itu dipakai untuk pembangunan gedung pengadilan tinggi dengan alasan syarat-syarat perjanjian tidak dipenuhi.<sup>111</sup>

Akibatnya, kasus ini menyulut polemik yang berkepanjangan dalam sidang DPRDS-KBS. Dalam sidang yang dipenuhi oleh

---

<sup>111</sup> Lihat: “Tanah Sindhunegara Bikin Heboh. Umat Protestan kontra DPRDS-KB”, dalam Surabaya Post 27 Juni 1956.

banyak umat Protestan ini tampak adanya polarisasi antara yang setuju tanah Sindhunegara tetap diberikan pada MGP dan yang mendukung agar tanah digunakan sebagai tempat pendirian kantor pengadilan tinggi. Mereka yang mendukung untuk diberikan pada MGP antara lain Rasjid (Parkindo), Pasik (PSI), Prajitno (PNI), dan Kwee Mo Liang (Katholieke), sedangkan mereka yang menghendaki agar tanah digunakan untuk pengadilan tinggi adalah Sudjono Adisurjo (Masjumi), Sugiman (Murba), dan Gani (Masjumi). Berikut beberapa kutipan dari anggota dewan yang pro dan kontra dalam melihat kasus ini (Sindhunegara, 1956).

Berikut ini komentar anggota dewan yang pro MGP.

Prajitno (PNI) setuju tanah ini diberikan kepada MGP, dengan syarat-syarat seperti tercantum dalam perjanjian jual beli pada tahun 1941. Pula Prajitno mendesak supaya hal ini malam ini juga diambil keputusan, karena “umur kita” ini tinggal 5 malam saja.

Memeluk agama lain dari Protestan, tetapi ia setuju dengan pembicara lainnya supaya tanah itu diberikan kepada MGP untuk pendirian Gereja. Bahkan bukan satu saja, ia menyetujui berdirinya masjid, daripada didirikan penjara.

Mereka yang pro DPD:

Sudjono Adisurjo (Masjumi) membantu usul DPD karena perjanjian jual beli tanah telah dilanggar, a.l. dijual kepada orang yang ketiga, dan kesempatan yang diberikan pada tahun 1951 disia-siakkannya. Pembicara merasa perlu menjelaskan bahwa ketiadaan setuju ini hendaknya jangan diartikan bahwa ia antipati terhadap umat Kristen. Jauh daripada itu dan juga jangan dianggap membela DPD yang dalam ini harus dikembalikan kewibawaannya, dengan lain perkataan kalau sesuatu perjanjian dilanggar harus juga diambil tindakan seperlunya. Kata-kata ini disetujui juga oleh Hasan Lahadji (Masjumi).

Sugiman (Murba) menghormati keberanian DPD itu, tetapi jangan hanya soal tanah Sindhunegara itu saja. Dengan peristiwa Dijalan Urip Sumohardjo diharapkan DPD bertindak demikian dan dapat membatalkan perjanjian jual-beli dengan Aniem, yang telah melanggar itu. Sugiman menanyakan juga, apakah benar, sesudah tanah itu dalam tangan The Siong Gak oleh annemer dijual lagi kepada Bond Becak Surabaya?



Sumber: Lontoh, dkk., 2001: i

**Gambar 24.** Gereja Maranatha yang selesai dibangun pada tahun 1959

Gani (Masjumi) dalam motivering persetujuannya pada usul DPD mengatakan, bahwa Pengadilan Tinggi yang juga menjadi korban perang kolonial, harus mempunyai gedung yang agak mentereng.

Tidak ada keterangan yang ditemukan bagaimana penyelesaian akhir dari kasus ini. Akan tetapi, melihat berita-berita selanjutnya maka dapat disimpulkan bahwa kasus ini dimenangkan oleh MGP. Pada tanggal 6 Januari 1958 misalnya, terdapat berita bahwa batu pertama untuk pembangunan Gereja Maranatha telah diletakkan. Untuk menggalang dana pembangunan gereja tersebut, panitia pembangunan menyelenggarakan pertunjukan-pertunjukan dalam al-kitab di gedung Yayasan Taman Kebudayaan Surabaya.<sup>112</sup> Pada tahun 1959, gereja yang menghabiskan biaya Rp1.750.000 ini telah selesai dibangun dan pada tanggal 15 Februari telah diadakan

<sup>112</sup> “Upacara Peletakan Batu Pertama Gereja Maranatha di Surabaya”, dalam *Surabaya Post* 6 Januari 1958; “Untuk Geredja Maranatha”, dalam *Surabaya Post* 9 Oktober 1958.

penyerahan dari pemborongnya, Marioen & Co. kepada direksi pembangunan gereja. Penyerahan gereja yang dihadiri oleh DPD Kota Praja dan beberapa pemimpin Islam ini memiliki kapasitas tempat duduk sebanyak 700 orang.<sup>113</sup>

Konflik yang terjadi atas tanah Sindhunegara, sesungguhnya merupakan konflik perebutan simbol. Bagi pemerintah kota, kasus ini merupakan taruhan akan kewibawaannya, sedangkan bagi umat Protestan kasus ini tidak hanya menyangkut tempat mereka beribadah, tetapi lebih dari itu kehadiran sebuah gereja di tengah kota merupakan simbol yang sangat penting bagi eksistensi mereka di kota ini. Konflik dengan pemerintah dan penolakan komunitas tertentu terhadap kehadiran simbol agama Nasrani sering mewarnai perjalanan sejarah kehidupan agama di Kota Surabaya. Salah satu contoh kasus yang penting dan menarik—walaupun melampaui batas temporal penelitian ini—adalah sebuah surat atau resolusi dari Badan Permusyawaratan Umat Islam Daerah Dupak dan Sekitarnya kepada wali kota. Resolusi ini diputuskan melalui musyawarah pada tanggal 23 Mei 1969 ini berisi: *Pertama*, agar tidak memberikan izin atas pembangunan gereja Pantekosta di Jalan Tuban Raya No. 71 Surabaya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.<sup>114</sup> *Kedua*, agar tidak memberikan izin kepada zending/missi/Dewan Gereja/Organ-organ Nasrani lainnya untuk mendirikan Gereja/Sekolah Nasrani (Kristen/Katolik) di daerah Dupak dan sekitarnya (AKS, box 1350, no. 29.013). Alasan atau pertimbangan resolusi ini adalah:

1. Bahwa dengan akan didirikannya Geredja Pantekosta di DJln. Tuban Raya No. 71 tersebut akan membawa akibat terganggunja ketenteraman beragama serta dichawatirkan akan menimbulkan ekses jang tidak diinginkan baik pada generasi sekarang maupun pada generasi jang akan datang, oleh karena:

---

<sup>113</sup> “Geredja Maranatha Sudah Selesai”, dalam *Surabaya Post* 16 Februari 1959.

<sup>114</sup> Pada tahun 1953, umat Pantekosta telah memiliki gereja yang terletak di Jalan Petji-nan Kulon No. 22. “Geredja Pantekosta”, dalam *Pewartu Soerabaia*, 17 Juni 1953.

- a. masyarakat daerah Tuban/Purwodadi khususnya dan masyarakat daerah Dupak umumnya mayoritas penganut Agama Islam;
  - b. berdamai dengan Madrasah Islam yang pembangunannya telah diresmikan oleh Bapak Walikota/Kepala Daerah Kotamadya Surabaya, serta perentjanaannya yang telah berjalan sedjak lk. 5 tahun lamanya.
2. Bahwa didirikannya Gerdeja pada tempat tersebut akan dipergunakan djama'ah oleh kebanyakan orang2 dari luar daerah Tuban/Purwodadi akan membuat suasana kurang sehat dalam pembinaan masyarakat daerah Tuban/Purwodadi.<sup>115</sup>

Resolusi ini didukung oleh pengurus Badan Permusyawaratan Umat Islam Daerah Dupak dan sekitarnya yang menjadi anggota dari partai dan ormas-ormas Islam. Selain itu, resolusi didukung juga oleh sejumlah lembaga politik maupun organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Lembaga-lembaga tersebut adalah Badan Kontak Ummat Islam Daerah Tembok Dukuh dan sekitarnya, Badan Permusjawaratan Organisasi Islam Demak Djaja, Partai Muslimin Indonesia Anak Tjabang Bubutan, Partai Nahdlatul Ulama MWT. Ketjamatan Bubutan, Partai Sjarikat Islam Indonesia Ketjamatan Bubutan, Gerakan Pemuda Ansor Anak Tjabang Bubutan, Muhammadiyah Tjabang Bubutan Barat, Muhammadiyah Tjabang Bubutan Timur dan Panitia Madrasah Islam DJln. Tuban Surabaya (AKS, box 1350, no. 29.013).

Bagaimana tanggapan pemerintah kota atas resolusi ini? Apakah umat Pantekosta berhasil mendirikan gereja sebagai tempat ibadahnya? Tidak ada data yang penulis temukan untuk menjawab pertanyaan ini. Sebaliknya, dua tahun setelah menghadapi masalah ini, pada tahun 1971 Gereja Pantekosta kembali menghadapi persoalan baru. Masalah ini bermula dari surat yang dikirim oleh Kantor Pendaftaran Tanah Jawa Timur kepada semua penyewa gedung olah raga miliknya termasuk Gereja Pantekosta yang telah menyewa sejak tahun 1953. Surat tertanggal 21 September 1971 ini berisi instruksi kepada semua pemakai gedung olahraga dan gereja untuk tidak

<sup>115</sup> "Geredja Pantekosta", dalam *Pewartar Soerabaia*, 17 Juni 1953.

mengadakan latihan dan kebaktian agama di gedung tersebut mulai tanggal 21 September s.d. 5 Oktober 1971. Larangan berkaitan dengan akan dipakainya gedung ini sebagai tempat untuk rapat kerja Dirjen Agraris seluruh Indonesia (AKS, box 1209, no. 25.398).

Pihak Gereja Pantekosta yang menerima surat ini menjadi panik, karena di samping suratnya mendadak, waktu yang diberikan untuk mencari tempat baru juga sangat singkat. Oleh karena itu, pada tanggal 25 September 1971, Madjelis Geredja Utusan Pantekosta (GUP) Surabaya yang diwakili oleh Pendeta David Husada mengirim surat kepada Kepala Kantor Inspeksi Pendaftaran Tanah Jawa Timur, yang berisi sebagaimana berikut (AKS, box 1209, no. 25.398).

- 1) Kami telah menjewa tempat tersebut sedjak bulan Pebruari tahun 1953, seperti jang terlampir dalam surat ini.
- 2) Geredja kami adalah suatu organisasi jang mempunyai badan hukum dan telah disahkan oleh Pemerintah sedjak tahun 1935 (Tgl. 17 September 1935 no. 26).
- 3) Kebaktian geredja bukanlah seperti kegiatan2 organisasi lainnja jang dapat dihentikan se-waktu2, tetapi kebaktian adalah suatu ibadat kepada Tuhan Jang Maha Esa.

Oleh karena itu kami mengharapkan kebidaksanaan bapak, agar bila tempat tersebut akan digunakan untuk sesuatu keperluan, harap bapak suka memberitahukannja 2 minggu sebelumnja, dan kami harap sedapat mungkin tidak menggunakan hari Minggu karena hari tersebut adalah hari ibadat kepada Tuhan.

Sepuluh hari kemudian (5 Oktober 1971), Kantor Inspeksi Pendaftaran Tanah Jawa Timur membalas surat tersebut dengan jawaban yang bernada emosional. Berikut isi dari surat tersebut (AKS, box 1209, no. 25.398).

- 1) Bahwa Saudara telah menjewa ruangan dimaksud semendjak th. 1953 itu bukan berarti Saudara lantas mendjadi pemilik ruangan itu.
- 2) Bahwa geredja saudara itu adalah suatu badan hukum, itu tidak ada hubungannja dengan persoalan persewaan ruangan dimaksud.

- 3) Bahwa Saudara itu adalah anggota organisasi Kebaktian ibadat kepada Tuhan J.M.E., kami sampai pada saat ini belum melihat bukti<sup>2</sup>nja. Kami pernah membatja salah satu adjaran dari Sang Christus:

“Tjintailah sesamamu sebagaimana engkau mentjintai dirimu”

Walaupun kami tidak termasuk golongan umatNja, akan tetapi kami dapat menilai keluhuran dari pada falsafah hidup jang tersimpul dalam adjaran itu.

- 4) Kami tidak dapat memberitahu kepada Saudara 2 (dua) minggu sebelumnya oleh karena kami mendapatnja perintah dari DIRD-JEN. sendiri untuk menjiapkan ruangan<sup>2</sup> bagi pameran baru pada tgl. 20-9-1971 djam 11.00 pagi. Dengan demikian Saudara dapat menghitung sendiri apakah mungkin kami memberitahukan kepada Saudara 2 minggu sebelumnya. Pameran dimulai pada tgl. 28 September 1971.
- 5). Kalau Saudara merasa tersinggung atas perbuatan kami disebut diatas dan untuk menghindari terulangnja kembali kejadian itu kami tidak menaruh keberatan bilamana Saudara membangun geredja sendiri dan meninggalkan ruangan dimaksud untuk seterusnya.

Kami turut berdoa semoga Saudara berhasil.-

Pihak Gereja Utusan Pantekosta (GUP) tampaknya tidak mau menanggapi jawaban dari Kantor Inspeksi Pendaftaran Tanah Jawa Timur. Sebaliknya pada tanggal 9 Oktober 1971 melayangkan surat kepada Dewan Kerja Sama Gereja-gereja Kristus Pantekosta Kota Madya Surabaya yang berisi permohonan bantuan tentang penyelesaian persoalan yang mereka hadapi (AKS, box 1209, no. 25.398). Pengiriman surat ini menarik dicermati karena selain ditembuskan kepada wali kota, ditembuskan juga kepada Ketua Sekber Golkar Kota Madya Surabaya yang dalam surat-surat sebelumnya tidak pernah dilakukan. Apakah ini indikasi kalau pihak Gereja Pantekosta mengharap bantuan Sekber Golkar untuk menyelesaikan masalah ini.

Seperti halnya kasus pertama, lagi-lagi tidak ada data yang ditemukan untuk masalah yang kedua. Akan tetapi, kedua kasus di atas memperlihatkan ketidakpekaan pemerintah terhadap kehidupan

keagamaan warganya. Selain itu, masalah tersebut memperlihatkan betapa agama yang tersymbolisasi lewat ruang-ruang ibadah dan lembaga-lembaga pendidikan yang berhubungan dengannya (misalnya madrasah) dapat menimbulkan pertentangan dan ketegangan antar-kelompok masyarakat.

## **D. MENEBAR WANGI DUPA: KLENTENG SEBAGAI PUSAT KEAGAMAAN DAN KEBUDAYAAN TIONGHOA**

Dari berbagai ritual yang sering disaksikan, dapat dikatakan bahwa masyarakat Tionghoa adalah komunitas yang sangat memperhatikan aspek-aspek religi di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pembangunan tempat ibadah yang sering disebut dengan klenteng<sup>116</sup> menjadi salah satu persoalan yang penting. Menurut Salmon, bagi masyarakat Tionghoa, klenteng bukan hanya tempat upacara keagamaan, melainkan juga sebagai ungkapan lahiriah masyarakat yang mendukungnya. Dengan demikian, studi tentang klenteng dapat memberikan sumbangan berharga untuk memahami sejarah sosial masyarakat yang bersangkutan (Lombard, 2003: 93).

### **1. Klenteng di Era Kolonial dan Pendudukan Jepang**

Sampai tahun 1905 tempat ibadah masyarakat Tionghoa berada di kawasan Pecinan (*Chinese kamp*). Pada mulanya, orang-orang Tionghoa menetap di kawasan Jalan Slomporetan, tetapi perkembangan mereka yang dari tahun ke tahun terus meningkat<sup>117</sup> menyebabkan pemukimannya juga berkembang ke arah Handelstraat (sekarang Jalan Kembang Jepun) dan ke arah Jalan Kapasan. Penyebaran ini

---

<sup>116</sup> Klenteng berasal dari kata Tionghoa 'guan-ying ting', yang artinya tempel bagi Dewi Guan-yin (Guan-in, Hok.) atau Kwam Im. Cf. Salmon dan D. Lombard, *Klenteng-klenteng dan Masyarakat Tionghoa di Jakarta* (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2003), hlm. 111.

<sup>117</sup> Pada tahun 1930 jumlah orang Tionghoa di Surabaya 31.866 jiwa, lima tahun kemudian (1935) jumlahnya meningkat menjadi 41.743 dan pada tahun 1940 mencapai 47.844 jiwa. Lihat *Volkstelling 1930 deel VII*.

disebabkan juga oleh tidak diberlakukannya lagi Undang-undang Wilayah (*Wijkenstelsel*),<sup>118</sup> yang mengharuskan orang Cina berdiam di Pecinan dan perkembangan arus perdagangan (Lilananda, 1995: 13).

Di kawasan Pecinan terdapat empat klenteng, yaitu: 1) Klenteng Hok An Kiong. Klenteng ini terletak di Jalan Cokelat dan merupakan klenteng tertua yang dibangun pada tahun 1830 oleh perkumpulan Hok Kian Kong Tik Soe, 2) Klenteng Hong Tik Hian yang berada di Jalan Dukuh. Tidak diketahui dengan jelas kapan berdirinya klenteng ini, namun sebelum 1899 telah berdiri, 3) Klenteng Boen Bio yang terletak di Jalan Kapasan. Klenteng yang dibangun pada tahun 1906 dan diresmikan pada tahun 1907 ini merupakan satu-satunya klenteng khusus bagi penganut Khonghucu, dan 4) Klenteng Pak Kik Bio yang berada di Jalan Jagalan. Klenteng ini dibangun pada tahun 1951 dan diresmikan pada tahun 1952 (Rahayu, 2005: 14).

Berkaitan dengan penyebaran orang-orang Tionghoa ke arah timur dan selatan, maka tempat ibadah mereka juga berkembang ke arah timur dengan dibangunnya beberapa klenteng di daerah Kapasan, daerah Jagalan, bahkan sampai ke Surabaya Selatan, yakni klenteng Jalan Cokroaminoto.

Secara garis besar, klenteng-klenteng di Surabaya dapat dibedakan ke dalam tiga jenis. *Pertama*, klenteng umum yang menganut ajaran Tri Dharma. Dalam klenteng ini terdapat banyak patung-patung dewa-dewi dan nabi-nabi Konghucu, Tao, dan Budha. Dengan demikian, ketiga pemeluk agama dapat melakukan sembahyang di tempat yang sama, tetapi dengan cara beribadah yang sesuai ajaran masing-masing. Selain melakukan sembahyang, mereka yang datang

---

<sup>118</sup> Undang-undang *Wijkenstelsel* dihapus pada tahun 1917 dan *Passenstelsel* dihapus pada tahun 1918. Penghapusan ini menyebabkan banyaknya orang-orang Tionghoa yang menetap di berbagai kawasan di luar Pecinan. Akibatnya, daerah sekitar Pabean, Songoyudan, dan panggung yang pada tahun 1866 masih menjadi kampung Melayu, berubah menjadi Pecinan. Mega Christina, "Menyongsong Hari Jadi ke-702, Menguak Sejarah Pecinan Surabaya: Mereka Kenal Segi Empat Emas Sejak Zaman Belanda", dalam *Surya* 23 Mei 1995; Shinta Devi Ika Shanti Rahayu, Boen Bio: *Benteng Terakhir Umat Konghucu* (Surabaya: JP Books, 2005), hlm. 33.



Sumber: Faber, 1931

**Gambar 25.** Klenteng Boen Bio di Jalan Kapasan

ke klenteng ini dapat juga meminta *ciam si* (Salmon dan Lombard 2003:111), obat atau minta diramal nasib dan jodohnya. Klenteng jenis ini adalah Klenteng Hok An Kiong yang terletak di Jalan Cokelat, Klenteng Hong Tek Hian di Jalan Dukuh, dan Klenteng Pak Kik Bio di Jalan Jagalan (Rahayu, 2005: 17). *Kedua*, klenteng bagi mereka yang memuja satu dewa atau satu nabi selain memuja Tuhan Yang Maha Esa. Contoh klenteng yang sering disebut juga dengan klenteng spesifik ini adalah Klenteng Boen Bio di Jalan Kapasan yang memuja Nabi Konghucu. *Ketiga*, klenteng keluarga yang didirikan oleh sebuah keluarga atau marga tertentu untuk menyembah dewa-dewi yang dianggap menjadi pelindung keluarga masing-masing. Contoh klenteng ini adalah Klenteng Hong San Ko Te di Jalan Cokroaminoto dan Soedarono Kwarso di Jalan Sidotopo (Ratnawati, 1989: 10 dan Lilananda, 1995: 39).

Pada zaman kolonial, klinteng yang bersifat komunal atau umum diurus oleh instansi yang bernama *Gong-guan* atau *Chineesche Raad* atau Dewan Cina. Instansi yang amat penting dan memiliki peran yang besar dalam sejarah masyarakat Tionghoa ini bertugas untuk menangani masalah warisan orang Tionghoa (*Boedelmeesters voor Chineesche sterfhuizen*). Selain mengawasi masyarakat, tugas lain dari dewan ini adalah memungut pajak, mengatur monopoli ekonomi, meninjau, melaksanakan serta membiayai upacara-upacara keagamaan termasuk masalah pemakaman (Salmon dan Lombard, 2003: 93–94).

Pendudukan Jepang di Indonesia merupakan babak baru bagi kehidupan orang-orang Tionghoa. Jauh sebelum militer Jepang menduduki Kota Surabaya, orang-orang Tionghoa sudah melakukan perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan ini dilakukan dalam dua bentuk, *pertama*, melakukan pemboikotan terhadap barang-barang produksi Jepang. Hal ini adalah refleksi perasaan anti-Jepang menyusul penyerbuan Jepang terhadap Tiongkok pada tahun 1931. Pemboikotan ini didalangi oleh Siang Hwee yang dikenal dengan gerakan Tjin Tjay Hwee. *Kedua*, melakukan pengumpulan dana untuk dikirim ke Tiongkok (Noordjanah, 2004: 84).<sup>119</sup> Selama pendudukannya di Surabaya, tidak ada kebijakan khusus yang dikeluarkan berkaitan dengan keberadaan klinteng. Namun, kebijakan yang diterapkan bersifat umum tidak dapat dipisahkan dari Panglima Tertinggi Tentara ke-16 Letjen Imamura yang memilih jalan yang lebih lunak. Bagi Imamura, tekanan dan sikap keras terhadap orang-orang Tionghoa hanya akan menimbulkan konflik baru. Oleh karena itu, potensi yang dimiliki oleh penduduk Tionghoa lebih baik dimanfaatkan untuk membantu jalannya mesin perang Jepang.

Kebijakan yang lunak tersebut diterapkan dalam bentuk pen-Cina-an kembali orang-orang Tionghoa. Terdapat tiga hal yang dilakukan Jepang untuk menghidupkan kembali kebudayaan Tionghoa tersebut. Ketiga hal itu adalah: *pertama*, menjadikan hari

<sup>119</sup> Wawancara, Oei Hiem Hwie 25 November 2005.

raya imlek sebagai hari libur, *kedua*, musik tradisional Tiongkok disiarkan di radio-radio pemerintah, dan *ketiga*, anak-anak Tionghoa harus bisa menulis, membaca, dan berbahasa Cina.<sup>120</sup>

## 2. Klenteng pada Masa Republik

Berakhirnya masa pendudukan Jepang (1942–1945) tidak membuat posisi orang-orang Tionghoa menjadi lebih baik dan tenang. Sebaliknya selama masa perang kemerdekaan (1945–1949), orang-orang Tionghoa mengalami masa-masa yang amat sulit. Pada masa itu, orang-orang Tionghoa terpecah menjadi dua golongan, ada yang mendukung republik dan yang antirepublik. Mereka yang antirepublik adalah orang-orang yang mendapatkan keuntungan berkat perlindungan Belanda, terutama sejak awal abad ke-20. Mereka menganggap kemerdekaan Indonesia tidak mungkin terwujud. Ketika terjadi bentrokan di Surabaya pada bulan Oktober dan November 1945, kelompok yang terakhir ini membantu Belanda (Noordjanah, 2004: 92). Melihat kenyataan ini, pasukan pejuang Surabaya dalam hal ini PKR mengadakan pembersihan orang-orang yang dicurigai sebagai mata-mata. Pekerjaan ini diserahkan pada pemuda-pemuda Tionghoa yang tergabung dalam San Chu I Tsing Thuan (Barisan Pemuda Tionghoa).

Di tengah persoalan yang pelik ini, sekelompok orang-orang Tionghoa membentuk Barisan Polisi Keamanan Kota, yang kemudian disebut dengan Pao An Tui. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1947 dengan tujuan untuk menjaga keselamatan orang-orang Tionghoa baik karena ancaman Belanda maupun pihak republik yang tidak menyukainya. Namun demikian, pembentukan satuan penjaga keamanan sipil tersebut tidak lantas membuat orang-orang Tionghoa menjadi aman. Sebaliknya berbagai teror dan intimidasi mewarnai kehidupan sehari-hari mereka di Surabaya. Dwicipta

---

<sup>120</sup> Didi Kwartanada, “Minoritas Tionghoa dan Fasisme Jepang: Jawa 1942-1945”. Dalam Seri Siasat Kebudayaan: Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 29.

dalam sebuah cerpennya yang berjudul Pao An Tui menggambarkan situasi ini dengan sangat baik. Dengan mengambil *setting* Kembang Jepun (nama daerah tempat bermukimnya orang-orang Tionghoa), Dwicipta berhasil mendeskripsikan situasi yang sangat dilematis yang dialami oleh orang-orang Tionghoa.

... Keng Hong memberi tanda pada Sin Liong untuk berjaga-jaga. Perlahan-lahan, ia membuka selot pintu, lalu membukanya. Sebuah kertas tertusuk pisau kecil di pintu rumahnya. Ia mengambilnya dan menutup pintu lagi. Diambilnya korek dari kantong celananya. Ia membaca tulisan itu.

“Antek-antek Pao An Tui kalau berani bersekutu dengan Belanda akan dimusnahkan.”

Mereka berpandangan satu sama lain. Keng Hong menggeleng-gelengkan kepalanya.

“Kita benar-benar berada di tempat yang sulit. Kedua belah pihak mencurigai kita,” katanya sambil meremas kertas itu sampai hancur. Kedua adik iparnya memandang bingung, tak tahu mesti berbuat apa.<sup>121</sup>

Di tengah situasi ini, sangat sulit bagi orang-orang Tionghoa untuk mengembangkan kepercayaannya termasuk membangun klenteng baru. Antara tahun 1945 hingga 1960 hanya terdapat satu klenteng baru. Klenteng tersebut dibangun pada tahun 1951 dengan nama klenteng Pak Kik Bio yang terletak di Jalan Jagalan. Kenyataan tersebut sangat berbeda dengan Jakarta yang pada periode sama memiliki jumlah klenteng baru sebanyak 12 buah (Salmon dan Lombard, 2003: 107–110). Dalam banyak kesempatan, kegiatan klenteng mengundang pro dan kontra. Pada tanggal 27 Maret 1959 misalnya, diumumkan adanya arak-arakan Toapekong, tetapi Pelaksana Kuasa Perang (Pekuper) Kota Praja Surabaya tidak menyetujui adanya arak-arakan Toapekong di luar klenteng.<sup>122</sup> Setelah

---

<sup>121</sup> Dwicipta, “Pao An Tui”, dalam Kompas, 27 November 2005.

<sup>122</sup> Larangan untuk melakukan kegiatan keagamaan di luar klenteng diterapkan juga di Makassar. Akan tetapi, larangan itu dikeluarkan oleh Konsul Cina berhubung terjadinya peristiwa pelemparan granat ketika arak-arakan Toapekong di sekitar kampung Cina.

melalui negosiasi dengan pihak keamanan, akhirnya Toapekong dapat diarak keliling kota. Pelarangan ini berkaitan dengan persoalan keamanan dan ketertiban umum. Alasan yang sama dipakai juga setahun sebelumnya yang melarang penggunaan tulisan huruf Tionghoa. Menurut pengumuman Komando Militer Kota Besar (KMKB) No. PNG.KM 032/5/1958, penggunaan tulisan-tulisan dengan huruf Tionghoa hanya dapat menimbulkan kesulitan dan salah pengertian bagi khalayak umum, dan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum dianggap perlu mengadakan ketentuan-ketentuan umum mengenai penggunaan huruf Tionghoa. Orang-orang Tionghoa yang hendak melakukan penggantian berbagai papan pengumuman yang semula dalam huruf Tionghoa ke huruf latin diberi waktu hingga akhir Juni 1958. Selain larangan penggunaan huruf Tionghoa dalam papan pengumuman ini, berbagai surat kabar atau harian yang berhuruf Tionghoa juga dilarang untuk terbit kembali.<sup>123</sup>

Beberapa tahun kemudian, campur tangan pemerintah dan militer dalam urusan internal klenteng sering tidak terhindarkan. Campur

---

Peristiwa yang terjadi pada tahun 1957 itu mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Setelah peristiwa tersebut, kegiatan arak-arakan tidak pernah lagi diadakan. Darmawan Masud Rahman, dkk., *Klenteng Ibu Agung Bahari Ujung Pandang* (Ujung Pandang: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan dan Tenggara, 1994), hlm. 41.

<sup>123</sup> “Pengumuman Komandan KMKB Surabaya. Warganegara Indonesia Dilarang Pergunakan Tulisan Huruf T’hoa”, dalam *Djawa Pos*, 21 Mei 1958; ‘KMKB Surabaya Prinsip Tidak Hendaki Terbitnja Sk2 Berhuruf Tionghoa. Pelaksanaan penggantian papan nama berhuruf Tionghoa akan diteliti’ Dalam *Djawa Pos*, 7 Juni 1958. Pada tahun 1952, larangan penggunaan huruf dan bahasa Tionghoa dan keharusan menggunakan bahasa Indonesia, Inggris atau Belanda dari pihak berwajib telah diperintahkan dalam pembukuan perusahaan. Larangan ini membuat panik pengusaha-pengusaha Tionghoa. Oleh karena itu Federasi Tiong Hoa Siang Hwee (federasi dari kantor-kantor dagang Tionghoa) mengajukan permintaan kepada Menteri Keuangan agar bahasa Tionghoa diperbolehkan dipakai dalam pembukuan. Permintaan ini didasari oleh suatu kenyataan bahwa sebagian besar pedagang dari Tiongkok tidak bisa berbahasa Indonesia. “Permintaan supaya bahasa Tionghoa boleh dipakai dlm pembukuan”, dalam *Perdamaian*, 15 Djanuari 1952; “Pembukuan Berbahasa Tionghoa”, dalam *Djawa Pos*, 14 Januari 1952.

tangan ini misalnya terjadi dalam proses pembentukan kepengurusan perkumpulan sembahyang di Klenteng Kampung Dukuh. Konflik yang terjadi pada tahun 1965 ini dipicu oleh perseteruan antara perkumpulan sembahyang. Dalam suratnya kepada Komdak X Jawa Timur, Caturtunggal<sup>124</sup> Kecamatan Pabean/Cantikan tempat klenteng ini berlokasi, menjelaskan kronologi konflik tersebut. Pada awalnya klenteng tersebut adalah milik perkumpulan sembahyang “Kong Tik Tjoeck Ong” yang sudah berumur ± 60 tahun. Pada tanggal 31 Januari 1956 berdiri lagi suatu perkumpulan sembahyang yang bernama “Hong Tik Hian King Sien Sia”. Perkumpulan baru ini juga menjadikan klenteng di Kampung Dukuh sebagai tempat sembahyang. Namun demikian, hubungan antara dua perkumpulan sembahyang ini baik dan tidak ada masalah (AKS, box 1619, no. 37.152).

Konflik baru terjadi ketika pada bulan November 1964 berdiri lagi sebuah perkumpulan baru yang menamakan diri “Hong Sang She King Sien Hwee” yang juga menjadikan klenteng di Kampung Dukuh sebagai tempat sembahyang. Mereka yang tergabung dalam kelompok ketiga ini adalah anggota kelompok dua yang keluar karena tidak puas dengan pemilihan pengurus baru pada tanggal 11 Oktober 1964. Dengan terbentuknya perkumpulan ketiga ini maka suasana klenteng menjadi kacau. Klenteng sebagai tempat yang suci pernah dipergunakan sebagai tempat minum bir, bahkan pernah terjadi pemukulan sehingga menjadi urusan yang berwajib (AKS, box 1619, no. 37.152).

Melihat kondisi klenteng yang kian hari menunjukkan kekacauan, maka pihak Caturtunggal mengambil inisiatif untuk mendamaikan kelompok yang bertikai. Setelah melewati serangkaian masalah, pada tanggal 11 September 1965 bertempat di kantor Kecamatan Pabean/Cantikan diadakan rapat pembentukan pengurus baru per-

---

<sup>124</sup> Caturtunggal adalah lembaga ‘supra’ pemerintahan yang terdiri atas camat, Pa. Uterpra, Perwakilan Kom Res Kep 1012 dan Pengurus Front Nasional Anak Cabang. AKS, box 1619, no. 37.152.

kumpulan sembahyang Klenteng Dukuh. Rapat tersebut dihadiri oleh tiga pihak, yakni Caturtunggal, unsur 6<sup>125</sup>, dan calon pengurus baru perkumpulan sembahyang Klenteng Dukuh yang merupakan peleburan dari dua bekas Perkumpulan Sembahyang “Hong Tik Hian King Sien Sia dan Hong Sang She King Sien Hwee”. Rapat yang dimulai pada pukul 09.00 hingga 13.40 akhirnya berhasil membentuk pengurus baru yang diketuai oleh Ong Kie Tjay (AKS, box 1619, no. 37.152). Pembentukan pengurus baru ini tidak lantas membuat gonjang-ganjing di klenteng ini menjadi tenang. Kekacauan baru dipicu oleh surat Seksi Intelijen Kom Din 101 tertanggal 21 September 1965 kepada Caturtunggal yang isinya menyatakan tidak membenarkan cara yang ditempuh oleh pihak Caturtunggal dalam menyelesaikan masalah di klenteng dukuh. Dengan surat ini, maka konflik tidak hanya terjadi antar perkumpulan sembahyang tetapi melebar pada lembaga pemerintah. Bagi pihak Caturtunggal, surat dari Seksi Intelijen Kom Din 101 ini mengherankan karena dalam rapat pembentukan pengurus baru pada 11 September 1965 juga dihadiri oleh wakil dari mereka. Oleh karena itu, pihak Caturtunggal tidak membenarkan surat dan tindakan Seksi Intelijen yang menurutnya tidak simpatik. Namun, pihak Intelijen Kom Din 101 tetap pada pendiriannya sehingga keadaan yang semula sudah cair kembali menjadi tegang.

Dalam suratnya kepada Komdak X Jawa Timur, tertanggal 22 November 1965, pihak Caturtunggal melaporkan ketegangan tersebut seperti kutipan berikut:

- a. Dalam keadaan jang demikian (adanja teror biadab G.30.S.) jang mana bagi pengurus jang baru jang sudah terpilih dengan sjah tidak berani bergerak, tetapi kesempatan itu dipergunakan setajara luluasa oleh bekas pengurus kumpulan ke III jang sudah dibubarkan dan tidak sjah (liar) dengan nada menjombongkan diri/menghina (ngejek) terhadap Tjaturtunggal dan Pengurus Baru jang sjah.

---

<sup>125</sup> Seperti halnya Caturtunggal, Unsur 6 adalah lembaga ‘supra’ pemerintah yang terdiri atas Pemerintah Kota Praja Surabaya, Kejaksaan Negeri, Komdin 101, KUA, dan Kom Res Kep 1012. AKS, box 1619, no. 37.152.

- b. Pada tgl. 4 Oktober 1965 mengadakan sembahjang.
- c. Pada tgl. 8 Nopember 1965 mengadakan sembahjang perkumpulan setjara besar2an dengan menjembelih/menjadiakan sadjian Babi, Kambing dan lain sebagainya.
- d. Apa sebabnja mereka berani berbuat demikian, ada latar belakang jang bagaimana dan mendapat idzin dari siapa?
- e. Sembahjang apakah? Apakah sembahjang untuk berdo'a terjadap Pahlawan Revolusi jang gugur karena kebiadaban teror G.30.S.? kami yakin tidak. Mereka bersembahjang hanja untuk mengatjau/menghina fihak lain (Instansi/perorangan).
- f. Ada pintu jang disegel terdapat rusak, tetapi jang menjegel kembali bukannya Seksi Intelidjen tetapi orang partikelir diberi hak untuk menjegel kembali. Orang/utusan siapa? Benarkah tjara itu? (AKS, box 1619, no. 37.152).

Sayang sekali tidak ada keterangan bagaimana penyelesaian akhir dari masalah ini. Akan tetapi bagi pihak Caturtunggal, kegagalan dalam menyelesaikan masalah ini akan menjatuhkan kewibawaannya di mata masyarakat. Hal ini tampak dari surat yang dikirim Caturtunggal kepada Wali Kota Kepala Daerah Kota Praja Surabaya dan instansi lain. "Bagaimana anggapan dan dimana kewibawaan Tjaturtunggal dan Pemerintah Bawahan dari masjarakat Asing jang kini sudah berkumpul/berapat lalu dengan tiba2 ada hal jang demikian?" (AKS, box 1619, no. 37.152.). Selain itu, proses penyelesaian konflik ini juga memperlihatkan adanya saling curiga antara lembaga pemerintahan dengan militer. Apalagi pada saat terjadinya konflik ini, gerakan 30 September baru saja berlalu. Kecurigaan ini muncul karena pihak militer tidak mengambil tindakan atas berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus perkumpulan sembahyang ketiga yang tidak sah dan sudah dibubarkan. Tambahan pula, keikutsertaan militer dalam berbagai proses penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat menunjukkan besarnya dominasi militer pada saat itu.

Menguatnya posisi militer tidak dapat dipisahkan dari situasi politik pada saat itu. Terjadinya Gerakan 30 September sangat menyudutkan posisi orang-orang Tionghoa, baik yang masih berstatus

warga negara asing maupun yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Peristiwa tersebut menimbulkan berbagai gerakan anti-Tionghoa di berbagai daerah di Indonesia termasuk Jawa Timur. Hal ini terjadi antara lain karena pada akhir masa kepemimpinan Soekarno banyak dari orang-orang Tionghoa yang menjadi anggota Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI), sedangkan sebagian dari anggotanya berorientasi pada PKI.<sup>126</sup> Sebagai penguasa baru di republik ini, Jenderal Soeharto menugaskan Mayor Jenderal Soemitro sebagai Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah (Pepelrada) Jawa Timur. Pada bulan Januari 1966 Soemitro menginstruksikan agar klenteng-klenteng yang ada di Jawa Timur menata dirinya kembali dan disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia. Ia melarang adanya unsur-unsur Cina di dalam klenteng, termasuk tulisan Cina yang berada di dalam maupun di luar bangunan. Untuk menindaklanjuti instruksi tersebut, beberapa anggota militer mendatangi klenteng-klenteng dan memerintahkan agar pengurus klenteng segera menurunkan tulisan-tulisan Cina atau menutup dengan kain, dan jika mereka menolak maka akan dirusak (Shinta, 2005: 164).

Pada tanggal 15 April 1967, Mayor Jenderal Sumitro menyerahkan jabatannya kepada Mayor Jenderal M. Jasin. Pada tanggal 26 Juni 1967, M. Jasin mengeluarkan keputusan yang sangat meresahkan bagi orang-orang Tionghoa. Surat Keputusan Pepelrada Jatim No. 22/6/1967 tersebut berisi tentang penggantian istilah 'klenteng' menjadi 'Tempat Ibadah Tri Dharma' dan kepada setiap penganutnya diberi kebebasan menjalankan ibadah di tempat-tempat yang telah disahkan oleh Pepelrada Jatim. Menurut Pepelrada, keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa agama bersifat universal, oleh karena itu setiap penduduk bebas memeluk agamanya masing-masing dan perlu adanya tindakan penertiban klenteng atau tempat ibadah tri dharma (Klenteng, 1967). Bagi

---

<sup>126</sup> Wawancara, Oei Him Hwie, 25 November 2005; Rahayu, Shinta Devi Ika Shanti, *op. cit.*, hlm. 162.

klenteng yang sejak semula memang menjadi tempat ibadah bagi tiga agama, keputusan tersebut tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi bagi klenteng yang murni sebagai tempat ibadah umat Konghucu, keputusan tersebut menjadi hal yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, pengurus klenteng Boen Bio menolak keputusan itu dan berusaha mempertahankan Boen Bio sebagai klenteng yang murni sebagai tempat ibadah orang-orang beragama Konghucu. Keberatan dari pengurus Boen Bio dapat diterima oleh Pepelrada Jawa Timur, sehingga Boen Bio tetap menjadi klenteng yang murni sebagai tempat ibadah orang-orang Konghucu (Shinta, 2005: 171).[]

# MAKAM TIONGHOA SEBAGAI SIMBOL RUANG SUCI: KONTROL, KONFLIK, DAN NEGOSIASI

## A. HIDUP ADALAH MENUNDA KEKALAHAN

“*Hidup hanya menunda kekalahan*” demikian kata Chairil Anwar dalam salah satu bait puisinya yang berjudul “Derai-derai Cemara”. Apakah yang dimaksud kekalahan oleh Chairil Anwar tersebut adalah kematian? Entahlah. Akan tetapi, satu hal yang pasti, kematian pasti akan menjemput manusia. Lalu apakah persoalan akan selesai dengan kematian? Bagi yang sudah meninggal mungkin telah selesai, tapi bagi keluarga yang ditinggalkan ternyata tidak. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kematian terkadang justru menjadi sumber masalah. Gangguan saat pemakaman, pencurian, hingga pengrusakan makam demi perkembangan dan keindahan kota menjadi persoalan yang kerap melanda berbagai makam Tionghoa di Indonesia. Di Yogyakarta misalnya, makam Tionghoa yang terletak di kompleks Universitas Gadjah Mada (UGM) harus rela berpindah tempat, karena di lokasi tersebut akan dibangun masjid kampus. Demikian pula di Makassar, makam Tionghoa harus rela tempatnya digantikan oleh gedung kantor gubernur Sulawesi Selatan.

Fenomena di atas juga menimpa makam-makam Tionghoa yang ada di Kota Surabaya. Berbagai gangguan seperti larangan penduduk setempat untuk memakamkan mayat di tempat tertentu, pencurian, dan pengrusakan makam akhirnya memuncak pada ditutupnya

makam-makam tersebut. Ironisnya, alasan penutupan makam itu seringkali tidak substansial. Berikut alasan pemerintah kota atas rencana penutupan beberapa makam itu.

“Meningat akan perkembangan2 pada dewasa ini, sangatlah tidak pada tempatnja adanja makam ditengah kota, seperti jang terletak di DJIn. Tambaksari, Embong Malang, DJIn. Pandegiling dsb. ... Demikian djuga untuk memelihara akan keindahan kota, maka perlu sekali sekarang di-mulainja penutupan makam2 tersebut” (AKS, box 118 no. 1824).

“... karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan kota, maka makam2 didalam kota itu harus ditutup. Ini untuk keperluan perluasan kota... Di atas tanah yang kosong itu lalu diberdirikan rumah2 yang baik dan jang sesuai dengan keindahan kota ....”<sup>127</sup>

Alasan yang dikemukakan atas rencana penutupan makam dan menggantinya dengan perumahan menunjukkan ketidakpekaan pemerintah atas keberadaan sebuah makam yang tidak sekadar tempat mengubur mayat, tetapi juga menjadi simbol penghormatan terhadap leluhur. Bagi masyarakat Tionghoa, makam bukan sekadar tempat memakamkan jenazah, tetapi memiliki makna dan fungsi yang sakral. Kesalahan dalam mengurus makam leluhur akan berakibat fatal bagi anak cucunya. Selain itu, makam merupakan salah satu kebanggaan sehingga mereka yang kaya tidak segan-segan membeli tanah yang luas hanya untuk membuat kubur bagi orang tuanya. Dengan kata lain, makam tidak hanya menjadi simbol sakralitas, tetapi juga telah menjadi simbol status sosial-ekonomi seseorang. Namun, tindakan pemerintah kota untuk menutup beberapa makam Tionghoa menunjukkan kalau makam tidak lagi sekadar berhubungan dengan persoalan sakralitas atau penghormatan terhadap leluhur, tetapi melebar pada persoalan ruang yang berkaitan dengan banyak kepentingan. Penggusuran makam untuk perluasan kota dan untuk perumahan, pembangunan perkantoran, masjid, dan lain-lain merupakan contoh

---

<sup>127</sup> “*Anggota DPD Amirudin: Penutupan Makam T’hoa Perlu Utk. Keperluan dan Keindahan kota*” dalam *Surabaya Post* 25 Maret 1958.

betapa makam sebagai simbol sakral terkalahkan oleh simbol ekonomi bahkan politik.<sup>128</sup>

Tulisan ini antara lain hendak mempelajari bagaimana makam Tionghoa menghadapi berbagai gangguan dan bagaimana keberadaannya harus terkalahkan oleh kehadiran simbol lain. Tulisan ini menggunakan berbagai bahan, antara lain dokumen yang tersimpan di Kantor Arsip Kota Surabaya, berita-berita koran, khususnya *Surabaya Post*, dan wawancara dengan beberapa orang yang mengetahui seputar masalah ini.

## **B. KEMATIAN DAN MAKAM DALAM PANDANGAN ORANG TIONGHOA**

Bagi sebagian orang Tionghoa, membicarakan kematian masih merupakan hal yang tabu, apalagi pada saat seseorang yang merencanakan untuk menikah atau melahirkan. Bagi orang Tionghoa, seseorang yang sudah meninggal secara otomatis statusnya berubah menjadi dewa. Orang Tionghoa yang meninggal dunia, ditahan dahulu beberapa hari di rumah untuk menunggu berkumpulnya sanak saudara. Masa penahanan jenazah biasanya antara tiga sampai tujuh hari. Akan tetapi, dalam beberapa kasus ada jenazah yang ditahan sampai lima belas hari. Mereka yang hendak menahan jenazah, keluarganya harus mengajukan surat permohonan izin kepada pemerintah Kota Surabaya. Jika yang meninggal tidak disebabkan oleh penyakit menular, maka permohonan penahanan jenazah akan dikabulkan. Pemberian izin disertai dengan perjanjian bahwa penahanan jenazah harus dilakukan dalam peti mati, tertutup rapat-rapat yang tidak dapat dibuka lagi dan harus menjalankan dengan sungguh-sungguh petunjuk dari kepala jawatan kesehatan kota (AKS, box 1321 no. 28.292; box 1321 no. 28.285; box 678 no. 14.014). Sebelum dikuburkan, jenazah harus dimandikan terlebih

---

<sup>128</sup> Terima kasih kepada Freek Colombijn dan Martine Barwegen yang telah mengirimkan beberapa fotokopi buku tentang makam.

dahulu oleh sanak keluarga sendiri, lalu diletakkan di satu tempat yang pantas agar dapat dilihat oleh keluarga untuk terakhir kalinya. Pakaian buat jenazah boleh pakaian yang pada masa hidupnya paling dia sukai, sedangkan pakaian buat keluarga yang sedang berkabung terbuat dari kain kasar (belacu) berwarna putih. Di lengan pakaian keluarga yang berkabung diberi tanda (pangkat) berupa potongan kain berwarna hitam, biru, dan merah. Warna hitam untuk anak, biru untuk cucu, dan merah untuk cicit.<sup>129</sup>

Dalam kebudayaan Tionghoa, makam bagi seseorang sangat penting, karena diyakini makam seseorang dapat memengaruhi keadaan keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, makam harus dibuat sebaik mungkin selain karena hal tersebut juga sebagai bukti besarnya penghormatan kepada orang tua. Dalam kebudayaan Tionghoa, penghormatan terhadap orang tua disebut dengan *Hao (Hshiao)*. Sikap hormat ini berlangsung setiap hari kepada mereka yang masih hidup dan setelah meninggal dilakukan dengan cara yang berbeda. Kebudayaan Konghucu menghasilkan budaya kekeluargaan yang kuat dimana keluarga menjadi basis pelestarian tradisi dan budaya, dan bahkan penghormatan yang berlebihan bukan saja ditujukan kepada yang lebih tua yang masih hidup tetapi juga kepada leluhur/nenek moyang yang sudah meninggal.<sup>130</sup> Oleh karena itu, keberadaan seorang anak sangat penting bagi keluarga Tionghoa, terutama anak laki-laki. Bagi mereka, anak bukan hanya untuk melanjutkan marga (*she*) dan membawa berkat (*bokeky*), tetapi terutama untuk mengganti sang ayah merawat abu leluhur.<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup> Tjoekat Liang, *Perubahan Besar Tentang: Adat-istiadat Bangsa Tionghoa dan Rimajat Hari Rajah Bangsa Tionghoa serta Burgerlijke Stand Boeat Bangsa Tionghoa dengan Burgerlijke Wetboek Saperloenja* (Semarang: Lic King An, 1925), hlm. 8-11; Wawancara, Mimi Lie, 3 Juni 2005.

<sup>130</sup> Herlianto, "Masalah Cina (1)" dalam: <http://www.hamline.edu/apa-kabar>. Diakses pada 5 Februari 2005.

<sup>131</sup> Tentang hal ini, lihat: Saumiman Saud, "Mengenal upacara kematian orang Tionghoa tradisi", dalam *Warta GKA Trinitas*, edisi 20 Oktober; <http://gkatrinitas.tripod.com/warta>.

Selain itu, makam orang tua juga dianggap sebagai suatu tempat/sarana ikatan tali persaudaraan antara sanak-cucu keluarga sehingga setiap tahun diperingati pada hari Chin Ming/Ceng Beng dengan berkumpul dan sembahyang di makam leluhur.<sup>132</sup>

Menurut Gondomono,<sup>133</sup> dalam penguburan orang Tionghoa mempunyai masalah yang besar karena makam harus memiliki *fengsui* yang bagus, terletak di atas bukit dan dekat dengan sungai. Dengan demikian, banyak orang Tionghoa yang memilih kremasi dan menitipkan abu di penitipan abu, untuk menghindari makam dengan *fengsui* yang buruk, selain tentunya biaya yang lebih ringan. Dalam *fengsui* makam, hal-hal yang diperhatikan antara lain: Naga–Liang–Gundukan–Air–Arah. Selain itu bentuk makam, batu nisan, waktu penguburan juga diperhitungkan. Menurut kepercayaan orang Tionghoa, baik buruknya *fengsui* makam biasanya akan langsung terlihat dalam tempo satu tahun dan berpengaruh pada keturunan laki-laki. Biasanya orang pantang untuk mengubah-ubah makam, jika makam itu sudah dianggap baik atau minimal tidak buruk. Akan tetapi jika ada tanda-tanda atau pengaruh buruk terasa, maka secepatnya makam akan diperiksa lagi oleh seorang ahli *fengsui* dan jika memungkinkan diperbaiki supaya pengaruh buruk tersebut hilang atau bahkan berubah jadi baik (Wijaya: <http://64.233179104>, 6 Juni 2005 dan Han Sianseng, 1923: 12–13). Menurut Acan Suhardi, *fengsui* atau arah letak makam merupakan sebuah peraturan yang tidak bisa diubah. Ia harus ada untuk sebuah peristirahatan terakhir bagi leluhur. *Fengsui* memiliki nilai magis dan makna yang sangat mendalam. Arah itu ditentukan berdasarkan angin (*feng* atau *hong*) dan air (*sui*). *Fengsui* tidak bisa ditentukan oleh sembarang orang dan

---

*btm*. Diakses pada 1 Juni 2005; Dany Suyanto, “Menyeleksi, isemani, setelah itu selesai”, dalam: *Jawa Pos*, 13 November 1993; Wawancara, Mimi Lie 3 Juni 2005.

<sup>132</sup> Lihat lebih jauh: Albert Hendra Wijaya, “Sedikit Mengenai Feng Shui” dalam <http://64.233179104>. Diakses pada 6 Juni 2005.

<sup>133</sup> Gondomono, *Membanting Tulang Menyembah Arwah: Kehidupan Kekotaan Masyarakat Cina* (Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1996), hlm. 88.

memiliki perhitungan tersendiri yang disesuaikan dengan tanggal dan hari kematian. *Fengsui* memiliki makna kebaktian tertinggi dari si anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal.<sup>134</sup>

Selain persoalan *fengsui*, salah satu adat yang juga banyak dianut oleh masyarakat Tionghoa adalah istri dimakamkan berdampingan dengan makam suaminya atau sebaliknya. Persoalannya kemudian adalah tidak jarang tanah yang masih kosong di samping makam seorang suami atau istri sudah dibeli oleh keluarga yang lain, padahal untuk membuat makam susun tidak lazim dalam adatistiadat masyarakat Tionghoa. Selain itu, peraturan dalam artikel 11 Verordening Makam Tionghoa, hanya membolehkan untuk mengubur satu jenazah. Namun, pemerintah kota pernah memberikan izin seorang Tionghoa (Ny. Dj. Tjoa Kian Ling) yang hendak membuat makam susun di atas makam suaminya. Kasus ini cukup menarik mengingat ini pertama kali dijumpai seorang Tionghoa yang ingin membuat makam susun. Tidak pelak lagi, kasus ini menjadi polemik di lingkungan pemerintah kota. Bahkan Kepala Pekerjaan Umum Kota Praja yang bertanggung jawab terhadap urusan pemakaman harus mengirim surat peringatan sebanyak empat kali kepada Ketua DPD agar memberi keputusan terhadap masalah ini.

Kepala Bagian Hukum Kota Praja Surabaya (W.M.C.E. van Beem) yang diminta pendapat atas masalah ini tidak dapat memberi keputusan. Dalam suratnya tertanggal 16 Maret 1959, W.M.C.E. van Beem menjelaskan, bahwa semua ketentuan yang ditetapkan dalam beberapa peraturan makam telah dipertimbangkan berdasarkan adat dan tata cara yang berlaku dalam penguburan untuk golongan masyarakat tertentu. Selain itu, peraturan daerah (perda) tentang pemakam selain dari Islam dan Kristen, tidak memuat makam-makam yang diperuntukkan lebih dari satu orang. Demikian pula, tidak ada makam-makam keluarga seperti yang terdapat pada agama lainnya, karena menurut adatistiadat bangsa Tionghoa mungkin

<sup>134</sup> “Bukti Kebaktian Tertinggi kepada Leluhurnya Hong Sui Makam Ditentukan Yayasan Pemakaman”, dalam *Pontianak Pos* 27 Mei 2005.

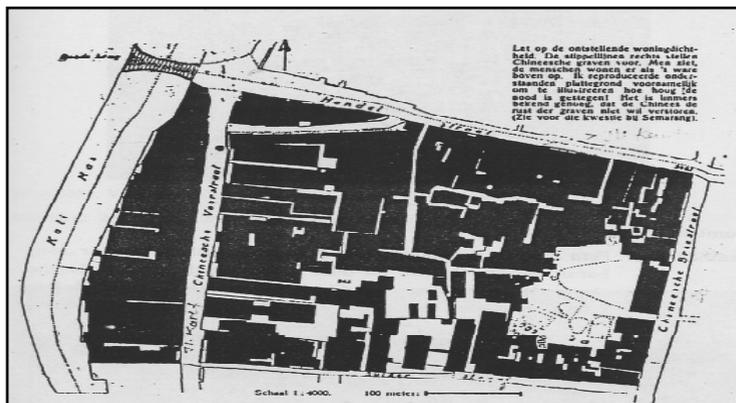
sekali bahwa makam campuran bersama itu tidak diperbolehkan (AKS, box 118 no. 1824). Menurut W.M.C.E. van Beem, jika adat ini sungguh-sungguh berlaku dan tetap masih ditaati, maka jangan memberikan perkecualian terhadap adat kaum atau golongan tertentu. Akan tetapi, jika adat itu sudah tidak berlaku lagi maka dapatlah diusulkan kepada DPRD. untuk mengubah peraturan makam yang bersangkutan. Sebagai tambahan diusulkan untuk meminta saran kepada anggota-anggota DPRD yang berasal dari etnis Tionghoa, yakni Saudara Ong Ing Sien dan Mr. Oe Siang Djie (AKS, box 118 no. 1824).

Setelah hampir setahun sejak Ny. Dj. Tjoa Kian Ling mengajukan permohonan (9 Oktober 1958), akhirnya pada tanggal 3 Agustus 1959 Dewan Pemerintah Daerah (DPD) Kota Praja Surabaya mengirimkan surat persetujuan asalkan kehendak untuk membuat makam susun tersebut berasal dari permintaan yang berkepentingan sendiri, sedangkan tentang dicantumkannya ketentuan makam susun tersebut dalam peraturan adalah soal kemudian (AKS, box 118 no. 1824). Lamanya masalah ini baru mendapat keputusan, dapat dimaknai dua hal. *Pertama*, pihak kotapradja tidak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan karena hal ini berkaitan dengan adat-istiadat dan tidak sesuai dengan peraturan penguburan yang telah ditetapkan untuk masing-masing golongan masyarakat yang ada di Kota Surabaya. Padahal, dari segi penghematan tanah makam tentu prinsip penguburan satu makam untuk dua jenazah adalah hal yang lebih baik. *Kedua*, kotapradja tidak dapat memanfaatkan dengan baik institusi keagamaan yang ada di lingkungan masyarakat Tionghoa seperti klenteng untuk dimintai saran tentang masalah yang diajukan oleh ummatnya. Pihak DPD Kotapradja memang pernah menyurat kepada Sdr. Ong Ing Sien (anggota DPRD Kotapradja Surabaya) untuk meminta pertimbangan atas masalah ini, akan tetapi sampai awal Juli 1958 tidak ada jawaban yang diberikan. Tidak adanya tanggapan dari Ong Ing Sien, mungkin saja disebabkan karena dia bukanlah seorang agamawan, tetapi politisi.

### C. MAKAM TIONGHOA PADA MASA KOLONIAL DAN PENDUDUKAN JEPANG

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, maka keberadaan makam sebagai tempat peristirahatan yang terakhir menjadi persoalan yang krusial. Pada masa kolonial, letak makam menyatu dengan pemukiman tiap-tiap kelompok masyarakat. Makam bagi bangsa Eropa misalnya, pada awalnya berada di dekat Gereja Krembangan, dekat dengan wilayah pemukiman awal Eropa di kawasan Jembatan Merah, sedangkan makam bagi orang-orang Arab terletak di kawasan Ampel, di perkampungan orang-orang Arab. Untuk orang-orang Tionghoa, letak makamnya menyatu dengan kawasan Pecinan yang terletak di antara Handelstraat (sekarang Jln. Kembang Jepun) dan Chineseche voorstraat (sekarang Jalan Karet) (Faber, 314–319).

Pada masa kolonial, segala hal yang berkaitan dengan makam Tionghoa diatur dalam *Verordening op de algemeene begraafplaatsen voor*



Sumber: Handinoto, 1996: 67

**Gambar 26.** Makam Tionghoa yang menyatu dengan kawasan pemukiman mereka

*Chineezzen in de Stadsgemeente Soerabaja.*<sup>135</sup> Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 7 Februari 1940 dan diundangkan dalam *Bijvoegsel van het Provinciaal Blad van Oost-Java*, tertanggal 1 April 1940, seri B no. 4. Dalam peraturan tersebut antara lain diatur tentang izin pemakaman, penggalian dan pengangkutan jenazah, pemakaian ceruk, serta biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus makam (AKS, box 1827 no. 45.887).



Faber, *Oud Surabaya*, hlm. 518

**Gambar 27.** Iring-iringan Pemakaman Jenazah orang Cina pada tahun 1900

Berbeda dengan makam Tionghoa pada masa republik yang diwarnai dengan berbagai masalah, pada masa kolonial dan pendudukan Jepang, tidak ada gangguan serius yang dialami oleh makam Tionghoa.<sup>136</sup> Hal ini antara lain disebabkan oleh sikap disiplin dan

---

<sup>135</sup> Untuk makam orang-orang Islam diatur dalam *Verordening op het beheer der gemeentelijke begraafplaatsen voor Mohamedanen*, yang ditetapkan pada tanggal 6 April 1922 dan diundangkan dalam Extra Bijvoegsel der Javasche Courant tertanggal 22 September 1922 no. 76. Untuk orang-orang Eropa diatur dalam *Verordening op het beheer der begraafplaatsen voor Europeanen alsmede voor Inlanders en Vreemde Oosterlingen die het Christendom belijden, hunne echtgenooten en kinderen, weduwen en weezen in de gemeente Soerabaja*, tertanggal 27 Oktober 1916 dan diundangkan dalam *Javasche Courant* tertanggal 24 November 1916, no. 14. AKS, box 1827, no. 45.887.

<sup>136</sup> Hal yang biasa dialami oleh orang-orang Tionghoa ketika hendak ke makam adalah gangguan dari perempuan-perempuan lacur yang sering mangkal di jalan-jalan dekat

ketegasan pemerintah kolonial dan Jepang dalam melindungi tempat-tempat publik.<sup>137</sup> Namun, hal ini tidak berarti pemerintah pendudukan Jepang tidak menaruh perhatian pada persoalan makam. Pada tanggal 1 Agustus 2602 misalnya, pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan pengumuman tentang penutupan beberapa kuburan Islam. Kuburan-kuburan tersebut adalah Kuburan Simolawang Gang II, Oendaan Wetan, Kalisari Gang I, Kambojastraat, Ketabangkali, Djagalan Gang V, Djagalan Gang IV, Kawatan Gang 12, dan Plemahan Gang V.<sup>138</sup>

Setahun kemudian (30 Juni 2603), Surabaya Sityo dengan suratnya no. 1076/B kembali mengeluarkan keputusan bahwa sejak tanggal 1 Juli 2603 kuburan di beberapa kampung tidak boleh lagi digunakan. Makam-makam yang ditutup tersebut adalah Soerabajan, Kedoengkliner gang VII, Wonoredjo gang III, Kedondong Lor, Pandegiling gang I, Koepang Pandjaan, Kedoenganjar gang kuburan, Petemon gang kuburan, Garoeda gang 2, dan Dinojo aloen-aloen gang IV (AKS, box 231 no. 4185). Tidak ada penjelasan mengapa dilakukan penutupan kuburan-kuburan kampung ini, tetapi boleh jadi hal ini sangat berkaitan dengan jumlah penduduk yang dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan.

Seperti kebiasaan orang Tionghoa yang menyimpan beberapa hari jenazah keluarganya, pada zaman Jepang hal ini tetap diperbolehkan. Izin diberikan dengan syarat harus disimpan dalam keranda tertutup dan harus mentaati perintah dari *Eiseibutyo* atau kepala dinas kesehatan kota (AKS, box 127 no. 1934; box 133 no. 1975).

---

kuburan Kembang Kuning, Tamarindelaan, Pasar Kembang, dan Banjoe-Oerip. 1940 'Boroknja Soerabja' dalam *Sin Po*, 9 Maret 1940, hlm.11-14.

<sup>137</sup> Wawancara, Suparto Brata, 2 Juli 2005; Wawancara, Hernoko Judobintoro, 3 Juli 2005.

<sup>138</sup> "Penotoepan Koeboeran", dalam *Soeara Asia*, 18 Agustus 2620.



Sumber: *Soeara Asia*, 5 September 2602

**Gambar 28.** Berita Duka Cita pada Zaman Jepang.

## D. MAKAM TIONGHOA PADA MASA REPUBLIK

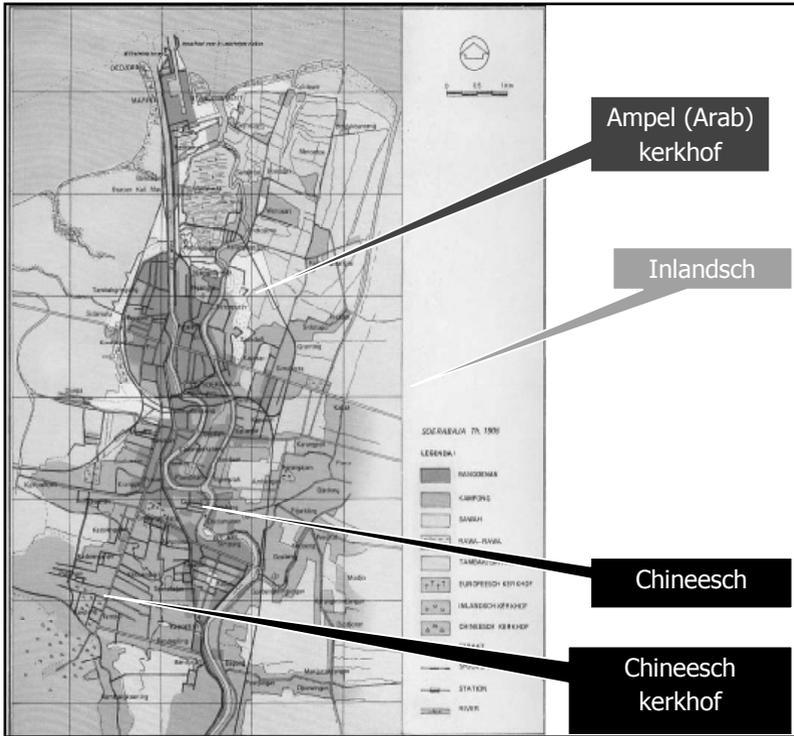
### 1. Bergelut dengan Konflik

*“si Cino itu tidak berhak beristirahat selamanya di bumi Indonesia tanpa gangguan, sehingga layak, kalau perlu, makamnya pun digusur”*

(Binekorb, 2001: 1)

Tengarai Prof. Aaron L. Binekorb akan gangguan yang sering dialami oleh orang-orang Tionghoa saat menuju persitirahatan terakhirnya tampaknya bukan omongan belaka. Di Kota Surabaya, konflik yang terjadi antara orang-orang Tionghoa yang akan memakamkan

jenazah keluarganya dengan masyarakat sering sekali terjadi. Konflik ini sesungguhnya tidak terlepas dari konflik perebutan ruang. Masyarakat yang tidak mempunyai tempat tinggal memakai tanah makam untuk mendirikan tempat tinggal atau bahkan menjadikan makam yang umumnya bagus sebagai rumah mereka.



Sumber: Peta Surabaya

**Gambar 29.** Beberapa Makam di Kota Surabaya

Sepanjang tahun 1951 sampai 1961, berbagai gangguan yang dialami oleh makam Tionghoa menjadi problem yang krusial. Gangguan yang dilakukan memiliki banyak bentuk, seperti pencurian barang-barang di makam, pelarangan memakamkan anggota keluarga, penarikan uang, dan lain-lain. Pada tanggal 27 Januari 1958 misalnya,

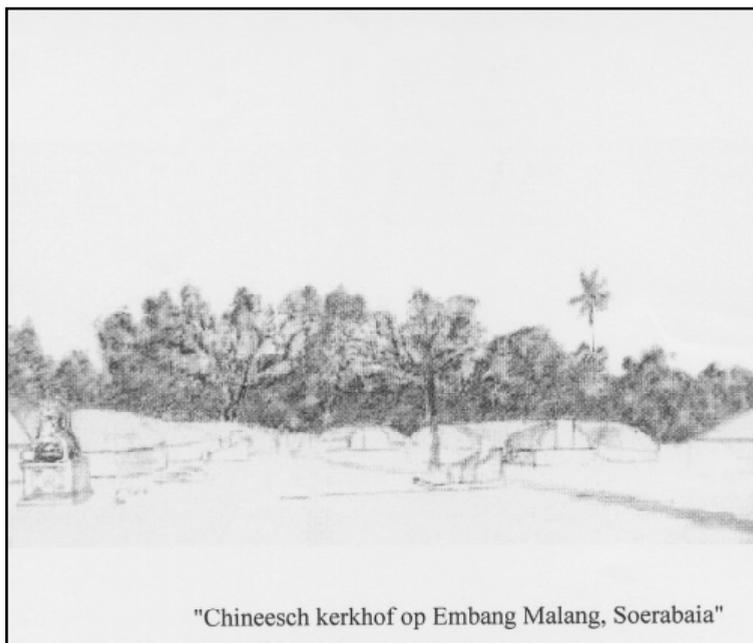
telah terjadi pencurian tiga buah marmer seharga Rp600 di sebuah makam Tionghoa Kembang Kuning dengan cara merusak makam.<sup>139</sup> Beruntung orang-orang Tionghoa memiliki banyak perkumpulan yang menjadi perantara yang mengadukan ke pemerintah jika mereka mendapat masalah. Selanjutnya saya akan menampilkan beberapa kasus gangguan yang dialami tersebut.

Pada tanggal 28 Maret 1951 misalnya, perkumpulan Giok Yong Kong Hwee, melayangkan surat kepada Kota Praja Surabaya perihal gangguan yang dialami oleh anggota perkumpulannya. Gangguan tersebut misalnya terjadi pada tanggal 24 dan 25 Maret 1951. Pada tanggal 24 Maret 1951, Tan Ing Tjiauw yang telah memakamkan anaknya di Banyu Urip tidak diperbolehkan pulang oleh sekelompok orang (6 orang) sebelum menandatangani sebuah surat. Pada tanggal 26 Maret 1951, beberapa orang yang memaksa untuk tanda tangan tersebut datang ke rumah Tan Ing Tjiauw untuk meminta sejumlah uang buat makam anaknya. Kemudian pada tanggal 25 Maret 1951, anak perempuan dari Njoo Hian Liong yang hendak dikubur di Banyu Urip mendapat larangan dari penduduk, sehingga terpaksa meminta pertolongan perkumpulan Hok Kian Kong Tik Soe agar anaknya dapat dikubur di makam Kupang Gunung (AKS, box 1496 no. 32.896).

Pengaduan perkumpulan Hok Kian Kong Tik Soe tersebut ditanggapi dengan cepat oleh pemerintah kota dengan mengeluarkan surat keterangan tertanggal 12 April 1951 yang menerangkan bahwa tanah di Banju Urip yang oleh penduduk dilarang untuk dijadikan tempat pemakaman adalah termasuk tanah makam berdasarkan buku Register Gemeente No. C.B. no. 52. Selain itu, menurut catatan di Gemeente tidak ada izin untuk mendirikan bangunan di atas tanah-tanah tersebut. Selanjutnya pada tanggal 2 Mei 1951, DPD Kota Besar Surabaya mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Urusan Dalam Kota Surabaya, yang meminta supaya mengambil tindakan untuk mencegah kesukaran-kesukaran yang

---

<sup>139</sup> "Pentjurian Dimakam", dalam *Surabaya Post* 28 Januari 1958.



Sumber: [www.kitlv.nl](http://www.kitlv.nl)

**Gambar 30.** Makam Tionghoa di Embong Malang

dialami oleh bangsa Tionghoa dalam memakamkan keluarganya dan membuat proses verbal terhadap pelanggar-pelanggar pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut DPD kesukaran yang dialami ketika hendak memakamkan jenazah tersebut haruslah dianggap sebagai kejahatan seperti yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 178, yang berbunyi:

‘Barang siapa, jang dengan sengadja mengganggu orang bepergian jang diperbolehkan masuk dalam suatu pemakam atau mengganggu/menghalangi pengangkutan djinazah kesuatu pemakam, dihukum pendjara selama-lamanja satu bulan dua minggu atau hukuman denda sebanjak-banjaknya seratus duapuluh rupiah’ (AKS, box 1496 no. 32.896).

Permintaan DPD kepada polisi untuk segera mengambil tindakan untuk mencegah kesukaran-kesukaran yang dialami oleh bangsa Tionghoa dalam memakamkan keluarganya ditanggapi dengan memeriksa orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut dan mereka menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu, Dinas Perkembangan Kota dalam suratnya tertanggal 25 Juli 1951 menyatakan telah membersihkan tanah makam tersebut dari gubuk yang selama ini menjadi penghalang bagi orang-orang yang hendak memakamkan keluarganya (AKS, box 1496 no. 32.896).

## **2. Penutupan Makam dan Konflik yang Berlanjut**

Setelah sekian lama terjadi konflik dengan masyarakat, akhirnya makam Tionghoa yang terletak di beberapa wilayah diusulkan ditutup oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). Menurut Dinas PU dalam suratnya tertanggal 7 Februari 1958 kepada Dewan Pemerintah Daerah Peralihan (DPDP) Kota Surabaya, penutupan tersebut perlu dilakukan mengingat tidak pada tempatnya makam-makam berada di tengah kota selain untuk memelihara keindahan kota. Sebagai respons atas usulan penutupan makam Tionghoa tersebut, dengan persetujuan Panitia Penyelesaian Tanah Makam Tionghoa, melalui pengumuman tanggal 11 Maret 1958, Dewan Pemerintah Daerah Peralihan (DPDP) Kota Surabaya menyampaikan rencana penutupan tujuh tempat pemakam Tionghoa, yakni di sekitar: 1) Jalan Kembangjapun, 2) Jalan Tambaksari (Karanggajam), 3) Jalan Teratai/Jalan Mendut, 4) Sebelah Selatan dan Utara Jalan Embong Malang, 5) Sebelah Selatan dan Utara Jalan Pandegiling, 6) Sebelah Utara Jalan Banyu Urip dan 7) Jalan Cokroaminoto. Berkaitan dengan rencana penutupan ini, dalam waktu enam bulan terhitung mulai tanggal pengumuman ini, kepada mereka yang berkepentingan diberikan kesempatan mengajukan permintaan secara tertulis untuk melangsungkan haknya mengubur di salah satu tempat pemakaman tersebut atau keberatan-keberatannya kepada Dewan Pemerintah

Daerah Peralihan (DPDP) melalui kepala lingkungan setempat, untuk dipertimbangkan.<sup>140</sup>

Bersamaan dengan pengumuman rencana penutupan tersebut, DPDP mengumumkan juga larangan untuk memakai atau mendirikan bangunan-bangunan secara tidak syah di dalamnya. Hanya saja, jika pada pengumuman rencana penutupan hanya terdapat tujuh makam, maka di pengumuman larangan mendirikan bangunan terdapat tiga lokasi tambahan, yaitu sebelah selatan Jalan Banyu Urip, sebelah barat Jalan Kembang Kuning, dan seluruh tanah makam di Banyu Urip Kupang Gunung dan Kembang Kuning. Untuk mengefektifkan pengumuman ini, DPDP menambahkan suatu pengumuman atau tepatnya ancaman bahwa barang siapa tidak mentaati pengumuman pelarangan mendirikan bangunan di sembilan lokasi yang ditetapkan, baik secara sadar ataupun tidak, akan diambil tindakan-tindakan berdasarkan atas Peraturan Penguasa Militer Pusat tertanggal 4 Desember 1957 No. Pert/P.M./014/1957 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemiliknya atau Kuasanya.<sup>141</sup>

Walaupun persoalan rumah dan bangunan liar yang berdiri di atas tanah makam orang-orang Tionghoa tidak disebut sebagai alasan rencana penutupan makam, tetapi masalah rumah liar ini merupakan persoalan yang krusial.<sup>142</sup> Dengan melihat ancaman bagi mereka yang

---

<sup>140</sup> AKS, box 118 no. 1824; “Tudjuh Tempat Pemakam Tionghoa Dinjatakan Tertutup. Dilarang Membangun Ditanah Makam” dalam *Surabaya Post*, 14 Maret 1958.

<sup>141</sup> Pada tanggal 25 Agustus 1958, DPDP Kota Praja Surabaya mengirim surat kepada Biro Iklan “Pantjaragam” di tujuh koran untuk memasang kembali pengumuman rencana penutupan dan pelarangan mendirikan bangunan di atas makam Tionghoa. Ketujuh koran tersebut adalah *Pewartu Surabaya*, *Suara Rakjat*, *Harian Umum*, *China Daily News*, *Trompet Masyarakat*, *Indonesian Daily News*, dan *Surabaya Post*. AKS, box 118 no. 1824.

<sup>142</sup> Seriusnya masalah pembongkaran rumah-rumah liar, misalnya terlihat pada kasus Pakis pada April 1956. Pembongkaran ini menyebabkan tewasnya 4 orang dan 2 orang luka-luka. Selain itu, akibat pembongkaran ini sepanjang bulan Mei 1956, ribuan orang melakukan demonstrasi dan munculnya tuntutan dari berbagai organisasi masyarakat dan politik seperti PSI, Masjumi, PNI, NU, dan SOBSI agar pembongkaran dihentikan dan menghukum alat-alat negara (tentara). Peristiwa ini juga menyebabkan dilarangnya demonstrasi di Kota Besar Surabaya yang dikeluarkan dan diumumkan oleh panglima

mendirikan bangunan di atas tanah makam, berdasarkan peraturan penguasa militer yang mengikuti pengumuman tersebut, maka boleh jadi masalah rumah liar ini menjadi salah satu alasan utama atas rencana penutupan tersebut. Hal ini diperkuat dengan keterangan DPDP Kota Praja yang terkait dengan rencana penutupan makam Tionghoa bahwa sedang diadakan pembicaraan dengan yang berwajib supaya didapatkan tanah guna menampung orang-orang yang mendirikan rumah-rumah liar di atas tanah makam yang akan ditutup tersebut.<sup>143</sup>

Keberadaan rumah-rumah liar yang tersebar di berbagai tempat termasuk di atas tanah makam Tionghoa tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kota pada pascarevolusi. Keadaan kota yang mulai stabil menyebabkan geliat pembangunan dan ekonomi mulai tumbuh. Dengan demikian, kota yang sebelumnya menjadi tempat yang “menakutkan” akibat perang tiba-tiba berubah menjadi tempat menarik banyak orang sehingga penduduk Kota Surabaya tumbuh dengan pesat. Mereka kemudian menempati tanah-tanah di tengah kota, dengan harapan agar mereka dengan mudah memperoleh pekerjaan. Pada tahun 1950-an, terdapat beberapa kawasan yang dihuni oleh banyak pemukim liar. Kampung-kampung tersebut, antara lain Kampung Dupak Masigit, kawasan sekitar Jln. Dipenogoro-Adityawarman, Ngaglik Baru dan Tambakrejo, dan Kapas Kerampung (Basundoro, 2005: 537–554).

---

tentara. Lihat: “Rumah2 Liar Dibongkar, Ribuan Org Berdemonstrasi” dalam *Surabaya Post* 17 April 1956; “4 Djiwa Melajang, 2 Luka2: Pembongkaran Rumah Liar Membawa Korban” dalam *Surabaya Post* 7 Mei 1956; “P.S.I. Surabaya: Hentikan Tjara2 Pembongkaran Bangunan Liar” dalam *Surabaya Post* 8 Mei 1956; “Demonstrasi Dilarang di Kota Besar S’baja”, dalam *Surabaya Post* 9 Mei 1956; “P.R.K.S.: Peristiwa Pakis Supaja Diselidiki” dalam *Surabaya Post* 15 Mei 1956; “Soal Tragedi Pakis: Masjumi-PNI-NU Satu Sikap” dalam *Surabaya Post* 16 Mei 1956; “Pemerintah Pusat dan Peristiwa Pakis”, dalam *Surabaya Post* 23 Mei 1956; “DPRDS-KBS Benarkan Tindakan jg Berwadajib dlm Peristiwa Pakis. Teruskan Tindakan”, dalam *Surabaya Post* 24 Mei 1956.

<sup>143</sup> Lihat lebih jauh: “Tudjuh tempat, *loc. cit.*”

Sampai awal Maret 1958, tidak ditemukan lagi dalam arsip tentang gangguan terhadap makam Tionghoa ini. Namun, pada tanggal 16 Maret 1958 konflik kembali terjadi antara masyarakat dengan orang-orang Tionghoa yang hendak memakamkan jenazah keluarganya. Kasus ini menarik karena dua hal, *pertama*, turun tangannya aparat keamanan dalam mengawal proses penguburan membuat penduduk tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi sekaligus memendam kemarahan dan dendam seperti yang terdapat dalam surat pernyataannya kepada pemerintah kota. *Kedua*, konflik ini terjadi lima hari setelah rencana penutupan tujuh makam Tionghoa yang diumumkan oleh pemerintah Kota Surabaya.

Boleh jadi pengumuman inilah yang menjadi penyebab terjadinya kembali konflik. Konflik bermula ketika Liem Kie Seng hendak memakamkan keluarganya yang bernama Lim Kim Nio di tanah pemakaman milik perkumpulan Hwa Kiauw Bian Hap Hwee di sebelah selatan Jalan Banyu Urip. Rencana penguburan tersebut dilarang oleh penduduk karena berdekatan dengan sebuah rumah penduduk dan minta diundur sejauh 100 meter. Permintaan penduduk ini ditolak oleh ahli waris almarhum dengan alasan pemerintah kota dengan suratnya No. 770200/8, tertanggal 13 Maret 1958 telah menyetujui penguburan tersebut dan waktu penguburannya sudah sangat mendesak. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka Polisi Negara Sie I bersama anggota Polisi Militer (PM) Kompi 55 mengawal proses penguburan hingga selesai (AKS, box 118 no. 1824).

Berkaitan dengan kasus di atas, pada tanggal 1 April 1958, penduduk yang diwakili oleh kepala rukun kampung dan Panitia Penutupan Penguburan Jenazah Bangsa Tionghoa mengeluarkan surat pernyataan yang ditujukan kepada DPD Swatantra Tingkat I Jawa Timur. Surat pernyataan tersebut antara lain berisi ketidakadilan dan berat sebelahnya keputusan DPDP Kota Praja Surabaya, terhadap penguburan jenazah Sdri. Liem Kiem Nio yang dikubur dalam batas perkampungan Banyu Urip Kidul, yang letaknya sangat berdekatan

dengan perumahan penduduk (25 meter dari rumah dan sumur untuk air minum). Namun, penduduk tidak dapat berbuat apa-apa mengingat proses penguburan tersebut dikawal oleh polisi.

‘... sekalipun demikian penduduk terpaksa menjerah mentah2 dalam membela kepentingannya jg. berdasarkan kenjataan jg. tidak dapat dibantah itu, setelah dihadapkan suatu pertentangan jg. Berlainan sifatnja (di-faitta compli) jaitu: “menghadapi Alat2 Kekuasaan Negara jg. bertindak menjaga pelaksanaan suatu keputusan Pemerintah/D.P.D.-K.P.S. sekalipun didalamnja terdapat kekurangan, namun suatu keputusan harus dianggap/diakui sjah.’

‘Penduduk dg. menahan kemarahan jg. penuh dendam dalam membela kepentingannya/tuntutannya jg. berdasarkan kenjataan/kebenaran jg. tidak bisa dibantah itu, terpaksa tidak mengadakan perlawanan apa2 (bukan menjerah kalah karena salah) bahkan mengalah dg. mengorbankan semua kepentingan2nja, setelah dihadapkan dg. pertentangan jg. berlainan sifatnja jaitu: “menghadapi petugas2 Alat Kekuasaan Negeranja jg. mestinja ditangguhkan menghadapi bahaya serangan musuh Negara jg. datang dri [sic.] luar maupun dari dalam, sekalipun petugas2 tsb, berada dalam kedudukan jg. salah/tidak wadjar’ (AKS, box 1852 no. 46.935).

Menurut penduduk, kejadian tersebut cukup memberi pengertian betapa tidak adilnya keputusan DPDP-KPS terhadap persoalan ini, yakni di satu pihak kepentingan Liem Kie Seng dijamin sepenuhnya dengan mendapat surat persetujuan DPDP sebagai pegangan, di lain pihak kepentingan penduduk Kampung Banyu Urip ditindas habis-habisan. Di bagian lain dari pernyataan tersebut dikatakan bahwa kejadian itu sangat mengharukan dan menimbulkan penyesalan yang tidak mudah dilupakan begitu saja, karena dua hal yakni 1) Terhadap penguburan jenazah Tionghoa (Liem Kiem Nio) yang sebetulnya tidak mempunyai hubungan yang produktif terhadap kepentingan negara/masyarakat dilakukan pengawalan oleh alat-alat kekuasaan negara sehingga terjadi di luar kebiasaannya, 2) Kejadian tersebut juga membenarkan dugaan, bahwa di dalamnya terdapat gejala-gejala perkosaan terhadap kehidupan demokrasi yang sengaja diusahakan

oleh golongan kecil tertentu<sup>144</sup> untuk dijadikan dasar mencapai keuntungan dan akibatnya akan lebih merugikan kepentingan rakyat banyak (AKS, box 1852 no. 46.935).

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Jawa Timur, tertanggal 9 Juni 1958 mengirimkan surat kepada DPD Kota Praja Surabaya yang meminta laporan dan pendapat. Tidak ada keterangan bagaimana akhirnya masalah tersebut diselesaikan. Dalam surat jawabannya kepada DPD Swatantra Jawa Timur tertanggal 31 Juli 1958, wali kota hanya menyampaikan bahwa masalah tersebut sudah diselesaikan setelah penduduk diberi penjelasan secukupnya (AKS, box 1852 no. 46.935).

Walaupun terasa berlebihan, beberapa kali dalam pernyataan tersebut dikemukakan bahwa kejadian tersebut merupakan perkosaan terhadap kehidupan demokrasi yang dilakukan oleh golongan kecil. Penyebutan beberapa kali kata demokrasi tidak lepas dari konteks kehidupan sosial politik ketika itu, yang pada periode 1957–1965, politik Indonesia berada dalam demokrasi terpimpin. Selain itu, anjuran agar alat-alat kekuasaan negara dalam hal ini polisi dan tentara menahan diri untuk turut campur dalam masalah pemukiman Tionghoa dan lebih berkonsentrasi untuk menghadapi musuh negara, baik dari luar maupun dari dalam negeri sangat berkaitan dengan situasi negara saat itu. Dalam catatan sejarah, masa-masa tersebut adalah masa ketika bangsa Indonesia menghadapi berbagai konflik internal. Pada tanggal 15 Februari 1958, sebuah pemerintahan pemberontak di Sumatra dengan markas besarnya di Bukittinggi diumumkan. Pemerintahan tersebut terkenal dengan

---

<sup>144</sup> Golongan kecil tertentu yang dimaksud dalam pernyataan penduduk tersebut tentulah golongan Tionghoa yang dari segi populasi merupakan minoritas. Menurut statistik pada akhir bulan Februari 1959, jumlah penduduk Kota Surabaya yang telah terdaftar melalui kantor-kantor lingkungan setempat adalah sebagai berikut: Indonesia 1.003.312 jiwa; Tionghoa 125.747 jiwa; Eropa 12.268 jiwa; Arab 8.703 jiwa; India/Pakistan 2.191 jiwa; dan Staatlos 117 jiwa. “Penduduk S’baja Terus Bertambah”, dalam *Surabaya Post* 25 Maret 1959.

nama Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dua hari kemudian diperkuat dengan bergabungnya Permesta.<sup>145</sup>

Keterlibatan polisi dalam urusan penyelesaian konflik penguburan antara orang-orang Tionghoa yang hendak memakamkan keluarganya dengan penduduk setempat masih terus berlanjut. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 14 Juli 1958, ketika dua anggota Dana Kematian Hwa Kiauw Bian Hap Hwee hendak memakamkan jenazah Ny. Oei Hoay Giok dan Tan Ping Swat di samping makam istrinya di Kupang Gunung (Jln. Girilaya). Ketika dilakukan penggalan makam, penduduk setempat melarang, sehingga keluarga almarhumah mendatangi Bagian Pekerjaan Umum (PU) Kota Praja Surabaya dan mendapatkan surat keterangan dari kepala bagian makam (M. Kasno), bahwa tanah makam yang akan digali itu tidak termasuk makam-makam yang akan ditutup, seperti yang dimaksudkan oleh pengumuman DPD Peralihan Kota Praja Surabaya tertanggal 11 Maret 1958 (AKS, box 118, no. 1824).

Oleh karena penduduk setempat tidak mengindahkan surat keterangan dari kota praja dan tetap melarang penguburan, maka pihak keluarga almarhumah minta bantuan polisi. Melihat sikap penduduk yang mengkhawatirkan, polisi terpaksa minta bantuan Corps Polisi Militer (CPM). Namun, penduduk tetap tidak bergeming dengan sikapnya yang menolak penguburan tersebut. Mereka mengungkapkan berbagai alasan penolakan dan memperlihatkan sebuah surat/resolusi rapat penduduk kampung. Melihat resolusi tersebut, pihak polisi maupun CPM menjadi bimbang dan tidak dapat memberi bantuan seperti yang diharapkan oleh keluarga almarhumah. Mengingat waktu sudah sore dan khawatir tidak ada penyelesaian, maka anggota pengurus Dana Kematian Hwa Kiauw Bian Hap Hwee menawarkan tanah makam lain. Dengan perasaan

---

<sup>145</sup> M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm. 396; “Perdana Menteri Djuanda: Pemerintah Lebih Pergunakan Blokkade Ekonomi daripada Strategi Militer thd. ‘PRRI’”, dalam *Surabaya Post* 22 Februari 1958; “Keterangan Pemerintah pada DPR. Demokrasi Terpimpin-werkdemokrasi”, dalam *Surabaya Post* 3 Maret 1959.

yang amat berat, tawaran tersebut akhirnya diterima walaupun bertentangan dengan keinginan yang meninggal dunia yang ingin dikubur di samping makam istrinya (AKS, box 118 no. 1824).

Menurut pengurus Dana Kematian Hwa Kiauw Bian Hap Hwee, peristiwa ini tidak saja melanggar peraturan yang syah, tetapi juga merugikan hak dan rintangan bagi keluarga yang akan melakukan pemakaman menurut adat kebiasaannya. Oleh karena itu, pengurus Dana Kematian Hwa Kiauw Bian Hap Hwee meminta pihak kota praja agar mengambil langkah seperlunya, antara lain dengan penerangan secara luas kepada penduduk melalui kepala-kepala lingkungan, RK, RT, dan lain-lain, supaya:

- a. Tidak ada rintangan lagi bagi pemakaman di tanah kuburan yang masih terbuka untuk makam.
- b. Tidak sampai terjadi pemakaman setjara paksa dengan kekuatan polisi seperti telah pernah kejadian sebelum peristiwa ini, sebab pemakaman tjara begini dapat menimbulkan permusuhan yang membahayakan keamanan.
- c. Tidak terdjadi lagi penjerobotan tanah makam dan bangunan liar di situ dan yang sudah kejadian, juga didjandji akan diselesaikan, dapat diselesaikan lebih mudah (AKS, box 118 no. 1824).

Permohonan pengurus Dana Kematian Hwa Kiauw Bian Hap Hwee ditanggapi oleh pemerintah kota praja dengan mengirim sebuah surat kepada semua ketua Rukun Kampung (RK). Surat yang tertanggal 2 September 1958 tersebut berisi antara lain: 1) Pemakaman Tionghoa yang tidak tercantum dalam pengumuman rencana penutupan pada 11 Maret 1958, dianggap sebagai tempat-tempat pemakaman yang syah dan dapat dipakai untuk mengubur jenazah seperti biasanya, 2) Tindakan menghalang-halangi penguburan jenazah dua orang Tionghoa pada tanggal 14 Juli 1958 di pemakaman Tionghoa yang syah di Kupang Gunung merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, 3)

Untuk menghindari terulangnya peristiwa yang sama, semua ketua Rukun Kampung diminta agar penduduk diberi penerangan seperlunya mengenai masalah tempat-tempat pemakaman Tionghoa (AKS, box 118 no. 1824).

Berkaitan dengan gangguan terhadap makam Tionghoa yang masih terus berlangsung, Panitia Perlindungan Makam dan Tanah Makam Tionghoa, mengirim surat tertanggal 9 September 1959 kepada pemerintah Kota Surabaya. Dalam surat tersebut dikemukakan antara lain: 1) Pengumuman DPDP Kota Praja Surabaya tertanggal 11 Maret 1958 tentang penutupan 7 tempat pemakaman Tionghoa dan larangan mendirikan bangunan tanpa izin pemiliknya yang bersandar pada Peraturan Penguasa Perang Pusat tertanggal 4 Desember 1957 No. Pert/P.M./014/1957, juga dengan pengumuman Peperda Daerah Surabaya tentang hal yang sama, ternyata tidak mengubah keadaan, 2) Pengrusakan dan pembongkaran makam Tionghoa makin meluas dan dilakukan terang-terangan di hadapan dan diketahui tanpa larangan oleh kepala rukun kampung, 3) Bangunan-bangunan liar di atas tanah makam Tionghoa (ada bangunan rumah dari batu), tanpa izin pemilik tanah, yang tentunya tanpa izin kota praja, makin menjadi-jadi, 4) Penolakan penduduk buat pemakaian tanah makam yang masih terbuka untuk penguburan tetap terjadi, 5) Penguburan yang diharapkan sesuai dengan adat dan menurut kehendak yang meninggal dunia buat dimakamkan di samping suami/istrinya tidak kesampaian. Hal ini terjadi karena demi menghindari permusuhan dengan penduduk jika digunakan kekuatan polisi atau militer, terpaksa mencari tanah lain (AKS, box 118 no. 1824).

Untuk menanggapi surat dari Panitia Perlindungan Makam dan Tanah Makam Tionghoa ini, Dewan Pemerintah Daerah meneruskan surat tersebut kepada Kepala Polisi Inspeksi/Kota Besar Surabaya dan meminta bantuan untuk pencegahan pengrusakan/pembongkaran makam-makam Tionghoa sesuai dengan perundingan segitiga yang telah diadakan beberapa bulan lalu antara KMKB-Polisi-DPD Kota Praja Surabaya (AKS, box 118 no. 1824). Seluruh upaya yang dilakukan

oleh pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi gangguan terhadap makam-makam Tionghoa tampaknya tidak banyak membuahkan hasil, sebaliknya pengrusakan terus terjadi. Pada tanggal 15 Juli 1961 misalnya, Tan Hong Lian (seorang dokter pemerintah) mengirim sebuah surat kepada walikota Surabaya yang mengadukan pengrusakan atas makam keluarganya di Banjuurip. Pengrusakan tersebut cukup parah hingga peti mayatnya dapat terlihat dengan jelas. Menanggapi pengaduan ini, wali kota meneruskan surat ini kepada kepala polisi seksi I Kota Praja Surabaya untuk mendapat perhatian seperlunya (AKS, box 118 no. 1824), tapi tidak ada keterangan bagaimana polisi menangani masalah ini.

### **3. Respons Masyarakat Tionghoa atas Pengumuman Rencana Penutupan Makam**

Sebagai reaksi atas rencana penutupan tujuh makam Tionghoa tersebut dan sebagai respons atas kesempatan yang diberikan DPDP untuk mempergunakan hak atau keberatannya, beberapa orang Tionghoa mengajukan surat permohonan dispensasi kepada pemerintah kota. Pada tanggal 28 Maret 1958 misalnya, Perkumpulan Lam Yang Tjo Soe yang diketuai oleh Han Twan Hwie mengirimkan surat kepada DPDP agar diperbolehkan memakai dua tempat lubang makam yang terletak di Jalan Mendut.<sup>146</sup> Pada tanggal 12 Mei 1958, Perkumpulan Lam Yang Tjo Soe kembali mengirimkan surat yang menerangkan bahwa masih ada 32 lubang yang belum dipakai. Dalam surat tersebut, Han Twah Hwie mengajukan permohonan agar keluarga yang akan dikuburkan di tanah tersebut agar di kemudian hari tidak mendapat halangan (AKS, box 2100 no. 57.534).

---

<sup>146</sup> Rencana penutupan makam Tionghoa yang terletak di Jalan Mendut (sekarang Jln. Teratai) baru benar-benar ditutup dan dipindahkan ke Kembang Kuning pada tahun 1982 dengan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 471/1982. Selanjutnya, di atas tanah bekas makam ini akan didirikan kantor camat Tambaksari. Lihat: AKS, box 2119, no. 58.557.

Selanjutnya, pada tanggal 3 September 1958, Tjoa Ping Khie mengajukan surat permohonan dispensasi penguburan untuk diri dan istrinya nanti di pemakaman Tionghoa Banyu Urip. Tanah makam untuk dua orang ini sudah dibeli oleh Tjoa Ping Khie sekitar 5 tahun lalu sebelum keluarnya pengumuman rencana penutupan makam tersebut. Walaupun surat ini baru mendapat tanggapan pada tanggal 20 Juni 1961, pemerintah kota praja dapat menyetujui permohonan dispensasi Tjoa Ping Khie (AKS, box 1852 no. 46.953). Pemberian waktu enam bulan untuk mengajukan permohonan dispensasi kepada mereka yang ingin memakamkan jenazah keluarganya di tujuh makam yang akan ditutup adalah sesuatu yang bijaksana, karena banyak orang Tionghoa yang sudah membeli tanah pemakaman jauh sebelum dikeluarkannya pengumuman kota praja tersebut. Akan tetapi, pemberian dispensasi ini justru menjadi sumber konflik antara penduduk di sekitar makam dengan mereka yang hendak memakamkan jenazah keluarganya. Bagi penduduk di sekitar makam, sejak dikeluarkannya pengumuman rencana penutupan makam Tionghoa pada tanggal 11 Maret 1958, maka tidak boleh lagi ada yang memakamkan jenazah keluarganya di tempat tersebut.

Hal ini misalnya terjadi dengan Tjoa Ping Khie ketika mengajukan surat permohonan dispensasi penguburan untuk diri dan istrinya nanti di pemakaman Tionghoa Banyu Urip. Penduduk yang menolak dispensasi yang diberikan oleh pemerintah kota kepada Tjoa Ping Khie, mengajukan beberapa alasan penolakannya, yakni: *Pertama*, keadaan kampung Banyu Urip telah menjadi perkampungan yang teratur, sekalipun pada umumnya bangunan-bangunan yang ada belum mempunyai izin resmi dari KPS, bahkan tanah-tanahnya juga merupakan tanah liar. Sekalipun demikian, perlu disampaikan bahwa nama Banyu Urip Utara dari Gang I s.d. V benar-benar merupakan kampung yang resmi, sebab telah dipasang nama kampung tersebut dari KPS. *Kedua*, mengingat kejadian salah seorang dari Malang yang memperbaiki makam orang tuanya yang ada di Banyu Urip hingga menimbulkan peristiwa yang tidak diinginkan, maka untuk

mencegah sesuatu yang tidak diinginkan, masyarakat berpendapat: 1) Daerah Banyu Urip tetap tertutup untuk makam Tionghoa (tidak diberikan dispensasi lagi); 2) *Bestemming* makam harap dicabut untuk daerah Banyu Urip; 3) Dispensasi untuk Saudara Tjoa Ping Khie hendaknya dicabut (AKS, box 1852 no. 46.935). Keberatan penduduk atas masih diberinya dispensasi kepada beberapa orang yang hendak memakamkan keluarganya di beberapa makam Tionghoa, tampaknya tidak digubris oleh pemerintah. Sebaliknya, pemberian izin atau dispensasi masih terus terjadi seperti yang diberikan pada Han Tjing Tjwan tertanggal 12 September 1961 yang hendak memakamkan keluarganya Ny. Han Tjong Khing di Tambaksari (AKS, box 1846 no. 38.178).

Untuk mencari jalan penyelesaian atas masalah ini, Dewan Pemerintah Daerah Peralihan (DPDP) mengundang Panitia Penyelesaian Tanah Makam Tionghoa dalam sebuah rapat tertanggal 21 Januari 1958. Dari pihak kota praja, dihadiri oleh Sdr. Amiruddin (anggota DPDP) dan Sdr. Soedarmadji (wakil DPRDP), sedangkan dari pihak Panitia Penyelesaian Tanah Makam Tionghoa hadir delapan orang yang dipimpin oleh Ong Ing Sien sebagai ketua (AKS, box 118 no. 1824). Tujuan utama rapat ini adalah mencari pemecahan atas banyaknya warga yang memakai makam Tionghoa sebagai tempat tinggal. Dalam rapat itu terungkap juga adanya beberapa orang yang sengaja mencari keuntungan dengan jalan memperjualbelikan, walaupun sebagian besar dari mereka memang sungguh-sungguh membutuhkan tempat tinggal. Dalam rapat tersebut, Ong Ing Sien mengemukakan bahwa masalah yang dihadapi tanah makam Tionghoa tidak hanya soal penyerobotan, tetapi juga rintangan yang dialami saat hendak memakamkan jenazah keluarganya. Oleh karena itu, beliau mendesak kepada pemerintah daerah supaya hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan menyampaikan kepada penguasa perang untuk diambil tindakan tegas (AKS, box 118 no. 1824).

Menurut Oon Tjhing Tiau (sekretaris Panitia Penyelesaian Tanah Makam Tionghoa), salah satu hal yang paling berat dirasakan oleh orang-orang Tionghoa adalah dipakainya tanah-tanah makam pasangan (makam persediaan). Untuk mendapatkan kembali makam tersebut, warga Tionghoa yang memiliki makam itu melakukan ganti rugi dengan sejumlah uang. Oleh karena itu, beliau berharap, khususnya menghadapi hari *Tjing Bing* tanggal 5 April 1958 supaya pemerintah daerah secepat mungkin mengadakan pembersihan terhadap rumah-rumah liar yang berdiri di atas makam. Seorang anggota lain dari Panitia Penyelesaian Tanah Makam Tionghoa, Mr. Tho Boon Hwan, memberi jalan keluar dari masalah ini. Beliau menyarankan agar pemerintah daerah menunjuk suatu tempat makam umum guna pemindahan makam dengan jaminan pemerintah atau pemerintah mengusahakan tempat penampungan guna memindahkan mereka (AKS, box 118 no. 1824).

Pertemuan tersebut akhirnya mengambil tiga kesimpulan, yakni 1) Sambil mencari penyelesaian lebih lanjut, rapat setuju diadakan penyetopan dahulu pendirian bangunan-bangunan liar, dan dengan bantuan yang berwajib supaya panitia mengusahakan pemberian tanda batas atau memagari makam-makam tersebut dengan biaya panitia. Di samping itu panitia supaya mencari biang keladinya; 2) Pemerintah Daerah, akan membicarakan dengan pihak kepolisian (alat negara) mengenai ketentuan-ketentuan makamnya; 3) Pemerintah daerah, akan membicarakan dengan pihak kepolisian mengenai penjagaan keamanan di makam-makam berkenaan dengan hari *Tjing Bing* tanggal 5 April 1958 (AKS, box 118 no. 1824). Meskipun demikian, rapat ini tidak mampu untuk meredakan konflik antara orang-orang Tionghoa yang hendak memakamkan jenazah anggota keluarganya dengan penduduk di sekitar makam.[]

Buku ini tidak diperjualbelikan.

## SIMPULAN

Penelitian ini menguji sebuah asumsi bahwa setiap perubahan kekuasaan akan mengakibatkan terjadinya perubahan, penciptaan, dan pelestarian simbol-simbol kota. Dengan tingkat perlakuan yang berbeda, kedua domain simbol kota yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini seperti domain politik-sejarah dan agama menunjukkan kentalnya pengaruh kekuasaan tersebut. Sampai akhir masa kekuasaan pemerintah Belanda telah didirikan lebih kurang 14 monumen dan patung. Sebagaimana halnya yang terjadi di Padang, Sumatra Barat, bahwa monumen dan tugu di Surabaya juga banyak didirikan baik atas prakarsa perorangan maupun kelompok. Akan tetapi, terdapat sebuah perbedaan bahwa jika di Padang pemerintah Belanda masih menyisakan tempat untuk tugu berukuran kecil yang secara resmi untuk menghormati organisasi nasionalis JSB, maka di Surabaya semua monumen dan patung beraroma kolonial.

Di era selanjutnya dapat dilihat bahwa dengan adanya semangat untuk menghilangkan jejak kekuasaan sebelumnya, maka di era okupasi Jepang, mereka telah menghancurkan satu per satu monumen dan patung Belanda, termasuk patung dada Wilhelmina yang terletak di taman kota (*stadstuin*). Namun, Jepang tidak pernah mendirikan monumen dan patung. Kekuasaannya disimbolkan antara lain melalui

keharusan mengibarkan bendera Jepang pada hari raya ‘Meizi-Setu’, pemberian salam untuk menghormati prajurit Jepang dan kewajiban membungkukkan badan ke arah kaisar Jepang. Sampai tahun 1960-an, hanya ada dua monumen yang tersisa, tetapi kemudian juga harus rata dengan tanah dan diganti dengan patung perjuangan. Ketika keadaan kota mulai stabil, khususnya pasca-penyerahan kedaulatan, pemerintah mulai mendirikan banyak monumen, patung, dan tugu. Salah satu tugu yang terkenal adalah tugu pahlawan yang didirikan di bekas kantor Raad van Justitie pada zaman Belanda dan gedung Kempetai pada masa Jepang. Tugu yang didirikan pada tahun 1952 (lebih dahulu didirikan dibandingkan dengan Monas Jakarta) ini, menjadi contoh yang baik dari sebuah proses dekolonisasi. Selain itu, “campur tangan” Soekarno dalam proses pendiriannya tampak sangat kental, terutama dapat dilihat pada desainnya. Salah satu monumen yang juga sangat ambisius, tetapi tidak terwujud hingga sekarang adalah rencana pendirian monumen W. R. Supratman di atas areal lebih kurang seluas 240 hektare. Pada monumen ini “campur tangan” Soekarno juga sangat kuat, khususnya dalam desain dan persetujuan atas tanah tempat pendiriannya. Namun demikian, monumen ini tidak pernah terwujud akibat ketiadaan dana.

Bagi sebagian penduduk, pendirian monumen dan patung ini tidak lebih sebagai penghamburan uang, apalagi saat itu kondisi ekonomi baru saja pulih dari perang. Untuk menghormati W.R. Supratman misalnya, masyarakat menganggap lebih bermanfaat jika mendirikan sekolah rakyat yang kemudian diberi nama Sekolah W. R. Supratman dibanding mendirikan monumen untuknya.

Selain pada monumen, patung, dan tugu, nama jalan juga menjadi media untuk merepresentasikan kekuasaan. Jalan-jalan yang terletak di sebelah barat Jembatan Merah yang merupakan tempat kediaman orang-orang Eropa misalnya, diberi nama dengan nama-nama Belanda seperti Heerenstraat, Willemstraat, Werfstraat, dan lain-lainnya. Ketika kota ini berkembang ke arah selatan, tempat terdapat pemukiman elite orang-orang Belanda, yakni sekitar Darmo

Boulevard, nama-nama gubernur jenderal juga menghiasi nama-nama jalan di wilayah itu, seperti Altingstraat, J. B. van Heutszstraat, dan lain-lainnya. Jalan-jalan sebelah timur Jembatan Merah yang dihuni oleh orang-orang Cina diberi nama seperti Chinesevorstraat, Tepekongstraat, Tienstraat, dan lain-lain, sedangkan di wilayah yang dihuni oleh orang-orang Arab dan Melayu dapat dijumpai misalnya Jalan Ampel, Mas Mansur, dan lain-lainnya. Satu hal yang menarik dari pemberian nama jalan pada masa pemerintahan Belanda adalah dipertahankannya sebagian besar nama-nama lokal yang mungkin sudah ada sejak abad ke-19. Dari 1113 nama jalan pada tahun 1940, hanya terdapat lebih kurang 21% atau 236 nama jalan yang berbahasa Belanda, dan sebagian besar mempergunakan nama-nama lokal seperti Blimbingstraat, Dinojo, Djagalan, Gembong, Kaliasin, Kalianjar, dan lain-lainnya. Seperti pada monumen dan patung, Jepang yang berkuasa di daerah ini sejak tahun 1942 hingga 1945 juga tidak memberikan penanda kekuasaannya pada nama-nama jalan. Satu-satunya jalan yang diubah namanya adalah Jalan Prambanan menjadi Jalan Kempetai. Hal ini berbeda dengan Madiun dan Semarang yang pada zaman Jepang mengubah nama-nama jalan berbau Belanda menjadi nama lokal.

Ketika kekuasaan berada di tangan penguasa republik, khususnya setelah pengakuan kedaulatan, nama-nama jalan mengalami perubahan secara besar-besaran. Nama-nama pahlawan baik di tingkat nasional maupun lokal kemudian menghiasi nama-nama jalan di kota ini sebagai pengganti nama-nama Belanda. Perubahan dan pengabdian nama dari mereka yang dianggap berjasa bagi negara dan Kota Surabaya terus berlangsung hingga tahun 1990-an. Namun, perubahan nama jalan ini tidak jarang menimbulkan pertentangan, sehingga harus dikembalikan pada nama semula, seperti kasus Jalan Darmo dan Jalan Jemursari. Sebagai salah satu simbol kekuasaan, lambang kota juga tidak luput dari berbagai upaya untuk mengubahnya. Sampai saat ini, lambang Kota Surabaya yang berintikan gambar Ikan Hiu (*Sura*) dan Buaya (*Baya*) sudah tiga kali mengalami perubahan.

Benteng dan Singa yang mencengkeram tulisan *Sura-Ing-Baya* menunjukkan dengan jelas siapa penguasa kota ketika itu. Setelah melalui serangkaian “perdebatan” di parlemen, akhirnya pada tahun 1956, Dewan Perwakilan Daerah Sementara Kota Besar Surabaya (DPRD-KBS) memutuskan untuk mempergunakan lambang Kota Surabaya seperti sekarang ini.

Tempat ibadah sebagai simbol agama menempati posisi penting di Kota Surabaya. Hal ini tercermin dari banyaknya masjid, gereja, dan klenteng yang tersebar di banyak tempat. Pada zaman Belanda terdapat dua masjid penting, yakni masjid Ampel dan Kemayoran. Masjid pertama terletak di pemukiman Arab dan agak jauh dari pusat kota. Namun, masjid ini merupakan simbol yang sangat kuat karena didirikan oleh seorang wali yang sangat terkenal, yaitu Sunan Ampel yang juga dikenal sebagai Raden Rahmat. Makam Sunan Ampel yang terletak di belakang masjid ini mempunyai daya tarik yang sangat kuat bagi warga NU untuk datang berziarah dan *bertawassul*. Adapun Masjid Kemayoran dapat dikatakan bahwa cikal bakalnya merupakan pemberian pemerintah Belanda sebagai kompensasi atas dirobohkannya sebuah masjid yang terletak di alun-alun, karena dibangun kantor Raad van Justitie. Dua masjid besar lainnya, yakni Masjid Al-Falah dan Masjid Mujahidin dibangun setelah proklamasi kemerdekaan. Berbeda dengan dua masjid sebelumnya yang dapat dikatakan sebagai representasi kaum nahdhiyin (Nahdatul Ulama), masjid ini dapat dianggap sebagai masjid yang dekat dengan gerakan modernis Muhammadiyah. Hal tersebut tampak dari tidak adanya simbol-simbol seperti yang terdapat pada masjid NU, seperti bedug, khatib yang memakai tongkat, azan dua kali pada shalat Jumat, Qunut pada waktu subuh, dan lain-lain. Akan tetapi, baik ‘Masjid NU’ maupun ‘Masjid Muhammadiyah’ memiliki satu simbol yang sama berupa *loudspeaker* untuk azan dan mengaji.

Masyarakat Tionghoa adalah komunitas yang sangat memperhatikan aspek-aspek religi di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pembangunan tempat ibadah yang sering disebut dengan klenteng

menjadi salah satu persoalan yang krusial. Klenteng bukan hanya tempat upacara keagamaan, melainkan juga sebagai ungkapan lahiriah masyarakat yang mendukungnya. Sejak zaman kolonial hingga tahun 1958, terdapat empat klenteng yang tersebar di kawasan Pecinan. Pada saat pendudukan Jepang, tidak ada kebijakan khusus yang dikeluarkan berkaitan dengan keberadaan klenteng. Namun demikian, kebijakan yang diterapkan bersifat lebih lunak. Bagi pemerintah Jepang, tekanan dan sikap keras terhadap orang-orang Tionghoa dapat menimbulkan konflik baru. Oleh karena itu, potensi yang dimiliki oleh penduduk Tionghoa lebih baik dimanfaatkan untuk membantu jalannya mesin perang Jepang.

Antara tahun 1945 hingga 1960 hanya terdapat satu klenteng baru. Klenteng tersebut dibangun pada tahun 1951 dengan nama klenteng Pak Kik Bio yang terletak di Jalan Jagalan. Kenyataan tersebut sangat berbeda dengan Jakarta yang pada periode sama memiliki jumlah klenteng baru sebanyak 12 buah. Selain itu, dalam banyak kesempatan, kegiatan klenteng mengundang pro dan kontra. Pada tanggal 27 Maret 1959 misalnya diumumkan adanya arak-arakan Toapekong, tetapi Pelaksana Kuasa Perang (Pekuper) Kota Praja Surabaya tidak menyetujui adanya arak-arakan di luar klenteng. Setelah melalui negosiasi dengan pihak keamanan, akhirnya Toapekong dapat diarak keliling kota. Pelarangan ini berkaitan dengan persoalan keamanan dan ketertiban umum. Alasan yang sama dipakai juga setahun sebelumnya yang melarang penggunaan tulisan huruf Tionghoa.

Sejak abad ke-19, di Surabaya telah terdapat areal pemakaman bagi orang-orang Tionghoa. Pada awalnya, areal pemakaman tersebut menyatu dengan kawasan pemukiman mereka di Kembang Jepun. Antara tahun 1867 sampai tahun 1940 terdapat areal pemakaman baru yang terletak di Embong Malang, Kupang, dan Kembangkuning. Berbeda dengan kota-kota lain seperti Padang yang areal makamnya sangat sesuai dengan pemakaman Tionghoa, yakni terletak di perbukitan, terlindung dari angin, serta menghadap ke

sungai dan laut, di Kota Surabaya terletak di areal yang rata dan sangat dekat dengan pemukiman penduduk. Akibatnya konflik perebutan ruang yang mewarnai Kota Surabaya pada tahun 1950-an, khususnya antara penduduk yang tidak mempunyai rumah dan dianggap sebagai penduduk liar dengan orang-orang Tionghoa tidak terhindarkan. Dengan demikian, jika bagi orang Tionghoa makam merupakan simbol yang sangat sakral, maka bagi penduduk makam tersebut merupakan areal yang siap huni. Dapat dikatakan bahwa konflik yang terjadi terutama pada pasca penyerahan kedaulatan tersebut, tidak terjadi pada zaman Belanda dan Jepang. Hal ini antara lain disebabkan oleh sikap tegas pemerintah dalam menjaga tempat-tempat publik, selain tentunya jumlah penduduk yang belum mengalami ledakan.

Dari keseluruhan hasil studi ini, dapat ditambahkan pula bahwa baru sebagian kecil dari sekian banyaknya simbol-simbol kota yang tersebar di Surabaya yang dapat dipaparkan. Keberadaan simbol-simbol kota lainnya seperti yang tercakup dalam domain adat, ekonomi, etnik, dan lain-lain sesungguhnya juga tidak luput dari pengaruh kekuasaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hasil studi ini dapat menjadi bahan dan titik tolak untuk melakukan elaborasi lebih jauh tentang bagaimana kekuasaan memperlakukan simbol-simbol kota.[]

# DAFTAR PUSTAKA

## 1. SUMBER ARSIP DAN PUBLIKASI RESMI

- AKS (Arsip Kota Surabaya), box 10, no. 70.  
\_\_\_\_\_, box 11, no. 74.  
\_\_\_\_\_, box 27, no. 1268-1269, 1271-1274.  
\_\_\_\_\_, box 100 No. 1556.  
\_\_\_\_\_, box 118, no. 1824.  
\_\_\_\_\_, box 127 no. 1934.  
\_\_\_\_\_, box 133 no. 1975.  
\_\_\_\_\_, box 168, no. 2813.  
\_\_\_\_\_, box 231 no. 4185.  
\_\_\_\_\_, box 225, no. 4137; 4158.  
\_\_\_\_\_, box 296 no. 4860.  
\_\_\_\_\_, box 665, no. 13.701.  
\_\_\_\_\_, box 667, no. 13.753  
\_\_\_\_\_, box 673, no. 13.917.  
\_\_\_\_\_, box 676, no. 13.979.  
\_\_\_\_\_, box 678 no. 14.014  
\_\_\_\_\_, box 691 no. 14.371  
\_\_\_\_\_, box 1111 no. 22.840  
\_\_\_\_\_, box 1130, no. 23.275.  
\_\_\_\_\_, box 1179 no. 24.642  
\_\_\_\_\_, box 1209, no. 25.398.  
\_\_\_\_\_, box 1227, no. 25.813.

\_\_\_\_\_, box 1321 no. 28.292; 28.285.  
\_\_\_\_\_, box 1350, no. 29.013.  
\_\_\_\_\_, box 1567, no. 35.325.  
\_\_\_\_\_, box 1814, no 45.356.  
\_\_\_\_\_, box 1827 no. 45.887.  
\_\_\_\_\_, box 1846 no. 38.178.  
\_\_\_\_\_, box 1852 no. 46.935.  
\_\_\_\_\_, box 2100 no. 57.534.  
\_\_\_\_\_, box 2119 no. 58.557.

Peraturan Daerah No. 03, tanggal 27 Juli 1974.

Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 22 Tahun 1955.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya .

Putusan DPRDS Kota Besar Surabaya, No. 34/DPRDS, 1956.

Putusan DPRD Kotapradja Surabaya, No. 21 Tahun 1959.

SK DPRD Kodya Surabaya, 6 Maret 1975, Nomor 02/DPRD/Kep/75.

SK Walikota tanggal 18 Maret 1975, No. 64/WK/75

SK DPRD Kotamadya dati II Surabaya No. 12 Tahun 1977.

SK Walikota, 17 November 1982 No. 471/1982.

SK Walikota Daerah Tingkat II Surabaya, No. 206, 22 Agustus 1994.

SK Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Surabaya, No.46, 9 Mei 1996.

SK Walikota Surabaya, No. 256 tahun 1990, 29 Oktober 1990.

SK Walikota Daerah Tingkat II Surabaya, No. 206, 22 Agustus 1994.

Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1927, No. 286 dan 1932 No. 554.

Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1905, No. 550 & 1925 No. 25, No. 219.

## 2. SURAT KABAR

*Djawa Pos*, 14 Januari 1952

\_\_\_\_\_, 11 November 1952

\_\_\_\_\_, 21 Mei 1958

\_\_\_\_\_, 10 Juni 1958

\_\_\_\_\_, 12 Juni 1958  
\_\_\_\_\_, 25 Juni 1958  
\_\_\_\_\_, 7 Juni 1958  
\_\_\_\_\_, 3 Juni 1958  
*Djawa Post*, 29 Februari 1952  
\_\_\_\_\_, 8 Maret 1952  
*Gapura*, Mei 1975  
*Java Pos*, 13 November 1993  
*Kompas*, 5 April 2001  
\_\_\_\_\_, 18 Mei 2001  
\_\_\_\_\_, 27 November 2005  
*Liberty*, 10 Agustus 1968  
*Malang Post*, 25 Juni 1958  
*Perdamaian*, 15 Januari 1952  
\_\_\_\_\_, 27 Februari 1952  
*Pewartas Soerabaia*, 17 Juni 1953  
*Pontianak Pos*, 27 Mei 2005  
*Radar Surabaya*, 25 Januari 2001  
*Sin Po*, 9 Maret 1940  
*Soeara Asia*, 13 Juni 2602  
\_\_\_\_\_, 14 Oktober 2602  
\_\_\_\_\_, 19 Oktober 2602  
\_\_\_\_\_, 18 Agustus 2602  
\_\_\_\_\_, 27 Januari 2605  
*Soera Oemoem*, 22 Januari 1941  
\_\_\_\_\_, 24 Agustus 1941  
*Suara Indonesia*, 5 April 2001  
*Surabaya Post*, 14 Oktober 1953  
\_\_\_\_\_, 23 Oktober 1953  
\_\_\_\_\_, 28 Oktober 1953  
\_\_\_\_\_, 31 Oktober 1953  
\_\_\_\_\_, 30 Desember 1953

\_\_\_\_\_, 3 April 1956  
\_\_\_\_\_, 17 April 1956  
\_\_\_\_\_, 7 Mei 1956  
\_\_\_\_\_, 8 Mei 1956  
\_\_\_\_\_, 9 Mei 1956  
\_\_\_\_\_, 15 Mei 1956  
\_\_\_\_\_, 16 Mei 1956  
\_\_\_\_\_, 23 Mei 1956  
\_\_\_\_\_, 24 Mei 1956  
\_\_\_\_\_, 27 Juni 1956  
\_\_\_\_\_, 6 Januari 1958  
\_\_\_\_\_, 16 Januari 1958  
\_\_\_\_\_, 28 Januari 1958  
\_\_\_\_\_, 19 Februari 1958  
\_\_\_\_\_, 22 Februari 1958  
\_\_\_\_\_, 14 Maret 1958  
\_\_\_\_\_, 25 Maret 1958  
\_\_\_\_\_, 4 Juni 1958  
\_\_\_\_\_, 12 Juni 1958  
\_\_\_\_\_, 9 Oktober 1958  
\_\_\_\_\_, 14 Januari 1959  
\_\_\_\_\_, 14 Februari 1959  
\_\_\_\_\_, 16 Februari 1959  
\_\_\_\_\_, 3 Maret 1959  
\_\_\_\_\_, 25 Maret 1959  
\_\_\_\_\_, 21 November 1960  
\_\_\_\_\_, 9 Agustus 1961  
\_\_\_\_\_, 7 September 1961  
\_\_\_\_\_, 3 Oktober 1962  
\_\_\_\_\_, 15 Oktober 1962  
\_\_\_\_\_, 18 Agustus 1963  
\_\_\_\_\_, 6 Februari 1964

\_\_\_\_\_, 29 Februari 1964  
\_\_\_\_\_, 11 Maret 1964  
\_\_\_\_\_, 16 Mei 1964  
\_\_\_\_\_, 26 November 1964  
\_\_\_\_\_, 4 Juli 1967  
*Surya*, 23 Mei 1995  
*Surya*, 4 Juni 2006

### 3. BUKU, JURNAL, MAJALAH, SURAT KABAR, SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

- Abdulgani, H. Ruslan. 1975. *100 hari di Surabaya*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Abdullah, Taufik. 1999. "Nasionalisme Indonesia dari Asal Usul ke Prospek Masa Depan" Dalam *Sejarah: Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi* (8)
- \_\_\_\_\_. 1995. "Pengalaman, Kesadaran, dan Sejarah." Pidato *Pengukuban Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra UGM*, Yogyakarta 27 November.
- Achmad, R.S. 1990. *Surabaya Bergolak*. Jakarta: Haji Masagung.
- Alfian. 1971. *Hasil Pemilu Tahun 1955 untuk DPR* Jakarta: Leknas.
- Alphabetisch [n.d.] *Alphabetisch lexicografisch naamlijst der wegen, straten, pleinen, kampongs, scholen, kerken, passars en openbare gebouwen in de gemeente Soerabaia* 1935. Uitgave En Druk: H. Van Ingen-Soerabaia.
- Alwi, Hasan, dkk. (Ed.). 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anasionalis. 2004. "Anasionalis, Patung Raffles Harus Dirobohkan' Dalam *Novum*.
- Anda, Reporter. 1962. "Putar Kajoon" *Surabaya Post* 15 Oktober.
- Anonim. 1958. "Anggota DPD Amirudin: Penutupan Makam T'hoa Perlu utk. Keperluan dan Keindahan Kota" Dalam *Surabaya Post* 25 Maret.
- Ardhana, I Ketut. 2004. "Denpasar: Perkembangan dari Kota Kolonial Hingga Kota Wisata", Makalah dipresentasikan pada the First International Conference on Urban History di Universitas Airlangga pada 22-25 Agustus.
- Ardhana, I ketut. 2005. *Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915-1950*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Barwogo, Gatot dkk. 1974. *Laporan Survey Sejarah Kepahlawanan Kota Surabaya*. Surabaya: Badan Pengembangan Pariwisata Daerah, 1974.
- Basundoro, Purnawan dan Sarkawi B. Husain. 2004. "Perempuan & Parlemen: Kajian Tentang Posisi dan Peran Perempuan dalam Politik Lokal di Jawa Timur" Laporan penelitian pada Lemlit Unair, Surabaya.
- Basundoro, Purnawan. 2004. "Problem Pemukiman Pasca Revolusi Kemerdekaan: Studi tentang Pemukiman Liar di Kota Surabaya 1945–1960" Dalam *Kota Lama Kota Baru. Sejarah Kota-kota di Indonesia*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah Unair, Research Programme Indonesia Across Orders, Ombak, 2005), hlm. 537–554.
- Baudet, H. dan I. J. Brugmans. 1987. *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. Jakarta: Obor.
- Anonim. 1958. "Besok Malam Pilihan Kepala Daerah Kota Praja Surabaya" Dalam *Djawa Pos*, 10 Juni.
- Bintarti, R.M. 1964. "Kenang-kenangan pada Masa Lampau." *Surabaya Post*, 16 Mei.
- Bosch, Amry van den. 1941. *The Dutch East Indies: Its government, Politics, and Problems*. Berkeley: University Press.
- Anonim. 1940. "Boroknja Soerabja". Dalam *Sin Po*, 9 Maart.
- Anonim. 2005. "Bukti Kebaktian Tertinggi kepada Leluhurnya Hong Sui Makam Ditentukan Yayasan Pemakaman" *Pontianak Pos* 27 Mei.
- Colombijn, Freek. 1993. "The powers of Symbol in the Urban Arena" Dalam Peter J. M. Nas (Ed.), *Urban Symbolism*. Leiden: E. J. Brill.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Patches of Padang: The History of an Indonesia Town in the Twentieth Century and the Use of Urban Space*. Leiden: Research School CNWS.
- \_\_\_\_\_. 2004. "Sign of the Times: Symbolic Change around Indonesian Independence." Makalah *International Workshop Urban Symbolism*, Leiden, Juni 16–18.
- Charlie, S. dan Theodorika. 1990. *Pergeseran Peranan Klenteng dalam Perkembangan Daerah Kembang Jepun*. Surabaya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Kristen Petra.
- Christina, Mega. 1995. "Menyongsong Hari Jadi ke-702, Menguk Sejarah Pecinan Surabaya: Mereka Kenal Segi Empat Emas Sejak Zaman Belanda". Dalam *Surya*, 23 Mei.
- Colombijn, Freek. 1994. *Patches of Padang: The History of an Indonesia Town in the twentieth Century and the Use of Urban Space*. Leiden: Research School CNWS.

- Dachlan, K.H. (Penerjemah). 1989. *Wali Songo. Kenang-kenangan Haul Agung Sunan Ampel ke-544*. Surabaya: Panitia Haul Agung Sunan Ampel.
- Anonim. 1956. "Demonstrasi Dilarang di Kota Besar S'bjaja". Dalam *Surabaya Post*, 9 Mei.
- Dick, H. W. 1993. "Nineteenth-century Industrialization, a Miss Opportunity?". Dalam: J. Thomas Lindblad (Ed.), *New Challenges in the Modern Economic History of Indonesia*, hlm. 125–126. Leiden: Program of Indonesian Studies.
- Anonim. 2002. *Surabaya, City of Work: A Socioeconomic History, 1900–2000*. Athens: Ohio University Press.
- Anonim. 1961. "Djadi DJln. Raya Darmo Lagi." *Surabaya Post* 9, Agustus.
- Anonim. 1962. "Djalan Sindhunegara Menjadi Jalan Komodor Jos Sudarso." *Surabaya Post*, 3 Oktober.
- Anonim. 1956. "DPRDS-KBS Benarkan Tindakan jg Berwadajib dlm Peristiwa Pakis. Teruskan Tindakan". Dalam *Surabaya Post*, 24 Mei.
- Anonim. 1958. "Dr. Satrio (Tjalon PKI): Suka Mendjadi Kepala Daerah Kota Surabaya Asal Semua Partai Setudju". Dalam *Surabaya Post*, 4 Juni.
- Anonim. 1958. "Dr. Satriyo Kepala Daerah Kotapradja Surabaya. Tjalon Tunggal, Terpilih Setjara Aklamasi". Dalam *Djawa Pos*, 12 Juni.
- Anonim. 1958. "Dr. Satriyo Disahkan Pemerintah Sebagai Kepala Daerah KBS". Dalam *Djawa Pos*, 25 Juni.
- Dwicipta. 2005. "Pao An Tui" Dalam *Kompas*, 27 November.
- Ekadjati, Edi S. dkk. 1985. *Sejarah Kota Bandung 1945–1979*. Jakarta: Depdikbud.
- Anonim. 1956. "4 Djiwa Melajang, 2 Luka2: Pembongkaran Rumah Liar Membawa Korban". Dalam *Surabaya Post*, 7 Mei.
- Evers, Hans Dieter dan Rüdiger Korff. 2002. *Urbanisme di Asia Tenggara*. Makna dan kekuasaan dalam ruang-ruang sosial. Jakarta: Yayasan Obor.
- Faber, G.H. von. 1931. *Oud Soerabaia, De Geschiedenis van Indië's Eerste Koopstad van de Oudste Tijden tot de Instelling van den Gemeenteraad*. Soerabaia: Gemeente Soerabaia.
- \_\_\_\_\_. 1933. *Nieuw Soerabaia, De Geschiedenis van Indië's Voornaamste Koopstad in the Eerste Kwarteem Sedert Hare Instelling 1906-1931*. Soerabaia: Gemeente Soerabaia.

- Fakih, Farabi. 2005. *Membayangkan Ibu Kota Jakarta di Bawah Soekarno*. Yogyakarta: Ombak.
- Fernando, M.R. dan David Bulbeck. 1992. *Chinese economic activity in Netherland Indie*. Singapore: ISEAS.
- Frederick, William H. 1986. *Pandangan dan gejolak: Masyarakat kota dan lahirnya revolusi Indonesia (Surabaya 1926–1946)*. Jakarta: Gramedia.
- Anonim. 1958. *Gema Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Peralihan Propinsi Djawa-Timur* Surabaya: DPRDP.
- Anonim. 1959. “Geredja Maranatha Sudah Selesai”. Dalam *Surabaya Post*, 16 Februari.
- Anonim. 1953. “Geredja Pantekosta”. Dalam *Pewartu Soerabaia*, 17 Juni.
- Anonim [n.d.] *Gewijzigde Straatnamen van de Stad Soerabaia*.
- Gist, N. P. Dan S. F. Fava. 1964. *Urban Society*. New York.
- Gondomono. 1996. *Membanting Tulang Menyembah Arwah: Kehidupan Kekotaan Masyarakat Cina*. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Goto, Ken’ Ichi. 1998. *Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Grijns, Kees. 2000. “Jabotabek Place Names”. Dalam: Kees Grijns and Peter J.M. Nas (Ed.), *Jakarta – Batavia Socio-Cultural Essays*, hlm. 216–223. Leiden: KITLV Press.
- Grijns, Kees and Peter J.M. Nas (Ed.). 2000. *Jakarta – Batavia socio-cultural essays*. Leiden: KITLV Press.
- Hageman, J. 1860. “Bijdragen tot de kennis van de Residentie Soerabaja.” *TVNI*, 22 (1).
- Handinoto. 1996. *Perkembangan dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya (1870–1940)*. Surabaya: Univesitas Kristen PETRA – Andi Press.
- Han Sianseng. 1923. *Kitab Hong Soei Kie*. Batavia: Snelpersdrukkerij Goan Hong & Co.
- Hayat, H.M. Soleh et al. 1995. *Peranan Ulama dalam Perjuangan Kemerdekaan*. Surabaya: PWNJ Jatim.
- Anonim. 1952. Hentikan Tugu<sup>2</sup>an! Dirikanlah “Sekolah-sekolah W.R. Supratman” Dalam *Djawa Pos*, 8 November.
- Herlianto. 2001. “Masalah Cina (1)”. Dalam: <http://www.hamline.edu/apa-kabar>. Diakses pada 5 Februari 2005.
- Heuken SJ, A. 1997. *Tempat-tempat Bersejarah di Jakarta*. Jakarta: Cipta Loka Caraka.

- Husain, Sarkawi B. 2003. "Sungai dan Perkembangan Kota di Indonesia pada Masa Kolonial: Sebuah Kajian Awal". *Mozaiik. Jurnal Kebudayaan dan Kemasyarakatan*, Vol. I (2): 109–117.
- \_\_\_\_\_. 2000. "Kalompoang: Konflik Intern dan Antarkerajaan di Sulawesi Selatan". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Th. Ke-6, No. 024, Juli.
- Idrus. 1948. *Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anonim. 2001. "Jangan Ganti Nama Jalan Raya Darmo". *Kompas* 5 April.
- Juliartono, Herry. 2001. "Jangan Diganti", *Kompas*, 18 Mei.
- Kartomihardjo, Prayoga dkk. 1986. *Monumen Perjuangan Jawa Timur*. Jakarta: Kem. P dan K.
- Kasansengari, Oerip. 1967. *Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan W. R. Soepratman Pentjiptanja*. Surabaya: Grafika Karya.
- Kasdi, Aminuddin dkk. 1986. *Pertempuran 10 November 1945, Citra Kepahlawanan Bangsa Indonesia di Surabaya*. Surabaya: Panitia Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan 10 November 1945.
- Anonim. 1977. *Kenangan Masjid Al-Falah*. Surabaya: Yayasan Masjid Al-Falah.
- Anonim. 1959. "Keterangan Pemerintah pada DPR. Demokrasi Terpimpin-werkdemokrasi". Dalam *Surabaya Post*, 3 Maret.
- Anonim. 1967. "Klenteng Menjadi Tempat Ibadah Tri Dharma". Dalam *Surabaya Post*, 4 Juli.
- Anonim. 1958. "KMKB Surabaya Prinsip Tidak Hendaki Terbitnja sk2 Berhuruf Tionghoa. Pelaksanaan Penggantian Papan Nama Berhuruf Tionghoa akan Diteliti". Dalam *Djawa Pos*, 7 Juni.
- Anonim. 1952. "Kotapradja Diliputi Suasana Terharu. Selamat Djalan, Tjak Doel...." Dalam *Perdamaian*, 28 Januari.
- Kuntowijoyo. 1988. *Perubaban Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850–1940*. Yogyakarta: PAU UGM.
- Kuswardani, Diyah. 2004. *Gubernur Jawa Timur 1945–1967 (Situasi Sosial Politik dan Ekonomi)*. Surabaya: Badan Arsip Provinsi Jawa Timur.
- Kwanda, Timoticin dan Handinoto. 2003. *Surabaya Architectural Heritage*. Surabaya: Jurusan Arsitektur Universitas Kristen PETRA.
- Kwartanada, Didi. 1996. "Minoritas Tionghoa dan Fasisme Jepang: Jawa 1942–1945". Dalam *Seri Siasat Kebudayaan: Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa*. Yogyakarta: Kanisius.

- Anonim. 1953. “Lambang Surabaya Pakai Tugu Tanpa Semanggi.” *Surabaya Post*, 30 Desember.
- Anonim. 1975. “Laporan Pembangunan Wali Kota Madya Surabaya pada Apel Besar Hari Jadi Kota ke-682.” *Gapura* 3: 6–8 (Mei).
- Anonim. 2602. “Larangan Bersidang dan Berkoempoel. Semoea Perkoempoelan Haroes Diboebarkan”. Dalam *Soeara Asia*, 27 Juli.
- Leirissa, R.Z. 1985. *Terwujudnya Suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia 1900–1945*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Lilananda, Rudy P. 1995. *Kapasan sebagai Pecinan Surabaya dalam Perencanaan Tata Ruang Wisata Kota*. Surabaya: LPPM UK Petra.
- Lindblad, J. Thomas, (Ed.). 1993. *New Challenges in the Modern Economic History of Indonesia*. Leiden: Program of Indonesian Studies.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta: LP3ES.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Lontoh, D.V. 2001. *Panggilan dan Pengutusan. Sejarah Pertumbuhan Jemaat GPIB “Maranatha” Surabaya*. Surabaya: GPIB.
- Anonim. 2004. “Lupakan Predikat Kota Pahlawan, Patung Penjahar Bertebaran di Surabaya”. Dalam *Sapujagat*, no. 59, tahun V, 1–15 Juli.
- Mackie, Jamie. 2000. “Sejarah Demografi Regional sebagai Petunjuk untuk Memahami Perubahan Sosial-ekonomi: Studi Kasus Karesidenan Surabaya, 1890–1990”. Dalam J. Thomas Lindblad (Ed.), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Anonim. 2605. “Madjelis Sjoero Moeslimin Indonesia. Mengadakan Propaganda Keliling”. Dalam *Soeara Asia*, 27 Januari.
- Anonim. 1958. “Masjid Kembang Kuning Adalah Juga yang Paling Pertama di Pulau Jawa”. Dalam *Surabaya Post*, 16 Januari.
- Anonim. 1960. “Masjid “Rachmad” Kembang Kuning Akan Dibangun dgn Beaja 8,5 Djuta Rup.” “Masjdjid jang Tertua di Seluruh Djawa” Dalam *Surabaya Post*, 21 November.
- Mattulada. 1979. *Pedang dan Sempoa: Suatu Analisa Kultural “Perasaan Kepribadian” Orang Jepang*. Ujung-Pandang: LEPHAS Unhas.
- M, J.Th. 1890. *SOERAT KANDOENGAN BOEAT goenanja segala prijaie-prijaie, jang memegang pekerdjaan di tanah gowernemennan di poelo Djawa dan Ma-*

- doera, ia-itoe KATRANGAN atas segala boekoeman dan prentab, jang patoet di kataboei oleh-nja.* Semarang: G.C.T. van Dorp & Co.
- Moedjono, Parlinah dkk. (Ed.). 1975. *20 Tahun Universitas Airlangga 10 November 1954–1974*. Surabaya: Unair.
- Moerthiko. 1986. *Rivajat Klenteng, Vibara, Litbang, Tempat Ibadah Tridbarma se-Jawa*. Semarang: Empeh Wong Kam Fu.
- Murtadlo, Moh. Sururi. 2002. *Masjid Kemayoran Surabaya (Sejarah Berdiri dan Perkembangannya)*. Surabaya: Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran.
- Nagazumi, Akira. 1989. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908–1918*. Jakarta: Grafitipers.
- Anonim. 2602. "Nama Kepala Djabatan Kantor Pemerintah". Dalam *Soeara Asia*, 19 Oktober.
- Nas, P. J. M. 1979. *Kota di Dunia Ketiga*. Jakarta: Bhartara Karya Aksara.
- Nas, Peter J.M. 1993. "Tatanan Simbolik Jakarta: Dari Kosmos ke Kondominium". Dalam: *JIIS* (4).
- Nas, Peter J.M. (Ed.). 1993. *Urban Symbolism*. Leiden: E.J. Brill.
- Noer, Deliar. 1980. *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900–1942*. Jakarta: LP3ES.
- Noordjanah, Andjarwati. 2004. *Komunitas Tionghoa di Surabaya (1910–1946)*. Semarang: Mesiass.
- Nurfaidah, Marta. 2006. "Makam Tionghoa Bukan Sekadar Peristirahatan" Dalam *Surya*, 4 Juni 2006.
- Anonim. 1941. *Soera Oemoem*, 24 Agustus.
- Anonim. 1941. *Soera Oemoem*, 22 Januari.
- Osman, Anselma Bea. 1988. "Masyarakat Cina Betawi Abad XX". Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada [skripsi].
- Anonim. 1958. "Pasar Wonokromo Dibuka 10 November". Dalam *Malang Post*, 25 Juni.
- Anonim. 2005. "Pao An Tui". Dalam *Kompas*, 27 November.
- Anonim. 1963. "Pekerjaan Pembangunan Monumen Supratman di S'baja Segera Dimulai". Dalam *Surabaya Post*, 18 Agustus.
- Anonim. 1952. "Pembukuan Berbahasa Tionghoa". Dalam *Djawa Pos*, 14 Januari.
- Anonim. 1956. "Pemerintah Pusat dan Peristiwa Pakis". Dalam *Surabaya Post*, 23 Mei.
- Anonim. 1956. "Pemindahan Makam Soepratman". Dalam *Surabaya Post*, 3 April.

- Anonim. 1953. "Pemuda Djadi Pahlawan." *Surabaya Post*, 23 Oktober.
- Anonim. 1964. "Pencangkulan Pertama Pembangunan Masjid Kemayoran Kamis Pagi Tadi". Dalam *Surabaya Post*, 26 November.
- Anonim. 1959. "Penduduk S'bjaja Terus bertambah". Dalam *Surabaya Post*, 25 Maret.
- Anonim. 2620. "Penggantian Nama2 djalan" Dalam *Soera Asia*, 14 Oktober.
- Anonim. 1958. "Pengumuman Komandan KMKB Surabaya. Warganegara Indonesia Dilarang Pergunakan Tulisan Huruf T'hoa". Dalam *Djawa Pos*, 21 Mei.
- Anonim. 1959. "Pengurus Masjdjid Ampel Terima 26.539,82". Dalam *Surabaya Post*, 14 Februari.
- Anonim. 2620. "Penotoeapan Koeboeran". Dalam *Soera Asia*, 18 Agustus.
- Anonim. 1958. "Pentjurian Di Makam" Dalam *Surabaya Post*, 28 Januari.
- Anonim. 1958. "Perdana Menteri Djuanda: Pemerintah Lebih Pergunakan Blokade Ekonomi daripada Strategi Militer thd. PRRI". Dalam *Surabaya Post*, 22 Pebruari.
- Anonim. 1975. "Perda Pemberian Nama Jalan dan Segala Ikhwalnya." *Gapura* 4: 13–14.
- Anonim. 1952. "Peresmian Tugu Pahlawan: Lambang daripada Djiwa Besar". Dalam *Djawa Pos*, 11 Nopember.
- Anonim. 1953. "Perluasan Mesdjid Ampel. So'al Tanah Kuburan di Sebelah Utara Mesdjid Ampel". Dalam *Surabaya Post*, 14 Oktober.
- Anonim. 1959. "Perluasan Mesdjid Ampel Selesai". Dalam *Surabaya Post*, 14 Januari.
- Anonim. 1952. "Permintaan Supaja Bahasa Tionghoa Boleh Dipakai dlm Pembukuan". Dalam *Perdamaian*, 15 Januari.
- Anonim. 2602. "Pertemuan di Yamato Hotel" Dalam *Soera Asia*, 13 Juni.
- Pijper, G.F. 1987. "Politik Islam Pemerintah Belanda" Dalam: H. Baudet dan I. J. Brugmans, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. Jakarta: Obor.
- Anonim. 1958. "PKI Tjalonkan Dr. Satrio sebagai Kepala Kotapradja Surabaya". Dalam *Djawa Pos*, 3 Juni.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (Ed.). 1992. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Depdikbud-Balai Pustaka.
- Prawiroatmodjo, S. 1957. *Bausastra Djawa-Indonesia*. Surabaya: Expres & Marfiah.

- Prijotomo, Josef. 2002. "Lupa dan Kenang di Dua Sub-era Modern Kota Malang". Dalam: Gunawan Tjahjono dan Putu Ayu P. Agustiananda, *Nyala Nirmana 72 tahun Dipl.-Ing Han Awal*. Jakarta: Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Anonim. 1956. "P.R.K.S.: Peristiwa Pakis Supaja Diselidiki". Dalam *Surabaya Post*, 15 Mei.
- Anonim. 1956. "P.S.I. Surabaya: Hentikan Tjara2 Pembongkaran Bangunan Liar". Dalam *Surabaya Post*, 8 Mei.
- Putra, Anom Surya. 2001. *Agamaku Terbang Tinggi*. Surabaya: Inspirasi.
- Putro Adi, F.J.B.T.. 1968. "Nama Djalan dan Letak Nomor Rumah di Kota Surabaya". *Liberty*, 10 Agustus.
- Rahayu, Shinta Devi Ika Shanti. 2005. *Boen Bio: Benteng Terakhir Umat Konghucu*. Surabaya: JP Books.
- Rahman, Darmawan Masud, dkk. 1994. *Klenteng Ibu Agung Bahari Ujung Pandang*. Ujung Pandang: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan dan Tenggara.
- Ratnawati, Rianny. 1989. *Arsitektur Klenteng di Surabaya*. Surabaya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Kristen Petra.
- Rato, Dominikus. 1992. *Rato, Biju' dan Asta: Persepsi Masyarakat Madura Sumenep Terhadap Kuburan Keramat*. Jember: Universitas Jember.
- Ricklefs, M.C. 1994. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anonim. 1961. "Rp 1/2 Djuta untuk Mulai Pembangunan Monumen Supratman". Dalam *Surabaya Post*, 7 September.
- Anonim. 1956. "Rumah2 Liar Dibongkar, Ribuan Org Berdemonstrasi". Dalam *Surabaya Post*, 17 April.
- Salmon, Cl. dan D. Lombard. 2003. *Klenteng-klenteng dan Masyarakat Tionghoa di Jakarta*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Saud, Saumiman. 2001. "Mengenal Upacara Kematian Orang Tionghoa Tradisi". Dalam *Warta GKA Trinitas*, edisi 20 Oktober; <http://gkatrinitas.tripod.com/warta.htm>. Diakses pada 1 Juni 2005.
- Anonim. 1953. "Sajembara Lambang Baru Surabaya." *Surabaya Post*, 28 Oktober
- Sanit, Arbi. 2000. *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sarodja, R. 1992. “Sekilas Pelaksanaan Pembangunan Tugu Pahlawan 10 November 1945 di Surabaya”. Surabaya, 22 September.
- Schlegel, G. 1885. *Chineesche Begrofenis en Huwelijks Onderneming Gevestigd te Soerabaja*. Leiden: Ej Brill.
- Anonim. 1990. *Sejarah Perkembangan Rencana Kota Surabaya*. Surabaya: Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Madya Surabaya.
- Anonim. 1975. “Sekali Lagi tentang: 31 Mei, Hari Jadi Kota Surabaya”. Dalam *Gapura*, no. 3/VIII/Mei 1975
- Anonim. 1975. “Sekelumit Kenangan: Surabaya Tiga Puluh Tahun yang Lalu.” *Gapura* 5: 5–7.
- Anonim. 1995. *Selayang Pandang Surabaya Tempo Doeloe*. Surabaya: Panitia Lustrum Arsitektur ITS.
- Anonim. 1953. “Semanggi Lambang Surabaya.” *Surabaya Post*, 31 Oktober.
- Anonim. 1958. “Sesudah Debat tentang Prosedur. Dengan Aklamasi Dr. Satriyo Dipilih Djadi Kepala Daerah Kota Surabaya”. Dalam *Surabaya Post*, 12 Juni.
- Setiadijaya, Barlan. 1991. *10 November 1945. Gelora Kepahlawanan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Dwi Warna.
- Shadiliy, Hassan (red.) [n.d.] *Ensiklopedi Indonesia. Edisi kbusus*. Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve.
- Anonim. 1964. “Siapa Pembunuh Patrice Lumumba?.” Dalam *Surabaya Post*, 6 Februari.
- Anonim. 1953. “Sidang Dewan Kota.” Dalam *Surabaya Post*, 23 Oktober.
- Anonim. 1952. “Sidang DPRDS Kota Besar Surabaya: Sedjarah ‘Stadstuijn’ Diachiri. DPD Tak Berdaja Menghadapi Modal Raksasa?.” Dalam *Perdamaian*, 27 Februari.
- Anonim. 1952. “Sidang DPRDS: Perdjudjian dgn. Stadstuijn Tidak Diperpandjang”. Dalam *Djava Post*, 27 Februari.
- Anonim. 1952. ”Sidang DPRDS jad: Stadstuijn Diganti ‘Taman Krida Budaja’”. Dalam *Djava Pos*, 27 Maret.
- Silas, Johan. 1996. *Kampung Surabaya Menuju Metropolitan*. Surabaya: Yayasan Keluarga Bhakti Surabaya dan *Surabaya Post*.
- \_\_\_\_\_. 2004. “Pengalaman Pelestarian Bangunan Bersejarah di Surabaya”, Makalah Seminar Pelestarian Pusaka Budaya: Kebijakan dan Praktik di Prancis dan Indonesia, Surabaya, 11 Mei.

- Anonim. 1958. “Soal Tanah di Depan Masjid Kemayoran”. Dalam *Surabaya Post*, 19 Februari.
- Anonim. 1956. “Soal Tragedi Pakis: Masjumi-PNI-NU satu sikap” Dalam *Surabaya Post*, 16 Mei.
- Soekanto. 1983. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Rajawali.
- Anonim. 2004. *Soerabaja 1900-1950: Havens, Marine, Stadsbeeld Port, Navy, Townscape*. Nederlands: Asia Maior.
- Soeratman, Darsiti. 1989. *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830–1939*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Soewito, Irna H.N. Hadi. 1994. *Rakyat Jawa Timur Mempertahankan Kemerdekaan*. Jakarta: Grasindo.
- Anonim. 1952. “Stadstuin Boleh Dioper Tapi...” Dalam *Djava Post*, 29 Februari.
- Sudarno, dkk. 1993. *Sejarah Pemerintahan Militer dan Peran Pamong Praja di Jawa Timur Selama Perjuangan Fisik 1945–1950*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anonim. 1980. *Surabaya dalam Lintasan Pembangunan*. Surabaya: Subbagian Humas & Protokol Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya.
- Suyanto, Dany. 1993. “Menyeleksi, Isemani, Setelah itu Selesai”. Dalam: *Jawa Pos*, 13 November.
- Suwarno, P. J. 1990. *Sejarah Birokrasi Pemerintahan Indonesia: Dabulu dan Sekarang*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Taal, Sandra. 2002. *Between Ideal and Reality: Images of Palembang*. Disertasi. Leiden: Leiden University.
- Anonim. 1953. “Tadi Pagi: Perletakan Batu Pertama Makam Baru W.R. Soepratman”. Dalam *Surabaya Post*, 28 Oktober.
- Anonim. 1956. “Tanah Sindhunegara Bikin Heboh. Umat Protestan kontra DPRDS-KB”. Dalam *Surabaya Post*, 27 Juni.
- Anonim. 1971. *Tegakkan PKI jang Marxis-Leninis untuk Memimpin Revolusi Demokrasi Rakyat Indonesia. Lima Dokumen Penting Politbiro CC PKI*. T.tp: Delegasi CC PKI.
- Anonim. 1964. “Tempat2 Ibadah di Kota S’baja dari Golongan Islam”. Dalam *Surabaya Post*, 29 Februari.
- Timoer, Soenarto. 1983. *Menjelajahi Jaman Babari Indonesia. Mitos Cura-Bhaya. Cerita Rakyat sebagai Sumber Penelitian Sejarah Surabaya*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Tjahjono, Gunawan dan Agustiananda, Putu Ayu P. 2002. *Nyala Nirmana 72 tahun Dipl.-Ing Han Awal*. Jakarta: Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Tjiptoatmodjo, F.A. Soetjipto. 1983. Kota-kota Pantai di Sekitar Selat Madura Abad ke-17 sampai Medio Abad ke-19". Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Tjoekat Liang. 1925. *Perobahan Besar tentang: Adat-istiadat Bangsa Tionghoa dan Riwayat Hari Rajah Bangsa Tionghoa serta Burgerlijke Stand Boeat Bangsa Tionghoa dengan Burgerlijke Wetboek Saperloenja*. Semarang: Lie King An.
- Tobing, Arnold C.L. 2005. Tobing, Arnold C.L., wawancara 8/11/2005
- Toer, Pramoedy Ananta. 1980a. *Bumi Manusia*. Jakarta: Hasta Mitra.
- \_\_\_\_\_. 1980b. *Anak Semua Bangsa*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Anonim. 1962. "Tugu". Dalam *Surabaya Post*, 15 Oktober.
- Anonim. 1964. "Tugu Pak Sakerah." Dalam *Surabaya Post*, 11 Maret.
- Anonim. 1958. Tudjuh Tempat Pemakam Tionghoa Dinjatakan Tertutup. Dilarang Membangun di Tanah Makam". Dalam *Surabaya Post*, 14 Maret.
- Anonim. 1952. "Tugu Nasional Lambang Revolusi". Dalam *Java Post*, 8 Maret.
- Anonim. 1958. "Untuk Geredja Maranatha". Dalam *Surabaya Post*, 9 Oktober.
- Anonim. 1958. "Upacara Peletakan Batu Pertama Gereja Maranatha di Surabaya" Dalam *Surabaya Post*, 6 Januari.
- Anonim. t. th. *Uraian Singkat Sejarah Dakwah dan Masjid Peninggalan Sunan Ampel*. Surabaya: Panitia haul agung Sunan Ampel ke-527.
- Anonim. [n.d.]. *Verslag stadgemeente Soerabaja 1940 statische berichten der gemeente Soerabaja 1931*.
- Veth, P.J. 1882. *Java: Geographisch, Ethnologisch, Historisch*. Harleem: De Erven F. Bohn.
- Anonim. 1906. *Volkstelling Nederlandsch-Indie 1905*. Batavia.
- Anonim. 1921. *Volkstelling Nederlandsch-Indie 1920*. Batavia.
- Anonim. 1931. *Volkstelling Nederlandsch-Indie 1931*. Batavia.
- Wijaya, Albert Hendra. 2005. "Sedikit Mengenai Feng Shui". Dalam <http://64.233179104>. Diakses pada 6 Juni 2005
- Widodo, Dukut Imam. 2001. Soerabaja Tempo Doloe: Berpesiar di Kali Mas Diiringi Orkes Budak". Dalam *Radar Surabaya*, Januari 25.
- \_\_\_\_\_. 2001. "Kawasan Darmo Memang Diciptakan Bagi Golongan Elite". Dalam *Suara Indonesia*, 5 April.

- \_\_\_\_\_. 2002. *Soerabaia Tempo Doeloe*. Buku 1. Surabaya: Dinas Pariwisata.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Soerabaia Tempo Doeloe*. Buku 2. Surabaya: Dinas Pariwisata.
- Wirjosoedarmo, Soekono. 1987. *Tata Babasa Indonesia (Edisi Lengkap)*. Surabaya: Sinar Wijaya.
- Wingjosoebroto, Soetandyo. 2004. *Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial di Hindia-Belanda: Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900–1940)*. Malang: Bayumedia.
- Wiryoprawiro, Zein M. 1986. *Perkembangan Arsitektur Masjid di Jawa Timur*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Yeoh, Brenda A. 1996. *Contesting Space: Power Relations and the Urban Built Environment in Colonial Singapore*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Yuliman, Sanento. 1968. “Dalam Bayangan Sang Pahlawan”. Dalam *Horison*, Maret.
- Zoest, Aart van. 1993. *Semiotika tentang Tanda, Cara Kerjanya dan Apa yang Kita Lakukan Dengannya*. Jakarta: Yayasan Sumber Agung.